



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah daerah, diperlukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

- Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
  5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
  6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  9. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
  12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
  - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN



Pasal 6  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (9,  
39/ 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8



PEMERINTAH  
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

**Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029**



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN  
 BULELENG TAHUN 2025-2029

URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
 BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR  
 DAFTAR ISI  
 DAFTAR TABEL  
 DAFTAR GAMBAR

			<b>HALAMAN</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>		
1.1.	Latar Belakang .....	I -	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan .....	I -	2
1.3.	Hubungan Antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya .....	I -	4
1.3.1	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Buleleng dengan RPJMN .....	I -	4
1.3.2	Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru Tahun 2025-2125 .....	I -	5
1.3.3	Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Buleleng dengan RPJMD Provinsi Bali .....	I -	5
1.3.4	Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng .....	I -	5
1.3.5	Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Buleleng .....	I -	5
1.3.6	Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah .....	I -	6
1.3.7	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya .....	I -	7
1.4.	Maksud dan Tujuan .....	I -	8
1.5.	Sistematika Penulisan .....	I -	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH</b>		
2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	II -	1
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi .....	II -	2
2.1.1.1.	Aspek Geografi .....	II -	2
2.1.1.2.	Aspek Demografi .....	II -	72
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II -	77
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi .....	II -	77
2.1.2.2.	Kejahteraan Sosial Budaya .....	II -	85

2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	.....	II	-	88
2.1.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	.....	II	-	88
2.1.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	.....	II	-	90
2.1.3.3.	Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah	.....	II	-	95
2.1.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi	.....	II	-	117
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	.....	II	-	122
2.1.4.1.	Indeks Pelayanan Publik	.....	II	-	122
2.1.4.2.	Indeks Inovasi Daerah	.....	II	-	123
2.1.4.3.	Indeks SPBE	.....	II	-	124
2.1.4.4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	.....	II	-	124
2.1.5.	Standar Pelayanan Minimal	.....	II	-	125
2.1.6.	Kerjasama Daerah	.....	II	-	139
2.1.7.	Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten Buleleng	.....	II	-	139
2.1.8.	BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah	.....	II	-	144
2.2.	Gambaran Keuangan Daerah	.....	II	-	146
2.3.	Permasalahan dan isu strategis	.....	II	-	190
2.3.1.	Permasalahan pembangunan daerah	.....	II	-	190
2.3.2.	Isu Strategis	.....	II	-	220

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1.	Visi, Misi Tujuan dan Sasaran	.....	III	-	1
3.1.1.	Visi	.....	III	-	1
3.1.2.	Misi	.....	III	-	3
3.1.3.	Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Misi RPJMD Tahun 2025-2029	.....	III	-	7
3.1.4.	Tujuan dan Sasaran	.....	III	-	8
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Priotitas Pembangunan Daerah	.....	III	-	28
3.2.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	.....	III	-	28
3.2.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	.....	III	-	41

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

4.1.	Rencana Program Perangkat Daerah	.....	IV	-	1
4.2.	Indikator Kinerja Utama	.....	IV	-	21
4.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	.....	IV	-	23

**BAB V PENUTUP**

5.1.	Pedoman Transisi	.....	V	-	1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	.....	V	-	1

## DAFTAR TABEL

<b>No. TABEL</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng .....	II - 1
2.2	Kemiringan Lereng Kabupaten Buleleng .....	II - 3
2.3	Rata - Rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika Menurut Stasiun, 2023 .....	II - 7
2.4	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 16
2.5	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 19
2.6	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 20
2.7	Perkembangan Produksi Komoditi Pertanian Hortikultura Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 21
2.8	Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 21
2.9	Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024 .....	II - 22
2.10	Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 .....	II - 23
2.11	Tabel Potensi Budidaya ikan tahun 2024 .....	II - 24
2.12	Jumlah Produksi Penangkapan menurut jenis ikan tahun 2024 .....	II - 24
2.13	Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah tingkat Kabupaten Buleleng .....	II - 25
2.14	Data Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten Buleleng .....	II - 26
2.15	Rincian Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng .....	II - 30
2.16	Kelas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng .....	II - 59
2.17	Kelas Risiko Banjir Bandang Kabupaten Buleleng .....	II - 61
2.18	Kelas Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Buleleng .....	II - 62
2.19	Kelas Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Buleleng .....	II - 64
2.20	Kelas Risiko Gempa Bumi Per .....	II - 65

2.21	Kecamatan di Kabupaten Buleleng Kelas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Buleleng	.....	II	-	67
2.22	Kelas Risiko Tanah Longsor Kabupaten Buleleng	.....	II	-	69
2.23	Kelas Risiko Tsunami Kabupaten Buleleng	.....	II	-	70
2.24	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng 2020-2024	.....	II	-	73
2.25	Sex Ratio Penduduk Kabupaten Buleleng, 2024	.....	II	-	73
2.26	Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2024	.....	II	-	74
2.27	Pendapatan Perkapita Kabupaten Buleleng, 2020-2024	.....	II	-	74
2.28	Pertumbuhan Ekonomi Buleleng dan Bali Tahun 2020 – 2024	.....	II	-	77
2.29	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 - 2024	.....	II	-	78
2.30	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2020-2024	.....	II	-	79
2.31	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024	.....	II	-	81
2.32	Jumlah Penduduk Miskin Perbandingan Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buleleng 2020-2024	.....	II	-	83
2.33	Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024	.....	II	-	89
2.34	PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024	.....	II	-	89
2.35	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	90
2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	92
2.37	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buleleng, 2020- 2024	.....	II	-	92
2.38	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buleleng, 2020- 2024	.....	II	-	93
2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	94

2.40	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, 2024/2025	.....	II	-	96
2.41	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kabupaten Buleleng, 2024/2025	.....	II	-	96
2.42	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP di Kabupaten Buleleng, 2024/2025	.....	II	-	97
2.43	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA, 2024/2025	.....	II	-	97
2.44	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buleleng, 2024/2025	.....	II	-	98
2.45	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Ketersediaan Sekolah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	99
2.46	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	100
2.47	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan tahun 2024	.....	II	-	101
2.48	Tenaga Kesehatan Tahun 2024	.....	II	-	101
2.49	Jumlah sarana peribadatan Kabupaten Buleleng tahun 2024	.....	II	-	102
2.50	Jumlah sarana perdagangan Kabupaten Buleleng tahun 2024	.....	II	-	102
2.51	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Buleleng	.....	II	-	103
2.52	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Buleleng	.....	II	-	104
2.53	Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	105
2.54	Data Perkembangan Kelistrikan Dusun/Banjar di Kabupaten Buleleng Tahun 2024	.....	II	-	106
2.55	Lokasi Penyelenggaraan Akses Free Wifi Menurut Desa Adat di Kecamatan Buleleng, 2024	.....	II	-	106
2.56	Pelayanan Air Minum di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	108
2.57	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	108
2.58	Data TPS3P di Kabupaten Buleleng Tahun 2024	.....	II	-	113
2.59	Panjang dan Kondisi Drainase di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	114
2.60	Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2020-2024	.....	II	-	115
2.61	Jumlah Hotel Berbintang, Hotel	.....	II	-	116

	Melati Dan Kamar di Kabupaten Buleleng, tahun 2024			
2.62	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Buleleng, 2020-2024	.....	II	- 116
2.63	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan tahun 2020-2024	.....	II	- 117
2.64	Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	- 118
2.65	Jumlah Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali 2020-2024	.....	II	- 118
2.66	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	- 120
2.67	Kinerja Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Kab.Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	- 123
2.68	Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	- 124
2.69	Capaian kinerja Inovasi Daerah Bab.Buleleng tahun 2024	.....	II	- 124
2.70	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buleleng Tahun 2024	.....	II	- 127
2.71	Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal	.....	II	- 145
2.72	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 s.d 2024	.....	II	- 149
2.73	Rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 s.d 2024	.....	II	- 149
2.74	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	- 151
2.75	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	- 154
2.76	Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	- 156
2.77	Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Buleleng	.....	II	- 157

2.78	selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020-2024 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun 2024	.....	II	-	159
2.79	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	-	163
2.80	Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	-	165
2.81	Tingkat Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2020-2024	.....	II	-	169
2.82	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024	.....	II	-	169
2.83	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	-	171
2.84	Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	.....	II	-	173
2.85	Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026-2030	.....	II	-	176
2.86	Proyeksi Belanja Daerah tahun 2026-2030	.....	II	-	181
2.87	Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2026-2030	.....	II	-	184
2.88	Proyeksi Belanja Wajib dan Pegeluaran Pembiayaan Wajib Daerah Tahun 2026 – 2030	.....	II	-	187
2.89	Penghitungan Kapasitas riil Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	.....	II	-	189
2.90	Kondisi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	.....	II	-	222
2.91	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	.....	II	-	224
2.92	Rencana Peruntukan Lindung	.....	II	-	238
2.93	Rencana Peruntukan Budidaya	.....	II	-	238
2.94	Strategi dan Arah Kebijakan	.....	II	-	241

	Pengembangan Produk Unggulan Daerah			
2.95	Strategi Penyelesaian			
	Permasalahan Prioritas Daerah	.....	II	- 242
2.96	Perumusan Permasalahan	.....	II	- 246
2.97	Isu Strategis Daerah	.....	II	- 249
3.1	Keselarasn antara Misi RPJMN (Astacita ) dengan RPJMD Kabupaten Buleleng	.....	III	- 5
3.2	Keselarasn antara Misi Provinsi Bali dengan RPJMD Kabupaten Buleleng	.....	III	- 6
3.3	Keselarasn Misi Pada RPJP Kabupaten Buleleng 2025-2045 dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029	.....	III	- 8
3.4	Rumusan Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030	.....	III	- 14
3.5	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029	.....	III	- 30
3.6	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1	.....	III	- 34
3.7	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2	.....	III	- 35
3.8	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3	.....	III	- 36
3.9	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4	.....	III	- 37
3.10	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5	.....	III	- 38
3.11	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6	.....	III	- 39
3.12	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 7	.....	III	- 40
3.13	Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 8	.....	III	- 41
3.14	Rumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029	.....	III	- 46
4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	.....	IV	- 2
4.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030	.....	IV	- 22
4.3	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030	.....	IV	- 24

## DAFTAR GAMBAR

No. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD .....	I - 6
1.2	Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan .....	I - 7
2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng .....	II - 2
2.2	Prosentase Luas Lahan berdasarkan Tingkat kemiringan Lereng di Kabupaten Buleleng .....	II - 3
2.3	Peta Kemiringan Lereng kabupaten Buleleng .....	II - 4
2.4	Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat .....	II - 6
2.5	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Buleleng .....	II - 6
2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Buleleng .....	II - 8
2.7	Peta Geologi Kabupaten Buleleng .....	II - 10
2.8	Peta Jenis Tanah Kabupaten Buleleng .....	II - 15
2.9	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng .....	II - 31
2.10	Peta resiko Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng .....	II - 60
2.11	Peta resiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Buleleng .....	II - 61
2.12	Peta resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Buleleng .....	II - 63
2.13	Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Buleleng .....	II - 64
2.14	Peta Resiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Buleleng .....	II - 66
2.15	Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Buleleng .....	II - 68
2.16	Peta Resiko Bencana tanah Longsor di Kabupaten Buleleng .....	II - 70
2.17	Peta Resiko Bencana Tsunami di Kabupaten Buleleng .....	II - 71
2.18	Perkembangan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 (jiwa) .....	II - 72
2.19	Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 .....	II - 75
2.20	Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 .....	II - 80
2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buleleng Tahun .....	II - 83

	2019-2023			
2.22	IPM Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	.....	II -	85
2.23	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2021-2023	.....	II -	86
2.24	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	.....	II -	86
2.25	Persentase RT ber PHBS dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	.....	II -	87
2.26	Perkembangan IPG Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	.....	II -	88
2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	.....	II -	94
2.28	Rasio Ketergantungan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2023	.....	II -	95
2.29	Pengelolaan Limbah B3 Perkantoran	.....	II -	110
2.30	Sistem pengelolaan sampah Rumah tangga	.....	II -	109
2.31	Indeks Daya Saing Kabupaten Buleleng 2023	.....	II -	122
2.32	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng 2022	.....	II -	122
3.1	Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2030	.....	III -	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*), dan pendekatan substansi, yaitu: pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Hal tersebut mengacu pasal 65 dan pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan pasal 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan bahwa Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Proses penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi Bupati dan Wakil bupati melaksanakan pembangunan berdasarkan visi, misi dan program prioritasnya. Pada sisi lain, RPJMD ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menilai kesesuaian visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah dengan kondisi obyektif Kabupaten Buleleng.

Substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025- 2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Semesta Berencana Kabupaten

Buleleng di tahun berkenaan, berdasarkan 17 (Tujuh belas) Arah Kebijakan dan 45 (empat puluh lima) Sasaran Pokok tahun 2025- 2029.

RPJMD merupakan fondasi penyusunan RKPD, sehingga secara khusus memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, RPJMD yang secara utuh memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Selanjutnya Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 7,72/2024);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, (4,34/2024));
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: (4, 38/2022));

### **1.3. Hubungan Antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Semesta berencana Provinsi Bali, dan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng.

#### **1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan RPJMN**

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dilaksanakan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyelarasan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

#### **1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100**

### **Tahun Bali Era Baru Tahun 2025-2125.**

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dilaksanakan penyelarasan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Penyelarasan RPJMD dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan ini mengakomodasi kearifan lokal dan mempertimbangkan tantangan serta kebutuhan Bali dalam jangka panjang. Oleh karena itu, RPJMD harus mengadaptasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen ini agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan dan sesuai dengan visi Bali Era Baru.

#### **1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali.**

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng juga harus berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Buleleng.

#### **1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng.**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 tahap pertama. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mencakup visi pembangunan daerah selama 20 tahun, sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun yang memuat visi, misi kepala daerah terpilih.

#### **1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan RKPD Kabupaten Buleleng**

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain

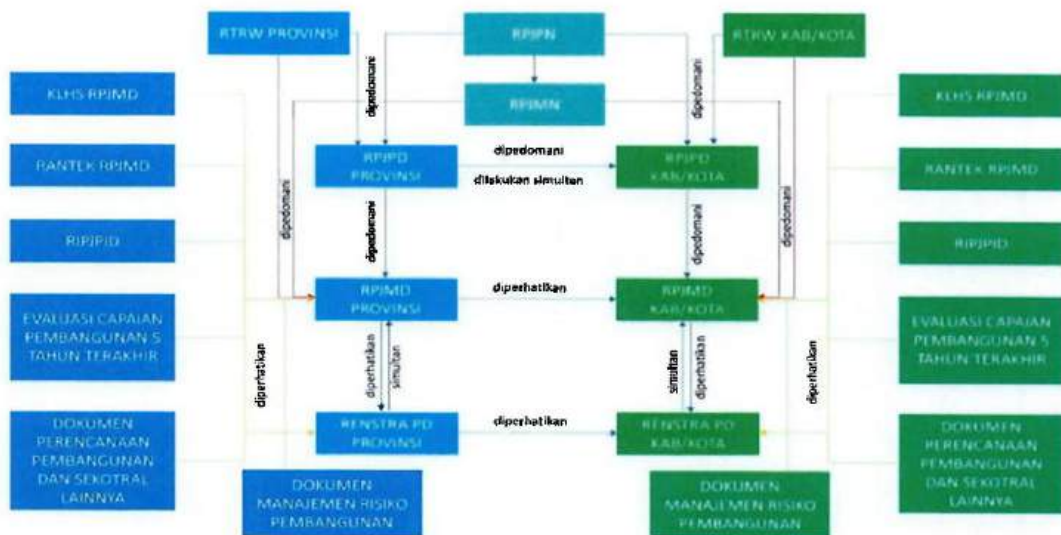
berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah, dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

### 1.3.6 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng.

Renstra-PD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Gambaran dingkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan dokumen Renstra-PD seperti pada gambar berikut:



Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD

### 1.3.7 Hubungan Antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Standar Pelayanan Minimal (SPM), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan berbagai dokumen sektoral lainnya.

Salah satu dokumen sektoral yang dimaksud adalah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Buleleng. Hubungan antara RPB dengan perencanaan lainnya mulai dari tingkat pusat seperti RIPB, Renas PB, dan RPJMN sampai tingkat daerah, dalam hal ini RTRW Daerah dan RPJMD. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan ( Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti, RPJMD.

Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

merupakan penjabaran RPJMD. RPB dalam proses penyusunannya juga merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB bukan semata-mata perencanaan dalam sektor penanggulangan bencana, tetapi rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan di daerah dalam membangun masyarakat yang berketahanan bencana. RPB bertujuan untuk membuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor melalui RPJMD menjadi berketahanan bencana. Oleh karenanya RPB harus diintegrasikan ke dalam RPJMD.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Buleleng sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode Tahun 2025- 2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025- 2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045;

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.
5. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Buleleng sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2025-2029.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

#### **‘BAB I       PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang:

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar hukum penyusunan;
- 1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- 1.4. Maksud dan tujuan; dan
- 1.5. Sistematika penulisan.

#### **BAB II       GAMBARAN UMUM DAERAH**

- 2.1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Buleleng secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
  - 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah;
  - 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum,  
Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
    - 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal;
    - 2.1.6. Kerjasama Daerah;
    - 2.1.7. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN

dan/atau APBD province di kabupaten/kota; serta  
2.1.8. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan  
Pemerintah Daerah

- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun Anggaran 2026-2030.
- 2.3. Permasalahan dan isu strategis paling sedikit memuat :
  - 2.3.1. Permasalahan pembangunan daerah; dan
  - 2.3.2. Isu strategis daerah.

### **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 3.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran  
Palin sedikit memuat:
  - 3.1.1. Visi, Misi; dan
  - 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 3.2. Strategi dan arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Palin sedikit memuat:
  - 3.2.1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
  - 3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

- 4.1. Program Perangkat Daerah memuat paling sedikit :
  - 4.1.1. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
  - 4.1.2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat daerah tahun 2025-2029.
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
  - 4.2.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui

Indukator Kinerja Utama (IKU); dan  
4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun  
2025-2029 melalui indikator kinerja  
penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD)

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Secara Astronomis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8° 03' 40" - 8° 23' 00" Lintang Selatan dan 114° 25' 55" - 115° 27' 28" Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Laut Bali
- Timur : Kabupaten Karangasem
- Selatan : Kabupaten Bangli, Badung, Tabanan dan Jembrana.
- Barat : Kabupaten Jembrana.

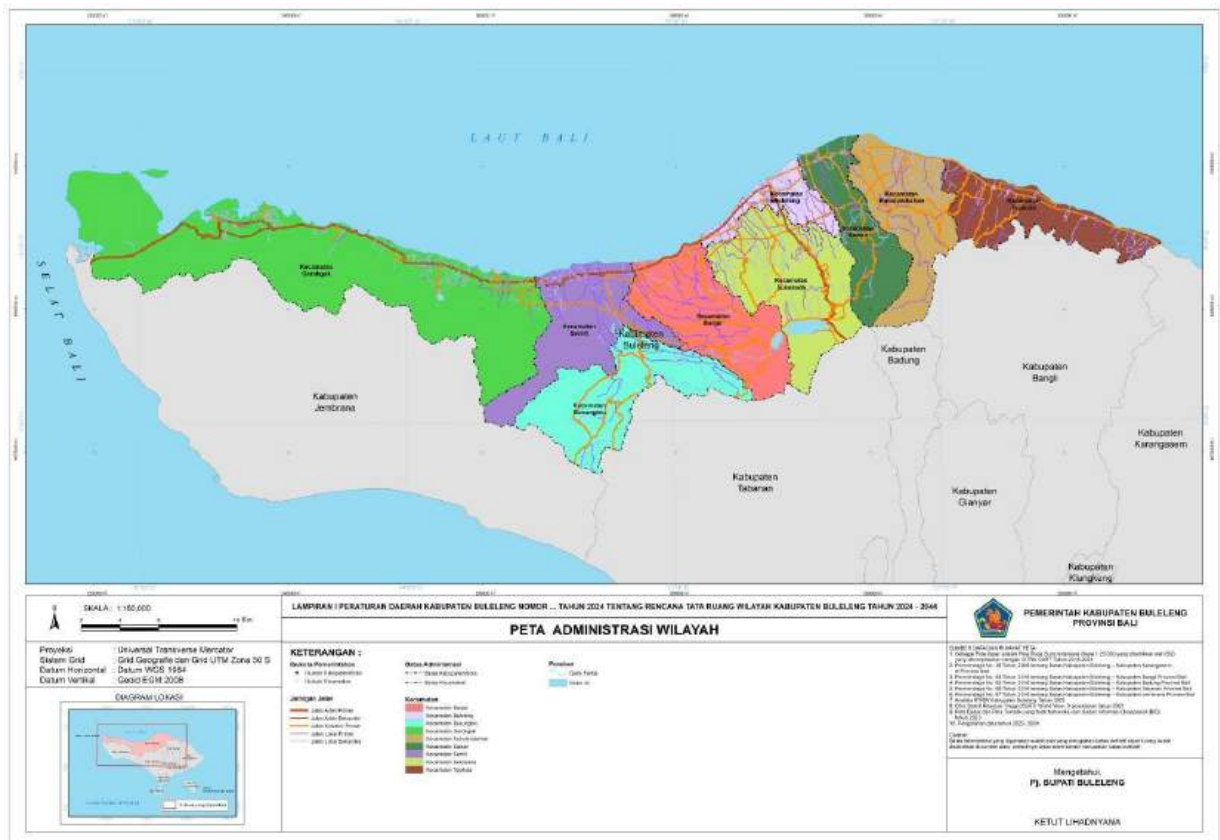
Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang paling luas diantara 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu 132.267,98 Ha, dengan panjang pantai ± 157,05 km. Secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa dan 169 Desa Pakraman/Desa Adat, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Gerokgak	14	40.573,84	30.68%
2	Seririt	21	12.310,20	9.31%
3	Busungbiu	15	14.065,24	10.63%
4	Banjar	17	13.785,46	10.42%
5	Sukasada	15	16.096,30	12.17%
6	Buleleng	29	4.624,84	3.50%
7	Sawan	14	9.129,44	6.90%
8	Kubutambahan	13	11.847,47	8.96%
9	Tejakula	10	9.835,19	7.44%
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>148</b>	<b>132.267.98</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Perda 4 Tahun 2024 Tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan dengan wilayah administrasi paling luas yaitu 40.573,84 Ha atau 30,68% dari total luas wilayah Kabupaten Buleleng, sedangkan Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan dengan wilayah administrasi paling kecil yaitu 4.624,84 Ha atau 3,50% dari total luas wilayah Kabupaten Buleleng.



Sumber: Perda 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng

### 2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Buleleng berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu dan hilir.

## 1) Topografi

### a) Kemiringan Lahan

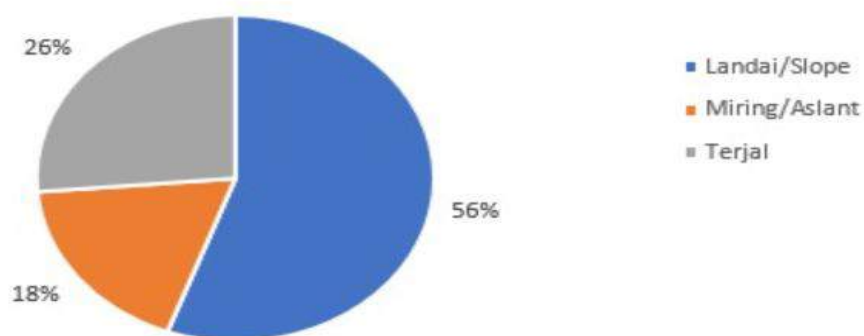
Bila ditinjau dari kondisi topografi menurut besarnya kemiringan lereng, perbedaan ketinggian dari permukaan laut serta bentang alamnya, maka Kabupaten Buleleng dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan topografi yaitu daerah datar dengan tingkat kemiringan landai (0-25%), Miring (25-40%) dan daerah Terjal dengan tingkat kemiringan > 40%.

Kemiringan lereng di Kabupaten Buleleng dapat diklasifikasikan seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Kemiringan Lereng Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Landai (Ha)	Miring (Ha)	Terjal (Ha)	Jumlah (Ha)
		0-25%	25-40%	> 40%	
1	Gerokgak	18,350.00	3,843.00	18,380.84	40,573.84
2	Seririt	8,478.00	900.00	2,932.20	12,310.20
3	Busungbiu	2,448.00	7,080.00	4,537.24	14,065.24
4	Banjar	1,629.00	1,062.00	11,094.46	13,785.46
5	Sukasada	13,630.00	1,170.00	1,296.30	16,096.30
6	Buleleng	4,694.00	-	69.16	4,624.84
7	Sawan	8,689.00	5,863.00	5,422.56	9,129.44
8	Kubutambahan	10,673.00	1,151.00	23.47	11,847.47
9	Tejakula	4,902.00	2,895.00	2,038.19	9,835.19
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>73,493.00</b>	<b>23,964.00</b>	<b>34,810.98</b>	<b>132,267.98</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024 dan Hasil Analisis



Gambar 2.2  
Persentase Luas Lahan berdasarkan Tingkat kemiringan Lereng di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa:

- Daerah Landai

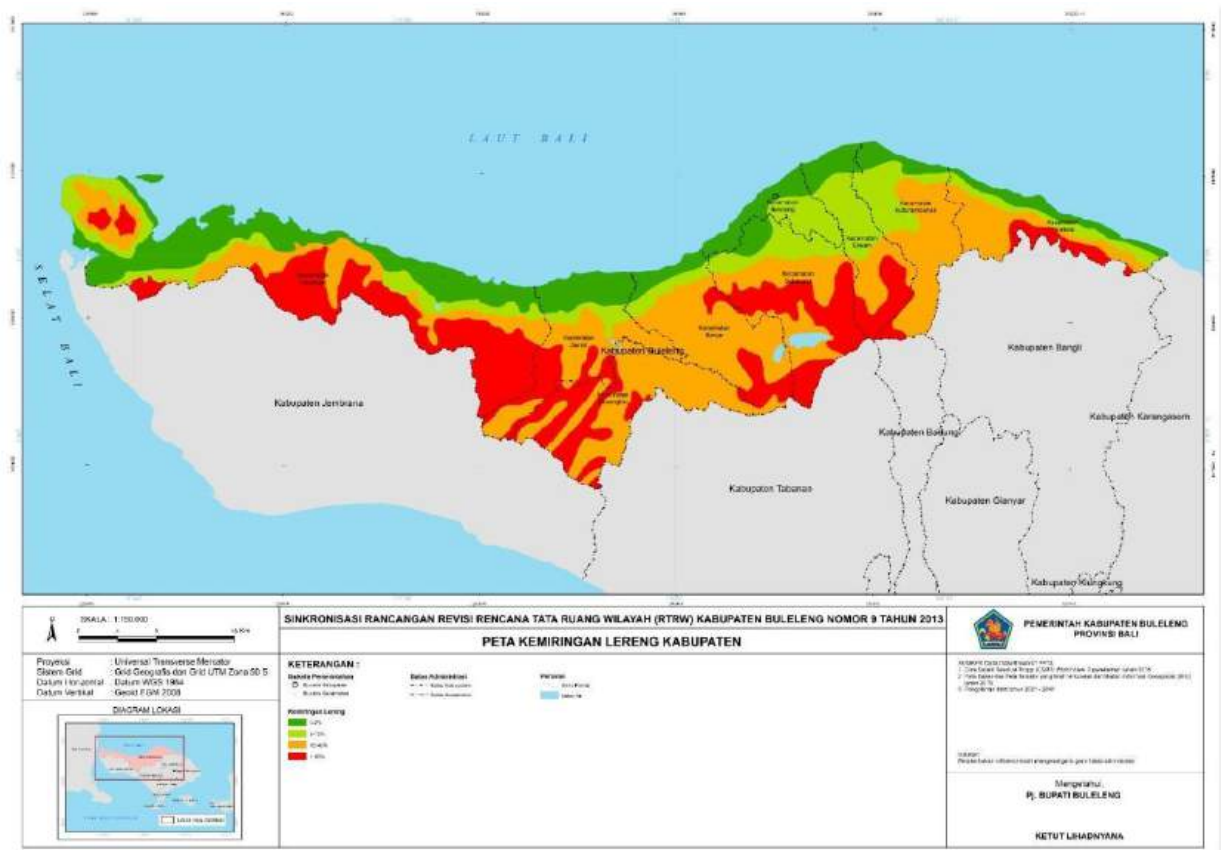
Sebagian besar dari luas wilayah merupakan daerah landai yaitu mencapai 56% (73,493.00 ha). Sisanya, sekitar 44% merupakan daerah miring dan terjal. Kecamatan yang memiliki persentase daerah landai yang lebih dominan adalah Gerokgak, Seririt, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula.

- Daerah Miring

Pada beberapa wilayah kecamatan, seperti Busungbiu dan Sawan memiliki persentase daerah miring yang relatif besar dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Persentase daerah miring pada kecamatan-kecamatan yang disebutkan tersebut berturut-turut adalah 29.54%, dan 24.47%. Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki daerah miring adalah Kecamatan Buleleng yang didominasi oleh wilayah landai.

- Daerah Terjal

Daerah terjal yang cukup dominan tersebar di Kecamatan Gerokgak (52.80%), Banjar (31.87%), dan Sawan (15.58%).



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Gambar 2.3  
Peta Kemiringan Lereng kabupaten Buleleng

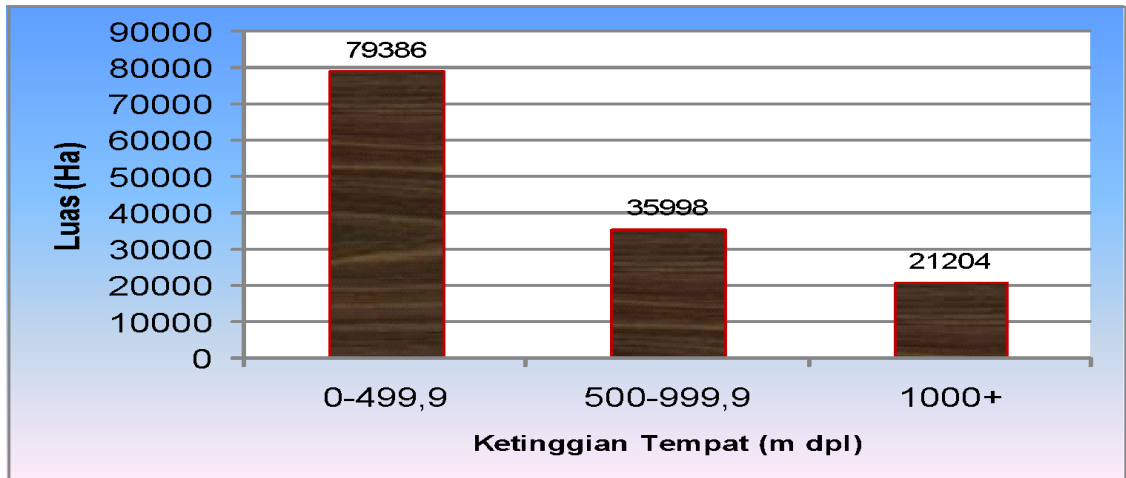
Berdasarkan Gambar 2.3, Sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng berupa perbukitan di bagian Selatan dan datar di bagian Utara (*Nyegara Gunung*). Kondisi topografi yang demikian diupayakan dikelola dengan baik karena berpotensi rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang.

Kondisi kelerengan akan mempengaruhi kemampuan lahan dalam menopang pembangunan khususnya untuk hunian masyarakat. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Kawasan Perkotaan, salah satu syarat fisik lingkungan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman khususnya pada kawasan perkotaan adalah kemiringan lahan tidak boleh melebihi 15% atau dalam kata lain tidak boleh berada pada kelas agak curam, curam, dan sangat curam. Harus berada pada kelas landai dan kelas datar. Ketentuan lebih detail tentang persyaratan kelerengan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut.

- Pada lahan dengan kelas datar yaitu kelerengan 0-8%, tidak diperlukan rekayasa teknis dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di atasnya.
- Pada lahan dengan kelas landai yaitu kelerengan 8-15% dibutuhkan rekayasa teknis dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di atasnya.

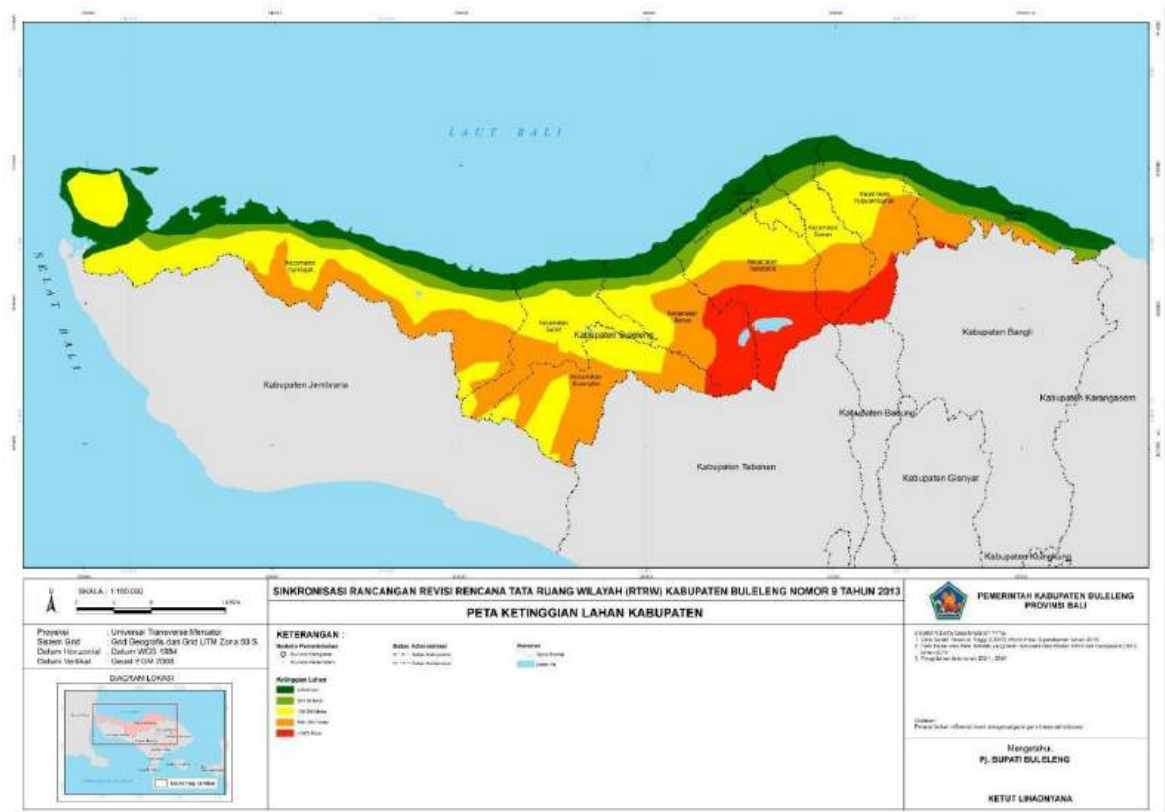
#### **b) Ketinggian Tempat**

Ditinjau dari ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl yaitu 58,12%, daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl hanya sekitar 15,52% sebagaimana tersaji pada Gambar 2.4



Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Gambar 2.4  
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat



Sumber: Materi Teknis Tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Gambar 2.5  
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Buleleng

## 2) Kondisi Klimatologi

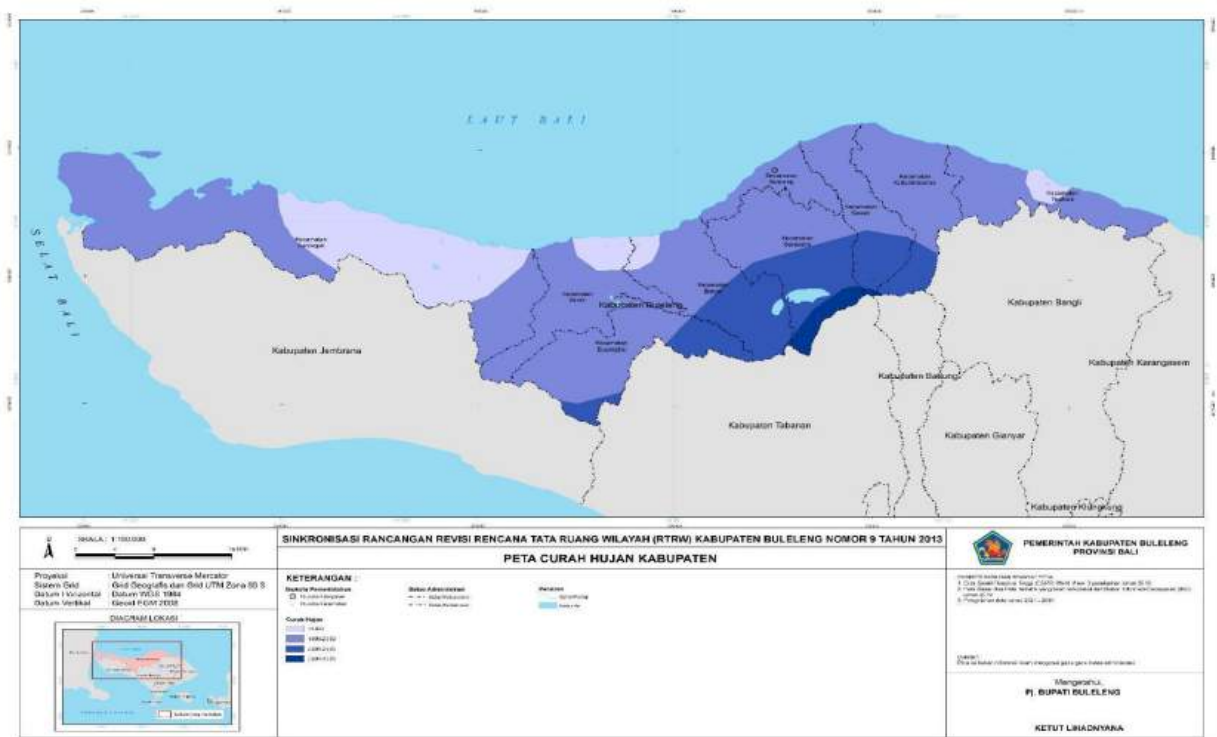
Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai  $Q = 50,68$ ) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai  $Q = 170,73 - 244,33$ ) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan

sekitarnya. Suhu udara rata-rata berkisar 27,53°C - 28,21°C, kelembaban udara rata-rata mencapai 74,06% - 81,55%, curah hujan antara 1562,40 - 1907,30 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai 6,8-8,4 jam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Rata - Rata Keadaan Meteorologi dan Geofisika Menurut Stasiun, 2024

	Uraian	Stasiun/ Station			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Denpasar	Pos Karangasem	Klimatologi Jembrana
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Suhu/ <i>Temperature</i> (°C)				
	Maksimum/ <i>Maximum</i>	33.00	35.20	34.80	34.10
	Minimum/ <i>Minimum</i>	20.20	20.60	20.00	19.40
	Rata-rata/ <i>Average</i>	27.53	27.97	28.21	28.17
2	Kelembaban Udara/ <i>Relative Humadity</i> (%)				
	Maksimum/ <i>Maximum</i>	99.00	100.00	98.00	99.00
	Minimum/ <i>Minimum</i>	54.00	43.00	46.00	51.00
	Rata-rata/ <i>Average</i>	81.55	78.73	74.06	78.59
3	Tekanan Udara/ <i>Air Pressure</i> (mbar)				
	Maksimum/ <i>Maximum</i>	1,017.00	1,016.90	1,000.10	1,018.60
	Minimum/ <i>Minimum</i>	1,003.60	1,001.70	886.50	1,001.20
	Rata-rata/ <i>Average</i>	1,010.37	1,009.43	992.87	1,008.38
4	Kecepatan Angin/ <i>Wind Velocity</i> (knot)				
	Maksimum/ <i>Maximum</i>	30.00	26.00	15.00	28.00
	Minimum/ <i>Minimum</i>	-	-	-	-
	Rata-rata/ <i>Average</i>	6.66	4.98	5.13	4.20
5	Curah Hujan/ <i>Rainfall</i> (mm/tahun)	1,562.40	1,707.80	1,687.60	1,907.30
6	Jumlah Hari Hujan (hari)/ <i>Number of Rainy Days (day)</i>	136	128	108	171
7	Penyinaran Matahari / <i>Sunshine</i> (jam)	8.4	7.0	6.8	7.5

Sumber : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Gambar 2.6  
Peta Curah Hujan Kabupaten Buleleng

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng memiliki curah hujan 1000 – 2000 mm/th. Sebagian Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Tejakula menunjukkan curah hujan < 1000 mm/ th sedangkan bagian selatan Kecamatan Sukasada memiliki curah hujan sangat tinggi berkisar 2500-3000 mm/th.

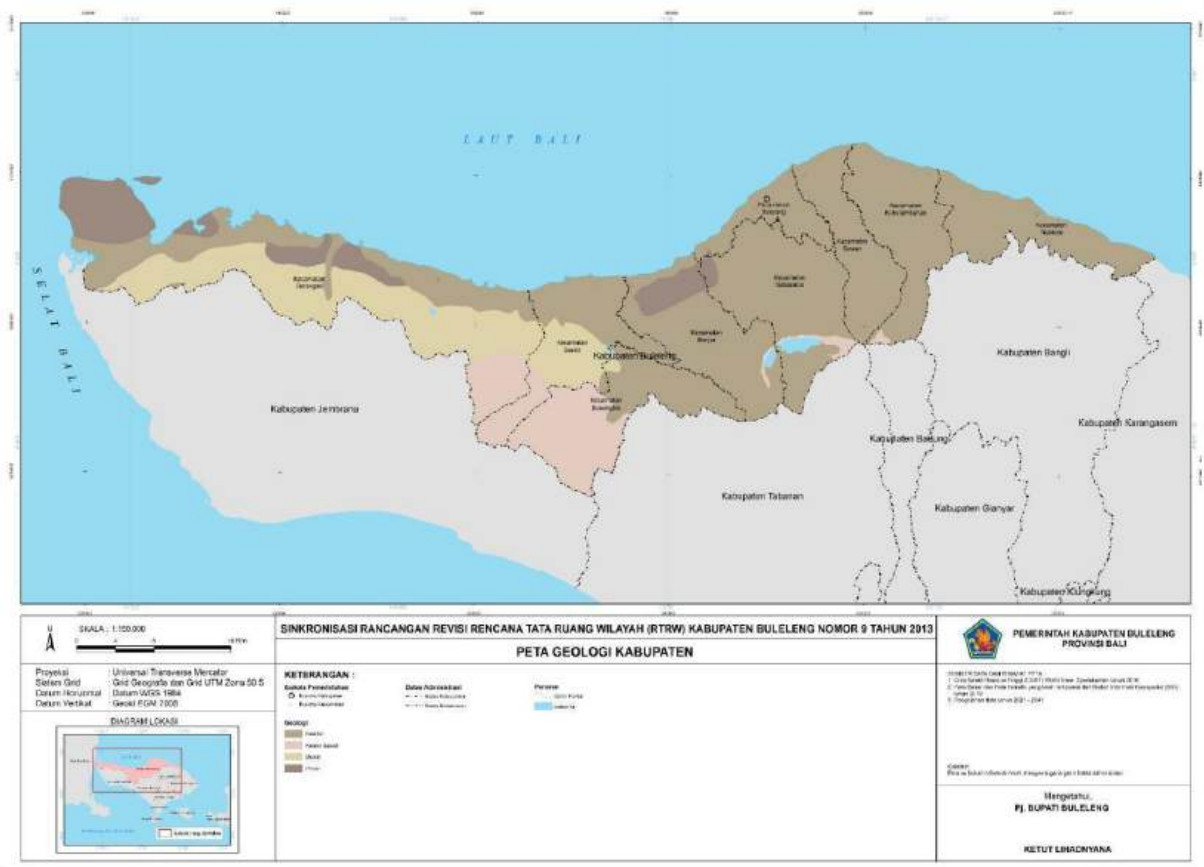
### 3) Geologi

Ditinjau dari aspek geologinya, wilayah Bali mulai dari zona selatan sebagian besar tersusun oleh endapan lahar gunung api yang berumur kuartar, seperti Gunung Beratan dan Buyan. Kemudian zona tengah berupa kompleks gunung api yang merupakan kelanjutan kompleks gunung api muda zona selatan. Pada zona tengah terdapat sejumlah kerucut gunung api yang terletak pada suatu deretan dengan arah barat daya-timur laut. Batuan terdiri dari batuan vulkanik yang berasal dari gunung api.

Selanjutnya zona utara di daerah pantai utara batuannya berasal dari endapan lahar Gunungapi Buyan dan Beratan yang berumur kuartar, disebelah selatan adalah perbukitan dari formasi Asah dengan batuan breksi dan lava berumur Pliosen. Ada pula

beberapa endapan aluvium yang berumur kuartar seperti di Pulaki. Di sebelah barat terdapat formasi Prapat Agung yang berisi batu gamping utara, formasi ini bertemu dengan formasi palasari yang terdiri dari batu gamping terumbu (Van Bemmelen, 1949).

Berdasarkan Peta Geologi Provinsi Bali, geologi Kabupaten Buleleng terdiri dari 10 jenis yaitu : (1) Batuan Buyan Beratan, (2) Batuan Gunung Api Buyan-Beratan Purba dan Batur Purba, (3) Batuan Gunung Api Jembrana : Lava, Breksi, Tufa dari G Klatakan, G Merbuk, G Patas dan Batuan yang Tergabung, (4) Batuan Gunung Api dari Kerucut Subresen G. Pohen, G. Sengayang, G. Lesung, (5) Endapan Alluvial, (6) Formasi Asah Lava, Breksi, Tufa, Batu Apung dengan Isian Rekahan Bersifat Gamping, (7) Formasi Prapat Agung, Batu Gamping, Batu Pasir, Gamping, Napal, (8) Tufa dan Endapan Lahar Buyan, Beratan dan Batur, (9) Tufa dan Endapan Lahar Buyan-Beratan dan Batur, dan (10) Tufa, Lava Breksi, Batuan Gunung Jembrana-Merbuk-Patas-Klatakan secara umum Kabupaten Buleleng didominasi oleh jenis Tufa dan Endapan Lahar Buyan, Beratan dan Batur yang tersebar hampir di daerah Buleleng bagian tengah ke arah timur mulai dari Kecamatan Seririt sampai Kecamatan Tejakula. Sementara jalur patahan yang ada hampir melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Buleleng dan dominan mengelompok di Kecamatan Seririt dan Busungbiu. Jalur patahan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kejadian bencana longsor dan gempa bumi.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044

Gambar 2.7  
Peta Geologi Kabupaten Buleleng

#### 4) Hidrologi

##### a. Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. DAS prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosial ekonomi DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2) Saba Daya (prioritas 2) Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2) Klatakan Lubang (prioritas 2) Leh Balian (prioritas 2), dan Oten Sungi (prioritas 2).

## **b. Sungai**

- **Kuantitas Sungai**

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 65 sungai (73,86%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 23 sungai atau 26,14% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 km. Debit maksimum sungai bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m<sup>3</sup>/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m<sup>3</sup>/tahun.

- **Kualitas Air Sungai**

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng terpantau kualitasnya. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/Tukad Banyumala, Sungai/Tukad Saba, dan Sungai/Tukad Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, Fecal Coliform dan Total Coliform melampaui baku mutu air minum Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016.

## **c. Air Danau/Waduk/Bendung/Embung**

Terdapat 2 buah danau, 3 buah waduk, 24 bendung, dan 1 buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 134.203.500 m<sup>3</sup>. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.800.000 m<sup>3</sup>. Sedangkan, di danau Tamblingan sekitar 27.050.000 m<sup>3</sup>. Danau Buyan dan danau Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata guna air di daerah hilir dan sekitarnya.

Dalam fungsinya sebagai penyedia air baku, fungsi Danau Buyan semakin menurun karena adanya sedimentasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada tahun 2015, volume sedimentasi mencapai 2.216,799 m<sup>3</sup>. Akibat dari sedimentasi tersebut menyebabkan penurunan kedalaman air selama 3 tahun terakhir sebesar 20 m serta volume air menurun dari 116,25 juta m<sup>3</sup> menjadi 49,6 juta m<sup>3</sup> (BWS Bali Penida, 2016). Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan kapung kili di danau.

Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak, waduk Titab di Kecamatan Busungbiu dan Waduk Tamblang di Kecamatan Sawan, dan Embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensi, rata-rata volume air Waduk Gerokgak 3,75 juta m<sup>3</sup> dan kondisinya berfluktuasi menurut musim. Secara teknis, waduk Titab memiliki luas genangan 68,83 Ha dengan volume tampungan efektif 10,60 juta m<sup>3</sup> yang dimanfaatkan untuk irigasi dan juga akan dimanfaatkan untuk air minum dan pembangkit listrik.

Pemanfaatan Waduk Titab sebagai irigasi mencakup daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1.915 Ha, daerah irigasi Lebah Semawa seluas 28 Ha, dan daerah irigasi Rawa seluas 23 Ha. Pemanfaatan sebagai air minum sebesar 350 liter per detik akan dikelola sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Desa-desa yang akan dilayani oleh SPAM Burana (Buleleng Jembrana) adalah:

- Kecamatan Seririt (Unggahan, Munduk Bestala, Bestala, Mayong, Rangdu, Ularan, Ringdikit, Joanyar, Kalianget, Tanguwisia, Sulanyah, Bubunan, Seririt, Pengastulan,

Patemon, Lokapaksa, Umeanyar, Banjarasem, Kalisada dan Pangkung Paruk).

- Kecamatan Banjar (Tampekan, Banjar Tegeha, Banjar, Dencarik, Temukus, dan Kaliasem).
- Kecamatan Busungbiu (Telaga, Titab, Kekeran, dan Busungbiu).
- Kecamatan Gerokgak (semua desa).

Waduk Tamblang berada Di Kecamatan Sawan, saat ini waduk telah selesai dibangun dengan luas genangan 29,88 Ha dan menampung air dengan volume total 5,1 Juta m<sup>3</sup>. Waduk ini direncanakan mendukung irigasi seluas 588 Ha, sumber air baku dengan debit 510 lt/detik dan direncanakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 0,54 MW dan direncanakan sebagai kawasan konservasi dan pariwisata.

#### **d. Mata Air**

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga mempunyai fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Kedepannya kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-lain.

#### **e. Produktivitas Akuifer dan Air Tanah**

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Bali, di Kabupaten Buleleng terdapat beragam karakteristik akuifer dan air tanah, meliputi aliran melalui ruang antar butir, melalui celah dan ruang antar butir. Adapun karakteristik produktivitas akuifer dan air tanah dimaksud sebagai berikut:

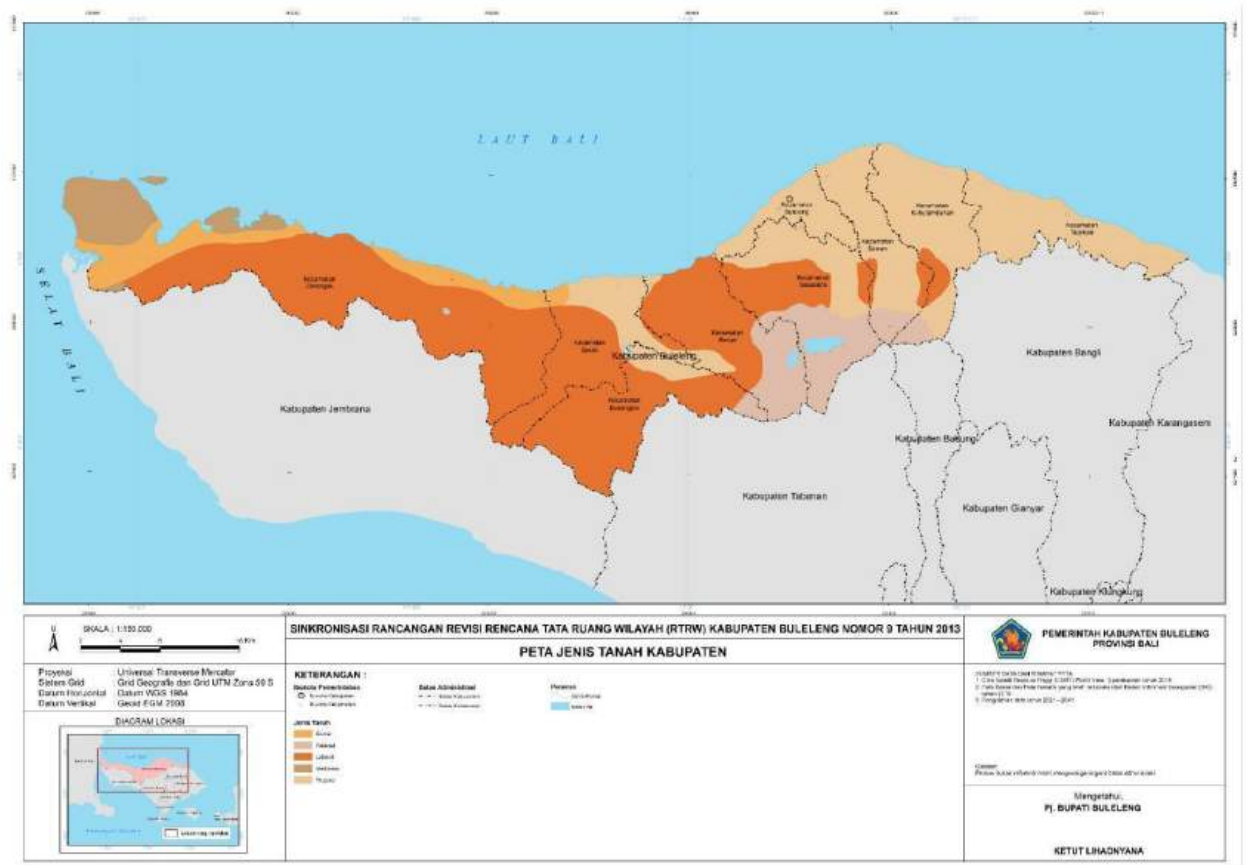
- Aliran melalui celah antar butir lokasi wilayah cakupan adalah Desa Tejakula, dengan produktivitas akuifer sekitar 90,40% dan debit sumur ± 52,67 liter/detik.
- Aliran melalui celah dan ruang antar butir Lokasi wilayah cakupan meliputi Desa Pacung, Julah, Bondalem, dan Tejakula,

dengan produktivitas akuifer cukup bervariasi antara 76,50% (Desa Bondalem) hingga 92,50% (Desa Tejakula). Debit sumur rata-rata cukup tinggi pada kisaran 23,34 – 52,67 liter/detik.

Ada 2 (dua) cekungan air tanah (CAT) yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu CAT Singaraja dan CAT Tejakula. CAT Singaraja memiliki sifat berupa aluvium pantai dan sungai, umumnya pasir dengan kelulusan sedang. Batuan gunung api kelompok Lesong- Pohen- Sangayang, serta batuan gunung api kelompok Buyan-Beratan dan Batur, terdiri dari breksi vulkanik, tuf pasir, dan endapan laharik, setempat lava, dengan kelulusan sedang sampai tinggi dan luas wilayah CAT sekitar 505 km<sup>2</sup>. CAT Tejakula memiliki sifat antara lain berupa aluvium endapan sungai, terdiri atas pasir, kerikil, dan kerakal sedang-tinggi. Batuan gunung api Batur dan batuan gunung api Agung, terutama aglomerat, lava, tuf, dan endapan laharik dengan kelulusan sedang sampai tinggi. Batuan gunung api Seraya dan batuan gunung api kelompok Buyan-Bratan purba, terdiri atas breksi gunung api dan lava, setempat tuf, dengan kelulusan rendah sampai sedang. Luas wilayah CAT sekitar 750 km<sup>2</sup>.

## **5) Jenis Tanah**

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Buleleng terdiri atas tanah alluvial, tanah regosol, tanah andosol, tanah latosol dan tanah mediteran. Mengenai tekstur tanah wilayah di Kabupaten Buleleng sebagian besar dalam kategori tekstur sedang. Selanjutnya, tekstur tanah dengan kategori berpasir hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Tejakula.



Gambar 2.8  
Peta Jenis Tanah Kabupaten Buleleng

## 6) Kondisi Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintah. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	64,17	60,95	62,50	60,28	62,84
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	88,52	89,38	88,11	88,74	93,47
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,58	70,46	52,00	52,06	58,67
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,92	51,08	70,58	70,00	74,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng, 2025

Indeks kualitas air di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 adalah 62,84 meningkat dari tahun 2023. Sementara kualitas udara menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 93,47 yang meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 88,74. Demikian juga data indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Buleleng tahun 2024 meningkat menjadi 52,058,676. Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2024 Kabupaten Buleleng sebesar 74,33.

## 7) Kondisi Sumber Daya Alam

### a. Flora dan Fauna

Wilayah Buleleng yang terstruktur atas dataran tinggi-dataran rendah, memiliki potensi berbagai jenis flora-fauna yang bersesuaian dengan habitat lingkungan tumbuhnya. Berbagai jenis flora-fauna dapat dikategorikan liar, binaan dan terdomestikasi. Jenis-jenis flora liar biasanya tumbuh secara alami di kawasan hutan, pertanian dan permukiman yang merupakan sumber plasma nutfah dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya flora binaan biasanya kondisinya semakin langka, dapat difungsikan sebagai kawasan konservasi, merupakan habitat hewan-hewan langka dan dilindungi. Kemudian, keberadaan fauna-fauna khususnya yang liar, langka dan dilindungi dapat disebutkan diantaranya jalak putih, kera abu-abu, menjangan, dan ayam hutan. Habitat hewan-hewan air, khususnya wilayah perairan laut di Buleleng, potensinya sangat besar karena wilayah perairan yang dimiliki sangat luas. Berbagai jenis flora maupun fauna seperti terumbu karang, ikan hias dan

ikan yang dikonsumsi termasuk hewan-hewan lain bukan ikan terdapat di perairan daerah ini.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Buleleng adalah 35.512,96 Ha yang berbatasan langsung dengan 47 (empat puluh tujuh) desa, dimana dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Perhutanan Sosial, maka pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial melalui kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten Buleleng sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Kabupaten Buleleng telah mendapat persetujuan perhutanan sosial seluas ± 18.785 Ha terdiri untuk 36 (tiga puluh enam) pemegang izin/persetujuan dalam bentuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan

## **b. Energi**

Berbagai jenis persediaan energi untuk pelayanan kegiatan-kegiatan di wilayah Kabupaten Buleleng secara umum tidak berasal dari wilayah setempat. Jenis-jenis energi yang tersedia yakni energi listrik, energi bahan bakar minyak, dan gas cair (LNG). Semua jenis energi ini didatangkan dari luar wilayah kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, sebagian anggota masyarakat kita masih ada yang menggunakan energi yang bersumber dari kayu bakar.

Energi memegang peranan vital dalam menggerakkan roda pembangunan dan aktivitas manusia. Menurut Otto Sumarwoto (1989), sumberdaya energi dapat dibagi dalam energi hayati atau biomassa, energi surya, energi air, energi laut, energi angin, energi nuklir, energi bahan fosil dan energi panas bumi. Pemanfaatan energi di Bali, sebagian besar merupakan pemanfaatan energi biomassa dan energi bahan fosil, sedangkan energi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Produksi listrik di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Buleleng, pada tahun 2001 bersumber dari

pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan disuplai dari Sistem Interkoneksi Jawa – Bali. Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Bali, tahun 2001 maka kebutuhan akan energi listrik di Provinsi Bali sampai saat ini masih dipenuhi oleh PLN dengan sumber pembangkit daya mampu 450 MW yang disalurkan oleh PLTD, PLTG Sanggaran dan PLTG Gilimanuk dengan interkoneksi listrik Jawa – Bali. Secara lengkap sistem jaringan Transmisi Kelistrikan di Provinsi Bali adalah dari GI Gilimanuk ke GI Pamaron dan GI Antosari, dari GI Antosari dilanjutkan ke GI Kapal, dari GI Kapal dibagi ke GI Padang Sambian, GI Gianyar dan GI Pesanggaran. Kemudian dari GI Pesanggaran dibawa ke GI Nusa Dua dan GI Sanur, dari GI Sanur dilanjutkan ke GI Gianyar dan dari GI Gianyar dilanjutkan ke GI Amlapura. Dari GI Kapal di teruskan ke GI Baturiti, dari GI Baturiti dikoneksi ke GI Pamaron. Dengan dasar pertimbangan bahwa kondisi energi listrik di Provinsi Bali telah kritis maka dalam RTRW Provinsi Bali direncanakan adanya pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara di Celukan Bawang. PLTB di Kecamatan Gerokgak sudah beroperasi, dan dikenal dengan nama PLTU Celukan Bawang.

### **c. Pertanian**

- **Pertanian Pangan**

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan di Buleleng secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan. Untuk mengetahui perkembangan luas panen dan produksi tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian  
Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024

JENIS KOMODITI	Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan									
	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi Panen (Ha)
A. PADI										
Padi Sawah	17.893	99.459	15.973,7	90.542,5	17.274,3	109.106	18.215,68	118.436,45	17.394,8	111.558,6
B. PALAWIJA										
Jagung	5.335	22.353	6.649	31.748	6.486,4	25.296,4	5.497,45	2.822,56	6.657,7	35.459,7
Kedelai	3	3	2	2	2,85	5	1,85	3,73	0	0
Kacang Tanah	1.423	1.834	1.089	1.403	958,10	1.385,5	931,3	2.185,93	537,8	639,2
Kacang Hijau	93	57	67	40,2	157	105,2	43,9	57,58	55,1	47,6
Ubi Kayu	400	4.945	586	7.243	631	10.201,3	41,00	645,6	222,3	5.790,5

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2025

Tabel 2.6  
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024

JENIS KOMODITI	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
<b>SAYUR-SAYURAN</b>										
Cabe Besar & Rawit	1.215	16.635	1.034	12.103	1.124,4	10.772,9	1.218,9	8.440,8	672,9	3.039,4
Bawang Merah	25	317	13	526	24	156	20	358,16	29,4	406,5
Bawang Putih	14	90	59	578	50,5	463,8	10	143,9	21,5	116,6
Jamur	10.949	151.265	1.140	119	996	94	111	36,7	20,0	13,2
Wortel	53	416	35	257	57	279	47	732,1	24,5	564,8
Kentang	21	269	4	39	16	164	21	222,9	11,5	137,0
Kubis	48	1.314	225	4.836	303,5	7.178	54	1515,8	29,8	831,8
Tomat	15	718	17	350	19,1	217,5	25,3	827,57	4,3	273,3
Buncis	3	47	3	47	0	0	9,5	189,67	3,0	46,7

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2024

- **Hortikultura**

Sistem produksi hortikultura Buleleng umumnya belum dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia. Proses produksi sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif. Proses produksi menghadapi tantangan ketersediaan lahan, teknologi efektif dan efisien di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki dilaksanakan melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi. Untuk mengetahui perkembangan banyaknya tanaman dan produksi hortikultura dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Perkembangan Produksi Komoditi Pertanian Hortikultura  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024

JENIS KOMODITI	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Pohon	Produksi (Ton)	Pohon	Produksi (Ton)	Pohon	Produksi (Ton)	Pohon	Produksi (Ton)	Pohon	Produksi (Ton)
<b>BUAH-BUAHAN</b>										
Mangga	680.541	26.260	680.676	33.990	679.993	31.067	680.45	39.656	680.458	41.363
Rambutan	250.925	10.991	250.895	19.425	294.910	19.894	249.09	21.871,2	249.090	13.215
Anggur	434.464	12.456	434.464	10.154	622.856	11.855	435.128	11.901,7	435.128	16.597
Manggis	73.941	1.886	73.971	2.217	74.496	1.617	74.431	1.895.611	74.431	4.633
Durian	122.930	3.101	125.492	3.921	136.796	3.920	144.131	2.327.021	144.131	7.980
Jeruk	382.936	3.532	384.013	5.519	382.600	4.848	391.045	4.853	369.609	4.862
Pisang	970.378	25.632	969.883	21.404	955.628	26.033	956.217	27.293	956.217	34.501

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2025

- **Perkebunan**

Potensi areal-areal perkebunan tahun 2023 seluas 27.968,21 Ha dengan Komoditi perkebunan yang menjadi produk andalan adalah : Kelapa Dalam, Kopi Robusta, Cengkeh, Jambu Mete, dan Kakao. Untuk mengetahui perkembangan luas areal tanaman dan produksi perkebunan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.8  
Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan di  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	KOMODITI	Luas Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan									
		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	<b>Kopi Robusta</b>	9.681,48	7.325,78	9.743,48	5.379,38	9.551,07	5.285,14	9.543,57	5.536,64	9.382,1	7.277,0
2	<b>Kakao</b>	1.179,83	749,66	1.069,33	547,36	1.037,83	541,89	1.037,33	491,51	1.034,9	350,8
3	<b>Cengkeh</b>	7.793,57	3.184,57	7.763,82	2.290,19	7.826,32	2.298,08	7.828,32	200.276	7.908,3	4.098,0
4	<b>Kelapa Dalam</b>	8.434,84	9.708,09	8.334,34	9.482,89	8.247,34	7.615,94	8.247,34	9.379,52	7.906,0	7.680,0
5	<b>Jambu Mete</b>	1.603,25	283,80	1.444,25	494,61	1.311,65	413,71	1.311,65	337,42	1.219,1	353,3

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 2025

- **Peternakan**

Perkembangan dan peningkatan produksi peternakan terus dipacu melalui berbagai program dan kegiatan, baik berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, pengadaan bibit unggul, inseminasi buatan, peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pembinaan hijauan makanan ternak dan kesehatan hewan.

Penerapan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam Pembangunan dibidang peternakan, baik dari segi populasi maupun produksi daging, susu maupun telur di Kabupaten Buleleng.

Potensi peternakan di Kabupaten Buleleng didukung oleh adanya sumber daya alam berupa lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan sebagai sumber Hijauan Makanan Ternak (HMT). Populasi ternak baik hewan besar maupun kecil yang telah berkembang di Buleleng meliputi : Sapi Potong, Kerbau, Babi Bali, Babi Sadleback, Babi Landrace, Kambing Kacang, Kambing PE, Ayam Buras, Ayam Ras, Itik, dan aneka ragam ternak lainnya.

Tabel 2.9  
Populasi Ternak di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024

JENIS TERNAK	POPULASI (EKOR)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	148.644	153.103	69,53	68.881	70.506
Kerbau	123	89	53	72	75
Kuda	5	4	3	0	6
Babi Bali	45.051	45.505	14.410	14.618	12.085
Babi Sadleback	40.265	41.256	15.740	15.821	10.521
Babi Landrace	19.814	20.165	19.256	19.248	17.499
Kambing Kacang	3.829	19.501	19.725	22.797	6.884
Kambing PE	19.010	4.040	4.187	0	15.590
Ayam Buras	727.019	780.716	350.658	344.679	490.851
Ayam Ras Petelur	69.447	76,88	72.203	99.816	153.212
Ayam Ras Pedaging	408.978	416.150	673.339	719.182	1.081.236

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2024

Tabel 2.10  
Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

JENIS PRODUKSI	TAHUN (TON)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PRODUKSI DAGING</b>	<b>8.269</b>	<b>7.741</b>	<b>7.062</b>	<b>10.702</b>	<b>9.493</b>
Daging Sapi	3.866	4.285	5.037	2.701	1.609
Daging Kerbau	3	5	0	0	5
Daging Kambing	796	395	105	609	395
Daging Babi	1.667	1.228	501	105	307
Daging Ayam Buras	1.008	1.027	666,7	600	1.027
Daging Ayam Ras	851	819	752	6.687	6.149
Daging Itik	78	32	0,7	0,5	1
<b>PRODUKSI TELUR</b>	<b>1.446</b>	<b>4.302</b>	<b>3.982</b>	<b>2.523</b>	<b>2.642</b>
Telur Ayam Buras	1.446	2.106	3.375	1.869	1.993
Telur Ayam Ras	328	1.264	264	304	324
Telur Itik	279	932	343	305	325

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, 2025

- **Perikanan**

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dibagian utara Pulau Bali berbatasan dengan Laut Jawa/Bali, sehingga sebagian besar wilayah Kabupaten merupakan kawasan pesisir dengan panjang pantai 157,05 Km dengan aneka ragam kekayaan laut serta sangat potensial (luas laut 319.680 Ha / atau ± 1.166,75 km<sup>2</sup> dengan radius 4 mil).

Potensi perairan laut Kabupaten Buleleng, selain memiliki potensi perikanan tangkap juga mempunyai potensi perikanan budidaya. Kawasan laut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya mencapai luas 1000 Ha, dengan tabel potensi sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Tabel Potensi Budidaya ikan tahun 2024**

JENIS BUDIDAYA	POTENSI (Ha)	PEMANFAATAN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
<b>Budidaya Laut</b>			
Bawal	250	-	-
Kakap	50	13,1	153,00
Lobster	250	-	1,41
Kerapu dan Bandeng	450	98,3	222,20
Rumput Laut	250	8,1	62,48
<b>Budidaya Air Payau</b>			
Tambak Udang	1.000	296,5	3.060,71
<b>Budidaya Air Tawar</b>			
Kolam terdiri dari:	500	29,7	68,97
1. Nila	-	15,8	33,41
2. Lele	-	13,9	35,56
Sawah	1.900		-
Waduk	18		-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, 2025

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Produksi Penangkapan menurut jenis ikan tahun 2024**

NO	JENIS IKAN LAUT	JUMLAH PRODUKSI PENANGKAPAN (Ton)
1	Cendro	481,75
2	Ekor Kuning	606,4
3	Kwee	400,5
4	Layang	1.064,45
5	Sunglir	525,65
6	Lemuru	597,75
7	Lemadang	567,55

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, 2025

- **Produk Unggulan Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil Kajian Analisis Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dan Model Hilirisasinya, 2024, Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten

Buleleng berdasarkan sub sektor pertanian dapat diuraikan sebagai berikut: pada (1) sub sektor Tanaman Pangan, komoditas unggulan pertaniannya adalah jagung, padi, kacang tanah, kacang hijau; (2) sub sektor Hortikultura Buah dan sayur semusim komoditas unggulan pertaniannya adalah cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, paprika, wortel, melon, bawang merah; (3) sub sektor Buah dan sayur tahunan komoditas unggulan pertaniannya adalah alpukat, durian, manggis, pepaya, anggur, mangga, rambutan, sawo; (4) sub sektor Biofarmaka komoditas unggulan pertaniannya adalah kapulaga, kunyit, temukunci, temulawak; (5) sub sektor Floriculture komoditas unggulan pertaniannya adalah anggrek, krisan, mawar; (6) sub sektor Perkebunan komoditas unggulan pertaniannya adalah kopi arabica, kopi robusta, cengkeh, panili, kelapa; (7) sub sektor Peternakan komoditas unggulan pertaniannya adalah sapi, babi, kerbau, kambing, ayam buras, itik, ayam petelur, itik petelur; dan (8) sub sektor Perikanan komoditas unggulan pertaniannya adalah benih Bandeng, benih Kakap Putih, benih Kerapu Macan, lele dumbo, udang Vaname, garam. Komoditas unggulan pertanian beserta hasil produksi dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13  
Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah  
tingkat Kabupaten Buleleng

No.	Sub Sektor Pertanian	Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten
1.	Tanaman Pangan	Jagung, Padi, Kacang Tanah, Kacang Hijau
2.	Hortikultura Buah dan Sayur Semusim	Cabai besar, Cabai rawit, Jamur, Kentang, Kubis, Paprika, Wortel, Melon, Bawang merah
3.	Hortikultura Buah dan Sayur Tahunan	Alpukat, Durian, Manggis, Pepaya, Anggur, Mangga, Rambutan, Sawo
4.	Hortikultura Biofarmaka	Kapulaga, Kunyit, Temukunci, Temulawak
5.	Hortikultura Floriculture	Anggrek, Krisan, Mawar
5.	Perkebunan	Kopi Arabica, Kopi Robusta, Cengkeh, Panili, Kelapa
6.	Peternakan	Sapi, Babi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Itik, Ayam Petelur, Itik Petelur

No.	Sub Sektor Pertanian	Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten
7.	Perikanan	Benih Bandeng, Benih Kakap Putih, Benih Kerapu Macan, Lele Dumbo, Udang Vaname, Garam

Sumber : Kajian Analisis Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dan Model Hilirisasinya, 2024

**Tabel 2.14**  
**Data Produksi Komoditi Unggulan Kabupaten Buleleng**

No.	Sub Sektor Pertanian	Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten	Kabupaten Buleleng (Data Produksi Komoditi) (*Ha/Ton/Ekor/Potong)	
			2020	2024
1.	Tanaman Pangan	Jagung	22,353	35,459.7
		Padi	99,459	111,558.6
		Kacang Tanah	1,834	639.2
		Kacang Hijau	57	47.6
2.	Hortikultura Buah dan Sayur Semusim	Cabai besar	1,104	204.9
		Cabai rawit	15,531	2,834.5
		Jamur	151,265	13.2
		Kentang	269	137.0
		Kubis	1,314	831.8
		Paprika	28,3	258,1
		Wortel	416	564.8
		Melon	0	36,5
		Bawang merah	317	406.5
		3.	Hortikultura Buah dan Sayur Tahunan	Alpukat
Durian	3,101			7,980
Manggis	1,886			4,633
Pepaya	1.612,7			4.762,1
Anggur	12,456			16,597
Mangga	26,260			41,363
Rambutan	10,991			13,215
4.	Hortikultura Biofarmaka	Kapulaga	0	0
		Kunyit	921.460	5.082.680
		Temukunci	4.200	13.323
		Temulawak	3.816	13.784
5.	Hortikultura Floriculture	Anggrek	53.079	4.260
		Krisan	126.788	71.358
		Mawar	0	3.600
5.	Perkebunan	Kopi Arabica	1.236,76	1.106,85

No.	Sub Sektor Pertanian	Komoditas Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten	Kabupaten Buleleng (Data Produksi Komoditi) (*Ha/Ton/Ekor/Potong)	
			2021	2023
		Kopi Robusta	7,325.78	7,727.00
		Cengkeh	3,184.57	4,098
		Panili	0	0.5
		Kelapa	9,708.09	7,680.00
6.	Peternakan	Sapi	148,644	70,506
		Babi	45,051	12,085
		Kerbau	89	75
		Kambing	23,541	22,474
		Ayam buras	780,716	490,851
		Itik	38,0	6,5
			<b>2021</b>	<b>2023</b>
7.	Perikanan	Benih Bandeng	87.8	222.20
		Benih Kakap Putih	113.04	153.00
		Benih Kerapu Macan	0,478	21.334
		Lele Dumbo	157.988,0	25.641,0
		Udang Vaname	3,193.24	3,060.71
		Garam	947,78	1.363,7
Catatan: - Ayam Petelur memiliki rata-rata produksi di tingkat kabupaten sebesar 1.192.961,8 ton				

Sumber : Kajian Analisis Produk Unggulan Pertanian Daerah Kabupaten Buleleng dan Model Hilirisasinya, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan Data produksi komoditi unggulan daerah dalam beberapa sub sektor. Data yang digunakan sebagai sandingan adalah data produksi komoditi Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 dan 2024, Pada sub sektor Tanaman Pangan, komoditi Jagung mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi yakni sebesar 63,03% dari sejumlah 22,353 Ha di tahun 2020 menjadi 35,459,7 Ha di tahun 2024. Selain Jagung, padi juga mengalami peningkatan produksi sebesar 89,15% dimana pada tahun 2020 data produksinya sebesar 99,459 Ha kemudian di tahun 2024 menjadi 111,558.6 Ha. Sementara itu untuk Kacang Tanah dan Kacang Hijau mengalami penurunan produksi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada sub sektor Hortikultura Buah dan Sayur Semusim, Wortel, Melon, paprika, dan bawang merah mengalami peningkatan produksi di tahun 2024, dimana paprika

mengalami peningkatan produksi tertinggi hingga mencapai 812% dari 28,3ton pada tahun 2020 menjadi 258,1 ton. pada tahun 2024 Produksi cabai rawit, jamur, kentang dan kubis mengalami penurunan dibandingkan produksi pada tahun 2020. Sementara itu pada sub sektor Hortikultura Buah dan Sayur Tahunan, sebagian besar komoditi mengalami kenaikan produksi khususnya sawo, Manggis, pepaya dan Anggur yang memiliki kenaikan produksi yang signifikan.

Komoditi pada sub sektor Hortikultura Biofarmaka sebagian besar mengalami kenaikan produksi, kecuali pada komoditi kapulaga yang tidak memiliki hasil produksi baik pada tahun 2020 maupun tahun 2024. Sementara itu, pada sub sektor Hortikultura Floriculture, Anggrek dan Krisan mengalami penurunan produksi masing sebesar 92% dan 44%, sedangkan mawar yang semulanya tidak ada hasil produksi di tahun 2020, menghasilkan 3600 potong di tahun 2024.

Pada sub sektor Perkebunan, Kopi robusta menjadi satu-satunya komoditi yang mengalami kenaikan produksi yakni sebesar 9% di tahun 2024. Produksi kopi robusta pada tahun 2020 adalah sebesar 7,325.78 ton, sementara itu pada tahun 2024 meningkat menjadi 7,727.00 ton. Komoditi lainnya seperti kopi arabica, dan kelapa mengalami penurunan produksi. Sementara itu, pada sub sektor Peternakan semua komoditi mengalami penurunan produksi pada tahun 2024, penurunan terbesar terjadi pada komoditi Ayam Buras yang mencapai 99% dari 876,1 ton di tahun 2019 turun menjadi 6,8 ton di tahun 2023.

Produksi komoditi pada sub sektor Perikanan sebagian besar mengalami peningkatan produksi, kecuali pada komoditi Lele Dumbo dan udang vaname yang mengalami penurunan. Produksi lele dumbo pada tahun 2020 mencapai 157.988,0ton sementara itu pada tahun 2024 turun menjadi 25.641,0 ton. Peningkatan produksi tertinggi pada sub sektor perikanan terjadi pada komoditi Benih Bandeng yang semula hanya sebesar 87.8 ton pada tahun 2020 menjadi 222.20 ton pada tahun 2024.

## 8) Pola Penggunaan Lahan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, dirumuskan dengan kriteria:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
4. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buleleng merujuk pada Materi teknis RTRW 2024-2044 dimana rencana pola ruang tersebut terdiri dari:

1. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
2. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

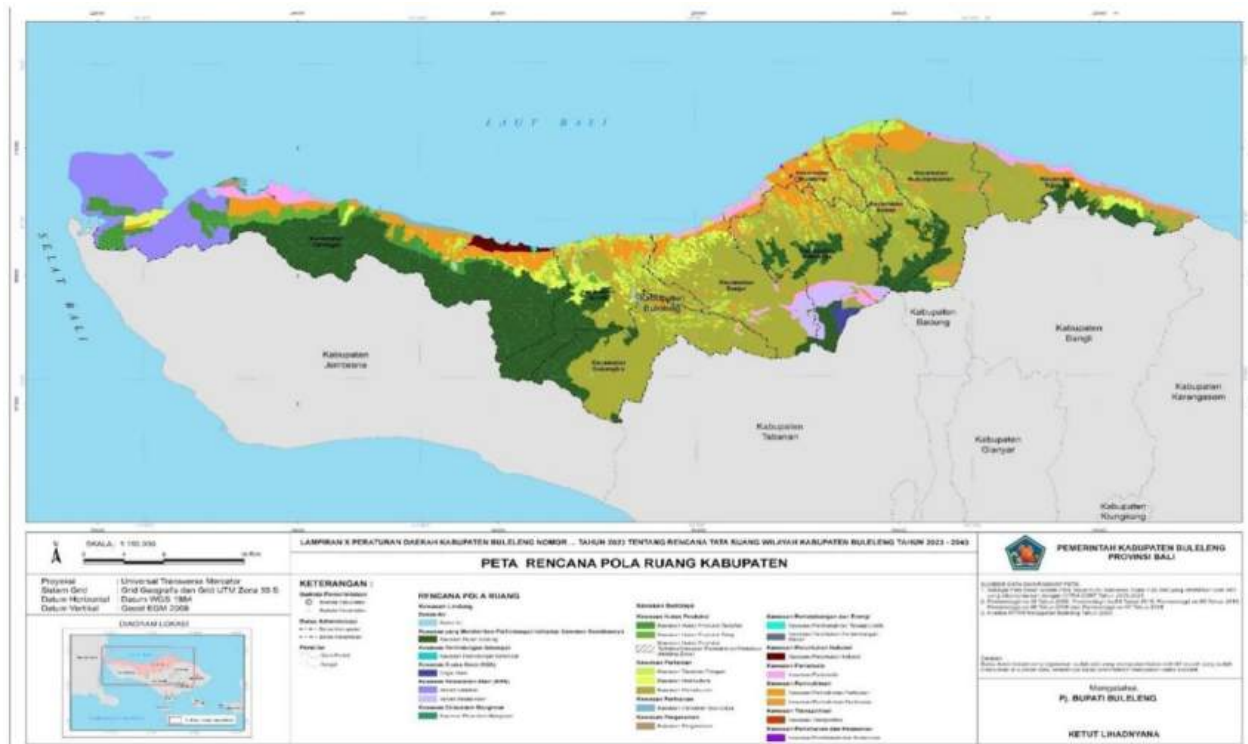
Sesuai Perda 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2024- 2044, Rencana pengembangan Kawasan Lindung memiliki total seluas 42.806,35 Ha. Semua Kawasan Lindung dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan perlindungan setempat karena luasannya relatif kecil (sempit), tidak dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten. Sedangkan rencana pengembangan Kawasan Budi Daya memiliki total luas 89,461.61Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rincian berikut.

Tabel 2.15  
Rincian Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
<b>1</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>		
a.	Badan Air	266.24	0.20%
b.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Hutan Lindung)	30,449.74	23.02%
c.	Kawasan Perlindungan Setempat	15.86	0.01%
d.	Kawasan Konservasi	11,986.00	9.06%
e.	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	88.51	0.07%
<b>LUAS KAWASAN LINDUNG</b>		<b>42,806.35</b>	<b>32.36%</b>
<b>2.</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>		
a.	Kawasan Hutan Produksi	5,629.19	4.26%
	▪ Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4,101.23	3.10%
	▪ Kawasan Hutan Produksi Tetap	1,527.96	1.16%
b.	Kawasan Pertanian	61,069.22	46.17%
	▪ Kawasan Tanaman Pangan	6,911.77	5.23%
	▪ Kawasan Hortikultura	4,305.61	3.26%
	▪ Kawasan Perkebunan	49,851.84	37.69%
c.	Kawasan Perikanan Budidaya	510.79	0.39%
d.	Kawasan Pergaraman	177.34	0.13%
e.	Kawasan Pertambangan dan Energi (Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik)	36.14	0.03%
f.	Kawasan Peruntukan Industri	707.54	0.53%
g.	Kawasan Pariwisata	4,343.56	3.28%
h.	Kawasan Permukiman	16,899.76	12.78%
	▪ Kawasan Permukiman Perkotaan	12,477.78	9.43%
	▪ Kawasan Permukiman Perdesaan	4,421.98	3.34%
i.	Kawasan Transportasi	44.57	0.03%
j.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	43.50	0.03%
<b>LUAS KAWASAN BUDIDAYA</b>		<b>89,461.61</b>	<b>67.64%</b>
<b>LUAS TOTAL</b>		<b>132,267.96</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Perda 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024 - 2044



Sumber: Perda 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024 - 2044

Gambar 2.9  
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng

### A. KAWASAN LINDUNG

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, **Kawasan Lindung** adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Arahan pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi

dan berkelanjutan. Arahannya pengelolaan dalam upaya melestarikan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Buleleng secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
2. Penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
4. Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
5. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non kayunya;
6. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam;
7. Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam; dan
8. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi hutan lindung.

Pemantapan Kawasan Lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Buleleng yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan, setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan Kawasan Budi Daya.

#### **a. Badan Air**

Badan Air merupakan kawasan peruntukan ruang yang berupa air permukaan bumi di wilayah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi dan hayati. Adapun Badan Air dapat berupa sungai, danau, embung, waduk dan air permukaan bumi lainnya.

Badan Air merupakan bagian dari air permukaan bumi yang dapat berupa sungai, embung, waduk dan sebagainya. Badan Air di wilayah Kabupaten Buleleng mencakup danau, bendungan/waduk/embung, sungai seluas kurang lebih 894 ha yang meliputi:

1. Badan air berupa bendungan/waduk/embung dan sungai seluas kurang lebih 266,24 ha tersebar di seluruh kecamatan.
2. Badan air berupa perairan Danau Buyan di Kecamatan Sukasada dan perairan Danau Tamblingan di Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 627 ha, yang menjadi bagian dari Kawasan Konservasi (TWA).

**b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Buleleng berupa Kawasan Hutan Lindung. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan berperan penting dalam tata lingkungan wilayah, yaitu:

1. Mengatur tata hidrologis, dimana hutan merupakan gudang penyimpanan air dan tempat menyerapnya air hujan yang pada akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai melalui mata air-mata air yang berada di bawahnya;
2. Mencegah erosi dan longsor, dimana melihat topografi wilayah Kabupaten Badung yang dominan berbukit dan bergunung-gunung, sehingga banyak lahan-lahan kritis yang mudah tererosi apabila datang hujan. Keberadaan hutan sangat berperan melindungi tanah dari erosi dan longsor;
3. Di dalam hutan terjadi daur unsur hara dan melalui aliran permukaan dapat mengalirkan hara ke area sekitarnya;

4. Mengatur iklim, melalui kumpulan pohon-pohonnya dapat memproduksi oksigen yang diperlukan bagi makhluk hidup dan penyerap karbondioksida. Sehingga, perannya sangat nyata dalam mitigasi pemanasan global. Siklus yang terjadi di hutan, dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah;
5. Hutan memiliki jenis kekayaan flora dan fauna sehingga fungsi hutan yang penting lagi adalah sebagai area yang memproduksi embrio-embrio flora dan fauna yang bakal menambah keanekaragaman hayati. Dengan salah satu fungsi hutan ini, dapat mempertahankan kondisi ketahanan ekosistem di satu wilayah; dan
6. Hutan memiliki jasa lingkungan bagi pariwisata serta penambah estetika alam bagi bentang alam wilayah.

Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng adalah seluas kurang lebih 30.449,74 Ha atau sebesar 23,02% dari luas total Kabupaten Buleleng, dengan sebaran sebagai berikut:

1. Kecamatan Gerokgak berupa Kawasan Hutan Lindung Bali Barat;
2. Kecamatan Busungbiu meliputi:
  - Kawasan Hutan Lindung Bali Barat; dan
  - Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah.
3. Kecamatan Seririt berupa Kawasan Hutan Lindung Bali Barat;
4. Kecamatan Banjar berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau;
5. Kecamatan Sukasada meliputi:
  - Kawasan Hutan Lindung Puncak Landep;
  - Kawasan Hutan Lindung Gunung Mungsu;
  - Kawasan Hutan Lindung Gunung Silangjana; dan
  - Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau.
6. Kecamatan Sawan berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Silangjana;
7. Kecamatan Kubutambahan berupa Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau; dan
8. Kecamatan Tejakula berupa Kawasan Hutan Lindung Penulisan.

Pengelolaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan cara:

1. Kawasan lindung yang saat ini berupa hutan lindung, dipertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya;

2. Mengalihfungsikan lahan lahan yang eksistingnya belukar/ ilalang/ padang rumput yang sesuai untuk hutan lindung dijadikan hutan lindung;
3. Memberikan fungsi lindung pada semua hutan produksi yang sudah ada yang kesesuaian lahannya memenuhi untuk hutan lindung;
4. Memberikan fungsi lindung pada sebagian perkebunan yang kesesuaian lahannya memenuhi untuk hutan lindung;
5. Rehabilitasi hutan lindung pada kawasan hutan lindung yang telah mengalami kerusakan dan penggundulan hutan secara liar;
6. Pembentukan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan;
7. Pelaksanaan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik, yang dapat dilakukan melalui Penyusunan Rencana Teknik Tahunan selama 5 tahun; dan
8. Memonitor dan membina semua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

### **c. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan Perlindungan Setempat yang direncanakan di Kabupaten Buleleng meliputi Kawasan Kearifan Lokal/ kawasan tempat suci. Sesuai Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024 – 2044, Kawasan tempat suci ditetapkan di Kabupaten Buleleng dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kawasan Tempat Suci Pura *kahyangan jagat* mencakup Kawasan tertentu di sekitar Pura *dang kahyangan* dan Pura *kahyangan jagat* lainnya seluas kurang lebih 15.86 ha, terdapat di:

- a) Kecamatan Banjar, meliputi:
  - Kawasan Pura Gubug Tamblingan;
  - Kawasan Pura Labuhan Aji; dan
  - Kawasan Pura Ulun Danu Tamblingan.
- b) Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
  - Kawasan Pura Puseh Panegil Dharma Panyusunan;
  - Kawasan Pura Negara Gambur Anglayang; dan
  - Kawasan Pura Bukit Sinunggal.
- c) Kecamatan Sukasada berupa Kawasan Pura Ulun Danu Buyan.
- d) Kecamatan Tejakula berupa Kawasan Pura Ponjok Batu.

**d. Kawasan Konservasi**

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di Kabupaten Buleleng meliputi: Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

▪ **Kawasan Suaka Alam (KSA)**

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan suaka alam (KSA) dapat berupa cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwa laut. Kawasan suaka alam (KSA) yang terdapat di Kabupaten Buleleng berupa meliputi kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru di Kecamatan Sukasada seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektare.

▪ **Kawasan Pelestarian Alam (KPA)**

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seluas 11.986 ha.

Sebaran lokasi kawasan pelestarian alam (KPA) di Kabupaten Buleleng, meliputi:

✓ Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional yang terdapat di Kabupaten Buleleng berupa Taman Nasional Bali Barat yang terdapat di Kabupaten Buleleng berlokasi di Desa Pejarakan dan Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak.

✓ Taman Wisata Alam (TWA)

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Kawasan Taman Wisata Alam ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
- Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
- Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

TWA yang terdapat di Kabupaten Buleleng adalah Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan yang berlokasi di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sukasada, yang di dalamnya terdapat dua buah danau yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan.

**e. Kawasan Ekosistem Mangrove**

Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan hutan *mangrove* atau hutan bakau yang merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan payau. Hutan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas yaitu adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka hanya sedikit

jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini. Kawasan ekosistem hutan *mangrove* di Kabupaten Buleleng terdapat di Kecamatan Gerokgak dengan luas kurang lebih 88,51 ha.

## **B. KAWASAN BUDI DAYA**

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengembangan pola ruang kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung lingkungan Kabupaten Buleleng, menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan, serta terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan.

Semua komponen kawasan budi daya dipetakan sesuai keberadaannya di wilayah kabupaten. Khusus untuk kawasan budi daya yang letaknya tersebar dalam luasannya relatif kecil (sempit), tidak dapat dipetakan dalam peta pola ruang wilayah kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pola ruang pada RTRW Kabupaten.

### **a. Kawasan Hutan Produksi**

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor, sub sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
2. Meningkatkan fungsi lindung;
3. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
4. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;

5. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
7. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
8. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
9. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengelolanya;
10. Meningkatkan ekspor; dan
11. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan produksi yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng meliputi: kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

- **Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Kawasan hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Dengan adanya kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Buleleng maka dapat mendorong pelestarian kemampuan sumber daya hutan, dan menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan.

Kawasan hutan produksi terbatas yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 4.101,23 (empat ribu seratus satu koma dua puluh tiga) hektare, meliputi:

- HPT Bali Barat di Kecamatan Gerokgak.
- HPT Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula.

- **Kawasan Hutan Produksi Tetap**

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, hutan suaka alam, dan taman buru.

Kawasan hutan produksi tetap merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Kawasan ini diarahkan untuk menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya, dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat.

Kawasan hutan produksi tetap yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng, seluas kurang lebih 1.527,96 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh enam) hektare yang meliputi:

- HP Bali Barat di Kecamatan Gerokgak;
- HP Bali Barat di Kecamatan Seririt;

#### **b. Kawasan Pertanian**

Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis sistem agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Penetapan Kawasan Pertanian pada umumnya mempertimbangkan kriteria:

- a. Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan.
- b. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya.
- c. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
- d. Pola tanam: monokultur, tumpang sari, campuran tumpang gilir.

- e. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.
- f. Arahan Pengelolaan Kawasan Pertanian mencakup:
- g. Penyusunan rancang bangun peruntukan pertanian berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah serta sosial budaya masyarakat setempat;
- h. Penguatan kelembagaan dan manajemen subak;
- i. Pengembangan penelitian pengembangan komoditas unggulan, diversifikasi produk dan sistem pola tanam yang mampu mengadaptasi kondisi perubahan iklim;
- j. Optimalisasi fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas lahan;
- k. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi ke non pertanian agar ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan;
- l. Pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten;
- m. Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat melalui sistem agribisnis dan agroindustri terpadu;
- n. Pengembangan kebijakan untuk mendorong integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata, desa wisata dan ekowisata;
- o. Pengembangan kawasan pertanian sekaligus berfungsi sebagai kawasan RTH dan resapan air;
- p. Revitalisasi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; dan
- q. Pengembangan teknologi tepat guna serta sarana dan prasarana produksi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil peroduksi/pasca panen.

Kawasan pertanian yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng, meliputi: kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.

- **Kawasan Tanaman Pangan**

Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Pemanfaatan ruang kawasan tanaman pangan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

- . Tetap terjaga kualitas lingkungan;
- a. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal; dan
- b. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Kawasan tanaman pangan diarahkan di semua wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Tejakula seluas kurang lebih 6.911,77 (enam ribu sembilan ratus sebelas koma tujuh puluh tujuh) hektare.

Arahan ini didasarkan pada pertimbangan produktifitas lahan, ketersediaan prasarana irigasi, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan yang sedang berlangsung.

Dalam rangka perlindungan kawasan tanaman pangan, maka ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Tanaman Pangan. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. KP2B di Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan luas kurang lebih 6.463 (enam ribu empat ratus enam puluh tiga) hektare tersebar di Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan.

- **Kawasan Hortikultura**

Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Kawasan Hortikultura ditetapkan dengan kriteria:

- Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan peruntukan budidaya hortikultura secara optimal;
- Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; dan
- Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.

Arahan pengelolaan Kawasan Hortikultura, mencakup:

- Pengembangan tanaman hortikultura pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan termasuk pertanian perkotaan (urban farming);
- Pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
- Pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat;
- Pengendalian kegiatan budidaya hortikultura sayur mayur pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
- Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
- Pengembangan luasan kawasan budi daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.

Kawasan hortikultura yang ditetapkan di Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 4.305,61 (empat ribu tiga ratus lima koma enam puluh satu) hektare, yang tersebar di Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Banjar, mencakup budidaya tanaman buah-buahan, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka, meliputi:

- Pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
- Pengembangan tanaman hortikultura dengan komoditas yang berdaya saing pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
  - o Komoditas tanaman buah-buahan mangga, rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan Sawan, Kecamatan Gerokgak;
  - o Komoditas tanaman hias dan sayur mayur di Kecamatan Sukasada; dan
  - o Komoditas budidaya tanaman buah-buahan durian, manggis, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Kecamatan Banjar.

▪ **Kawasan Perkebunan**

Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan budidaya perkebunan di Kabupaten Buleleng dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki.

Arahan pengelolaan kawasan perkebunan, mencakup:

- Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan;
- Mendorong kegiatan penelitian dan pemuliaan tanaman perkebunan;
- Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem agribisnis dan agroindustri.
- Penguatan sistem kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terintegrasi dengan subak abian;
- Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
- Pengembangan perkebunan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya dengan konsep simantri;

- Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap berbasis Subak dan kawasan sesuai potensi;
- Membina dan mengembangkan perkebunan ramah lingkungan; dan
- Pengembangan agrowisata dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Buleleng ditetapkan seluas kurang lebih 49.851,84 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu koma delapan puluh empat) hektare yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan/produk unggulan perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi:

- Pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
- Pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan

### **c. Kawasan Perikanan**

Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan yang dikembangkan di wilayah daratan di Kabupaten Buleleng berupa kawasan perikanan budi daya. Kawasan budidaya perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 510,79 (lima ratus sepuluh koma tujuh puluh sembilan) hektare yang tersebar di Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Kubutambahan, dan Kecamatan Sawan, meliputi: perikanan budidaya air tawar dan budidaya air payau (tambak), terdiri atas :

Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar terdiri atas:

- Kawasan perikanan budidaya kolam di seluruh kecamatan;
- Kawasan perikanan budidaya ikan bersama tanaman padi sawah (minapadi) di seluruh kecamatan;
- Kawasan perikanan budidaya perairan umum di seluruh kecamatan;
- Kawasan perikanan budidaya saluran irigasi di seluruh kecamatan; dan
- Kawasan budidaya bidang pembenihan di seluruh kecamatan.

Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau terdiri atas:

- Budidaya tambak udang diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt; dan
- Budidaya tambak bandeng diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt.

Berkembangnya budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Buleleng mendorong berkembangnya kegiatan pendukung budidaya, terutama kegiatan pembenihan ikan. Dalam menunjang pengembangan ekspor komoditas, pengembangan perikanan perlu didukung dengan pengembangan pengelolaan pasca panennya beserta fasilitas penunjangnya yang menunjang kualitas. Arahkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Buleleng adalah:

- Pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan meliputi: Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit dan Balai Penelitian Perikanan Gondol.
- Pengembangan usaha perikanan budidaya, baik untuk ikan konsumsi dan ikan hias;
- Pengembangan sertifikasi bagi usaha pembenihan ikan baik pembenihan ikan konsumsi maupun ikan hias;
- Menjaga kelestarian sumberdaya air terhadap pencemaran limbah;
- Pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
- Pemantapan prasarana Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol; dan

- Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

#### **d. Kawasan Pergaraman**

Kawasan Pergaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam. Kawasan pergaraman di wilayah Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 177,34 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat) hectare yang mencakup:

- Kawasan pergaraman yang merupakan kegiatan pergaraman rakyat pada wilayah pesisir di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak dan di Desa Les, Kecamatan Tejakula;
- Kegiatan pergaraman di wilayah daratan merupakan kegiatan pergaraman yang bercampur secara harmonis dengan kawasan peruntukan lainnya.

#### **e. Kawasan Pertambangan dan Energi**

Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Kawasan pertambangan dan energi di wilayah Kabupaten Buleleng meliputi kawasan pembangkit tenaga listrik seluas kurang lebih 36,14 (tiga puluh enam koma empat belas) hektare.

Kawasan pembangkitan tenaga listrik merupakan kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Buleleng, meliputi:

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pemaron di Kecamatan Buleleng.

#### **f. Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri
- Pengembangan kawasan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri
- Pengembangan sentra industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu di dalam Kawasan Peruntukan Industri
- Pengawasan dan pemantauan serta pengendalian terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri
- Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan kawasan permukiman

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Buleleng seluas kurang lebih 707,54 (tujuh ratus tujuh koma lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Gerokgak yang deliniasi kawasannya meliputi sebagian Desa Patas, sebagian Desa Pengulon, dan sebagian Desa Celukan Bawang. Sedangkan pengembangan kegiatan industri di luar Kawasan Peruntukan Industri dapat dilakukan dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektare tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng setelah mendapat kajian teknis dari instansi terkait serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Arahan pengelolaan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, meliputi:

- Pengembangan kawasan industri mengacu pada SK Menteri Perindustrian No. 286 Tahun 1989 (tata cara perizinan dan standar teknis kawasan industri) didukung rencana tata ruang yang terinci bagi kawasan industri;
- Pembentukan sistem informasi dalam mengarahkan investasi menurut lokasi, jenis dan klasifikasi industri yang konsisten dengan rencana kawasan budidaya industri;
- Evaluasi rencana pembangunan kawasan peruntukan aneka industri maupun sentra industri kecil yang telah berjalan dari aspek lingkungan, sosial budaya, dan pemanfaatan ruang;

- Meningkatkan produktivitas kawasan industri dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan hulu atau penghasil bahan baku. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah menyediakan ruang/lahan pengembangan bahan baku industri berupa lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya;
- Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas dari kawasan industri ke kawasan penghasil bahan baku industri;
- Pembuangan limbah kegiatan industri baik ke udara, darat maupun perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- Pengembangan industri di kawasan perkotaan sifatnya hanya sebagai penunjang untuk penyediaan perumahan karyawan kawasan industri dan bukan untuk lokasi prosesing kawasan industri; dan
- Pengembangan industri kecil menengah juga dapat dilakukan dengan pengembangan agroindustri di Kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari.

#### **g. Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata (DTW) yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata. Kawasan pariwisata di Kabupaten Buleleng ditetapkan seluas kurang lebih 4.343,56 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga koma lima puluh enam) hektare.

Sebaran Kawasan Pariwisata di Wilayah Kabupaten, terdapat di:

- Kecamatan Gerokgak yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, Desa Pemuteran, Desa Banyupoh, dan Desa Penyabangan;
- Kecamatan Seririt yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kalisada, Desa Banjarasem, Desa Ume Anyar, Desa Lokapaksa, Desa Pengastulan, Kelurahan Seririt, Desa Sulanyah, Desa Tangguwisia, dan Desa Kalianget;
- Kecamatan Banjar yang meliputi:
  - a. Kawasan sekitar pantai Desa Banjar, Desa Dencarik, Desa Temukus, dan Desa Kaliasem; dan

- b. Kawasan sekitar lembah Desa Kaliasem, Desa Kayuputih, Desa Pedawa, Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Gesing.
- Kecamatan Busungbiu yang meliputi Kawasan sekitar lembah Desa Umejero;
  - Kecamatan Buleleng yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kalibukbuk, Desa Anturan, Desa Tukadmungga, Desa Pamaron, Desa Baktiseraga, Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Banyuning, dan Kelurahan Penarukan;
  - Kecamatan Sukasada yang meliputi Kawasan sekitar lembah Desa Selat, Desa Panji Anom, Desa Panji, Desa Wanagiri, Desa Pancasari, dan Desa Pegayaman;
  - Kecamatan Kubutambahan yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Kubutambahan dan Desa Bukti; dan
  - Kecamatan Tejakula yang meliputi Kawasan sekitar pantai Desa Pacung, Desa Sembiran, Desa Julah, Desa Bondalem, Desa Tejakula, Desa Les, Desa Penuktukan, Desa Sambirenteng, dan Desa Tembok.

Kawasan Pariwisata di Wilayah Kabupaten adalah untuk mendukung konsep perwilayahan pembangunan kepariwisataan Bali pada Destinasi Pariwisata Daerah Bali Utara didukung beberapa Kawasan Strategis tematik pariwisata dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah, Desa Wisata yang diintegrasikan dengan kawasan peruntukan lainnya secara terpadu termasuk sebaran DTW yang *overlay* secara harmonis di Wilayah Kabupaten.

DTW di Wilayah Kabupaten meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan yang dapat berupa Kawasan, hamparan, koridor, Wilayah desa atau kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya dapat berada pada Kawasan Pariwisata atau di luar Kawasan Pariwisata maupun bercampur secara harmonis dengan Kawasan peruntukan lainnya tersebar di Wilayah Kabupaten.

Potensi DTW yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi:

1. DTW Alam yang terdapat di:

a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:

- Taman Nasional Bali Barat di Desa Sumber Klampok;
- Taman Laut Pulau Menjangan di Desa Sumber Klampok;
- Air Panas Banyuwedang di Desa Pejarakan; dan
- Air Terjun Pengumbahan di Desa Pemuteran.

b. Kecamatan Busungbiu, meliputi:

- *Rice Field Terrace* Umajero di Desa Umejero; dan
- *Rice Field Terrace* Kekeran di Desa Kekeran.

c. Kecamatan Banjar, meliputi:

- Air Panas Banjar di Desa Banjar;
- Air Terjun Melanting di Desa Munduk;
- Danau Tamblingan di Desa Munduk;
- Perkebunan Anggur Dencarik di Desa Dencarik; dan
- Air Terjun Singsing di Desa Temukus.

d. Kecamatan Sukasada, meliputi:

- Danau Buyan di Desa Pancasari;
- Air Terjun Banyumala di Desa Wanagiri;
- Monkey Forrest Wanagiri di Desa Wanagiri;
- Air Terjun Gitgit di Desa Gitgit;
- Air Terjun Bertingkat/Multitier Waterfall di Desa Gitgit;
- Air Colek Pamor di Desa Gitgit;
- Air Terjun Campuhan/Twin Waterfall di Desa Gitgit;
- Air Terjun Jembong di Desa Ambengan;
- Air Terjun Pucuk di Desa Sambangan;
- Air Terjun Kroya di Desa Sambangan;
- Air Terjun Kembar di Desa Sambangan;
- Air Terjun Aling-aling di Desa Sambangan;
- Hutan Raya Selat di Desa Selat;
- Pemandian Sungai Abasan di Desa Panji Anom;
- Bali Sport Canyoning di Desa Desa Gitgit; dan
- Air Terjun Cinta di Desa Wanagiri.

e. Kecamatan Buleleng, meliputi:

- Pantai Lovina di Desa Kalibukbuk; dan
  - Pantai Penimbangan di Desa Baktiseraga.
- f. Kecamatan Sawan, meliputi:
- Pantai Kerobokan di Desa Kerobokan;
  - Air Terjun Tadah Hujan Campur Rasa di Desa Menyali;
  - Air Terjun Sekumpul di Desa Sekumpul;
  - Air Terjun Bengbengan di Desa Lemukih;
  - Air Terjun Fiji di Desa Lemukih;
  - Air Terjun Bukit Lalang di Desa Lemukih;
  - Air Terjun Yeh Mampeh Lemukih di Desa Lemukih;
  - Air Terjun Ikut Sampidi Desa Lemukih;
  - Air Terjun Teja di Desa Bebetin; dan
  - Pemandian Manuksesa di Desa Bebetin.
- g. Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
- Desa Tua Bulian di Desa Bulian;
  - Bukit Teletubbies di Desa Kubutambahan; dan
  - Air Terjun Carat di Desa Tamblang.
- h. Kecamatan Tejakula, meliputi:
- Air Terjun Yeh Mampeh Les di Desa Les;
  - Taman Laut Desa Les di Desa Les; dan
  - Taman Segara Desa Penuktukan di Desa Penuktukan.
2. DTW Budaya/Sejarah yang terdapat di:
- a. Kecamatan Gerokgak, meliputi:
- Pura Jaya Prana di Desa Sumber Klampok;
  - Lingkungan Pura Pulaki dan Pesanakannya di Desa Banyupoh;
  - Pura Batu Kursi di Desa Pemuteran; dan
  - Lingkungan Pura Taman Kelentingsari di Desa Sumber Klampok.
- b. Kecamatan Seririt berupa Linggam Ciwa di Desa Unggahan.
- c. Kecamatan Banjar, meliputi:
- Brahma Wihara Arama di Desa Banjar Tegeha;
  - Desa Tua Sidatapa di Desa Sidatapa;
  - Desa Tua Pedawa di Desa Pedawa;

- Desa Tua Tigawasa di Desa Tigawasa;
  - Desa Cempaga di Desa Cempaga; dan
  - Desa Tua Banyuseri di Desa Banyuseri.
- d. Kecamatan Sukasada, meliputi:
- Tugu Bhuana Kerta di Desa Panji;
  - Perang Prakpak di Desa Padangbulia; dan
  - Perang Gebeg di Desa Padangbulia.
- e. Kecamatan Buleleng, meliputi:
- Tugu Singa Ambara Raja di Kelurahan Paket Agung;
  - Gedong Kertya di Kelurahan Paket Agung;
  - Museum Buleleng di Kelurahan Paket Agung;
  - Eks Pelabuhan Buleleng di Kelurahan Kampung Bugis;
  - Puri Buleleng di Kelurahan Liligundi;
  - Puri Kanginan di Kelurahan Kendran; dan
  - Situs Budha di Desa Kalibukbuk.
- f. Kecamatan Sawan, meliputi:
- Lingkungan Pura Beji di Desa Sangsit;
  - Lingkungan Pura Dalem Sangsit di Desa Sangsit; dan
  - Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Desa Jagaraga.
- g. Kecamatan Kubutambahan, meliputi:
- Lingkungan Pura Meduwe Karang di Desa Kubutambahan; dan
  - Lingkungan Pura Puncak Sinunggal di Desa Tajun.
- h. Kecamatan Tejakula, meliputi:
- Lingkungan Pura Ponjok Batu di Desa Pacung;
  - Desa Tua Sembiran di Desa Sembiran; dan
  - Desa Tua Julah di Desa Julah.
3. DTW Buatan yang terdapat di:
- a. Kecamatan Gerokgak berupa Bendungan Gerokgak di Desa Gerokgak;
  - b. Kecamatan Seririt, meliputi:
    - Bendungan Titab di Desa Ularan; dan
  - c. Kecamatan Sawan, meliputi:

- Bendungan Tamblang; dan
  - Monumen Perang Jagaraga di Desa Jagaraga.
- d. Kecamatan Banjar, meliputi:
- Krisna *Funtastic Land* di Desa Temukus; dan
  - Krisna *Water Sport* di Desa Temukus.
- e. Kecamatan Sukasada, meliputi:
- Krisna Adventure di Desa Sambangan;
  - Monumen Tri Yuda Sakti di Kelurahan Sukasada;
  - Kolam Renang Silangjana di Desa Silangjana; dan
  - DTW Bali *Park Dasong* di Desa Pancasari.
- f. Kecamatan Kubutambahan berupa Kolam Renang Air Sanih di Desa Bukti.
4. Desa Wisata terdapat di:
- a. Kecamatan Sukasada meliputi:
- Desa Ambengan;
  - Desa Pancasari; dan
  - Desa Gitgit.
- b. Kecamatan Tejakula meliputi:
- Desa Sembiran;
  - Desa Julah; dan
  - Desa Pacung.
- c. Kecamatan Banjar meliputi:
- Desa Munduk;
  - Desa Gesing;
  - Desa Pedawa;
  - Desa Tigawasa;
  - Desa Cempaga;
  - Desa Banyuseri; dan
  - Desa Banjar.
- d. Kecamatan Gerokgak yaitu Desa Pemuteran;
- e. Kecamatan Sawan, meliputi:
- Desa Bebetin;
  - Desa Lemukih;
  - Desa Sekumpul;

- Desa Menyali;
- Desa Sangsit;
- Desa Jagaraga; dan
- Desa Sawan.

f. Kecamatan Buleleng yaitu Desa Paket Agung

Kawasan Pariwisata, pusat-pusat KSPD, KSPN, dan DTW terintegrasi dengan alokasi ruang zona pariwisata dan DTW pada wilayah perairan pesisir Provinsi yang berdampingan pada area Kawasan peruntukan pariwisata pada Wilayah Kabupaten.

#### **h. Kawasan Permukiman**

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Secara umum, tujuan penetapan kawasan permukiman bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kawasan sekaligus memberikan kawasan hunian yang aman, nyaman dan layak huni, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan permukiman ditentukan dengan kriteria:

1. Tanah relatif datar dengan kemiringan berkisar antara 0-15%.
2. Bukan merupakan kawasan rawan bencana tinggi.
3. Tidak berlokasi pada kawasan lindung.
4. Tidak mengalihfungsikan KP2B.
5. Tanah disekitar perkotaan yang mempunyai perkembangan sebagai pusat pertumbuhan aktivitas.
6. Lokasinya mempunyai akses transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah.
7. Tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa.

8. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pematuan berskala kota.
9. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang.
10. Memiliki pola permukiman yang kompak.
11. Memiliki ketersediaan sarana pelayanan umum atau minimal memiliki kemudahan mencapai sarana pelayanan umum.

Kawasan permukiman mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.

Kawasan permukiman di Kabupaten Buleleng, meliputi: kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

#### ▪ **Kawasan Permukiman Perkotaan**

Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan yang disandanginya meliputi fungsi PKW, PKL dan PPK seluas 12.477,78 ha.

Sebaran kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Buleleng, terdapat di:

- Kecamatan Buleleng;
- Kecamatan Sawan;
- Kecamatan Sukasada;
- Kecamatan Seririt;
- Kecamatan Gerokgak;
- Kecamatan Busungbiu;

- Kecamatan Banjar;
- Kecamatan Kubutambahan; dan
- Kecamatan Tejakula.

▪ **Kawasan Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL, agropolitan dan kawasan perdesaan lainnya seluas 4.421,98 ha.

Sebaran kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Buleleng, terdapat di:

- Kecamatan Buleleng;
- Kecamatan Sawan;
- Kecamatan Sukasada;
- Kecamatan Seririt;
- Kecamatan Gerokgak
- Kecamatan Busungbiu;
- Kecamatan Banjar;
- Kecamatan Kubutambahan; dan
- Kecamatan Tejakula.

**i. Kawasan Transportasi**

Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut seluas 44,57 Ha.

Kawasan transportasi yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Buleleng, meliputi:

- Fasilitas darat Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak, Pelabuhan Sangsit di Kecamatan Sawan, dan Pelabuhan Buleleng di Kecamatan Buleleng;

- Bandar Udara Khusus Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak;
- Terminal Barang Baktiseraga di Kecamatan Buleleng;
- Terminal Penumpang Banyuasri di Kecamatan Buleleng;
- Terminal Penumpang Penarukan di Kecamatan Buleleng; dan
- Terminal Penumpang Sukasada di Kecamatan Sukasada.

**j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya seluas 43,50 Ha. Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

1. Sekolah Polisi Negara Polda Bali – Singaraja di Kecamatan Buleleng;
2. Sekolah Calon Tamtama Resimen Induk Kodam IX/Udayana di Kecamatan Buleleng;
3. Kepolisian Resor di Kecamatan Buleleng;
4. Komando Rayon Militer yang terdapat di seluruh kecamatan;
5. Batalyon Zeni Tempur 18/Yudha Karya Raksaka di Kecamatan Buleleng;
6. Batalyon Infanteri Raider 900/Satya Bhakti Wirottama di Kecamatan Buleleng;
7. Komando Distrik Militer 1609/Buleleng di Kecamatan Buleleng;
8. Kompi Senapan C Yonif Raider 900 di Kecamatan Kubutambahan;
9. Asrama Brigade Mobil di Kecamatan Seririt; dan
10. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam IX/Udayana di Kecamatan Gerokgak.

**9) Kawasan Rawan Bencana**

Berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026 yang telah dilakukan maka diketahui bahwa di Kabupaten Buleleng terdapat beberapa jenis bencana yang berada di kelas resiko tinggi

yaitu bencana Banjir Bandang, cuaca ekstrem, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, gempa bumi, dan Tsunami, Sedangkan beberapa bencana lain yang berada di kelas resiko sedang adalah bencana banjir, Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Tanah Longsor.

Jenis bencana yang berada di kelas resiko tinggi tersebut memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah.

1) Kawasan rawan bencana Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang umumnya kering, yang diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain meluapnya air akibat dari curah hujan tinggi. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng.

Tingkat risiko banjir diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas banjir di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.16**  
**Kelas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	-	139,01	96,63	235,64	Sedang
2	Buleleng	-	654,57	15,54	670,11	Tinggi
3	Busungbiu	-	89,91	0,12	90,03	Sedang
4	Gerokgak	-	2626,94	-	2626,94	Tinggi
5	Kubutambahan	-	149,79	-	149,79	Sedang
6	Sawan	-	456,53	1,58	458,11	Sedang
7	Seririt	-	1154,50	-	1154,5	Tinggi
8	Sukasada	-	23,56	-	23,56	Sedang
9	Tejakula	-	-	-	0	Sedang
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Sedang</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Jika dilihat pada tabel di atas maka hampir seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng memiliki potensi risiko banjir dengan

kategori sedang sampai tinggi. Kecamatan Buleleng, Gerokgak dan Seririt merupakan kecamatan dengan tingkat risiko tinggi. Topografi wilayah yang lebih rendah dari sekitarnya akan berpeluang lebih tinggi mengalami banjir.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Gambar 2.10

Peta resiko Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng

## 2) Kawasan rawan bencana Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa material longsoran atau runtuhnya bendungan alam, yang dipicu dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

Tingkat risiko banjir bandang diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas banjir bandang di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dalam tabel berikut

**Tabel 2.17**  
**Kelas Risiko Banjir Bandang Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	9,98	168,10	484,66	662,74	Tinggi
2	Buleleng	-	94,90	118,74	213,64	Tinggi
3	Busungbiu	166,27	14,66	342,14	523,07	Tinggi
4	Gerokgak	-	12,68	318,55	331,23	Tinggi
5	Kubutambahan	-	90,73	88,83	179,56	Sedang
6	Sawan	84,24	23,21	52,50	159,95	Rendah
7	Seririt	-	47,79	1103,30	1151,09	Tinggi
8	Sukasada	203,67	79,61	54,84	338,12	Tinggi
9	Tejakula	93,31	-	290,61	383,92	Tinggi
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Tinggi</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tingkat risiko bencana banjir bandang selain kecamatan Kubutambahan dan Sawan adalah kelas risiko tinggi, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi banjir bandang, terutama daerah-daerah yang berada di dekat sungai.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

**Gambar 2.11**  
**Peta resiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Buleleng**

### 3) Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di keseluruhan kecamatan berada pada kelas risiko tinggi, terutama pada bagian pesisir utara maka perlu melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap bencana cuaca ekstrim. Kawasan pesisir merupakan wilayah yang relatif datar dan memiliki keterbukaan lahan tinggi. Pada saat curah hujan tinggi, angin kencang di kawasan pesisir berpotensi tinggi untuk terjadi.

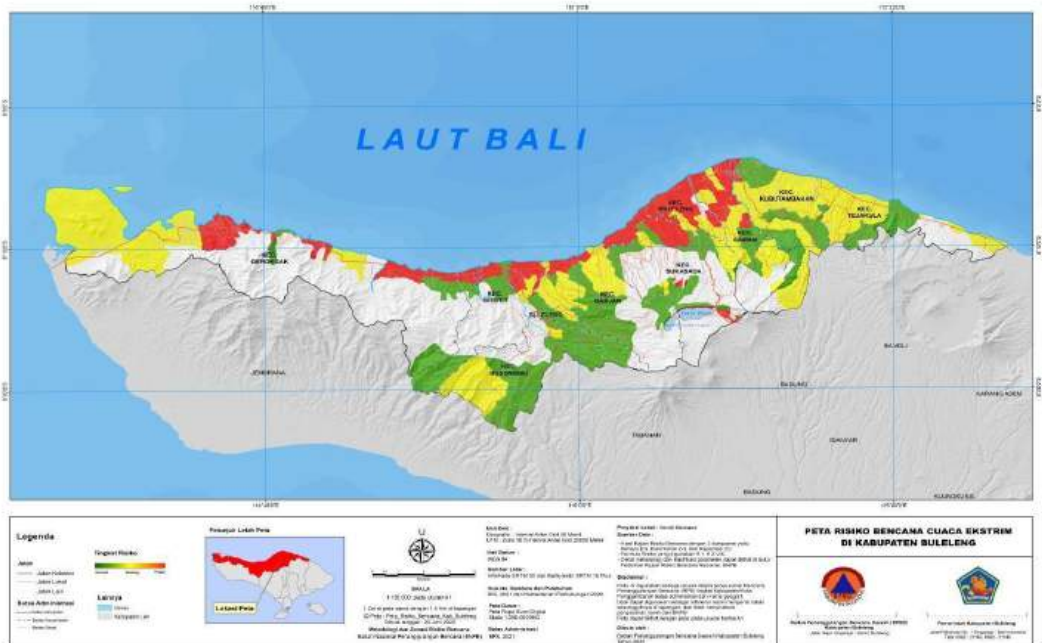
**Tabel 2.18**  
**Kelas Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	5984,28	3299,74	689,99	9974,01	Rendah
2	Buleleng	-	634,34	2907,76	3542,1	Tinggi
3	Busungbiu	6984,01	3556,59	-	10540,6	Rendah
4	Gerokgak	1431,72	12138,41	3268,24	16838,37	Tinggi
5	Kubutambahan	4468,56	6674,41	-	11142,97	Sedang
6	Sawan	1245,18	2862,85	2568,25	6676,28	Tinggi
7	Seririt	3861,27	649,66	2126,87	6637,8	Tinggi
8	Sukasada	3095,60	1223,03	2221,61	6540,24	Rendah
9	Tejakula	2042,84	4956,62	-	6999,46	Sedang
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Tinggi</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Berdasarkan peta potensi bahaya cuaca ekstrim, dapat dilihat bahwa semua kecamatan memiliki potensi sedang, kecuali kecamatan Buleleng yang memiliki potensi risiko tinggi. Potensi risiko tinggi ini disebabkan karena kerentanan yang terdapat di Kecamatan Buleleng lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Buleleng, biasanya terjadi di bulan Januari hingga Februari yang berbarengan dengan puncaknya musim hujan. Dampak dari bencana ini sampai menyebabkan robohnya atap rumah warga termasuk infrastruktur yang lain. Kejadian cuaca ekstrim ini sangat sulit

sekali dilakukan prediksi lokasi kejadiannya, namun memperhatikan data kejadian yang pernah melanda Kabupaten Buleleng, masyarakat harus tetap waspada terhadap kejadian bencana cuaca ekstrim untuk meminimalkan risiko bencana.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026  
Gambar 2.12

Peta resiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Buleleng

#### 4) Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrem adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Tingkat risiko gelombang ekstrem dan abrasi diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, hingga kapasitas gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dalam Tabel 2.19 dibawah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 5 kecamatan yang memiliki tingkat risiko pada kelas

sedang. Dari hasil analisa terhadap data tinggi muka air laut ditemukan bahwa pada bulan musim penghujan yaitu bulan Desember-Februari telah terjadi fenomena lonjakan muka air laut yang cenderung tinggi mencapai ketinggian 2 m.

**Tabel 2.19**  
**Kelas Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				Kelas
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	-	-	76,57	76,57	Tinggi
2	Buleleng	-	-	78,16	78,16	Tinggi
3	Busungbiu	-	-	-	-	Rendah
4	Gerokgak	-	727,33	363,59	1090,92	Tinggi
5	Kubutambahan	-	-	168,10	168,1	Tinggi
6	Sawan	-	-	76,44	76,44	Tinggi
7	Seririt	-	27,15	140,00	167,15	Tinggi
8	Sukasada	-	-	-	-	Rendah
9	Tejakula	-	-	423,47	423,47	Tinggi
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Tinggi</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

**Gambar 2.13**  
**Peta Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Buleleng**

5) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan (<http://www.bnpb.go.id>). Tatanan Tektonik pada Back Arc basin ditambah dengan terobosan batuan dan litologi batuan kuartar yang tidak kompak menyebabkan Kabupaten Buleleng sangat rawan terjadi gempa bumi

Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam menghadapi bencana gempa bumi. Secara keseluruhan risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Buleleng dengan klasifikasi tinggi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut

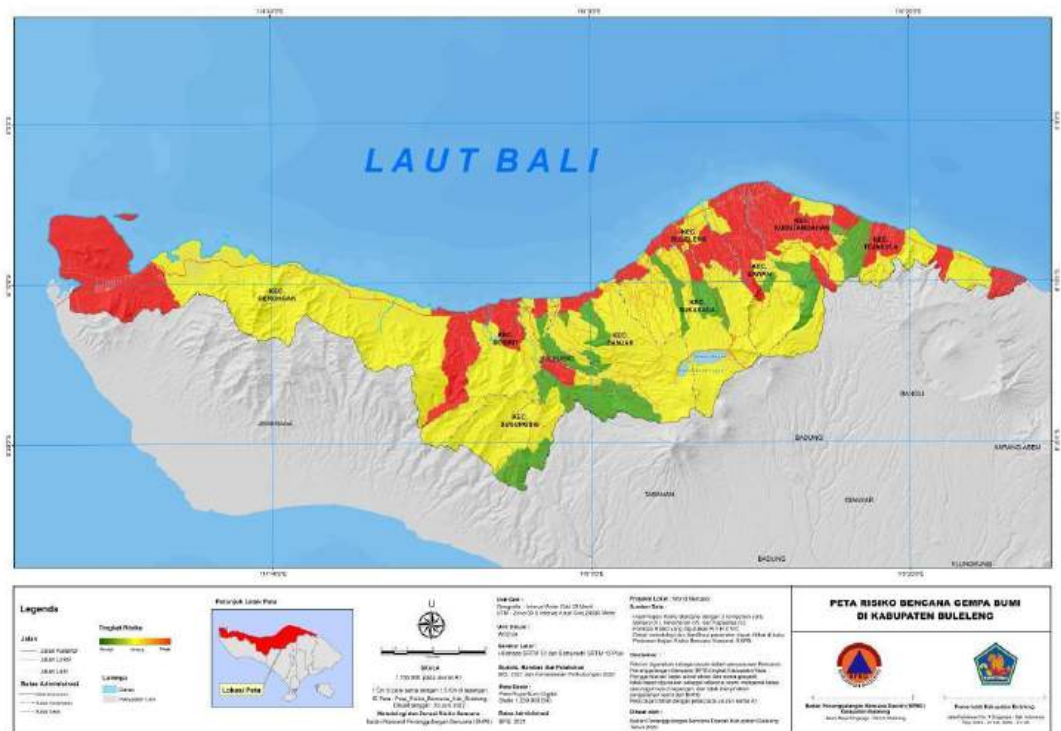
**Tabel 2.20**  
**Kelas Risiko Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	1315,42	12680,65	691,87	14.687,94	Sedang
2	Buleleng	2,76	1034,73	2512,87	3.550,36	Tinggi
3	Busungbiu	5266,00	7392,14	747,85	13.405,99	Rendah
4	Gerokgak	-	20394,46	14794,03	35.188,49	Sedang
5	Kubutambahan	1678,68	4719,71	5427,52	11.825,91	Tinggi
6	Sawan	237,49	50004,50	3611,31	53.853,3	Tinggi
7	Seririt	1223,93	8535,73	2239,52	11.999,18	Sedang
8	Sukasada	2226,78	12490,09	444,83	15.161,7	Sedang
9	Tejakula	1859,88	3918,34	3742,41	9.520,63	Tinggi
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Tinggi</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Pada Tabel diatas terlihat bahwa tingkat risiko bencana gempa bumi berada pada kelas risiko rendah dan sebagian tinggi, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi gempa bumi. Penting juga untuk diantisipasi, walaupun gempa bumi dan tsunami merupakan dua jenis ancaman yang berbeda, namun keduanya dapat terjadi secara berurutan. Umumnya jika terjadi bencana gempa bumi dengan skala yang tinggi, berada

dekat dengan daratan, dan terjadi di laut dangkal akan berpotensi memicu terjadi tsunami. Hal ini juga dikuatkan oleh data histori dampak bencana gempa bumi yang pernah melanda Kabupaten Buleleng. Dengan demikian dilakukan perlu dilakukan upaya mitigasi, sebagai upaya untuk meminimalisir dampak korban jiwa, serta mewujudkan terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana dan terpadu.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Gambar 2.14  
Peta Resiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Buleleng

- 6) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar potensi bahan yang terbakar (misalnya: pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Buleleng berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas sedang utamanya terjadi di daerah kering seperti di Kecamatan Gerokgak. Tingginya kebakaran

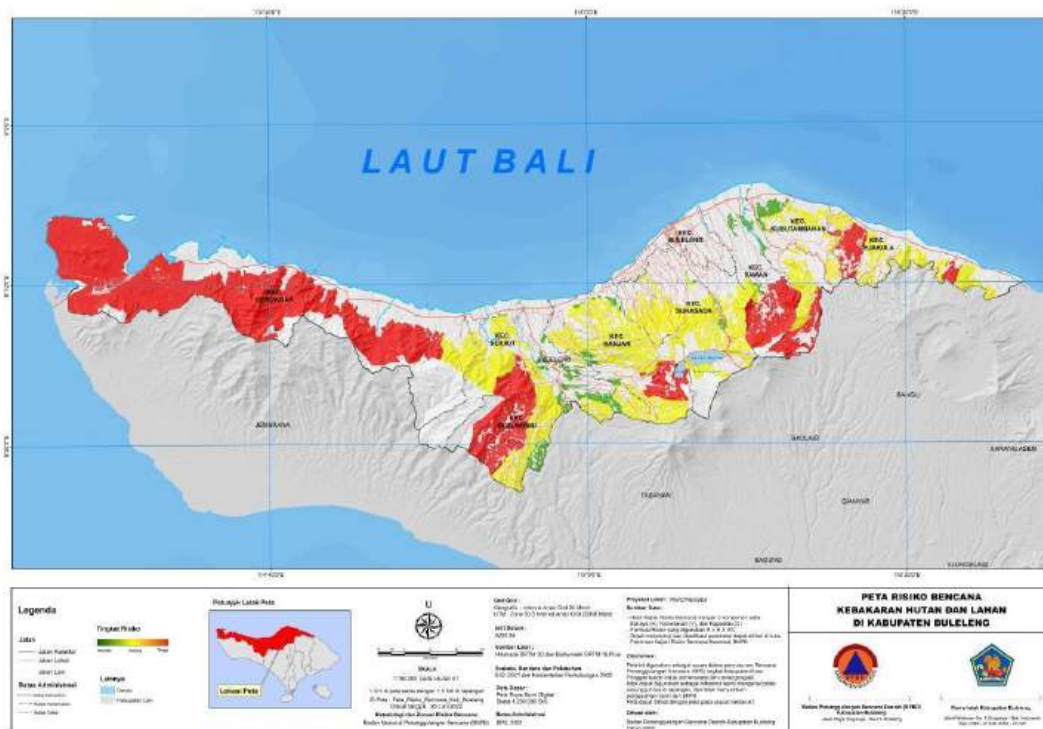
hutan dan lahan dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan yang didukung oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dalam Tabel berikut

**Tabel 2.21**  
**Kelas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	399,56	5937,75	1304,84	7.642,15	Sedang
2	Buleleng	16,28	-	-	16,28	Rendah
3	Busungbiu	999,97	3871,25	3444,88	8.316,1	Sedang
4	Gerokgak	-	1095,87	21996,22	23.092,09	Tinggi
5	Kubutambahan	660,66	2969,68	1244,64	4.874,98	Sedang
6	Sawan	250,92	305,12	2870,32	3.426,36	Rendah
7	Seririt	223,09	2964,52	1299,75	4.487,36	Rendah
8	Sukasada	159,41	5931,85	-	6.091,26	Sedang
9	Tejakula	-	2772,58	1468,97	4.241,55	Sedang
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Sedang</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat pada kelas risiko tinggi di semua kecamatan kecuali Kecamatan Banjar dan Buleleng berada pada kategori sedang. Hal ini masih perlu diwaspadai karena di wilayah Kabupaten Buleleng memiliki banyak area hutan, lahan perkebunan, dan area semak belukar yang mudah terbakar terlebih lagi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan. Selain dipicu oleh aktivitas manusia, kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan juga oleh cuaca kering dan panas.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Gambar 2.15  
Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  
di Kabupaten Buleleng

7) Kawasan Rawan Bencana Erosi/Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik gempa bumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut

Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kelas risiko tanah longsor Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut

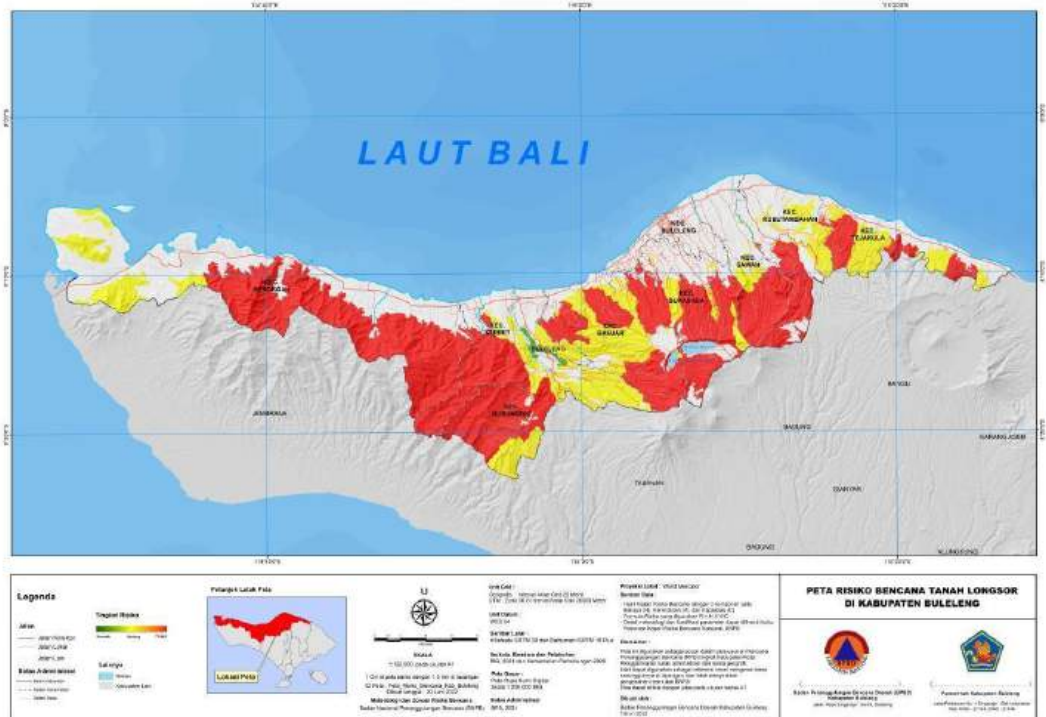
**Tabel 2.22**  
**Kelas Risiko Tanah Longsor Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	-	5206,18	6599,75	11.805,93	Sedang
2	Buleleng	5,92	-	-	5,92	Rendah
3	Busungbiu	246,21	4972,18	6829,89	12.048,28	Sedang
4	Gerokgak	-	3910,71	13829,21	17.739,92	Tinggi
5	Kubutambahan	-	2375,71	3351,30	5.727,01	Sedang
6	Sawan	-	864,28	3723,58	4.587,86	Sedang
7	Seririt	198,10	1839,76	6062,02	8.099,88	Sedang
8	Sukasada	1,47	1475,28	8638,06	10.114,81	Tinggi
9	Tejakula	-	3279,95	2897,42	6.177,37	Sedang
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Sedang</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Daerah yang memiliki tingkat potensi tinggi rawan bencana tanah longsor tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaen Buleleng. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Sukasada merupakan kecamatan yang paling sering menjadi sorotan terutama kejadian bencana tanah longsor sepanjang jalur Singaraja-Denpasar tepatnya di Desa Gitgit. Sesungguhnya kondisi geografis wilayah bagian selatan Kabupaten Buleleng hampir memiliki topografi yang seragam, hanya saja ada beberapa perbedaan yang menyebabkan kejadian bencana tanah longsor lebih sering terjadi di Kecamatan Sukasada terutama di Desa Gitgit. Salah satunya adalah karena terjadi kegiatan pemotongan lereng untuk jalan sehingga kemiringan lereng sepanjang jalan menjadi sangat terjal.

Selain itu adanya pembangunan jalan *shortcut* di bagian atas khususnya di Kecamatan Sukasada akan mempengaruhi diklus hidrologi dan resapan air. Hal ini juga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor yang merupakan jenis bencana dengan kejadian yang paling sering terjadi di Buleleng.



Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Gambar 2.16  
Peta Resiko Bencana tanah Longsor  
di Kabupaten Buleleng

8) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter *fast-onset disaster* atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti halnya Kabupaten Buleleng yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut.

Tingkat risiko tsunami diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas tsunami di Kabupaten Buleleng yang ditunjukkan dalam Tabel berikut

Tabel 2.23  
Kelas Risiko Tsunami Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjar	-	-	33,30	33,3	Tinggi
2	Buleleng	-	-	24,23	24,23	Tinggi
3	Busungbiu	-	-	-	-	Rendah

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
4	Gerokgak	-	340,98	440,92	781,9	Tinggi
5	Kubutambahan	-	-	88,32	88,32	Tinggi
6	Sawan	-	-	49,40	49,4	Tinggi
7	Seririt	-	-	74,00	74	Tinggi
8	Sukasada	-	-	-	-	Rendah
9	Tejakula	-	-	220,34	220,34	Tinggi
<b>Kabupaten Buleleng</b>						<b>Tinggi</b>

Sumber: Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Walapun dari sisi data kejadian bencana 5 tahun terakhir tidak ada potensi tsunami, namun jika memperhatikan data histori kejadian jangka panjang yaitu : Gempa bumi Bali utara 22 November 1815 memicu tsunami (10.253 orang meninggal); Gempa bumi Bali utara 1818 memicu tsunami 3,5 meter; Gempa bumi Bali utara 13 Mei 1857 memicu tsunami 3,4 meter (36 orang meninggal); dan Gempa bumi Bali utara 21 Januari 1917 memicu tsunami 2 meter (1500 orang meninggal), membuka wawasan bahwa sesungguhnya pemerintah Kabupaten Buleleng harus selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir yang berpotensi terdampak tsunami. Selain itu pemeliharaan alat peringatan dini yang sudah ada agar selalu diperhatikan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik.



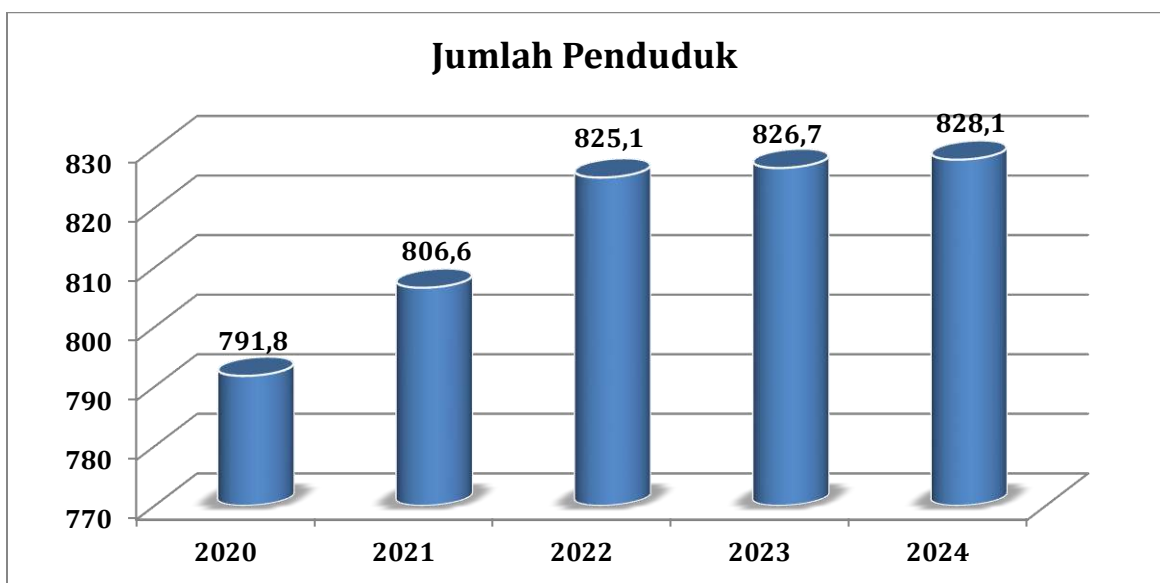
Sumber : Kajian Resiko Bencana Tahun 2022-2026

Gambar 2.17  
Peta Resiko Bencana Tsunami di Kabupaten Buleleng

### 2.1.2.Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena paling berperan dalam pembangunan baik sebagai subyek sekaligus obyek. Apabila tidak dikelola dengan baik jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah tersendiri dan menjadi beban pembangunan.

Perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 825.141 jiwa, dengan komposisi 414.775 jiwa Laki-laki dan 410.366 jiwa Perempuan, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng mencapai 826.740 jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 828.156 jiwa, terdiri dari 417.978 jiwa laki-laki (50,47%) dan 410.178 jiwa perempuan (49,53%) disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.18

Perkembangan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dapat dipergunakan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan jumlah penduduk disuatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (ribu)					Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Gerokgak	97,55	99,13	101,14	102,43	103.158	0,007
2	Seririt	93,41	95,67	98,38	95,21	94.880	-0,004
3	Busungbiu	52,69	53,90	55,36	53,38	52.830	-0,010
4	Banjar	86,21	87,68	89,54	88,10	88.034	-0,001
5	Sukasada	89,77	91,28	93,19	94,23	95.223	0,010
6	Buleleng	150,21	151,75	153,93	155,17	155.561	0,002
7	Sawan	80,17	82,26	84,76	85,68	85.566	-0,001
8	Kubutambahan	68,78	70,11	71,76	73,89	74.411	0,006
9	Tejakula	73,02	74,87	77,08	78,51	78.493	0,000
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>791,81</b>	<b>806,65</b>	<b>825,14</b>	<b>826,74</b>	<b>828.156</b>	<b>0,002</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

### b. Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam suatu populasi, biasanya dinyatakan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Berikut gambaran sex ratio untuk setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng

Tabel 2.25  
Sex Ratio Penduduk Kabupaten Buleleng, 2024

Kecamatan	Sex Ratio
Gerokgak	101,21
Seririt	100,68
Busungbiu	101,76
Banjar	101,73
Sukasada	101,53
Buleleng	101,85
Sawan	101,77
Kubutambahan	103,55
Tejakula	103,75
<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>101,90</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

### c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng yaitu 606 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Buleleng yaitu 3.314 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Busungbiu yaitu 269 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.26  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2024

	<b>Kecamatan</b>	<b>Persentase penduduk</b>	<b>Kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup></b>
	Gerokgak	12,46	289
	Seririt	11,46	849
	Busungbiu	6,38	269
	Banjar	10,63	510
	Sukasada	11,50	551
	Buleleng	18,78	3.314
	Sawan	10,33	925
	Kubutambahan	8,99	629
	Tejakula	9,48	804
	Kabupaten Buleleng	100,00	606

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

### d. Pendapatan Penduduk Perkapita

Pendapatan perkapita ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu daerah. Daerah yang memiliki nilai pendapatan daerah yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah penduduk pun menentukan tingkat kemakmuran dari daerah tersebut.

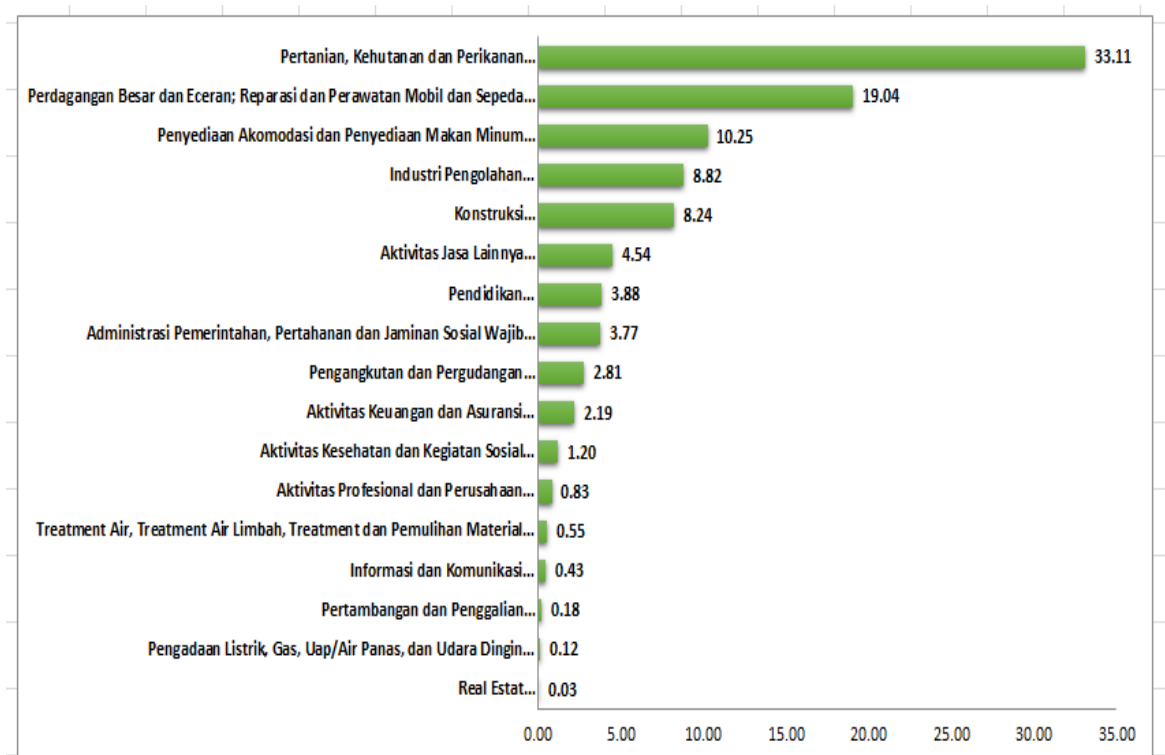
Tabel 2.27  
Pendapatan Perkapita Kabupaten Buleleng, 2020-2024

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)</b>	<b>Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)</b>	
			<b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>
1	2020	791,81	42,24	27,98
2	2021	806,65	41,89	27,35
3	2022	825,14	44,60	27,98
4	2023	830,20	47,41	28,78
5	2024	828,15	50,80	30,01

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2025

### e. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data Sakernas 2024, sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Buleleng bergerak pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 33,11 persen. Persentase penduduk bekerja pada sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 terdapat 41,07 persen penduduk bekerja yang bergelut di sektor ini. Sektor terbanyak kedua setelahnya adalah lapangan pekerjaan bidang perdagangan besar dan eceran yakni sebanyak 19,04 persen. Sektor ini mengalami peningkatan dari 12,18 persen pada tahun 2022. Pada posisi ketiga yakni sektor penyediaan akomodasi makan minum mengalami peningkatan dari 6,77 persen pada tahun 2022 menjadi 10,25 persen pada tahun 2024. Persentase penduduk bekerja di berbagai sector lapangan usaha tersaji dalam gambar berikut.



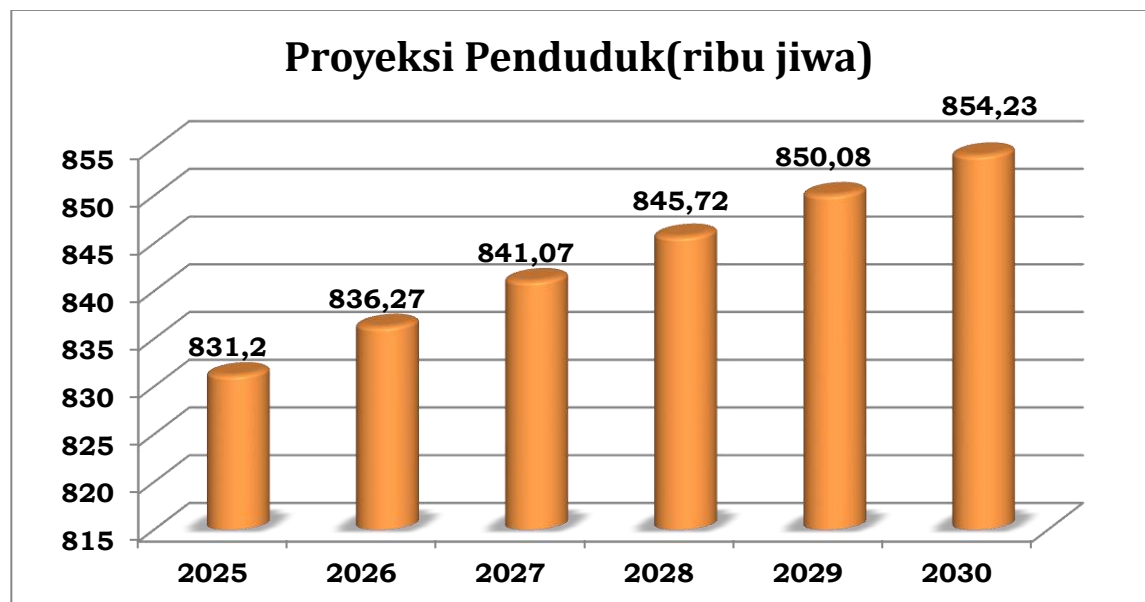
Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Gambar 2.19  
Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2024

#### f. **Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng**

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

Proyeksi penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan, termasuk dalam bidang Kesehatan terutama untuk menentukan kebutuhan fasilitas medis dan obat-obatan, Pendidikan untuk memperkirakan jumlah siswa dan kebutuhan guru, Ekonomi untuk merencanakan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja dan kebutuhan perencanaan lainnya. Dengan memahami proyeksi penduduk, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merencanakan kebijakan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Berikut ditampilkan proyeksi penduduk kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030.



Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2025-2030 Berdasarkan gambar diatas proyeksi penduduk meningkat dari tahun 2025 sebanyak 831.20 ribu jiwa dan menjadi sebanyak 854,23 ribu jiwa pada tahun 2030

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai kondisi makro ekonomi suatu wilayah yang mencerminkan kinerja pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.29

Tabel 2.28  
Pertumbuhan Ekonomi Buleleng dan Bali Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kabupaten Buleleng (%)	Provinsi Bali (%)
2020	-5,80	-9,34
2021	-1,27	-2,46
2022	3,11	4,84
2023	3,64	5,71
2024	5,04	5,48

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah mengarah lebih baik. Pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan yaitu mencapai 5,04% dibandingkan dengan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebesar 3,64%.

#### b. Struktur Perekonomian

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dengan Tahun Dasar 2010 dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori. Secara detail seperti dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.29  
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 - 2024

No.	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,28	22,54	21,54	20,90	20,40
B	Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,90	0,88	0,86	0,84
C	Industri Pengolahan	5,92	6,09	6,15	6,16	6,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	9,32	9,59	9,64	9,23	8,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,85	11,88	12,10	12,31	12,14
H	Transportasi dan Pergudangan	1,12	1,06	1,09	1,18	1,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,83	13,18	14,55	16,15	17,08
J	Informasi dan Komunikasi	6,14	6,35	5,98	5,73	5,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	4,16	4,63	5,04	5,45
L	Real Estate	4,72	4,84	4,74	4,60	4,48
M, N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,71	0,73	0,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	5,87	5,58	5,52	5,15
P	Jasa Pendidikan	7,96	8,13	7,66	7,11	6,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,44	2,57	2,48	2,42	2,35
R,S, T, U	Jasa Lainnya	1,82	1,87	1,99	2,06	2,08

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Struktur Perekonomian Kabupaten Buleleng, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali. Perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor non pertanian, khususnya Industri Pariwisata. Sedangkan struktur perekonomian di Kabupaten Buleleng didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kondisi ini terlihat dari sumbangannya yang paling besar dalam pembentukan PDRB

Tahun 2024, yaitu sebesar 20,40%, diikuti dengan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,08%, serta pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,14%. Dari sisi peningkatan kontribusi maka sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pergerakan positif yang berpotensi mengimbangi kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

**c. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani tahun 2024 NTP mencapai 95,41.

**d. Laju Inflasi**

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap konsumsi barang ekonomi dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara sederhana, inflasi didefinisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama dalam periode waktu tertentu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama. Data inflasi jangka panjang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat jangka panjang di daerah. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata di Kota Singaraja, dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.30**  
**Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2020-2024**

Wilayah Inflasi	Nilai Inflasi (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024

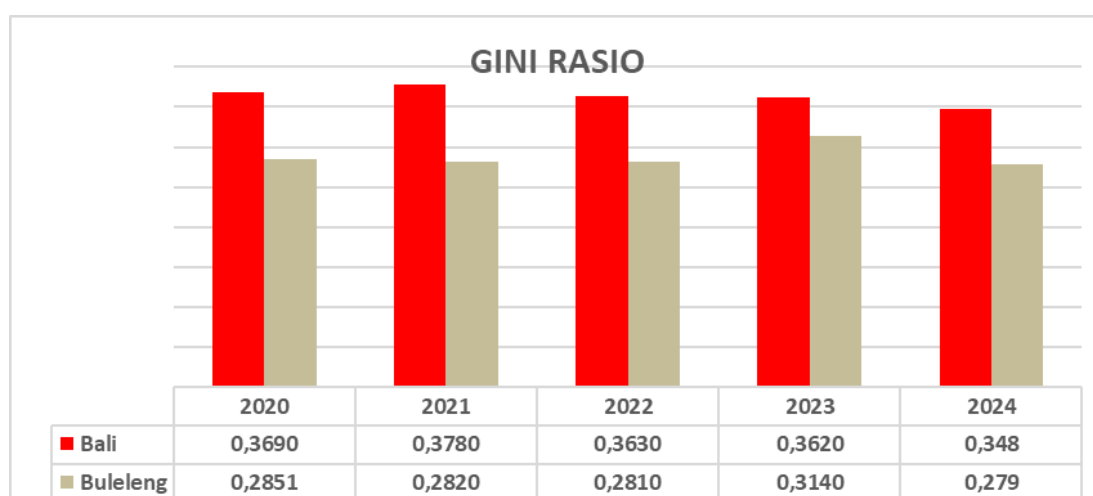
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Denpasar	0,55	2,01	6,44	2,54	2,34
Singaraja	2,48	2,39	4,63	4,31	1,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

#### e. Gini rasio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2020-2024 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2024, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,279 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,314, angka ini lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Bali sebesar 0,348. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2025

Gambar 2.20  
Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

**f. Angka Kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti: faktor kultural, alamiah, dan struktural serta adanya ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan yang lain-lainnya.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan internasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen dan berupaya untuk menguranginya melalui upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, menjadikan kemiskinan tersebut belum dapat terentaskan keseluruhan. Kompleksitas kemiskinan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (kebijakan ekonomi), kondisi politik serta keamanan dan ketertiban suatu bangsa maupun daerah.

Kondisi kemiskinan Kabupaten Buleleng lima tahun terakhir (2020-2024) telah menunjukkan penurunan tiap tahunnya, kondisi tersebut selaras dengan dengan penurunan angka kemiskinan Provinsi Bali, hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng sudah mengalami peningkatan. Secara rinci data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024 di sajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.31  
Jumlah Penduduk Miskin  
Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024

Tahun	Penduduk Miskin Buleleng		Penduduk Miskin Bali	
	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
2020	35.250	5,32	165.190	3,78
2021	40.920	6,12	201.970	4,53
2022	41.680	6,21	205.680	4,57
2023	39.520	5,85	193.780	4,25
2024	36.550	5,39	184.430	4,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, 2025

Secara relatif penduduk miskin di Kabupaten Buleleng lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bali. Karena itu penanggulangan kemiskinan masih perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pembangunan Kabupaten Buleleng.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada RPJMD tahun 2025-2029. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin akan terus menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Buleleng. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Di samping itu, kemiskinan juga merupakan masalah sosial-ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang sangat bervariasi.

Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng adalah 1) pengurangan beban biaya bagi penduduk miskin dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi, 2) meningkatkan pendapatan atau daya beli penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik, dan 3) meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan dengan pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Bentuk riil tersebut dilaksanakan melalui program Penanggulangan Kemiskinan.

#### **g. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

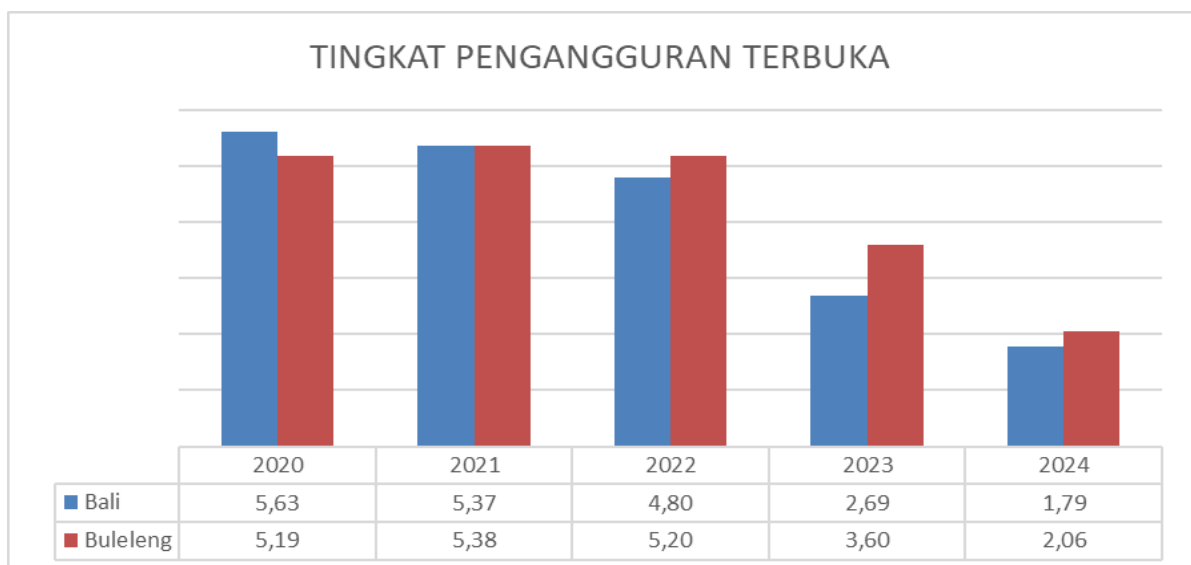
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang telah memasuki usia 15 tahun ke atas dikategorikan sebagai penduduk usia kerja, dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap penduduk dalam kategori usia kerja dan siap melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja.

Tahun 2023 Penduduk Usia Kerja Kabupaten Buleleng sebanyak 627.160 jiwa dan Tahun 2024 Penduduk Usia Kerja meningkat menjadi sebanyak 632.699 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebesar 75,49% dan Tahun 2024 meningkat menjadi 79,77%. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2024 sebesar 2,06% menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 3,60%. Hal ini tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.32  
Perbandingan Penduduk Usia Kerja,  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat  
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buleleng 2020-2024

No	TAHUN	PENDUDUK USIA KERJA (JIWA)	TPT (%)	TPAK (%)
1	2020	509.835	5,19	75,07
2	2021	514.726	5,38	73,08
3	2022	519.615	5,20	75,38
4	2023	627.160	3,60	75,49
5	2024	632.699	2,06	79,77

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, 2025



Gambar 2.21  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buleleng Tahun  
2020-2024

**h. Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Kemajuan pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponen tersebut.

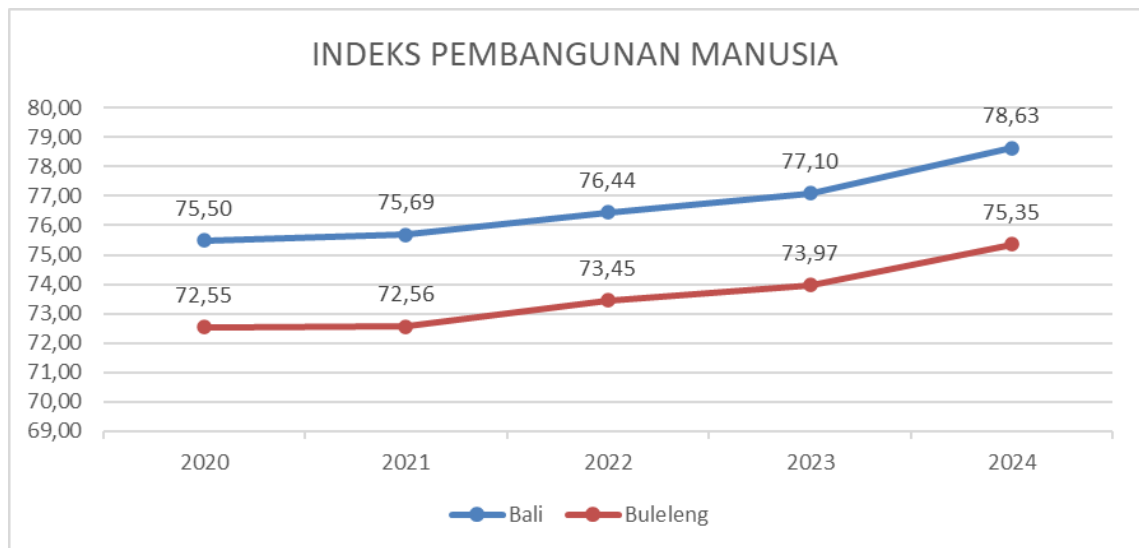
Umur Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2024 Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng tercatat 74,71 meningkat dibandingkan Tahun 2023 mencapai 74,65.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2024, Harapan Lama Sekolah Buleleng tercatat 13,30 dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,69 meningkat dibandingkan Tahun 2023 mencapai 13,27 dan 7,57.

Dimensi yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran per Kapita masyarakat Buleleng tercatat sebesar Rp12,99 juta per tahun, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp13,98 juta per tahun.

Kemajuan pembangunan manusia Kabupaten Buleleng periode 2020-2024 secara umum berada pada level “tinggi” karena nilai IPM berada diantara 70,00 sampai 80,00. Pencapaian IPM kabupaten Buleleng cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 sebesar 72,55 mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 75,35 namun masih lebih rendah apabila dibandingkan IPM Provinsi

Bali. Perbandingan perkembangan IPM Kabupaten Buleleng dan Provinsi dalam lima tahun terakhir tersaji dalam Gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

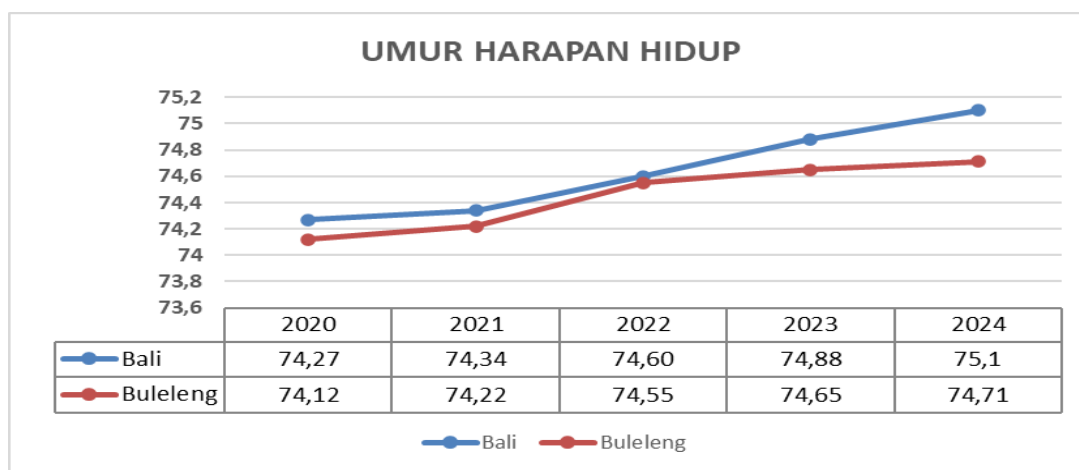
Gambar 2.22  
IPM Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

## 2.2.2.Kejahteraan Sosial Budaya

### a. Indeks Keluarga sehat

#### 1) Kualitas Kesehatan (Umur Harapan Hidup)

Peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kabupaten Buleleng ada beberapa indikator yang dapat dilihat, antara lain Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian IBU (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), sanitasi kesehatan, pelayanan air bersih dan Perilaku yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS). UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses dibidang pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 mencapai 74,71 namun masih berada di bawah UHH Provinsi Bali 75,10.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

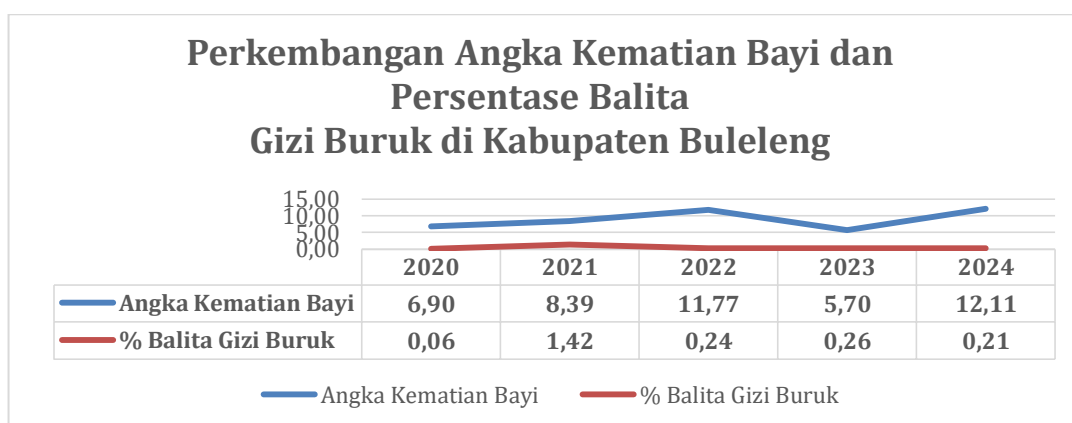
Gambar 2.23  
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2020-2024

## 2) Angka Bayi dan Persentase Balita Gizi Buruk

Angka Kematian bayi menjadi salah satu indikator kesehatan yang cukup penting, dengan ini dapat diketahui dari jumlah kematian karena kelahiran per jumlah 1000 kelahiran di wilayah tertentu dalam waktu tertentu.

Angka kematian bayi selalu diupayakan agar dapat diturunkan, dimana jumlah kelahiran hidup dan jumlah kematian bayi pada tahun 2024 adalah 12,11 per 1000 kelahiran hidup bayi. Sedangkan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebesar 0,21%.

Berikut grafik tentang Angka Kematian Bayi dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng.

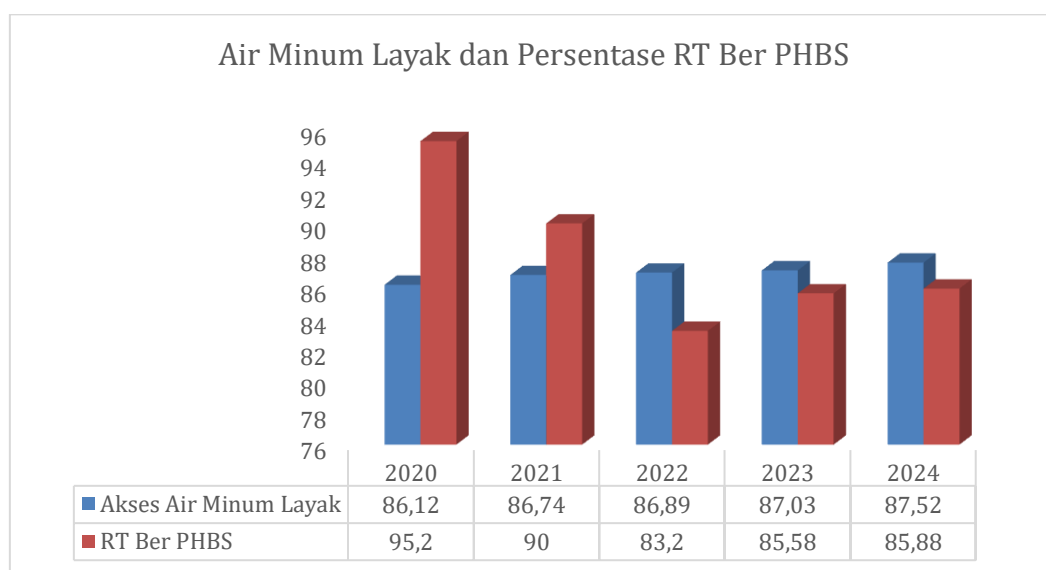


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Buleleng, 2024

Gambar 2.24  
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

### 3) Sanitasi, Air Bersih dan PHBS

Salah satu Indikator kesehatan adalah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak). Kedua kriteria ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, 2024  
Dinas Kesehatan Kab. Buleleng, 2024

Gambar 2.25  
Persentase RT ber PHBS dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng  
Tahun 2020-2024

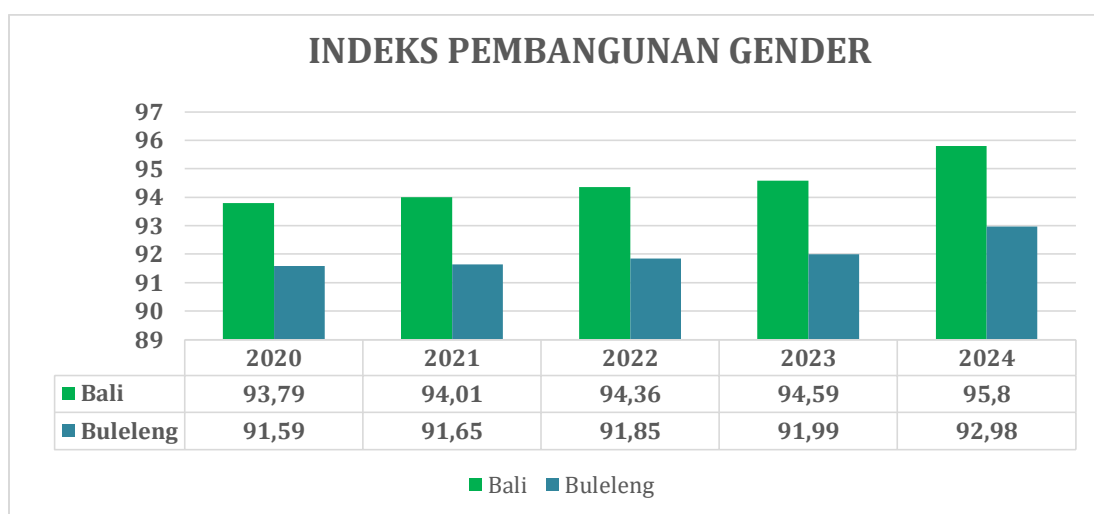
Indikator kesehatan berikutnya adalah Penduduk yang Berperilaku Hidup Sehat (PHBS). Rumah tangga dikatakan berPHBS adalah RT yang memiliki beberapa kriteria PHBS, meliputi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menggunakan air bersih, jamban sehat, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan lain-lain.

#### b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Pada tahun 2020, angka IPG tercatat sebesar 91,59 dan pada tahun 2024 naik menjadi 92,58. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena distribusi peran dalam pembangunan berbasis gender semakin

optimal/semakin seimbang.

IPG merupakan indeks komposit (diturunkan dari angka IPM, hanya menggunakan data penduduk perempuan) sehingga perlu dikaji beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Komponen kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekonomi relatif tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di dunia kerja masih perlu ditingkatkan.



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2.26  
Perkembangan IPG Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Angka IPG ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki laki. Angka yang ada dapat diartikan bahwa ketika angka IPG makin mendekati angka 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Sebaliknya apabila angka IPG semakin menjauhi dari angka 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Angka 100 dijadikan patokan karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

##### a. PDRB

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng digunakan pendekatan penghitungan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan cerminan atau

gambaran secara makro mengenai perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, karena PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian daerah tersebut. PDRB Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.33**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2020 - 2024**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</b> (Miliar Rp.)	<b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan</b> (Miliar Rp.)
2020	33.306,17	22.066,16
2021	33.337,29	21.797,73
2022	35.805,28	22.463,38
2023	38.351,11	23.281,43
2024	41.387,75	24.453,82

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, 2025

Dari Tabel 2.32 dapat dilihat PDRB Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan menggunakan Tahun Dasar 2010, pada Tahun 2020 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Buleleng sebesar Rp 33.306,17 Miliar lebih, meningkat menjadi sebesar Rp 41.387,75 Miliar lebih di Tahun 2024 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 22.066,16 Miliar lebih, meningkat menjadi Rp 24.453,82 Miliar lebih pada Tahun 2024.

#### **b. PDRB per Kapita**

PDRB per Kapita penduduk Kabupaten Buleleng, yaitu PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp42,24 juta pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp50,79 juta pada Tahun 2024 dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp27,98 juta pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp30,01 juta pada Tahun 2024 seperti tersaji dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.34**  
**PDRB per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2020 - 2024**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>PDRB per kapita Harga Berlaku</b> (Juta Rp)	<b>PDRB per kapita Harga Konstan</b> (Juta Rp)
1	2020	42,24	27,98
2	2021	41,89	27,35
3	2022	44,60	27,98
4	2023	47,41	28,78
5	2024	50,79	30,01

Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka, 2025

#### **c. Rasio Kewirausahaan**

Rasio wirausaha terhadap total penduduk di Buleleng masih

sangat rendah, data tahun 2022 menunjukkan rasio kewirausahaan di Buleleng baru 1,25 persen. Angka ini jauh di bawah capaian nasional sebesar 3,47 persen dan masih jauh dari kategori negara maju yang rasio kewirausahaan minimal 12 persen dari total populasi. Pemerintah pun terus mendorong akan rasio tersebut terus naik guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemudahan memperoleh izin berusaha juga terus diupayakan untuk menarik minat masyarakat berwirausaha. Termasuk dalam mendirikan badan usaha sebagai prasyarat untuk memperoleh akses pembiayaan dari industri perbankan.

### 2.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

#### a. Indeks Pendidikan

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal dapat dilihat dari kualitas dan angka harapan lama sekolah. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Data menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan dari tahun 2020, yaitu 13,07 tahun menjadi 13,30 tahun pada tahun 2024. Dengan demikian, usia sekolah penduduk meningkat, demikian juga jika dilihat dari rata-rata Lama Sekolah (RLS), dari 7,24 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,69 pada tahun 2024, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali, yaitu 9,54. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.35

Tabel 2.35  
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata  
Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	HLS dan RLS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Sekolah					
	Kabupaten Buleleng	13,07	13,08	13,26	13,27	13,30
	Provinsi Bali	13,33	13,40	13,48	13,58	13,62
2	Rata-rata Lama Sekolah					
	Kabupaten Buleleng	7,24	7,25	7,56	7,57	7,69
	Provinsi Bali	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng, 2025

Jika dilihat pada komponen rata rata lama sekolah di Kabupaten Buleleng tahun 2024 adalah sebesar 7,69 level rata-rata lama sekolah

yang lebih rendah dari harapan lama sekolah sebesar 13,30 disebabkan antara lain adalah keberadaan penduduk berusia tua yang hanya mengenyam pendidikan dasar atau bahkan belum mengenyam pendidikan sama sekali.

## **b. Angka Literasi / Numerisasi**

Proses pembangunan Pendidikan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaiannya. Indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta indikator input pendidikan salah satunya yakni ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, yang mencakup guru, ruang kelas, dan bangunan sekolah.

Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk yang bisa membaca dan menulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi dan wawasan. Membaca menjadi hal krusial yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, karena dengan semakin banyak seseorang membaca akan semakin luas pengetahuannya. Kegiatan membaca akan mengembangkan kualitas diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan menulis menjadi lebih baik. Indikator yang mampu mengukur capaian kemampuan membaca maupun menulis masyarakat di suatu wilayah adalah indikator Angka Melek Huruf (AMH).

### **1) Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Tercata AMH Kabupaten Buleleng tahun 2020 mencapai 92,13%, namun mengalami penurunan ditahun 2021 menjadi 83,72%. Pada tahun 2022 Angka Melek Huruf Buleleng mencapai 95,31%.

### **2) Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020- 2024

No	Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sedrajat	99,69	99,98	99,41	99,83	99,68
2	SMP/MTs/Sederajat	90,85	93,24	96,53	95,86	96,44

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Buleleng, persentase pencapaian APS SD/MI menunjukkan penurunan, dimana tahun 2023 sebesar 99,83% dan pada tahun 2024 mencapai 99,68%. Untuk kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dimana persentase pencapaian APS SMP/MTs tahun 2023 sebesar 95,86% dan pada tahun 2024 mencapai 96,44%.

### 3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase.

Tabel 2.37  
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan  
di Kabupaten Buleleng, 2020-2024

No	Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sedrajat	95,16	94,45	95,10	95,12	98,83
2	SMP/MTs/Sederajat	86,40	87,15	86,87	85,44	87,30
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	79,81	79,22	78,58	64,34	66,01

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI/Sedrajat di Kabupaten Buleleng persentase pencapaian APM SD/MI/Sedrajat menunjukkan peningkatan dimana tahun 2020 sebesar 95,16% dan pada tahun 2024 mencapai 98,83%, persentase pencapaian APM SMP/MTs mengalami peningkatan dimana tahun 2020 sebesar 86,40% menjadi 87,30% pada tahun 2024. Begitu juga halnya terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat persentase pencapaian APM

SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2020 mencapai 79,81% menurun menjadi 66,01% pada tahun 2024.

#### 4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama

Tabel 2.38  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Buleleng, 2020- 2024

No	Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sedrajat	101,28	101,24	101,76	99,80	102,00
2	SMP/MTs/Sederajat	95,26	102,99	100,51	108,42	102,64
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	98,72	97,43	98,24	85,82	92,07

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI/Sedrajat di Kabupaten Buleleng persentase pencapaian APK SD/MI/Sedrajat menunjukkan peningkatan dimana tahun 2020 sebesar 101,28% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 102,00%, persentase pencapaian APK SMP/MTs mengalami peningkatan dimana tahun 2020 sebesar 95,26% dan pada tahun 2024 mencapai 102,64%. Pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami penurunan dimana persentase pencapaian APK SMA/SMK/MA/Sederajat tahun 2020 mencapai 98,72% dan tahun 2024 menjadi 92,07%.

#### c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buleleng relatif mengalami peningkatan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2024. Di tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 75,49% dan meningkat menjadi 79,77 pada Tahun 2024.

Tabel 2.39  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Kabupaten Buleleng	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	75,07	73,08	75,38	75,49	79,77

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng, 2025



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2.27  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPAK) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

#### d. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Indikator yang kerap disebut sebagai *Dependency Ratio* ini berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhannya ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *dependency ratio* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif.

Dari distribusi penduduk tersebut maka dapat diketahui angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebesar 46,02%, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 orang penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya.



Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025 (data diolah)

Gambar 2.28  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 – 2024

### 2.1.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

#### a. Kondisi Sarana Pendukung

##### 1) Sarana Pendidikan

Pengembangan dan pembangunan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, produktif, cerdas dan berakhlak mulia. Pengembangan dan pembangunan pendidikan selama ini telah diarahkan dalam rangka menciptakan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng juga memperhatikan sasaran-sasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran Sustainable Development Goals (SDG's).

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buleleng mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu sarana untuk

meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. Parameter keberhasilan pembangunan pendidikan dapat diukur dari tingkat partisipasi sekolah, penduduk usia belajar, dan pendidikan tertinggi yang pernah diikuti.

Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan senantiasa diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dimana sampai dengan Tahun 2023 telah terbangun sarana dan prasarana sekolah sebagai berikut:

**a. Ketersediaan Sekolah**

Tabel 2.40  
Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, 2024/2025

No.	Kecamatan	Sekolah, guru, murid								
		Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	Gerokgak	2	217	13	17	661	52	19	878	65
2	Seririt	5	252	25	23	839	67	28	1.091	92
3	Busungbiu	2	150	15	16	371	39	18	521	54
4	Banjar	6	335	40	15	669	47	21	1.004	87
5	Sukasada	3	132	15	25	1.025	87	28	1.157	102
6	Buleleng	6	547	44	54	2.745	223	60	3.292	267
7	Sawan	-	-	-	19	811	56	19	811	56
8	Kubutambahan	4	222	18	12	495	34	16	717	52
9	Tejakula	2	172	16	10	540	28	12	712	44
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>30</b>	<b>2.027</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>8.156</b>	<b>633</b>	<b>221</b>	<b>10.183</b>	<b>819</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.41  
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kabupaten Buleleng, 2024/2025

No.	Kecamatan	Sekolah, guru, murid								
		Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	Gerokgak	45	7.361	429	-	-		45	7.361	429
2	Seririt	50	6.799	462	-	-		50	6.799	462
3	Busungbiu	45	3.692	383	-	-		45	3.692	383

No.	Kecamatan	Sekolah, guru, murid								
		Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
4	Banjar	59	6.854	530	-	-		59	6.854	530
5	Sukasada	58	7.829	542	2	315	22	60	8.144	564
6	Buleleng	68	12.470	746	7	1.520	102	75	13.990	849
7	Sawan	45	6.649	432	-	-		45	6.649	432
8	Kubutambahan	45	6.416	420	-	-		45	6.416	420
9	Tejakula	41	6.122	382	-	-		41	6.122	382
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>456</b>	<b>64.192</b>	<b>4.326</b>	<b>9</b>	<b>1.835</b>	<b>124</b>	<b>465</b>	<b>66.027</b>	<b>4.451</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.42  
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP di Kabupaten Buleleng, 2024/2025

No.	Kecamatan	Sekolah, guru, murid								
		Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	Gerokgak	7	3.628	200	2	149	12	9	3.777	212
2	Seririt	4	3.170	174	2	114	16	6	3.284	190
3	Busungbiu	5	2.126	118	-	-	-	5	2.126	118
4	Banjar	7	3.758	213	-	-	-	7	3.758	213
5	Sukasada	7	2.664	169	2	287	17	9	2.951	186
6	Buleleng	8	7.969	448	7	619	62	15	8.588	510
7	Sawan	5	3.136	184	1	102	4	6	3.238	188
8	Kubutambahan	8	3.292	208	-	-	-	8	3.292	208
9	Tejakula	6	3.142	151	-	-	-	6	3.142	151
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>57</b>	<b>32.885</b>	<b>1.865</b>	<b>14</b>	<b>1.271</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>34.156</b>	<b>1.976</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.43  
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA, 2024/2025

No	Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	Gerokgak	2	1.141	79	-	-	-	2	1.141	79
2	Seririt	1	1.123	59	1	91	11	2	1.214	70
3	Busungbiu	2	1.010	77	-	-	-	2	1.010	77

No	Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
4	Banjar	2	1.593	113	1	178	17	3	1.771	130
5	Sukasada	1	313	36	2	483	28	3	796	64
6	Buleleng	4	4.867	287	5	479	47	9	5.346	334
7	Sawan	1	419	41	1	8	5	2	427	46
8	Kubutambahan	2	1.092	88	1	137	10	3	1.229	98
9	Tejakula	2	1.164	74	-	-	-	2	1.164	74
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>17</b>	<b>12.722</b>	<b>854</b>	<b>11</b>	<b>1.376</b>	<b>118</b>	<b>28</b>	<b>14.098</b>	<b>972</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.44  
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buleleng, 2024/2025

No	Kecamatan	Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1	Gerokgak	1	1.077	59	3	605	32	4	1.682	91
2	Seririt	2	2.086	123	1	138	13	3	2.224	136
3	Busungbiu	1	558	39	-	-	-	1	558	39
4	Banjar	1	236	16	1	360	17	2	596	33
5	Sukasada	1	1.420	100	2	342	18	3	1.762	118
6	Buleleng	3	5.415	339	3	731	49	6	6.146	388
7	Sawan	1	1.035	66	2	24	10	3	1.059	76
8	Kubutambahan	2	1.390	98	-	-	-	2	1.390	98
9	Tejakula	2	1.116	74	-	-	-	2	1.116	74
<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>14</b>	<b>14.333</b>	<b>914</b>	<b>12</b>	<b>2.20</b>	<b>139</b>	<b>26</b>	<b>16.533</b>	<b>1.053</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

## b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar/MI atau SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk usia dasar (7-12 tahun) dan umur 13-15 tahun (SMP/MTs) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan bersangkutan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.45  
Ketersediaan Sekolah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	484	467	466	465	465
1.2	Jumlah Murid	68.722	68.416	67.827	67.111	66.027
1.3	Rasio (%)	71.24	71,40	69,00	69,63	73,68
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	75	73	70	71	71
2.2	Jumlah Murid	32.687	33.415	33.781	33.843	34.156
2.3	Rasio (%)	20.90	25,84	21,94	20,12	28,15

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Dari data yang ada untuk tingkat umur 7-12 tahun daya tampung sekolah terhadap murid sudah memadai dengan rasio 73,68% dan berada di atas rasio ideal (52) per 10.000 penduduk usia 7-12. Sedangkan untuk tingkat umur 13-15 tahun berkisar rasio 28,15% dan masih berada di bawah rasio ideal 52 atau tersedia 52 SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15, artinya ketersediaan gedung sekolah belum memadai.

## c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid dapat berpengaruh pada kualitas pelaksanaan belajar mengajar yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas hasil pendidikan sekolah. Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.46  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten  
Buleleng Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	4.424	4.341	4.304	4.294	3.945
1.2.	Jumlah Murid	68.722	68.416	67.827	67.111	66.050
1.3.	Rasio	1:18	1:17	1:18	1:22	1:23
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.943	1.793	1.975	1.993	1.878
2.2.	Jumlah Murid	32.687	33.415	33.781	33.843	34.042
2.3.	Rasio	1:18	1:19	1:20	1:19	1:20

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 hingga 2024 tampak berfluktuasi pada kisaran 1:18 sampai dengan 1:23. Sementara itu, data menunjukkan rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tampak lebih tinggi, yaitu antara 1:18 sampai 1:20. Hal ini menunjukkan rasio guru dan murid di Kabupaten Buleleng sudah memenuhi harapan, yaitu 1:23 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan 1:20 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs.

## 2) Sarana Kesehatan

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan, seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.47  
Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan					
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Gerokgak		-	2	2	5	7
2	Seririt	2	-	3	3	7	6
3	Busungbiu		-		2	9	1
4	Banjar		-		2	9	3
5	Sukasada		-	2	2	11	4
6	Buleleng	5	1	5	3	6	14
7	Sawan	1	-		2	6	5
8	Kubutambahan		-		2	11	2
9	Tejakula		-		2	8	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>44</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.48  
Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis						
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian	Ahli gizi	Ahli teknologi laboratorium
1	Gerokgak	10	2	44	58	7	1	3
2	Seririt	56	10	122	103	23	6	10
3	Busungbiu	7	2	17	27	3	2	3
4	Banjar	13	2	20	27	4	4	2
5	Sukasada	10	6	22	38	4	2	2
6	Buleleng	261	25	956	301	107	50	85
7	Sawan	30	7	57	76	7	5	9
8	Kubutambahan	8	2	18	30	4	4	3
9	Tejakula	7	1	25	38	4	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>402</b>	<b>57</b>	<b>1.281</b>	<b>698</b>	<b>163</b>	<b>77</b>	<b>120</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

### 3) Sarana Peribadatan

Pertambahan pemeluk agama sebagai konsekuensi pertambahan jumlah penduduk akan dibarengi dengan kebutuhan dan ketersediaan jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Buleleng. Jumlah sarana peribadatan Tahun 2024 sebanyak 1.702 unit. Jumlah sarana peribadatan tersebut pada umumnya adalah Pura yaitu sebanyak 1.409 unit, Masjid 73 unit, Mushola yaitu sebanyak 134 unit, menyusul Gereja Protestan sebanyak 67 unit, Gereja Katolik sebanyak 1 unit dan vihara sebanyak 18 unit seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.49  
Jumlah sarana peribadatan Kabupaten Buleleng tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Peribadatan					
		Pura	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Wihara
1	Gerokgak	89	21	82	6	-	-
2	Seririt	173	8	2	7	-	-
3	Busungbiu	266	1	-	4	-	-
4	Banjar	178	3	5	7	-	5
5	Sukasada	110	10	20	8	-	2
6	Buleleng	101	22	19	25	1	10
7	Sawan	116	1	-	8	-	-
8	Kubutambahan	185	3	-	2	-	1
9	Tejakula	191	4	6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.409</b>	<b>73</b>	<b>134</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

#### 4) Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan salah satu indikator penataan perdagangan dalam Kabupaten Buleleng, sarana berupa pasar rakyat, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang yang ada. Jumlah sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang ada di Kabupaten Buleleng tahun 2024 secara rinci tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.50  
Jumlah sarana perdagangan Kabupaten Buleleng tahun 2024

Kecamatan	Jenis sarana perdagangan			
	Pasar Kabupaten	Pasar Desa	Pasar Tenten	Pasar Hewan
Gerokgak	-	5	-	-
Seririt	1	7	-	-
Busungbiu	-	1	-	-
Banjar	1	3	-	-
Sukasada	1	3	-	1
Buleleng	8	4	-	-
Sawan	1	8	-	-
Kubutambahan	1	2	-	-
Tejakula	-	9	-	-
<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

#### b. Kondisi Pusat Permukiman

Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas 10.960,72 ha meliputi:

- Kawasan permukiman perkotaan

- Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di perkotaan Singaraja;
- Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Seririt;
- Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sangsit, dan Tejakula

- Kawasan pemukiman perdesaan

Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni.

Rencana kawasan permukiman meliputi: rencana kawasan terbangun yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman penduduk perkotaan maupun perdesaan seluas 7.873,49 Ha yang tersebar di semua kecamatan.

- Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/201/HK/2022 Tahun 2022 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng Tahun 2021. Dalam SK Bupati tersebut, terdapat 6 (Enam) lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51  
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Buleleng

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Lingkungan Kampung Anyar	18.56	Kampung Anyar	Buleleng	Kumuh Ringan
2	Lingkungan Kampung Baru	10.82	Kampung Baru	Buleleng	Kumuh Ringan
3	Lingkungan Kelurahan	14.82	Penarukan	Buleleng	Kumuh Ringan

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
	Penarukan				
4	Lingkungan Desa Sepang	12.4	Sepang	Buleleng	Kumuh Ringan
5	Lingkungan Kelurahan Seririt	17.69	Seririt	Buleleng	Kumuh Ringan
6	Lingkungan Desa Gerokgak	7.29	Gerokgak	Buleleng	Kumuh Ringan
	<b>TOTAL</b>	<b>81.58</b>			

Sumber: SK Bupati Buleleng Nomor 050/201/HK/2022, Tahun 2022

### c. Kondisi Sistem Jaringan Transportasi

#### 1) Sistem Jaringan Jalan;

##### a) Kondisi Jalan

Prasarana infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi empat sesuai dengan status kewenangannya, yaitu jalan nasional/jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan non status. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jalan kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/240/HK/2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Buleleng adalah sepanjang 949,82 km pada tahun 2023. Panjang ini berkurang dari panjang jalan pada tahun 2022 sepanjang 1.136,60 km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 590/997/HK/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten. Panjang jalan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.52  
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Buleleng

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Panjang Jalan (Km)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	156,34	156,34	156,34	146,61	146,61
Provinsi	106,65	106,47	106,47	112,27	91,45
Kabupaten/Kota	1.136,60	1.136,60	1.136,60	949,82	949,82
<b>Jumlah total</b>	<b>1.399,59</b>	<b>1.399,41</b>	<b>1.399,41</b>	<b>1.208,70</b>	<b>1.187,88</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2025

##### b) Kondisi Jembatan

Prasarana infrastruktur jembatan di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi tiga yaitu jembatan nasional, jembatan provinsi, dan jembatan kabupaten. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah jembatan kabupaten dengan total panjang jembatan sebesar 949,82 m pada tahun 2023.

Kondisi jembatan Kabupaten Buleleng dalam kondisi mantap sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 77,17% atau sepanjang 723,97 m. Persentase ini menurun dari kondisi jembatan mantap pada tahun 2022 sebesar 95,02% atau sepanjang 1.634,87 m. Lebih jelasnya kondisi jembatan pada dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.53  
Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jembatan Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi baik (m)	508	1204,67	1204,67	619,82	1.224,97
	Persentase (%)	41,21	73,69	73,69	65,26	74,93
2	Kondisi sedang (m)	443,85	348,8	348,8	113,15	340,5
	Persentase (%)	36,00	21,34	21,34	11,91	20,83
3	Kondisi Rusak Ringan (m)	281,00	69,37	69,37	87,385	69,37
	Persentase (%)	22,79	4,24	4,24	9,2	4,24
4	Kondisi Rusak Berat (m)	-	12	12	129,565	-
	Persentase (%)	-	0,73	0,73	13,63	-
5	Kondisi mantap (m)	951,85	1.161,88	1.553,50	723,97	1.565
	Persentase (%)	77,21	71,07	95,02	77,17	95,76
Total Panjang Jembatan (m)		1.232,85	1.634,87	1.634,87	949,82	1.634,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2024

### c) Terminal

Jumlah terminal di Kabupaten Buleleng sebanyak 4 buah yang tersebar dibeebrapa lokasi yaitu:

1. Terminal Barang Baktiseraga di Kecamatan Buleleng;
2. Terminal Penumpang Banyuasri di Kecamatan Buleleng;
3. Terminal Penumpang Penarukan di Kecamatan Buleleng; dan
4. Terminal Penumpang Sukasada di Kecamatan Sukasada.

### d. Kondisi Sistem Jaringan Energi;

Perwujudan Sistem Jaringan Energi, meliputi:

1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:

- Peningkatan pelayanan jaringan distribusi gas; dan
  - Menyediakan pasokan gas sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik yang ada dan kebutuhan gas lainnya dalam rangka mewujudkan energi bersih.
2. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan, meliputi:
- Pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga baru di wilayah kabupaten;
  - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - Pengembangan gardu listrik.

Tabel 2.54  
Data Perkembangan Kelistrikan Dusun/Banjar  
di Kabupaten Buleleng Tahun 2024

JUMLAH DESA	JUMLAH DUSUN	LISTRIK PLN (KWh)		
		DAYA TERPASANG	PRODUKSI LISTRIK	LISTRIK TERJUAL
148	620	372.597.110	462.607.927	440.125.181,85

Sumber Data: PT PLN (Persero) Area Bali Utara, 2024

#### e. Kondisi Sistem Jaringan Telekomunikasi;

Telekomunikasi merupakan kegiatan pelayanan lalu lintas informasi dan berita yang memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan kemasyarakatan baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang. Peningkatan layanan Telekomunikasi telah dapat mempercepat arus informasi sampai keseluruhan Kecamatan/Desa di Kabupaten Buleleng. Berikut data penyelenggaraan akses free wi-fi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.55  
Lokasi Penyelenggaraan Akses Free Wifi Bali Smart Island  
di Kabupaten Buleleng, 2024

NO	KECAMATAN	DESA ADAT	PUSKESMAS	DTW	FASILITAS UMUM LAINNYA
1	Gerokgak	14	2	8	8
2	Seririt	25	3	0	3
3	Busungbiu	16	2	0	11
4	Banjar	17	2	7	5
5	Sukasada	21	2	10	6

NO	KECAMATAN	DESA ADAT	PUSKESMAS	DTW	FASILITAS UMUM LAINNYA
6	Sawan	18	2	6	5
7	Buleleng	21	3	5	11
8	Kubutambahan	22	2	4	2
9	Tejakula	15	2	5	13
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>64</b>

Sumber: Diskominfosanti Kabupaten Buleleng, 2025

## f. Kondisi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

### 1. Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Baku;

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Buleleng ditangani oleh Sistem PDAM dan Sistem Swakelola Masyarakat dalam bentuk lembaga Unit Pengelola Sarana atau Kelompok Pengelola Sarana (UPS/KPS) di tingkat desa/kelompok. Dari jumlah 148 desa/kelurahan, 67 desa/kelurahan sudah mendapat pelayanan air bersih PDAM dan sisanya 81 desa melalui UPS/KPS di tingkat desa/kelompok. Dari 81 desa yang dilayani melalui UPS/KPS terdapat sekitar 25 Kelurahan/Desa, di samping dilayani oleh PDAM juga dilayani melalui UPS/KPS.

Layanan air minum di Kabupaten Buleleng yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Buleleng adalah PDAM Cabang Celukan Bawang, Cabang Seririt, Unit Sambirenteng, Cabang Air Sanih, Cabang Busungbiu, dan Cabang Pancasari. Rendahnya cakupan pelayanan PDAM Buleleng diakibatkan karena faktor topografi wilayah yang berbukit dan permukiman penduduk yang menyebar membuat PDAM Buleleng belum mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Buleleng.

Pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Buleleng untuk tahun 2024 sebesar 87,52% yang meningkat dari pelayanan air minum perpipaan tahun sebelumnya dengan pelayanan PDAM sebesar 24,50% dan pelayanan PAM Desa sebesar 63,02%. Persentase pelayanan air minum non perpipaan untuk tahun 2024 menurun menjadi sebesar 12,48%, hal ini karena adanya peningkatan jumlah pelanggan air minum PDAM dan PAM Desa di Kabupaten Buleleng.

Lebih jelasnya mengenai pelayanan air minum di Kabupaten Buleleng tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56  
Pelayanan Air Minum di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	Pelayanan Air Minum	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpipaan (jiwa)	711.230	716.385	719.108	721.064	723.084
	Persentase (%)	86,12	86,74	86,89	87,09	87,52
	a. PDAM	276.894	276.894	271.296	266.975	202.417
	Persentase (%)	33,53	33,53	32,78	32,24	24,50
	b. PAM Desa	434.336	439.491	447.813	454.089	520.667
	Persentase (%)	52,59	53,22	54,11	54,84	63,02
2	Non Perpipaan (jiwa)	114.630	109.475	108.538	106.917	103.109
	Persentase (%)	13,88	13,26	13,11	12,91	12,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2025

## 2. Sistem Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng melayani 132 buah Daerah Irigasi (DI) dengan berbagai kondisi. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 79,01%. Kondisi jaringan rusak ringan adalah sebesar 16,17% dan kondisi jaringan rusak berat sebesar 4,82%.

Lebih jelasnya untuk kondisi irigasi di Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.57  
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Kondisi Jaringan Irigasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Baik (%)	76,50	78,43	78,24	78,56	79,01
Kondisi Rusak Ringan (%)	17,78	16,30	16,63	16,31	16,17
Kondisi Rusak Berat (%)	5,71	5,26	5,13	5,13	4,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2025

### **3. Sistem Jaringan Air Limbah dan Sanitasi;**

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai dengan RTRW kabupaten Buleleng, meliputi:

- a. SPAL non domestic meliputi:
  - pengembangan jaringan pengelolaan air limbah terpadu di Kawasan Peruntukan Industri Celukan Bawang; dan
  - pengembangan jaringan pengelolaan air limbah terpadu di Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina.

- b. SPAL domestik meliputi:

SPAL domestik berupa infrastruktur SPAL meliputi:

- o instalasi pengolahan air limbah Kawasan Perkotaan Singaraja di Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Sukasada;
- o instalasi pengolahan air limbah Kawasan Perkotaan Seririt di Kecamatan Seririt;
- o instalasi pengolahan air limbah Kawasan Pemuteran dan sekitarnya di Kecamatan Gerokgak;
- o pengembangan jaringan air limbah komunal di Kawasan padat permukiman di seluruh kecamatan; dan
- o IPLT di Kecamatan Kubutambahan.

### **4. Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah B3;**

Perkembangan industri dan pariwisata mengakibatkan semakin banyak limbah-limbah dari pabrik, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor, sekolah dan sebagainya yang berupa cair, padat bahkan berupa zat gas dan semuanya itu berbahaya bagi kehidupan kita. Tetapi ada limbah yang lebih berbahaya lagi yang disebut dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Hal tersebut sebenarnya bukan merupakan masalah kecil dan sepele, karena apabila limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tersebut dibiarkan ataupun dianggap sepele penanganannya, atau bahkan melakukan penanganan yang salah dalam menanganani limbah B3 tersebut, maka dampak dari Limbah Bahan Berbahaya dan beracun tersebut akan semakin meluas, bahkan dampaknya pun akan sangat dirasakan bagi lingkungan sekitar kita, dan tentu saja dampak tersebut akan menjurus pada

kehidupan makhluk hidup baik dampak yang akan dirasakan dalam jangka pendek ataupun dampak yang akan dirasakan dalam jangka panjang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang juga merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan rangkaian kegiatan yang pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan 3R (Reduse, Reuse, Recycle), dan dapat dengan langsung melakukan pengolahan terhadap limbah B3 serta terakhir dapat melalui penimbunan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga dan hasil produk kegiatan usaha industri, limbah usaha sablon, limbah rumah sakit, dll.



Gambar 2.29  
Pengelolaan Limbah B3 Perkantoran

Salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah B3 adalah perkantoran, sekolah, toko modern. Jenis limbah B3 yang dihasilkan perkantoran, sekolah, toko modern adalah Baterai Bekas, Lampu TL Bekas, Kemasan B3 (Kemasan bollpoint, cartridge bekas). Jenis limbah B3 perkantoran bisa disimpan di tempat sampah B3 dalam bentuk dropbox.

Tempat sampah dengan konsep dropbox untuk limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sebagai tempat limbah B3 di area perkantoran dan percontohan untuk menunjang penerapan eco-office. Penggunaan warna cerah yang berbeda-beda sebagai penanda jenis limbah yang akan dibuang di tempat khusus tersebut. dropbox warna-warni tersebut bisa diisi dengan kategori warna merah untuk baterai bekas, biru untuk limbah elektronik, kuning untuk kemasan bekas tinta dan hijau untuk lampu TL bekas (neon). Sistem kerja dropbox tersebut sama seperti tempat pembuangan sampah biasa. Apabila telah terisi penuh atau sampai pada batas penyimpanan, maka limbah B3 elektronik itu akan diambil oleh pihak ke tiga dari jasa pengangkut dan pengolah limbah B3 yang berizin.

## **5. Sistem Jaringan Persampahan;**

Sistem Pengelolaan Sampah memiliki alur yang dimulai dari sumber sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, sampah sudah harus dikelola dan dipilah dari sumbernya. Mana sampah yang termasuk klasifikasi sampah organik, sampah anorganik, sampah limbah B3 dan sisanya menjadi sampah residu. Sampah dipilah kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya, untuk sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos, pembuatan Eco Ecnzym dan sebagai bahan pakan magot; sampah anorganik diolah menjadi bahan bernilai ekonomis dengan model 3R yang pertama Reduce yaitu membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai, yang kedua Reuse yaitu dengan cara memanfaatkan kembali sampah menjadi barang bernilai guna (menambah nilai manfaat dan

ekonomi) kemudian yang terakhir Recycle yaitu mengirim kembali sampah anorganik ke pihak ketiga untuk diolah kembali menjadi produk baru. Sampah yang tidak bernilai ekonomis itu akan menjadi sampah residu yang dikumpulkan dimasing-masing TPS (Tempat Penampungan Sementara) kemudian diangkut oleh armada Dinas Lingkungan Hidup dan/atau armada desa yang selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah residu yang masuk ke TPA Bengkulu akan diproses menggunakan sistem sanitary landfill, dimana sampah akan ditutup dan ditata menggunakan tanah sehingga sampah tidak berserakan dan tidak mencemari lingkungan sekitar.



Gambar 2.30

Sistem pengelolaan sampah Rumah tangga  
Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Buleleng

terdiri atas:

a. TPS3R;

TPS3R berada di tiap desa/kelurahan/Desa Adat untuk pengelolaan persampahan pada sumbernya, tersebar di seluruh kecamatan;

**Tabel 2.58**  
**Data TPS3R di Kabupaten Buleleng Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa	TPST dan TPS3R (unit)	Timbulan (Kg/Bulan)
1	Gerokgak	6	6	17.161
2	Seririt	6	6	20.865
3	Busungbiu	5	5	22.453
4	Banjar	4	4	23.889
5	Sukasada	6	6	20.109
6	Buleleng	7	7	17.161
7	Sawan	7	7	35.834
8	Kubutambahan	8	8	15.271
9	Tejakula	9	9	50.046
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>222.789</b>

Sumber: Satu Data Kabupaten Buleleng, 2025

b. TPA; dan

TPA, meliputi:

- o TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan; dan
- o Rencana TPA di Kecamatan Gerokgak dan atau di Kecamatan Seririt setelah melalui kajian.

c. TPST.

TPST dikembangkan di tiap kecamatan atau beberapa kecamatan untuk pengelolaan persampahan pada sumbernya, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

## **6. Sistem jaringan evakuasi bencana**

Sistem jaringan evakuasi bencana di Kabupaten Buleleng terdiri atas:

a. Jalur evakuasi bencana terdiri atas;

- o jalur Jalan menuju lapangan olahraga terbuka di tiap Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
- o jalur Jalan menuju pelataran terminal;
- o jalur Jalan menuju gedung olahraga atau gedung serbaguna di tiap Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan
- o jalur Jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

b. Tempat evakuasi bencana meliputi:

Tempat evakuasi bencana terdapat di seluruh kecamatan, terdiri atas :

- kantor kecamatan;
- kantor kelurahan dan/atau desa;
- lapangan olahraga terbuka;
- gedung olahraga;
- sekolah;
- balai banjar;
- puskesmas;
- rumah sakit;
- pelataran terminal;
- pelataran parkir; dan
- pelataran bangunan umum lainnya.

## 7. Sistem Jaringan Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Buleleng berada pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) jalan nasional, RUMIJA jalan provinsi dan RUMIJA jalan kabupaten dengan total panjang drainase pada Tahun 2023 adalah 2.054.822 m dengan kewenangan penanganan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) sekitar 311.500 m, kewenangan Pemerintah Provinsi sebesar 224.762 m dan kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah 759.280m. Persentase kondisi baik untuk saluran drainase kewenangan kabupaten tahun 2024 adalah sebesar 36,35%, kondisi sedang sebesar 25,15%, dan kondisi buruk sebesar 38,50%. Lebih jelasnya data panjang dan kondisi saluran drainase di Kabupaten Buleleng dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.59  
Panjang dan Kondisi Drainase di Kabupaten Buleleng  
Tahun 2020-2024

No	Kondisi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		2023		2024	
		panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%	panjang (m)	%
Saluran Drainase Kewenangan Kabupaten											
1	Baik	142.660	20.62%	179.661	24,53%	729.280	50%	275.461	36,28%	275.995	36,35%
2	Sedang	190.990	27.61%	190.989	26,08%	275.461	18,14%	190.989	25,15%	190.989	25,15%
3	Buruk	358.062	51.76%	361.630	49,38%	483.819	31,86%	292.830	38,57%	292.296	38,50%
	Total	691.711	100%	732.280	100%	1.518.560	100%	759.280	100%	759.280	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buleleng, 2025

### g. Kondisi Pariwisata

Perkembangan kunjungan wisatawan sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan pasca pandemi covid-19. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebanyak 1.223.139 orang meningkat dari 874.674 orang pada Tahun 2022. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Buleleng perlu terus dikembangkan melalui pemulihan citra pariwisata pasca pandemi covid-19, revitalisasi maupun pengembangan DTW serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan length of stay wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

Tabel 2.60  
Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)		Jumlah
	Domestik	Manca Negara	
2020	121.255	55.843	177.098
2021	217.197	7.012	224.209
2022	703.642	171.032	874.674
2023	800.857	422.282	1.223.139
2024	979.985	604.833	1.584.818

Sumber : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

#### a. Akomodasi Pariwisata

Buleleng sendiri memiliki berbagai macam objek wisata yang menarik, dari mulai wisata alam seperti gunung, pantai, hutan, dan wisata budaya seperti candi, museum, dan keindahan tarian tradisional. Tidak ketinggalan pula wisata modern seperti wisata selfie dengan spot-spot menarik yang dijadikan sebagai destinasi wisata populer.

Di samping objek wisata, akomodasi menjadi salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam dunia pariwisata. Akomodasi meliputi berbagai jenis tempat tinggal yang disediakan bagi para wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, seperti hotel, penginapan, vila, dan lain-lain.

Tabel 2.61  
Jumlah Hotel Berbintang, Hotel Melati Dan Kamar Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Buleleng, 2024

Kecamatan	Hotel Berbintang		Hotel Melati	
	Hotel	Kamar	Hotel	Kamar
Gerokgak	15	300	30	476
Seririt	2	47	11	150
Busungbiu	-	-	1	19
Banjar	12	171	22	290
Sukasada	7	151	7	111
Buleleng	19	380	60	1.046
Sawan	-	-	1	25
Kubutambahan	-	-	2	38
Tejakula	14	201	9	128
<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>69</b>	<b>1.250</b>	<b>143</b>	<b>2.283</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

Tabel 2.62  
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Buleleng, 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Gerokgak	26	46	46	54	88
Seririt	7	9	9	26	20
Busungbiu	-	-	-	-	1
Banjar	15	59	59	59	120
Sukasada	6	19	19	37	40
Buleleng	53	93	93	111	182
Sawan	1	1	1	3	1
Kubutambahan	4	4	4	-	4
Tejakula	12	20	20	31	39
<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>124</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>321</b>	<b>495</b>

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2025

#### b. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Kehadiran wisatawan di Kabupaten Buleleng memberikan banyak manfaat, khususnya di bidang ekonomi. Perputaran uang yang dilakukan wisatawan asing/domestik berpotensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Apalagi, jika wisatawan tersebut menetap di daerah wisata dalam waktu yang cukup lama.

Akan tetapi, menarik wisatawan agar tinggal dan menetap di tempat wisata dengan waktu yang cukup lama merupakan suatu

tantangan tersendiri. Berbagai aspek, khususnya strategi 3A pariwisata harus disusun dan diterapkan. 3A tersebut adalah Atraksi, Akses, dan Amenitas.

Selain ketiga aspek tersebut, akomodasi juga menjadi hal yang cukup krusial. Ketersediaan tempat untuk beristirahat dan menginap yang nyaman dapat menjadi faktor wisatawan asing merasa puas bahkan ingin memperpanjang masa liburannya. Lama tinggal menetapnya wisatawan.

Tabel 2.63  
Rata-rata lama Tinggal Wisatawan tahun 2020-2024

No	Keterangan	Lama tinggal wisatawan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan	2,02	1,09	1,32	0,95	1,5

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buleleng, 2025

#### 2.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

##### a. Kondisi Investasi

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah nilai investasinya. Sedangkan jika dilihat dari serapan tenaga kerjanya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Buleleng cenderung kondusif.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan investasi di Kabupaten Buleleng cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 total investasi mencapai sekitar Rp.1,103 triliun meningkat menjadi Rp.6,862 triliun pada tahun 2024.

Tabel 2.64  
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi	
	Nilai	Penggunaan tenaga kerja Kontribusi
2020	1.103.792.763.786,00	1.792
2021	1.660.856.000.000,00	1.385
2022	448.674.270.861,00	559
2023	598.650.829.280,00	886
2024	6.862.652.271.197,00	949

Sumber: Satu Data Kabupaten Buleleng, 2025

Tabel 2.65  
Jumlah Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali 2020-2024

Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	142.332	173.492	201.730	486.632	186.441
Kab. Tabanan	758.200	1.035.195	194.247	162.769	385.863
Kab. Badung	3.558.447	2.514.694	3.170.567	2.739.222	4.103.973
Kab. Gianyar	145.776	871.301	295.323	293.607	804.195
Kab. Klungkung	42.420	66.996	106.496	20.451	46.214
Kab. Bangli	23.055	31.854	20.970	67.117	44.323
Kab. Karangasem	78.045	142.373	161.417	201.212	104.159
Kab. Buleleng	361.332	552.240	322.338	343.714	1.280.254
Kota Denpasar	323.068	967.105	1.529.016	343.714	2.199.949
<b>Provinsi Bali</b>	<b>5.432.675</b>	<b>6.355.249</b>	<b>6.002.103</b>	<b>6.950.785</b>	<b>9.155.371</b>

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2025

jika dilihat dari tabel diatas Kabupaten Buleleng memiliki penanaman modal asing yang urutan ketiga dari kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali. Jumlah tertinggi berada di Kabupaten Badung, sedangkan Kabupaten Buleleng hanya memiliki 1.280.254 penanam modal asing pada tahun 2024.

## b. Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan

kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada kuesioner yang mensurvei penduduk tentang keamanan di sekitar mereka. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya. Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor rasa aman. Skor ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal mengidentifikasi masalah keamanan dan membuat tindakan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya.

### **c. Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Buleleng juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten Buleleng dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur dengan perguruan tinggi yang cukup banyak berlokasi di wilayah Kabupaten Buleleng. Konflik berbau SARA, bahkan aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan Organisasi Kepemudaan. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Sampai tahun 2023, cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 95%,

meningkat dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 90%, yang bertugas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal/lingkungan. Adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 95% di tahun 2023 dapat diselesaikan secara efektif. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah 100% pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan ini terkait dengan area perkotaan yang terpusat di Kawasan Perkotaan Singaraja, sedangkan Kawasan perkotaan lainnya yang merupakan ibukota kecamatan tersebar di wilayah perdesaan Kabupaten Buleleng. Meskipun demikian, kondisi ini telah diimbangi dengan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2023 sebesar 100%. Angka ini relatif sama dengan tahun 2022 sebesar 100%. Kondisi jalan dan traffic yang padat, serta beberapa ruas jalan utama ditutup, dapat menghambat laju/kecepatan mobil damkar, dan memperlambat waktu tempuh menuju lokasi kebakaran. Di sisi lain, faktor kondisi jalan dan traffic merupakan faktor di luar kendali pemadam kebakaran. Pada beberapa lokasi kebakaran, akses jalan cukup sempit, sementara mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng berukuran/berkapasitas besar, sehingga tidak bisa mendekati ke lokasi kebakaran. Faktor lainnya adalah kemampuan personil Damkar yang terbatas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas personil Damkar terkait pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya untuk personil yang berstatus sebagai tenaga Non PNS.

Tabel 2.66  
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan  
Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80	85	90	95	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	90	95	95	95	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	-	-
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	100	100	100	-	-
5	Persentase capaian response time	-	-	-	82,17	87

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan non kebakaran					
6	Persentase Penegakan PERDA	80	90	90	95	95

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng, 2025

Upaya lainnya adalah melalui instrumen Peraturan Daerah, upaya penegakan Perda telah mencapai 95% pada tahun 2024, sampai saat ini dari seluruh laporan pengaduan yang masuk. Sejalan dengan upaya menjaga iklim usaha/investasi yang kondusif di masyarakat, karena itu perlu terus dikembangkan program peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

#### **d. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Dalam mengimplementasi dan mengukur keberhasilan penguatan Moderasi Beragama dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator Moderasi Beragama yang dikemukakan berikut ini.

##### 1. Komitmen kebangsaan

Nilai luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diterjemahkan menjadi komitmen kebangsaan yakni Cinta Tanah Air.

##### 2. Toleransi

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama.

##### 3. Anti kekerasan

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

##### 4. Penerimaan terhadap tradisi

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam

perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

#### e. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah indeks daya saing Kabupaten Buleleng tahun 2024 dengan skor 3,73.

**Indeks Daya Saing Daerah 2024**  
**Kabupaten/Kota**  
Update per 11 Maret 2025

Kode	Provinsi	Kab/Kota	Pilar 12	Skor IDSD
			Kapabilitas Inovasi	Skor IDSD
51	BALI	Provinsi	4,06	3,91
5101	BALI	JEMBRANA	2,23	3,73
5102	BALI	TABANAN	2,42	3,70
5103	BALI	BADUNG	4,30	4,14
5104	BALI	GIANYAR	2,53	3,85
5105	BALI	KLUNGKUNG	2,08	3,65
5106	BALI	BANGLI	2,32	3,47
5107	BALI	KARANGASEM	1,79	3,59
5108	BALI	BULELENG	3,61	3,73
5171	BALI	KOTA DENPASAR	4,18	4,16

Gambar 2.31  
Indeks Daya Saing Kabupaten Buleleng 2024

#### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

##### 2.1.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L, Pemda di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan.

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
153.	Kabupaten Nias	3,45	4,45	4,32	4,07	A-
154.	Kabupaten Gianyar	3,98	4,52	3,7	4,07	A-
155.	Kabupaten Pidie Jaya	4,23	3,42	4,52	4,06	A-
156.	Kabupaten Lebak	4,10	4,13	3,93	4,05	A-
157.	Kabupaten Landak	3,36	4,47	4,31	4,05	A-
158.	Kabupaten Malang	4,29	4,09	3,76	4,05	A-
159.	Kabupaten Paser	3,80	4,56	3,72	4,03	A-
160.	Kabupaten Belitung	4,11	3,97	3,97	4,02	A-
161.	Kabupaten Tojo Unauna	4,09	4,01	3,94	4,01	A-
162.	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,28	3,22	4,53	4,01	A-
163.	Kabupaten Belitung Timur	3,92	4,09	4,02	4,01	A-
164.	Kabupaten Indragiri Hulu	4,49	3,55	3,96	4,00	B
165.	Kabupaten Buleleng	3,90	4,08	4	3,99	B

Gambar 2.32  
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng 2024

**Tabel 2.67**  
**Kinerja Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Kab.Buleleng Tahun 2021-2024**

Tahun penilaian	Unit penyelenggara	Niai Indeks
<b>2021</b>	Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu	<b>3,51</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>4,49</b>
<b>2022</b>	Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu	<b>4,48</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>4,31</b>
<b>2023</b>	Kecamatan Tejakula	<b>3,46</b>
	Dinas Sosial	<b>4,02</b>
	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>4,15</b>
<b>2024</b>	Dinas Sosial	<b>3,90</b>
	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>4,08</b>
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>4,00</b>

Sumber, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, 2025

#### 2.1.4.2. Indeks Inovasi Daerah

Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Selain mendorong penelitian dan pengembangan berbagai pihak, Kabupaten Buleleng telah memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah pada tahun 2023 mencapai 96,15%. Sedangkan

persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2023 adalah 92,85%, tetap dari tahun sebelumnya.

Guna menerapkan pemanfaatan hasil kelitbangan, Kabupaten Buleleng memiliki beberapa kebijakan terutama terhadap beberapa produk unggulan seperti pengembangan Kawasan Desa Bali Aga.

**Tabel 2.68**  
**Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	53,19	85,71	100	96,15	35
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	100	100	-	-
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	92,85	100

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, 2025

**Tabel 2.69**  
**Capaian kinerja Inovasi Daerah Bab. Buleleng tahun 2023**

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Buleleng	60,98	Sangat Inovatif

Sumber : Kemendagri 2024

#### **2.1.4.3. Indeks SPBE**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu, berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Pada tahun 2024, capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Buleleng sebesar 3,69 dengan predikat “Baik”.

#### **2.1.4.4. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Pada tahun 2024, IKM Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 87 hal ini merupakan hasil upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan meningkatkan kerjasama dengan membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait.

#### **2.1.5. Standar Pelayanan Minimal**

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan meliputi bagi Warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini, Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar, dan Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

SPM Pekerjaan Umum meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. SPM Perumahan Rakyat meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Untuk SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk SPM Sosial meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian SPM Kabupaten Buleleng dari 29 Jenis Layanan Dasar dengan tersaji pada table berikut

**Tabel 2.70**  
**Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Buleleng Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi capaian SPM
1	2	3	4	5
1	<b>SPM Pendidikan</b>			
	• Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100%	149%
	• Pendidikan Kesetaraan	Peserentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	191%
	• Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).	100%	102%
2	<b>SPM Kesehatan</b>			
	• Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan ibu persalinan	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi capaian SPM
1	2	3	4	5
	• Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase jumlah Balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga Negara usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
	• Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Persentase orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi capaian SPM
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)</li> </ul>	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%
3	<b>SPM Bidang Pekerjaan Umum</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari</li> </ul>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> </ul>	Persentase Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	100%	100%
4	<b>SPM Bidang Perumahan Rakyat</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana</li> </ul>		100%	100%
5	<b>SPM Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan)	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi capaian SPM
1	2	3	4	5
	Umum			
	• Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Kawasan Rawan bencana yang Mendapat informasi	100%	100%
	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Persentase Kawasan Rawan bencana yang Mendapat layanan Pencegahan bencana	100%	100%
	• Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana < 24 jam	100%	100%
	• Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase capaian response time daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dan Non Kebakaran	100%	94%
6	<b>SPM Bidang Sosial</b>			
	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luarpanti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi capaian SPM
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti</li> </ul>	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</li> </ul>	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota</li> </ul>	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	100%

## 2.1.6. Capaian Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah

### Capaian terhadap Target Indikator kinerja Daerah RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2024

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	72.34	72.70	100.5	Tercapai	72.66	73.00	100.47	Tercapai	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7.27	7.57	104.13	Tercapai	7.27	7.69	105.78	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
		Rata-rata harapan lama sekolah	13.27	13.27	100	Tercapai	13.29	13.30	100.08	Tercapai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	Tercapai	100	98.55	98.55	Tidak Tercapai	Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73	72.57	99.41	Tidak Tercapai	73.50	66.71	90.76	Tidak Tercapai	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buleleng
4	Meningkatnya Kompetensi Ketenaga Kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.3	3.6	90.91	Tidak Tercapai	3.00	2.06	131.33	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.56	75.49	99.91	Tidak Tercapai	76.26	79.77	104.60	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng
5	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3	3.64	110.3	Tercapai	3.5	5.04	144.00	Tercapai	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng
6	Meningkatnya Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	61.5	68.31	111.07	Tercapai	62	76.39	123.21	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
7	Stabilitas Harga - harga Bahan Pokok Penting	Laju Inflasi	2,5-3,5	4.31	76.86	Tidak Tercapai	2.5-3.5	1.93	122.80	Tercapai	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Persentase Kondisi jalan dan jembatan mantap	72	52.07	72.32	Tidak Tercapai	73.00	66.72	91.40	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertibandan kelancaran lalu lintas Perhubungan	89	89	100	Tercapai	90	90	100.00	Tercapai	Dinas Perhubungan Kab.Buleleng
		Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	78.56	78.56	100	Tercapai	79.00	79	100.00	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng
		Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	87	87	100	Tercapai	87.50	88.00	100.57	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Persentase pelayanan air limbah	94.46	94.46	100	Tercapai	94.56	95.00	100.47	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng	
	Persentase panjang saluran drainase Dalam Kondisi Baik	48.27	48.27	100	Tercapai	48.88	48.88	100.00	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng	
	Persentase pengembangan sistem persampahan	41.86	41.86	100	Tercapai	46.51	46.51	100.00	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buleleng	
9	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk Miskin	5.15	5.85	113.59	Tidak Tercapai	4.9	5.39	110.00	Tidak Tercapai	Dinas Sosial Kab.Buleleng
10	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	6.86	23.95	349.13	Tercapai	9.86	42.23	428.30	Tercapai	Dinas Sosial Kab.Buleleng
11	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat	Persentase Penanganan bencana	98	98	100	Tercapai	98	98	100.00	Tercapai	BPBD Kab.Buleleng, dan Dinas Pemadam Kebakaran, Kab.Buleleng
		Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)	100	100	100	Tercapai	100	100	100.00	Tercapai	Satpol PP Kab.Buleleng

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
12	Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya	Persentase Cagar budaya yang lestari	30	30	100	Tercapai	40	40	100.00	Tercapai	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
		Persentase Budaya tak benda yang lestari	33.33	33.33	100	Tercapai	50.00	50	100.00	Tercapai	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
		Persentase desa adat yang lestari	32.57	32.57	100	Tercapai	39.67	39.67	100.00	Tercapai	Dinas Kebudayaan Kab.Buleleng
13	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air	59.1	60.29	102.01	Tercapai	59.10	62.84	106.33	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
14	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara	89.65	88.74	98.98	Tidak Tercapai	89.76	93.47	104.13	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
15	Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks tutupan lahan	52.6	52.06	98.97	Tidak Tercapai	52.66	58.67	111.41	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buleleng
16	Terwujudnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	75	70	93.33	Tidak Tercapai	75	75	100.00	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab.Buleleng

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TAHUN 2023				TAHUN 2024				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/ TIDAK TERCAPAI)	TARGET RPD	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS KETERCAPAIAN (TERCAPAI/ TIDAK TERCAPAI)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
17	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1	3.45	111.29	Tercapai	3.2	3.69	115.31	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Buleleng
18	Meningkatnya kualitas layanan public	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	90	100	111.11	Tercapai	90	97	107.78	Tercapai	Bagian Organisasi Setda Kab.buleleng
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	70	68.84	98.34	Tidak Tercapai	70.01	69.50	99.27	Tidak Tercapai	Bagian Organisasi Setda Kab.buleleng
20	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77	78.45	101.88	Tercapai	78	78	100.00	Tercapai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
21	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit sistem	150	330.5	220.33	Tercapai	200	347.50	173.75	Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kab.Buleleng
22	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	100	100	100	Tercapai	100	100	100.00	Tercapai	Inspektorat Daerah Kab.Buleleng

Uraian tabel diatas menggambarkan dari 34 indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagian besar tercapai targetnya hanya 10 indikator yang belum tercapai pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 menyisakan 5 indikator kinerja yang belum mencapai target 100 persen.dan pada target indikator kinerja yang belum tercapai ditahun 2024 ini sudah dituangkan kembali menjadi target indikator kinerja di RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029.

### **2.1.7. Kerjasama Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efisien dan merata. Dalam konteks pemerintahan daerah, kerjasama ini mencakup berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga antar daerah dengan tujuan untuk saling mendukung, memperkuat kapasitas, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Walaupun kerjasama antar daerah memiliki banyak manfaat, namun tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah yang dapat mempengaruhi kelancaran kerjasama. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hal pembagian sumber daya atau pengambilan keputusan. Selain itu, masalah komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah juga seringkali menjadi hambatan dalam kerjasama antar daerah. Dibutuhkan mekanisme yang jelas dan transparan agar setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal tanpa ada yang merasa dirugikan.

### **2.1.8. Rencana pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan /atau provinsi di Kabupaten Buleleng.**

Kabupaten Buleleng merupakan satu dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang menjadi lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun highlight indikasi intervensi dan lokasi prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**a. Highlight Indikasi Intervensi di Kabupaten Buleleng**

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singaraja-Lovina (termasuk <i>urban renewal</i> kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka)</li> <li>• TNBB-Menjangan-Pemuteran</li> <li>• Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara</li> <li>• Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja</li> </ul> </li> </ul>
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Peningkatan D.I. Tukad Saba</li> <li>• Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah</li> <li>• Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan</li> <li>• Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)</li> <li>• Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</li> <li>• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian pangan, peternakan, dan hortikultura</li> <li>• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Saba</li> <li>• Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Saba, Danau Buyan, Danau Tamblingan</li> <li>• Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur</li> <li>• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan;</li> </ul>

No	Lokasi Prioritas	<i>Highlight Indikasi Intervensi</i>
		<p>peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.</li> <li>• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gundang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.</li> </ul>
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng (B2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, anggur)</li> <li>• Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, anggur)</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, dan anggur)</li> <li>• Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, anggur)</li> </ul>
B3	Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan anggur</li> <li>• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.</li> </ul>
E1	Kawasan Konservasi TN Bali Barat (E1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi</li> <li>• Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi.</li> <li>• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetic</li> </ul>

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
E3	Kawasan Konverasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan</li> <li>• Perlindungan pengamanan hutan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)</li> </ul>

#### b. Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali

Pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali pada periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, berorientasi pada melanjutkan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pada capaian RPJMD sebelumnya, pembangunan baru, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur Provinsi Bali secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah Provinsi Bali menetapkan indikasi rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali, dengan lokasi di kabupaten/kota se-Bali dengan indikasi pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan sebagai berikut :

No	Lokasi Prioritas	Kegiatan
1	Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan konektivitas Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem (Pembangunan Jalan Berina, Karangasem-Buleleng)</li> <li>• Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Sangsit</li> <li>• Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Celukan Bawang</li> <li>• Pembangunan <i>Shortcut</i> Mengwitani-Singaraja</li> <li>• Pembangunan Kawasan Industri Maritim dan Perkapalan Brombong</li> <li>• Pembangunan dan Penataan Kawasan Lovina</li> <li>• Pembangunan dan Penataan Kawasan Pelabuhan Buleleng</li> <li>• Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Letkol Wisnu</li> <li>• Pembangunan Bandara Baru</li> <li>• Perlindungan Danau Tamblingan dan Danau Buyan</li> </ul>

Daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah di atas merupakan daftar indikatif yang dapat diubah berdasarkan evaluasi atau ketentuan perundang-undangan.

Di samping rencana pembangunan infrastruktur dimaksud, juga direncanakan Pembangunan infrastruktur umum yang berlokasi di kabupaten/kota se-Bali antara lain:

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan serta Pemenuhan Faskes dan Alat Kelengkapan Jalan.
2. Penanganan Sampah.
3. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas TPS3R, TPST, dan TPA.
4. Peningkatan Layanan Air Minum dan Limbah.
5. Peningkatan Ketangguhan Bencana.
6. Penanganan Terpadu Bencana Banjir.
7. Perlindungan Laut, Sungai dan Mata Air.
8. Penanganan Kualitas Rumah dan Kawasan Kumuh.
9. Penataan Kawasan, Destinasi/Objek Wisata.

#### **2.1.9. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah**

BUMD adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai pelaku ekonomi di daerah, BUMD diharapkan dapat menjadi pendukung dan penggerak perekonomian daerah. Baik melalui kegiatan usaha maupun kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta. Selain itu, BUMD juga mementingkan kemajuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat.

Selain itu, BUMD secara khusus berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada maupun adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membentuk BUMD baru lainnya, agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya. Sehingga BUMD dituntut lebih efisien dan profesional dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya BUMD diharapkan dapat meningkatkan produksi, pendapatan daerah, serta perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, BUMD di setiap daerah memiliki andil dan peran untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Berdasarkan penjelasan di atas sesuai Peraturan Daerah 1 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal kepada BUMD dan Peraturan daerah No. 5 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali, beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- 2.1.9.1. PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja

- 2.1.9.2. Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng
- 2.1.9.3. Perumda Pasar Argha Nayottama Kabuoaten Buleleng
- 2.1.9.4. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng
- 2.1.9.5. PT JAMKRIDA
- 2.1.9.6. PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (PERSERODA)

Berikut adalah beberapa BUMD berdasarkan rincian penerimaan atas Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

Tabel 2.71  
Penerimaan Deviden atas Penyertaan Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank BPD Bali	21.231.505.390,00	21.231.505.390,33	16.200.134.281,13	11.702.973.404,65
2	Perumda Swatantra	1.200.000.000,00	917.558.269,00	900.000.000,00	365.067.265,00
3	Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng				
4	PT JAMKRIDA			7.689.130,00	3.424.370,00
5	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45 (PERSERODA)				
5	Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng	9.000.000.000,00	8.571.013.095,00	7.523.871.787,00	3.510.139.375,00

sumber data: LRA TA 2024

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.050.090.783,48. Dan ditahun 2024 kembali meningkat sebesar Rp. 6.799.810.191,87. Tercapainya seluruh target pendapatan dari anggaran karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat yang mulai mengalami peningkatan.

## 2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang hubungan Keuangan anatar pemerintah Pusat dan daerah dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan

keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### **2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir**

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Buleleng secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka

komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **1. Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah**

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 5 tahun ke depan (dari tahun 2026 s.d tahun 2030).

#### **A. Pendapatan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikandalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 2.72  
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s.d 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>PENDAPATAN</b>					
	A. Pendapatan Asli Daerah	318.986.891.632,31	391.988.445.424,21	410.564.891.258,14	460.500.058.608,71	509.474.781.931,42
	B. Pendapatan Transfer	1.573.171.787.153,58	1.574.989.396.000,75	1.645.523.802.691,00	1.723.164.796.195,00	1.990.090.996.222,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.060.410.000,00	116.236.876.264,00	22.863.932.045,00	33.203.452.035,65	35.105.135.397,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.003.219.088.785,89</b>	<b>2.083.214.717.688,96</b>	<b>2.078.952.625.994,14</b>	<b>2.216.868.306.839,36</b>	<b>2.534.670.913.550,42</b>
2	<b>BELANJA</b>					
	A. Belanja Operasi	1.464.223.634.793,85	1.625.692.312.146,49	1.679.161.875.608,90	1.752.101.099.431,13	1.937.542.023.599,43
	B. Belanja Modal	259.440.204.132,01	202.523.213.564,37	155.220.622.262,10	189.949.646.989,00	183.312.147.805,05
	C. Belanja Tak Terduga	46.090.243.621,54	5.190.431.459,00	785.960.776,00	361.250.000,00	53.013.101,00
	D. Belanja Transfer	236.347.401.663,28	236.969.598.800,00	244.567.671.656,00	262.711.105.571,00	286.569.930.178,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.006.101.484.210,68</b>	<b>2.070.375.555.969,86</b>	<b>2.079.736.130.303,00</b>	<b>2.205.123.101.991,13</b>	<b>2.407.477.114.683,48</b>
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>					
3	<b>PEMBIAYAAN</b>					
	A. Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran Pembiayaan	4.400.000.000,00	9.000.000.000,00	15.681.600.000,00	5.557.000.000,00	-
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	-	-	-	-	-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari LKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 2.73

Rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2020</b>			
	a. PAD	335.072.650.874,71	318.986.891.632,31	95,2
	b. Pendapatan Transfer	1.611.540.423.641,42	1.573.171.787.153,58	97,62
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	113.406.120.000,00	111.060.410.000,00	97,93
	Jumlah	2.060.019.194.516,13	2.003.219.088.785,89	97,24
<b>2</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2021</b>			
	a. PAD	395.236.169.142,50	391.988.445.424,21	99,18
	b. Pendapatan Transfer	1.646.034.904.487,00	1.574.989.396.000,75	95,68

No	Uraian	Target	Realisasi	%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	117.420.582.021,00	116.236.876.264,00	98,99
	Jumlah	2.158.691.655.650,50	2.083.214.717.688,96	96,50
<b>3</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2022</b>			
	a. PAD	476.658.327.551,00	410.564.891.258,14	86,13
	b. Pendapatan Transfer	1.704.269.608.976,00	1.645.523.802.691,00	96,55
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	-	22.863.932.045,00	92,96
	Jumlah	2.180.927.936.527,00	2.078.952.625.994,14	95,32
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2023</b>			
	a. PAD	466.449.460.711,00	460.500.058.608,71	98,72
	b. Pendapatan Transfer	1.757.718.808.489,00	1.723.164.796.195,00	98,03
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	35.186.156.000,00	33.203.452.035,65	94,37
	Jumlah	2.259.354.425.200,00	2.216.868.306.839,36	98,12
<b>5</b>	<b>Pendapatan Daerah Tahun 2024</b>			
	a. PAD	575.417.310.612,00	509.474.781.931,42	88,54
	b. Pendapatan Transfer	1.993.128.883.917,00	1.990.090.996.222,00	99,85
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	45.000.201.486,00	35.105.135.397,00	78,01
	Jumlah	2.613.546.396.015,00	2.534.670.913.550,42	96,98

Sumber : Diolah dari LKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah terlihat relatif pluktuatif selama tahun 2020 hingga 2024, secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Buleleng mencapai 96,83%.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kabupaten Buleleng terjadi pada tahun 2023, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 98,12% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD, yaitu sebesar 98,72%, Sementara itu, kinerja realisasi Pendapatan Transfer mencapai target 98,03% dan kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai sebesar 94,37%.

Kinerja pendapatan transfer merupakan yang terbesar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 97,55%. Disusul Komponen PAD yang dengan rata-rata 93,55% dan terakhir Lain-lain Pendapatan yang sah memiliki rata-rata 92,45%.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.74**

**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pendapatan</b>						
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>318.986.891.632,31</b>	<b>391.988.445.424,21</b>	<b>410.564.891.258,14</b>	<b>460.500.058.608,71</b>	<b>509.474.781.931,42</b>	<b>12,61</b>
	Pajak Daerah	118.257.303.529,90	136.710.405.062,61	172.689.999.523,41	221.543.885.845,93	251.948.162.383,77	5,25
	Retribusi Daerah	19.809.775.071,00	36.150.491.390,00	30.078.820.360,00	34.103.424.122,00	29.404.398.277,45	2,05
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.823.539.604,20	20.045.797.893,06	15.581.604.414,65	24.631.695.198,13	30.720.076.754,33	3,85
	Lain - Lain PAD yang Sah	161.096.273.427,21	199.081.751.078,54	192.214.466.960,08	180.221.053.442,65	197.402.144.515,87	1,46
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.573.171.787.153,58</b>	<b>1.574.989.396.000,75</b>	<b>1.645.523.802.691,00</b>	<b>1.723.164.796.195,00</b>	<b>1.990.090.996.222,00</b>	<b>0,88</b>
	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.177.658.540.453,00</b>	<b>1.225.794.143.075,00</b>	<b>1.269.014.740.424,00</b>	<b>1.320.272.885.965,00</b>	<b>1.406.029.274.041,00</b>	<b>1,17</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	32.846.513.449,00	35.249.280.975,00	29.279.087.523,00	24.698.210.114,00	24.953.732.000,00	0,94
	Dana Alokasi Umum	904.071.781.000,00	890.141.572.000,00	887.085.023.949,00	932.206.178.954,00	1.001.384.850.681,00	2,43
	Dana Alokasi Khusus	240.740.246.004,00	300.403.290.100,00	352.650.628.952,00	363.368.496.897,00	379.690.691.360,00	(0,1)
	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>175.907.577.000,00</b>	<b>159.217.187.000,00</b>	<b>178.226.158.000,00</b>	<b>170.226.374.000,00</b>	<b>165.232.062.000,00</b>	<b>(1,24)</b>
	Dana Penyesuaian	175.907.577.000,00	159.217.187.000,00	178.226.158.000,00	<b>170.226.374.000,00</b>	165.232.062.000,00	(1,24)
	Transfer Pemerintah Provinsi	<b>219.605.669.700,58</b>	<b>189.978.065.925,75</b>	<b>198.282.904.267,00</b>	<b>232.665.536.230,00</b>	<b>418.829.660.181,00</b>	<b>60,35</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	142.162.195.730,58	115.018.073.909,64	173.694.333.241,00	202.713.278.174,00	251.472.859.336,00	18,17
	<b>Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</b>	<b>77.443.473.970,00</b>	<b>74.959.992.016,11</b>	<b>24.588.571.026,00</b>	<b>29.952.258.056,00</b>	<b>167.356.800.845,00</b>	<b>102,54</b>
	Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya						102,54

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
		77.443.473.970,00	74.959.992.016,11	<b>24.588.571.026,00</b>	29.952.258.056,00	167.356.800.845,00	
<b>3</b>	<b>Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah</b>	<b>111.060.410.000,00</b>	<b>116.236.876.264,00</b>	<b>22.863.932.045,00</b>	<b>33.203.452.035,65</b>	<b>35.105.135.397,00</b>	<b>(6,13)</b>
	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	111.060.410.000,00	116.236.876.264,00	22.863.932.045,00	33.203.452.035,65	35.105.135.397,00	(6,13)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.003.219.088.785,89</b>	<b>2.083.214.717.688,96</b>	<b>2.078.952.625.994,14</b>	<b>2.216.868.306.839,36</b>	<b>2.534.670.913.550,42</b>	<b>6,18</b>

Sumber : Diolah dari LKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan pada beberapa komponen pendapatan daerah kecuali pendapatan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang mengalami penurunan.

## **B. Penerimaan Pembiayaan**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah

**Tabel 2.75**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah selama 5**  
**Tahun Terakhir dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	Total Pendapatan Daerah	2.003.219.088.785,8 <sub>9</sub>	2.083.214.717.688,9 <sub>6</sub>	2.078.952.625.994,1 <sub>4</sub>	2.216.868.306.839,3 <sub>6</sub>	2.534.670.913.550,4 <sub>2</sub>	6,18
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	75.834.129.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.195.113,99	(3,92)
	Penggunaan SiLPA	75.834.129.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.195.113,99	(3,92)
	Total Penerimaan Daerah	2.079.053.218.586,2 <sub>0</sub>	2.151.766.452.064,4 <sub>8</sub>	2.151.343.522.088,7 <sub>6</sub>	2.272.794.098.625,1 <sub>2</sub>	2.596.784.108.664,4 <sub>1</sub>	5,84

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

## **2. Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang akan disajikan dalam sub bahasan yang berbeda.

### **A. Kinerja Realisasi Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Dalam realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 5 tahun terakhir terutama tahun 2020 sampai 2024 mengalami perkembangan yang terus meningkat hanya pada tahun 2020 masih berada pada kondisi pandemi dan pemulihan pasca pandemi sehingga serapan anggaran mengalami penurunan. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng

sebesar 93,71%, pada tahun anggaran 2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 93,33%. Tahun 2022 realisasi belanja daerah kembali menurun menjadi 92,96%, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 95,49%. Namun pada tahun 2024 belanja daerah kembali mengalami penurunan menjadi 89,98%. Lebih rinci tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
**Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir**  
**dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	BELANJA DAERAH					
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>93,39%</b>	<b>94,03%</b>	<b>87,87%</b>	<b>96,86%</b>	<b>93,90%</b>
	Belanja Pegawai	97,05%	98,35%	95,48%	98,72%	96,40%
	Belanja Barang dan Jasa	89,90%	89,18%	90,87%	93,89%	89,47%
	Belanja Hibah	91,71%	95,78%	97,32%	99,69%	95,49%
	Belanja Bantuan Sosial	5,39%	97,96%	67,82%	98,31%	90,79%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>98,70%</b>	<b>85,94%</b>	<b>86,52%</b>	<b>83,35%</b>	<b>86,69%</b>
	Belanja Tanah	99,93%	0,00%	0,00%	87,66%	97,80%
	Belanja Peralatan dan Mesin	92,44%	95,75%	89,81%	92,17%	93,20%
	Belanja Gedung dan Bangunan	99,38%	82,08%	81,72%	78,96%	95,49%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85,89%	69,61%	80,27%	59,35%	73,43%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	138,38%	123,36%	94,26%	99,35%	105,30%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,94%
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>79,54%</b>	<b>59,39%</b>	<b>43,21%</b>	<b>13,86%</b>	<b>1,12%</b>
	Belanja Tidak Terduga	79,54%	59,39%	43,21%	13,86%	1,12%
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>97,32%</b>	<b>96,77%</b>	<b>94,96%</b>	<b>97,37%</b>	<b>72,34%</b>
	Transfer Bagi Hasil Pajak	66,68%	59,45%	71,46%	85,37%	72,96%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	64,78%	59,45%	42,32%	60,25%	63,41%
	Transfer Bantuan Keuangan	99,78%	100,00%	97,81%	100,00%	72,40%
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>93,71%</b>	<b>93,33%</b>	<b>92,96%</b>	<b>95,49%</b>	<b>89,98%</b>

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90% terkecuali tahun 2024 hanya mencapai 89,98%. Kinerja Belanja Operasi juga mengalami kecenderungan membaik dari 93,39% di tahun 2020 meningkat menjadi 93,90% di tahun 2024. Kinerja penyerapan belanja terbesar ada di belanja pegawai, yang mencapai 98,72%. Sedangkan, belanja modal memiliki kinerja realisasi relative berfluktuasi dengan tingkat penyerapan pada tahun 2024 mencapai 86,69%. Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal kinerja realisasi belanja modalnya sudah mengalokasikan anggaran, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah, seperti jalan dan jembatan, walaupun dalam situasi kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mampu memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 2.77  
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>BELANJA DAERAH</b>					
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>72,99%</b>	<b>78,52%</b>	<b>80,74%</b>	<b>79,46%</b>	<b>80,48%</b>
	Belanja Pegawai	40,23%	40,95%	42,54%	43,29%	47,98%
	Belanja Barang dan Jasa	31,16%	34,34%	33,90%	30,61%	26,72%
	Belanja Hibah	1,58%	2,91%	3,87%	5,02%	5,46%
	Belanja Bantuan Sosial	0,02%	0,32%	0,43%	0,54%	0,33%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>12,93%</b>	<b>9,78%</b>	<b>7,46%</b>	<b>8,61%</b>	<b>7,61%</b>
	Belanja Tanah	0,01%	0,00%	0,00%	0,21%	0,03%
	Belanja Peralatan dan Mesin	2,72%	4,18%	3,70%	3,90%	2,24%
	Belanja Gedung dan Bangunan	8,80%	2,29%	1,48%	2,44%	1,63%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,64%	2,39%	1,54%	1,03%	2,65%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,76%	0,92%	0,75%	1,04%	0,95%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,02%</b>	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	2,30%	0,25%	0,04%	0,02%	0,00%
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>11,78%</b>	<b>11,45%</b>	<b>11,76%</b>	<b>11,91%</b>	11,90%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,53%	0,50%	0,58%	1,07%	0,90%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,06%	0,06%	0,11%	0,21%	0,12%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	11,19%	10,89%	1,07%	0,63%	10,89%
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja barang dan jasa dan belanja modal, termasuk belanja pegawai. sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat dikatakan memiliki komitmen untuk peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah, dan diharapkan dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut di masa mendatang. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 5 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 26-34%, sedangkan belanja modal berada di kisaran 7-12%. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.464.223.634.793,85</b>	<b>1.625.692.312.146,49</b>	<b>1.679.161.875.608,90</b>	<b>1.752.101.099.431,13</b>	<b>1.937.542.023.599,43</b>	<b>7,31</b>
	Belanja Pegawai	807.030.781.147,76	847.840.859.277,00	884.709.856.539,00	954.572.961.969,00	1.155.026.896.491,70	9,58
	Belanja Barang dan Jasa	625.200.702.646,09	710.959.203.224,49	704.950.970.566,93	674.925.968.501,13	643.244.315.051,73	0,98
	Belanja Hibah	31.655.996.000,00	60.348.589.645,00	80.515.690.100,00	110.657.841.961,00	131.378.812.056,00	45,05
	Belanja Bantuan Sosial	336.155.000,00	6.543.660.000,00	8.985.358.402,97	11.944.327.000,00	7.892.000.000,00	470,73
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>259.440.204.132,01</b>	<b>202.523.213.564,37</b>	<b>155.220.622.262,10</b>	<b>189.949.646.989,00</b>	<b>183.312.147.805,05</b>	<b>(6,60)</b>
	Belanja Tanah	270.182.400,00	-	-	4.690.642.967,00	672.654.000,00	(46,41)
	Belanja Peralatan dan Mesin	54.617.759.864,36	86.595.788.749,72	76.915.563.664,10	85.976.147.644,00	54.016.056.933,00	5,49
	Belanja Gedung dan Bangunan	176.506.273.399,56	47.365.061.975,23	30.748.434.668,00	53.812.721.318,00	39.123.065.723,76	(15,13)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.776.306.003,09	49.561.276.238,00	31.933.993.642,00	22.631.784.076,00	63.775.377.784,22	101,25
	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.269.682.465,00	19.001.086.601,42	15.622.630.288,00	22.838.350.984,00	22.959.845.424,00	13,34
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>46.090.243.621,54</b>	<b>5.190.431.459,00</b>	<b>785.960.776,00</b>	<b>361.250.000,00</b>	<b>53.013.101,00</b>	<b>(78,24)</b>
	Belanja Tidak Terduga	46.090.243.621,54	5.190.431.459,00	785.960.776,00	361.250.000,00	53.013.101,00	(78,24)
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>236.347.401.663,28</b>	<b>236.969.598.800,00</b>	<b>244.567.671.656,00</b>	<b>262.711.105.571,00</b>	<b>286.569.930.178,00</b>	<b>4,99</b>
	Transfer Bagi Hasil Pajak	10.630.302.110,10	10.292.257.200,00	12.055.447.314,00	23.673.495.484,00	21.649.305.794,00	25,44

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	1.245.450.053,18	1.302.110.100,00	2.211.137.692,00	4.615.673.992,00	2.848.548.362,00	36,21
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	224.471.649.500,00	225.375.231.500,00	230.301.086.650,00	234.421.936.095,00	262.072.076.022,00	4,04
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>2.006.101.484.210,68</b>	<b>2.070.375.555.969,86</b>	<b>2.079.736.130.303,00</b>	<b>2.205.123.101.991,13</b>	<b>2.407.477.114.683,48</b>	<b>4,72</b>

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. untuk realisasi belanja operasi dari tahun 2020 s.d 2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 7,31%. untuk belanja Modal setiap tahunnya juga mengalami fluktuasi rata-rata pertumbuhannya, yaitu sebesar -6,60%. Sedangkan, belanja tidak terduga lonjakan pertumbuhannya terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat pandemic covid-19 belanja diarahkan ke BTT untuk penanggulangan pandemi rata-rata pertumbuhannya mencapai -78,24% dan belanja transfer dari tahun 2020 sampai tahun 2024 meningkat dengan rata –rata pertumbuhan mencapai 4,99%.

Dari sisi jenis belanja terlihat bahwa belanja Bantuan sosial tumbuh cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 470,73 % namun pertumbuhannya tidak merata setiap tahun bahkan cenderung fluktuasinya dan timpang disetiap tahunnya, diikuti dengan belanja Hibah mencapai sebesar 45,05%. Sedangkan belanja Pegawai cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,58 % serta belanja barang jasa cenderung tidak stabil dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 0,98%. Pada belanja modal, realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 101,25 %, belanja modal untuk Belanja Gedung dan Bangunan berfluktuatif dengan pertumbuhan sebesar -15,13 %, Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 13,34%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja nilai rata-rata pertumbuhannya relatif selalu tinggi, terutama untuk belanja bantuan keuangan. Disisi lain, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan

proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik.

Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

## **B. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 2.79

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.400.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>15.681.600.000,00</b>	<b>5.557.000.000,00</b>	-	<b>28,56</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.400.000.000,00	9.000.000.000,00	15.681.600.000,00	5.557.000.000,00	-	28,56
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tabel di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 tahun terakhir kebijakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Daerah atau BUMD lainnya terkecuali tahun 2024 yang tidak mengalokasikan penyertaan modal. Untuk itu, dalam proyeksi ke depan kemungkinan besar pengeluaran pembiayaan terutama untuk penyertaan modal perlu untuk dialokasikan.

### **2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

#### **2.2.2.1. Neraca Daerah**

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Berikut ini perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.80

Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>68.551.734.375,52</b>	<b>72.407.417.274,62</b>	<b>55.925.791.785,76</b>	<b>62.113.996.633,99</b>	<b>189.306.993.980,93</b>
	Kas di Kas Daerah	27.630.977.631,60	31.078.547.558,72	25.074.165.272,40	37.841.555.958,81	177.063.262.292,36
	Kas di Bendahara Penerimaan	481.766.237,00			20.000,00	240.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran			1.092,00		25.000,00
	Kas di BLUD	22.784.687.328,02	32.465.667.581,50	28.615.396.588,22	19.414.855.687,10	7.990.322.766,38
	Kas Dana BOS	2.145.205.529,91	1.608.355.381,62	579.939.195,99		-
	Kas Lainnya		16.521.180,00			-
	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.509.097.648,99	7.238.325.572,78	1.656.289.637,15	2.522.630.643,63	2.408.331.427,77
	Saldo Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah				12.470.920,65	-
	Kas Dana BOSP				75.918.818,80	406.168.704,42
	Kas Dana BOK Puskesmas				2.246.544.605,00	1.438.643.790,00
	<b>Investasi Jangka Pendek</b>					
	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>136.879.509.482,64</b>	<b>205.733.406.926,27</b>	<b>171.502.111.819,04</b>	<b>205.316.458.395,29</b>	<b>187.264.956.554,25</b>
	Piutang Pajak Daerah	92.855.375.771,16	101.490.093.896,12	110.741.394.933,67	119.721.633.925,40	125.127.211.638,89
	Piutang Retribusi	1.567.410.583,00	1.159.922.258,00	644.580.304,00	881.123.379,00	422.905.609,00

No	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.513.215.969,08	76.305.227.248,15	28.247.095.178,37	16.975.869.478,89	-
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.943.507.159,40	26.778.163.524,00	31.869.041.403,00	67.737.831.612,00	19.664.978.016,10
		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					41.993.205.593,00
		Piutang Lainnya	63.949.447,25	61.627.572,26	60.999.447,26	59.959.947,26	56.655.697,26
		Penyisihan Piutang	(50.284.724.965,27)	(55.195.830.081,02)	(68.633.709.492,83)	(76.484.079.588,84)	(82.046.951.279,41)
		Beban Dibayar Dimuka	59.974.108,68	11.359.084,11	11.359.084,11	9.081.990,83	9.155.786,30
		Persediaan	35.740.134.069,15	43.559.831.499,05	30.411.226.506,65	35.216.675.150,36	41.562.335.449,46
		<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>191.010.576.517,97</b>	<b>266.577.812.275,29</b>	<b>189.277.779.149,99</b>	<b>226.232.092.528,89</b>	<b>336.153.146.188,79</b>
		<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
		<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>366.690.025,00</b>	<b>369.790.558,00</b>	<b>375.472.377,00</b>	<b>378.797.400,00</b>	<b>380.047.400,00</b>
		Dana Bergulir	366.690.025,00	369.790.558,00	375.472.377,00	378.797.400,00	380.047.400,00
		<b>Jumlah investasi jangka panjang non permanen</b>	<b>366.690.025,00</b>	<b>369.790.558,00</b>	<b>375.472.377,00</b>	<b>378.797.400,00</b>	<b>380.047.400,00</b>
		Investasi Jangka Panjang Permanen	202.209.925.850,49	227.904.423.061,79	244.172.015.690,30	249.994.268.053,86	250.973.346.928,38
		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	202.209.925.850,49	227.904.423.061,79	244.172.015.690,30	249.994.268.053,86	250.973.346.928,38
		<b>Jumlah investasi jangka panjang permanen</b>	<b>202.209.925.850,49</b>	<b>227.904.423.061,79</b>	<b>244.172.015.690,30</b>	<b>249.994.268.053,86</b>	<b>250.973.346.928,38</b>
		<b>Jumlah investasi jangka panjang</b>	<b>202.576.615.875,49</b>	<b>228.274.213.619,79</b>	<b>244.547.488.067,30</b>	<b>250.373.065.453,86</b>	<b>251.353.394.328,38</b>

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ASET TETAP</b>					
	Tanah	618.717.715.325,67	648.584.520.775,67	697.382.069.369,67	746.095.174.375,67	785.577.678.606,67
	Peralatan dan Mesin	638.517.628.408,98	733.982.173.396,98	813.497.157.087,62	893.989.481.308,24	948.328.874.756,75
	Gedung dan Bangunan	1.103.815.372.611,85	1.160.750.855.329,67	1.018.728.579.179,03	1.063.995.151.753,16	1.107.460.821.453,93
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.156.818.697.713,10	1.176.836.094.412,71	1.204.375.070.817,63	1.241.505.811.161,36	1.305.543.763.407,88
	Aset Tetap Lainnya	108.146.910.004,48	126.077.847.268,48	141.287.656.161,16	162.959.864.150,16	185.590.033.953,30
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.086.600.679,04	23.720.546.404,32	20.636.240.949,02	21.258.920.792,57	35.418.505.133,75
	Akumulasi Penyusutan	(1.334.229.033.172,05)	(1.471.242.915.689,72)	(1.601.807.398.321,95)	(1.743.628.220.318,00)	(1.913.719.313.041,38)
	<b>Jumlah aset tetap</b>	<b>2.315.873.891.571,07</b>	<b>2.398.709.121.898,11</b>	<b>2.294.099.375.242,18</b>	<b>2.386.176.183.223,16</b>	<b>2.454.200.364.270,90</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>71.294.233.314,97</b>	<b>68.835.906.583,05</b>	<b>229.826.643.122,10</b>	<b>229.020.478.272,51</b>	<b>46.291.433.637,87</b>
	Tagihan Jangka Panjang	32.263.625,01	17.185.500,01	2.785.500,01	9.693.750,00	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	43.338.604.175,97	41.260.944.508,97	192.073.343.437,34	197.041.865.783,01	-
	Aset Tidak Berwujud	592.517.810,00	693.625.415,00	554.281.194,00	730.878.212,00	484.577.610,00
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.515.171.000,00	3.898.370.050,00	554.281.194,00	4.421.347.560,00	4.454.146.560,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.922.653.190,00)	(3.204.744.635,00)		(3.690.469.348,00)	(3.969.568.950,00)
	Aset Lain-lain	27.330.847.703,99	26.864.151.159,07	33.856.393.501,75	27.675.049.527,50	45.432.052.027,87
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			3.339.839.489,00	3.562.991.000,00	374.804.000,00
	Aset Lain-lain	33.814.246.283,67	32.918.220.011,12		59.381.020.354,39	50.725.179.900,91

No	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(6.483.398.579,68)	(6.054.068.852,05)	(22.829.606.434,64)	(31.705.970.826,89)	(5.293.127.873,04)
	Properti Investasi						164.178.553.258,07
	<b>Jumlah aset lainnya</b>		<b>71.294.233.314,97</b>	<b>68.835.906.583,05</b>	<b>229.826.643.122,10</b>	<b>229.020.478.272,51</b>	<b>46.291.433.637,87</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.780.755.317.279,50</b>	<b>2.962.397.054.376,24</b>	<b>2.957.751.285.581,57</b>	<b>3.091.801.819.478,42</b>	<b>3.252.176.891.684,01</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>		<b>28.888.073.443,94</b>	<b>47.748.621.227,01</b>	<b>40.804.193.027,59</b>	<b>95.409.762.992,85</b>	<b>106.937.220.890,87</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>28.888.073.443,94</b>	<b>47.748.621.227,01</b>	<b>40.804.193.027,59</b>	<b>95.409.762.992,85</b>	<b>106.937.220.890,87</b>
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		16.521.180,00			152.585,00
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					-
		Pendapatan Diterima Dimuka	1.406.450.321,30	1.178.054.856,77	917.259.734,03	483.556.278,90	729.259.603,86
		Utang Belanja dan transfer	27.326.306.372,64	45.588.139.142,65	39.886.383.414,99	94.925.647.498,73	106.167.260.919,33
		Utang Jangka Pendek Lainnya	155.316.750,00	965.906.047,59	549.878,57	559.215,22	40.547.782,68
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>28.888.073.443,94</b>	<b>47.748.621.227,01</b>	<b>40.804.193.027,59</b>	<b>95.409.762.992,85</b>	<b>106.937.220.890,87</b>
	<b>EKUITAS</b>		<b>2.751.867.243.835,56</b>	<b>2.914.648.433.149,23</b>	<b>2.916.947.092.553,98</b>	<b>2.996.392.016.485,57</b>	<b>3.145.183.015.095,88</b>
		<b>EKUITAS</b>	2.751.867.243.835,56	2.914.648.433.149,23	2.916.947.092.553,98	2.996.392.016.485,57	3.145.183.015.095,88
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>2.751.867.243.835,56</b>	<b>2.914.648.433.149,23</b>	<b>2.916.947.092.553,98</b>	<b>2.996.392.016.485,57</b>	<b>3.145.183.015.095,88</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>2.780.755.317.279,50</b>	<b>2.962.397.054.376,24</b>	<b>2.957.751.285.581,57</b>	<b>3.091.801.779.478,42</b>	<b>3.252.120.235.986,75</b>

Tabel 2.81  
Tingkat Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Kabupaten Buleleng Periode  
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
LIKUIDITAS					
Rasio Lancar	6,61	5,58	4,64	3,17	3,14
Rasio Cepat	5,37	4,67	3,89	2,80	2,75
SOLVABILITAS					
Rasio utang terhadap Aset	0,01	0,02	0,01	0,03	0,03

Sumber: Laporan Keuangan Daerah (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan rasio likuiditas, yaitu Rasio Lancar dan Rasio Cepat menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, kemampuan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total asset juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik.

#### 2.2.2.2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.82  
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020–2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.003.219.088.785,89</b>	<b>2.083.214.717.688,96</b>	<b>2.078.952.625.994,14</b>	<b>2.216.868.306.839,36</b>	<b>2.534.670.913.550,42</b>
Pendapatan Asli Daerah	318.986.891.632,31	391.988.445.424,21	410.564.891.258,14	460.500.058.608,71	509.474.781.931,42
<b>RASIO PAD</b>	<b>15,92</b>	<b>18,82</b>	<b>19,75</b>	<b>20,77</b>	<b>20,10</b>
Pendapatan Transfer	1.573.171.787.153,58	1.574.989.396.000,75	1.645.523.802.691,00	1.723.164.796.195,00	1.990.090.996.222,00
<b>RASIO Pendapatan Transfer</b>	<b>78,53</b>	<b>75,60</b>	<b>79,15</b>	<b>77,73</b>	<b>78,52</b>

Sumber: Laporan Keuangan Daerah (diolah)

#### 2.2.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan

untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buleleng selama 3 tahun terakhir. Tabel berikut menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 2.83

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun Terakhir dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur</b>	<b>807.030.781.147,76</b>	<b>847.840.859.277,00</b>	<b>884.709.856.539,00</b>	<b>954.572.961.969,00</b>	<b>1.155.026.896.491,70</b>
<b>B</b>	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>2.010.501.484.210,68</b>	<b>2.079.375.555.969,86</b>	<b>2.095.417.730.303,00</b>	<b>2.210.680.101.991,13</b>	<b>2.407.357.424.983,48</b>
1	Total Realisasi Belanja	2.006.101.484.210,68	2.070.375.555.969,86	2.079.736.130.303,00	2.205.123.101.991,13	2.407.357.424.983,48
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	4.400.000.000,00	9.000.000.000,00	15.681.600.000,00	5.557.000.000,00	-
	<b>Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Apratur Terhadap Total Pengeluaran (%)</b>	<b>40,14%</b>	<b>40,77%</b>	<b>42,22%</b>	<b>43,18%</b>	<b>48,04%</b>

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Proporsi pemenuhan belanja aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren meningkat, dan secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada tahun 2020, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 40,14% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya meningkat pada tahun 2021 menjadi hanya sebesar 40.77% dan kemudian naik kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 42.22% selanjutnya meningkat menjadi 43.18 % di tahun 2023, pada tahun 2024 realisasinya meningkat menjadi 48.04%. Proporsi di tahun 2020 menjadi proporsi paling rendah selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

#### **2.2.2.4. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah Kabupaten Buleleng berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Buleleng adalah penyertaan modal.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran.

Jika dilihat dari tabel 2.84 di bawah, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami fluktuasi. Penggunaan SiLPA ini tentu dipengaruhi oleh SiLPA yang dituangkan setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi *fiscal distress* (tekanan anggaran). Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 2.83 di atas, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMD. Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 2.84

Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>2.003.219.088.785,89</b>	<b>2.083.214.717.688,96</b>	<b>2.078.952.625.994,14</b>	<b>2.216.868.306.839,36</b>	<b>2.534.670.913.550,42</b>
2	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.006.101.484.210,68</b>	<b>2.070.375.555.969,86</b>	<b>2.079.736.130.303,00</b>	<b>2.205.123.101.991,13</b>	<b>2.407.357.424.983,48</b>
3	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4.400.000.000,00</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>15.681.600.000,00</b>	<b>5.557.000.000,00</b>	-
<b>A</b>	<b>Surplus (Defisit) Riil</b>	<b>(2.882.395.424,79)</b>	<b>12.839.161.719,10</b>	<b>(78.350.430.886,00)</b>	<b>11.745.204.848,23</b>	<b>127.193.798.866,94</b>
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan	75.834.129.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.195.113,99
	Penggunaan SiLPA	75.834.129.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.195.113,99
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>75.834.129.800,31</b>	<b>68.551.734.375,52</b>	<b>72.390.896.094,62</b>	<b>55.925.791.785,76</b>	<b>62.113.195.113,99</b>
<b>A+B</b>	<b>SILPA</b>	<b>68.551.734.375,52</b>	<b>72.390.896.094,62</b>	<b>55.925.791.785,76</b>	<b>62.113.996.633,99</b>	<b>189.306.993.980,93</b>

Sumber: Diolah dari LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tabel 2.86 di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2022 sedangkan surplus terjadi di tahun 2021, 2023 dan 2024. Meskipun terjadi defisit riil selama 2 tahun terakhir dan surplus 3 tahun terakhir, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2020 terjadi defisit riil yang mencapai sebesar Rp. 2.882.395.424,79 ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp. 75,834,129,800.31 sehingga SILPA menjadi sebesar Rp. 68.551.734.375,52. Kondisi berbeda dengan tahun 2020, dimana tahun 2021 terjadi surplus riil sebesar Rp. 12.839.161.719,10 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp. 68,551,734,375.52 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp. 72.390.896.094,62. Tahun 2022 kembali terjadi defisit riil sebesar -Rp. 78.350.430.886,00 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp. 72.390.896.094,62 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp. 55.925.791.785,76. Terakhir, pada tahun 2023 terjadi realisasi surplus riil dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.11.745.204.848,23 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp. 55.925.791.785,76 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi 62.113.996.633,99. Kondisi tahun 2024 terjadi surplus riil sebesar Rp. 127,193,798,866.94 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp. 62,113,195,113.99 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi Rp. 189,306,993,980.93.

### **2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan**

#### **2.2.3.1. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah**

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2026-2030 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.85  
Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline	PROYEKSI				
	Tahun 2024	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,534,670,913,550.42</b>	<b>2,633,053,864,129.00</b>	<b>2,608,564,364,396.26</b>	<b>2,712,839,709,736.27</b>	<b>2,832,146,053,983.83</b>	<b>2,906,763,021,654.01</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>509,474,781,931.42</b>	<b>760,942,122,325.00</b>	<b>850,098,604,637.39</b>	<b>923,265,635,624.15</b>	<b>1,010,315,527,205.17</b>	<b>1,051,384,087,828.50</b>
Pendapatan Pajak Daerah	251,948,162,383.77	406,256,966,325.00	472,569,221,023.59	537,360,218,928.87	615,550,154,856.12	647,841,937,563.80
Hasil Retribusi Daerah	29,404,398,277.45	304,607,156,000.00	325,845,110,462.64	332,517,990,337.27	339,327,522,027.11	346,276,503,981.84
Hasil Pengel Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30,720,076,754.33	38,225,000,000.00	39,697,875,588.25	41,227,503,629.05	42,816,070,892.88	44,465,848,410.29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	197,402,144,515.87	11,853,000,000.00	11,986,397,562.91	12,159,922,728.97	12,621,779,429.07	12,799,797,872.57
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,990,090,996,222.00</b>	<b>1,872,111,741,804.00</b>	<b>1,758,465,759,758.87</b>	<b>1,789,574,074,112.11</b>	<b>1,821,830,526,778.65</b>	<b>1,855,378,933,825.52</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,571,261,336,041.00</b>	<b>1,544,994,399,000.00</b>	<b>1,475,141,997,995.31</b>	<b>1,488,436,156,159.65</b>	<b>1,501,823,978,994.49</b>	<b>1,515,449,282,566.85</b>
DTU-Dana Bagi Hasil	24,953,732,000.00	29,867,451,000.00	31,995,019,277.32	33,114,979,026.67	34,274,142,060.41	35,356,224,393.64
Dana Alokasi Umum	1,001,384,850,681.00	1,004,517,209,000.00	909,884,925,103.91	910,471,880,655.86	911,058,836,207.81	911,646,134,727.33
Dana Alokasi Khusus Fisik	60,610,125,474.00	4,500,941,000.00	5,446,138,610.00	5,990,752,471.00	6,589,827,718.10	7,248,810,489.91
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	319,080,565,886.00	345,375,184,000.00	362,201,053,200.00	370,824,887,800.00	379,448,722,400.00	388,288,152,865.00
<b>Dana insentif Daerah</b>	<b>32,877,739,000.00</b>	<b>22,179,842,000.00</b>	<b>23,314,284,069.71</b>	<b>23,859,675,604.57</b>	<b>24,405,067,139.42</b>	<b>24,963,843,240.75</b>

URAIAN	Baseline	PROYEKSI				
	Tahun 2024	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Dana Desa</b>	<b>132,354,323,000.00</b>	<b>138,553,772,000.00</b>	<b>142,300,577,734.37</b>	<b>144,173,980,601.56</b>	<b>146,047,383,468.75</b>	<b>147,946,116,850.23</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>418,829,660,181.00</b>	<b>327,117,342,804.00</b>	<b>283,323,761,763.56</b>	<b>301,137,917,952.47</b>	<b>320,006,547,784.17</b>	<b>339,929,651,258.66</b>
<b>Transfer antar daerah</b>						
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	251,472,859,336.00	147,518,310,849.00	158,323,761,763.56	171,238,159,963.72	185,207,031,806.67	200,230,377,292.41
Bantuan Keuangan Provinsi dan kabupaten lainnya	167,356,800,845.00	179,599,031,955.00	125,000,000,000.00	129,899,757,988.75	134,799,515,977.50	139,699,273,966.25
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>35,105,135,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Lain-lain	35,105,135,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Prundang-Undangan						

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD

Pendapatan Daerah tahun 2026-2030 secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,633 triliun rupiah lebih dan di akhir periode RPJMD 2025-2029 menjadi 2,906 triliun rupiah lebih. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dipaang proyeksi mengingat sudah masuk didalam komponen PAD pada sub retribusi daerah.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2020 – 2024 dan kondisi sosial ekonomi atas dampak ekonomi lokal nasional dan global sebagai dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta target pertumbuhan lapangan usaha pembentuk PDRB yang berpengaruh terhadap PAD. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026-2030 diproyeksi akan meningkat. Tahun 2026 PAD diproyeksi sebesar 760,796 Milyar rupiah lebih dan setiap tahunnya diproyeksi meningkat dan tahun 2030 sebesar 1,051 Triliun rupiah lebih. Semua komponen PAD diproyeksikan mengalami peningkatan terkecuali Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai akibat adanya kebijakan komponen pendapatan yang masuk ke Retribusi daerah. Proyeksi pendapatan transfer dihitung dengan memperhatikan realisasi pada tahun 2024 dan kondisi tahun 2025. komponen pendapatan transfer dari dana perimbangan pada dana bagi hasil (DBH) diasumsikan meningkat, sumber dana DAU diproyeksikan atau diasumsikan penerimaannya mengalami peningkatan sehubungan dengan adanya formasi dan pengangkatan P3K dan PNS serta kebijakan DAK walaupun dialokasikan berdasarkan tematik dan lokasi prioritas yang ditentukan sesuai kebijakan nasional tetapi terdapat juga kebijakan DAK regular dan pemerataan, Pada komponen Dana Insentif Daerah diproyeksikan meningkat dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2024 dan kondisi tahun 2025 dan berbagai pengakuan kinerja daerah oleh pemerintah pusat sedangkan komponen Dana Desa diproyeksikan sesuai penilaian kinerja desa tahun sebelumnya. untuk penentuan alokasi kinerja dana desa tahun berikutnya.

Pada pendapatan transfer antar daerah yang diproyeksikan pada Dana Bagi Hasil Provinsi dirancang mengalami penurunan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah pusat, disamping itu adanya perubahan kebijakan alokasi transfer keuangan daerah dimana Opsen Pajak/tambahan Pajak menurut persentase tertentu pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB menjadi komponen kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) diberlakukannya opsen pajak mulai efektif di tahun 2025. Sedangkan pos Bantuan Keuangan dirancang meningkat. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan menurun dari penerimaan tahun 2025, walaupun tahun-tahun sebelumnya ada penerimaan hibah dan penerimaan lainnya namun kedepannya belum dapat dipastikan, disamping itu adanya perubahan kebijakan alokasi transfer keuangan daerah pada Dana Kapitasi JKN FKTP menjadi komponen kelompok dana Retribusi daerah yang mulai tahun 2025.

#### **2.2.3.2. Proyeksi Belanja Daerah**

Proyeksi Belanja Daerah disajikan dalam tabel 2.88. Belanja Daerah tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,93 persen, tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,478 triliun rupiah lebih dan di akhir periode RPJMD 2025-2029 menjadi 2,867 triliun rupiah lebih. Proyeksi belanja daerah memperhitungkan arahan penggunaan sumber-sumber pendapatan dan kebutuhan prioritas daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.3.2.1. Belanja Operasi diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79 persen dengan perincian :

- a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar -0,82 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ditahun 2025, disisi lainnya memperhitungkan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun.
- b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 7,77

persen per tahun. Kenaikan tersebut diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage, namun demikian perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran untuk antisipasi kegiatan mendesak.

c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan menurun rata-rata sebesar -8,2 persen pertahun.

d. Proyeksi belanja bantuan sosial tahun 2025 diasumsikan meningkat rata-rata per tahunnya sebesar 1,38 persen pertahun

2.2.3.2.2. Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,79 persen.

2.2.3.2.3. Belanja Tak Terduga diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25 persen.

2.2.3.2.4. Belanja Transfer, Belanja transfer dialokasikan kepada desa berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dan dana desa. Belanja transfer diproyeksikan sesuai ketentuan perundangan dimana 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk bagi hasil pada pemerintah desa dan 10 persen dari dana transfer umum untuk bantuan keuangan umum pada desa dan bantuan keuangan khusus pada desa tetap dialokasikan, sedangkan dana desa diasumsikan meningkat mengikuti besaran dana desa tahun 2025. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan SPM, pelayanan dasar dan Prioritas pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Tabel 2.86  
Proyeksi Belanja Daerah tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	(%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,407,477,114,683.48</b>	<b>2,867,153,864,129.00</b>	<b>2,672,669,364,396.27</b>	<b>2,776,228,709,736.27</b>	<b>2,893,758,553,983.83</b>	<b>2,970,560,021,654.01</b>	<b>0.99</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,937,542,023,599.43</b>	<b>2,189,089,985,295.82</b>	<b>2,097,545,588,436.68</b>	<b>2,166,275,693,174.35</b>	<b>2,210,605,797,911.46</b>	<b>2,254,935,902,648.46</b>	0.79
Belanja pegawai	1,155,026,896,491.70	1,480,091,410,049.14	1,468,091,410,049.15	1,456,091,410,049.72	1,444,091,410,049.74	1,432,091,410,049.63	(0.82)
Belanja Barang Jasa	643,244,315,051.73	536,023,553,214.68	544,454,178,387.53	619,484,283,124.63	670,614,387,861.72	720,744,492,598.83	7.77
Belanja Hibah	131,378,812,056.00	164,356,483,500.00	76,500,000,000.00	82,000,000,000.00	87,000,000,000.00	93,000,000,000.00	(8.32)
Belanja Bansos	7,892,000,000.00	8,618,538,532.00	8,500,000,000.00	8,700,000,000.00	8,900,000,000.00	9,100,000,000.00	1.38
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>183,312,147,805.05</b>	<b>375,897,417,100.68</b>	<b>248,793,770,638.47</b>	<b>274,432,529,065.49</b>	<b>337,084,307,088.47</b>	<b>363,565,922,088.66</b>	<b>1.79</b>
Belanja Modal Tanah	672,654,000.00	2,000,000.00	5,000,000,000.00	14,279,159.00	17,705,546.00	21,131,932.00	62,460.91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,016,056,933.00	41,896,413,929.78	42,343,770,532.82	77,671,994,143.53	78,351,905,653.35	79,031,817,163.14	21.56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,123,065,723.76	259,194,766,300.00	112,000,000,000.00	20,829,444,538.53	11,390,317,817.37	16,215,153,062.50	(35.29)

URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	(%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	63,775,377,784.22	46,395,564,800.90	70,000,000,000.00	155,893,171,802.46	226,727,099,333.45	247,126,901,876.40	57.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22,959,845,424.00	27,102,623,150.00	16,548,747,790.35	17,093,943,456.52	17,639,139,122.70	18,184,334,788.87	(7.34)
Belanja Modal Aset Lainnya	2,765,147,940.07	1,306,048,920.00	2,901,252,315.30	2,929,695,965.45	2,958,139,615.60	2,986,583,265.75	31.26
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>53,013,101.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>25.00</b>
Belanja Tak Terduga	53,013,101.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	25.00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>286,569,930,178.00</b>	<b>297,166,461,732.50</b>	<b>316,330,005,321.12</b>	<b>325,520,487,496.43</b>	<b>336,068,448,983.89</b>	<b>342,058,196,916.89</b>	<b>3.59</b>
Belanja Transfer Bagi Hasil	24,497,854,156.00	70,436,912,232.50	79,841,433,148.62	86,987,820,926.61	95,487,767,688.32	99,411,844,154.56	9.05
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	262,072,076,022.00	226,729,549,500.00	236,488,572,172.49	238,532,666,569.81	240,580,681,295.57	242,646,352,762.33	1.72

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD

### **2.2.3.3. Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan membaik setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan pembiayaan dari sumber Silpa diproyeksikan meningkat setiap tahun. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten untuk melakukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank (LKB) dengan pertimbangan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur publik. Disisi pengeluaran pembiayaan dirancang untuk penyertaan modal kepada BUMD dan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pinjaman daerah Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2026-2030 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.87  
Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI					Rata-rata Pertumbuhan
		2026	2027	2028	2029	2030	(%)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>62.113.996.634,00</b>	<b>234,100,000,000.00</b>	<b>64,105,000,000.00</b>	<b>63,389,000,000.00</b>	<b>61,612,500,000.00</b>	<b>63,797,000,000.00</b>	<b>(18.25)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>62.113.996.634,00</b>	<b>265,000,000,000.00</b>	<b>128,210,000,000.00</b>	<b>126,778,000,000.00</b>	<b>123,225,000,000.00</b>	<b>127,594,000,000.00</b>	<b>(13.00)</b>
Silpa/ Silpa Riil	62.113.996.634,00	65,000,000,000.00	128,210,000,000.00	126,778,000,000.00	123,225,000,000.00	127,594,000,000.00	24.22
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pinjaman Daerah	0,00	200,000,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>30,900,000,000.00</b>	<b>64,105,000,000.00</b>	<b>63,389,000,000.00</b>	<b>61,612,500,000.00</b>	<b>63,797,000,000.00</b>	<b>26.77</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan Modal	0,00	30,900,000,000.00	6,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	10,000,000,000.00	25.45
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pinjaman	0,00	0,00	57,605,000,000.00	61,389,000,000.00	57,612,500,000.00	53,797,000,000.00	(2.07)
<b>PEMBIAYAAN BERSIH</b>	<b>62.113.996.634,00</b>	<b>234,100,000,000.00</b>	<b>64,105,000,000.00</b>	<b>63,389,000,000.00</b>	<b>61,612,500,000.00</b>	<b>63,797,000,000.00</b>	<b>(18.25)</b>

sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD

## **1. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama**

Belanja dan Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Belanja dan Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut

### **2.2.3.4.1. Belanja Operasi**

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari dan gaji P3K paruh waktu, belanja operasional perangkat daerah berupa belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan operasional lainnya serta belanja premi BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, belanja LPJU, Belanja PBI jaminan kesehatan.
- c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah pada lembaga yang dibentuk berdasarkan perundangan dan Hibah partai Politik dan hibah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. Belanja Bansos, terdiri dari Bansos bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **2.2.3.4.2. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan hibah yang tidak direncanakan.

### **2.2.3.4.3. Belanja Transfer**

Belanja transfer dialokasikan kepada pemerintah desa berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dan dana desa. Belanja transfer diproyeksikan sesuai ketentuan perundangan dimana 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk bagi hasil pada pemerintah desa dan 10 persen dari dana transfer

umum untuk bantuan keuangan umum pada desa, sedangkan dana desa dialokasikan sesuai besaran dana desa sesuai tahun 2025 dan dan diproyeksikan ketahun berikutnya serta nantinya akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana desa yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah.

#### **2.2.3.4.4. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pinjaman daerah namun dalam periode tahun 2020-2024 tidak dialokasikan pembentukan dana cadangan dan selanjutnya pada periode 2026-2030 dapat dialokasikan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan berlaku. pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 2026-2030 memperhatikan ketentuan penyertaan modal daerah, berdasarkan hal tersebut pengeluaran pembiayaan periode 2026-2030 setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.88

Tabel 2.88  
Proyeksi Belanja Wajib dan Pegeluaran Pembiayaan Wajib Daerah  
Tahun 2026 – 2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
<b>BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN WAJIB DAERAH</b>	<b>1,789,633,028,249.70</b>	<b>2,035,957,871,781.64</b>	<b>2,091,326,415,370.27</b>	<b>2,097,800,897,546.15</b>	<b>2,103,572,359,033.63</b>	<b>2,106,746,606,966.52</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,388,750,371,499.70</b>	<b>1,702,891,410,049.14</b>	<b>1,700,891,410,049.15</b>	<b>1,698,891,410,049.72</b>	<b>1,695,891,410,049.74</b>	<b>1,690,891,410,049.63</b>
Belanja pegawai	1.190.427.371.499,70	1,480,091,410,049.14	1,468,091,410,049.15	1,456,091,410,049.72	1,444,091,410,049.74	1,432,091,410,049.63
Belanja Barang Jasa	186,950,000,000,00	222,800,000,000.00	232,800,000,000.00	242,800,000,000.00	251,800,000,000.00	258,800,000,000.00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.753.252.485,00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>
Belanja Tak Terduga	4.753.252.485,00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>396.129.404.265,00</b>	<b>297,166,461,732.50</b>	<b>316,330,005,321.12</b>	<b>325,520,487,496.43</b>	<b>336,068,448,983.89</b>	<b>342,058,196,916.89</b>
Belanja Transfer Bagi Hasil	34.164.458.665,00	70,436,912,232.50	79,841,433,148.62	86,987,820,926.61	95,487,767,688.32	99,411,844,154.56
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	361.964.945.600,00	226,729,549,500.00	236,488,572,172.49	238,532,666,569.81	240,580,681,295.57	242,646,352,762.33
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>30,900,000,000.00</b>	<b>64,105,000,000.00</b>	<b>63,389,000,000.00</b>	<b>61,612,500,000.00</b>	<b>63,797,000,000.00</b>
Penyertaan Modal		30,900,000,000.00	6,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo pinjaman	0,00	-	57,605,000,000.00	61,389,000,000.00	57,612,500,000.00	53,797,000,000.00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD

## **2. Penghitungan Kapasitas Riil Keungan Daerah**

Dari uraian-uraian sebelumnya, terkait proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja periodik wajib serta pengelurana pembiayaan wajib maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2026-2030) disajikan dalam tabel 2.89

Tabel 2.89  
Penghitungan Kapasitas riil Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	Baseline Tahun 2024	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	2.605.840.312.015,00	2,633,053,864,129.00	2,608,564,364,396.26	2,712,839,709,736.27	2,832,146,053,983.83	2,906,763,021,654.01
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	62.113.996.634,00	65,000,000,000.00	128,210,000,000.00	126,778,000,000.00	123,225,000,000.00	127,594,000,000.00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah		200,000,000,000.00				
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>2,667,954,308,649.00</b>	<b>2,898,053,864,129.00</b>	<b>2,736,774,364,396.26</b>	<b>2,839,617,709,736.27</b>	<b>2,955,371,053,983.83</b>	<b>3,034,357,021,654.01</b>
Dikurangi:						
Belanja Wajib Mengikat	1,770,891,995,028.97	2,035,957,871,781.64	2,091,326,415,370.27	2,097,800,897,546.15	2,103,572,359,033.63	2,106,746,606,966.52
<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>878,321,280,399.30</b>	<b>862,095,992,347.36</b>	<b>645,447,949,026.00</b>	<b>741,816,812,190.12</b>	<b>851,798,694,950.19</b>	<b>927,610,414,687.49</b>

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD

Tabel 2.89 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buleleng cukup tinggi dan lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2024. Ini dikarenakan adanya dampak dari kebijakan pemerintah untuk pengangkatan P3K. Kedepan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2024 ini, baru pada tahun 2029 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng akan membaik dari tahun anggaran sebelumnya. Kemudian, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

## **2.3. Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.3.1. Permasalahan Pembangunan**

#### **2.3.1.1. Permasalahan Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Buleleng berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup

strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu dan hilir. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang paling luas diantara 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu 132.267,98 Ha, dengan panjang pantai ± 157,05 km. Secara topografi merupakan daerah datar dengan tingkat kemiringan landai (0-25%), Miring (25-40%) dan daerah Terjal dengan tingkat kemiringan > 40%. sehingga koneksitas antar wilayah belum merata. Permasalahan utama aspek geografis yang masih dihadapi dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Cakupan wilayah yang luas dan sebagian kecil kawasan kering.
2. Sebagian besar luas wilayah (58,12%), topografinya pada kemiringan dan terjal pada ketinggian 0-499,9 mdpl dengan dengan kontur berbukit.
3. Tingginya potensi bencana (bencana alam, bencana geologi dan Meteorologi).
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum dikelola dengan baik.
5. Curah hujan yang tidak menentu dan tidak merata.

#### **2.3.1.2. Permasalahan Demografis**

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena paling berperan dalam pembangunan baik sebagai subyek sekaligus obyek. Apabila tidak dikelola dengan baik jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah tersendiri dan menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Buleleng terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan imbas dari adanya kelahiran dan ditambah dengan pengaruh dari migrasi masuk dan tingkat kelahiran yang hampir seimbang dengan tingkat kematian, serta pertumbuhan penduduk yang relatif tetap. Sebanyak 68,49 persen penduduk produktif yang berada pada kisaran umur 15-64 tahun. Penduduk yang termasuk angkatan kerja hanya sekitar 79,77 persen terhadap penduduk usia kerja dan sisanya termasuk usia sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lain. Hal ini menimbulkan angka ketergantungan yang tinggi. Kepadatan penduduk juga belum merata antar wilayah sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Permasalahan demografis yang masih dihadapi 5 tahun mendatang antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat setiap tahun
2. Indek Pembangunan Manusia (IPM) masih berada dibawah provinsi

### **2.3.1.3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi**

Dengan kondisi wilayah yang paling luas di Provinsi Bali dengan sebagian merupakan wilayah berbukit, ada wilayah kering serta jumlah penduduk yang besar berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan ekonomi dimasyarakat, seperti peluang lapangan kerja yang sedikit, kualitas SDM yang belum memadai, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang masih terbatas, tingginya penduduk miskin, pengangguran dan berbagai masalah sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan ekonomi yang masih akan dihadapi 5 tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Nilai tukar petani masih belum optimal
3. Pemanfaatan potensi ekonomi belum maksimal.
4. Sebaran pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah dan antar sektor ekonomi.
5. Distribusi pendapatan kelompok 40% bawah masih rendah.
6. Pendapatan per Kapita Masyarakat masih rendah.
7. Sektor lapangan usaha UMKM, Koperasi dan Industri belum berkembang optimal.
8. Kesejahteraan petani dan ekonomi keluarga petani masih rendah.
9. Investasi sektor ekonomi di luar pariwisata masih perlu dipacu.
10. Kualitas tenaga kerja yang kurang sesuai dengan yang dibutuhkan di pasar kerja;

### **2.3.1.4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya**

Persentase kemiskinan Buleleng menempati posisi ke 8 (delapan) dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali, hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi berkisar 5-6 persen. Kemiskinan lebih banyak dibentuk akibat factor geografis, nilai-nilai sosial budaya minimnya kemudahan atau materi, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk. Permasalahan kesejahteraan sosial budaya yang berpotensi dihadapi dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng yang masih tinggi diangka 5,39 persen.
2. Eksistensi nilai-nilai kebudayaan Bali yang diterapkan dalam

- kehidupan bermasyarakat mengalami degradasi.
3. Rata-rata lama sekolah masih di bawah Provinsi Bali.
  4. Harapan Lama Sekolah (Tahun) masih di bawah Provinsi Bali.
  5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang tidak/belum bersekolah paling tinggi di Provinsi Bali.
  6. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 masih di bawah Provinsi Bali.
  7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun, Usia 13-15 Tahun, Usia 16-18 Tahun, dan Usia 19-24 Tahun belum tercapai 100%.
  8. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buleleng cukup rendah di Provinsi Bali.
  9. Sarana keolahragaan masih terbatas dan belum merata disetiap wilayah.
  10. Program beasiswa anak kurang mampu belum optimal.
  11. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, belum tercapai.

#### **2.3.1.5. Permasalahan Daya Saing Ekonomi Daerah**

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya dan aset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan keterkaitan tersebut menjadi sebuah model ekonomi dan sosial. Daya saing diperlukan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup serta untuk meningkatkan eksistensi ekonomi daerah menjadi kompetitif. Permasalahan daya saing ekonomi daerah yang berpotensi dihadapi dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Ekonomi Buleleng selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kontraksi dan berfluktuasi serta masih dibawah capaian provinsi.
2. Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Buleleng secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan kelima (masih rendah dibanding kabupaten lain di Bali).
3. Daya saing SDM masih rendah (IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali).
4. Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mantap, dimana dari panjang jalan kabupaten sepanjang 949,82 Km masih menyisakan kondisi rusak berat dan sedang.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan yang ada belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat jika

dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Buleleng.

6. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Buleleng.

Dalam konteks pembangunan daerah, indikator makro pembangunan daerah menjadi acuan penting dalam perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator makro pembangunan daerah ini mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan dinamika perekonomian suatu daerah. Indikator ini diukur melalui persentase peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun, yang menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif sangat dipengaruhi oleh sektor industri dan perdagangan. Sektor industri, termasuk manufaktur dan pengolahan sumber daya alam, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan PDB. Selain itu, sektor perdagangan berperan dalam distribusi barang dan jasa, yang meningkatkan aktivitas ekonomi. Kebijakan yang mendukung investasi, seperti insentif bagi pelaku usaha dan pengembangan infrastruktur, juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga dapat berkontribusi, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat

Tingkat kemiskinan, di sisi lain, menjadi indikator yang menunjukkan efektivitas program-program sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menghitung persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik pula kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup. Penurunan tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Program pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Sektor kesehatan juga

berperan penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang baik, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup. Selain itu, sektor pertanian dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke pembiayaan, juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang mencerminkan ketersediaan lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Pengangguran yang tinggi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah lapangan kerja yang ada. Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh sektor ketenagakerjaan dan pelatihan kerja. Sektor ini mencakup pengembangan program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Selain itu, sektor investasi yang menciptakan lapangan kerja baru, seperti infrastruktur dan teknologi informasi, juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM) juga dapat menciptakan peluang kerja yang signifikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup masyarakat, yang meliputi tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, tetapi juga memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. IPM yang tinggi berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sektor pendidikan harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sektor kesehatan harus menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk program imunisasi dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, sektor ekonomi yang kuat dengan lapangan kerja yang memadai akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan IPM. Program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan langsung tunai dan program kesehatan, juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Rasio gini sebagai indikator tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah, menjadi indikator penting lainnya. Rasio ini memberikan informasi tentang distribusi pendapatan diantara penduduk, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang inklusif. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio gini dapat dipengaruhi oleh sektor ekonomi dan kebijakan redistribusi. Sektor ekonomi yang inklusif, seperti pengembangan UKM dan koperasi, dapat membantu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan perpajakan yang progresif dan program-program sosial yang menysar kelompok rentan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Sektor perumahan dan infrastruktur juga berperan dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan bagi semua lapisan masyarakat, yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan

Kesenjangan antara pencapaian dan target indikator makro pembangunan menandakan adanya permasalahan pada sektor- sektor yang berperan dalam pemenuhan capaian indikator makro pembangunan di daerah. Identifikasi terhadap permasalahan masing- masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap akar permasalahan dari kesenjangan pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Permasalahan pada masing- masing urusan sebagaimana digambarkan pada uraian dibawah.

## **1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1) Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan**

Angka partisipasi siswa pada jenjang pendidikan di Kabupaten Buleleng belum memenuhi target yang direncanakan. Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan usia dini, angka partisipasi murni pada jenjang SD/ MI dan angka partisipasi murni pada jenjang SMP/ MT's seluruhnya belum memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: pertama, banyak siswa yang terpaksa meninggalkan sekolah untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga karena tekanan ekonomi, faktor ini sangat dominan di daerah pedesaan dan

di kalangan keluarga dengan tingkat sosioekonomi rendah dimana kontribusi ekonomi anak dianggap penting bagi kelangsungan hidup keluarga. Selanjutnya, masalah aksesibilitas dan jarak ke sekolah menengah juga berkontribusi terhadap pemenuhan target terutama di daerah pedesaan yang terpencil, banyak siswa harus menempuh jarak yang jauh dengan fasilitas transportasi yang minim untuk bisa sampai ke sekolah yang berkaitan dengan rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat SMP/MTs yang belum memenuhi standar ideal. Hal ini tidak hanya menambah beban waktu dan biaya, tetapi juga mengurangi motivasi siswa untuk tetap bersekolah. Kualitas pendidikan yang tidak merata juga membuat beberapa siswa merasa tidak mendapat manfaat yang cukup dari melanjutkan pendidikan. Di beberapa sekolah, fasilitas yang kurang memadai, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, serta sumber daya belajar yang terbatas menciptakan kesenjangan antara ekspektasi siswa dan realitas di sekolah. Ketidakmerataan ini membuat siswa kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena merasa upaya mereka tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Dengan adanya peningkatan jumlah dan kualitas sekolah menengah, pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, serta kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, diharapkan partisipasi siswa dalam pendidikan menengah akan meningkat. Hal ini termasuk pembangunan sekolah baru, peningkatan fasilitas, serta program beasiswa dan pelatihan keterampilan yang lebih luas. Semua langkah ini akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Meskipun peningkatan ini merupakan indikasi positif dari upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, angka-angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bali. Faktor-faktor penyebabnya dapat meliputi akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan berkualitas, tingkat sosioekonomi yang bervariasi, serta kurangnya program pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk menyamakan capaian pendidikan dengan provinsi, seperti peningkatan infrastruktur pendidikan dan pemberdayaan tenaga pendidik

Rasio guru dan murid untuk jenjang SD dan SMP sederajat di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan distribusi guru yang merata. Meskipun rasio secara keseluruhan sesuai standar, adanya daerah dengan kekurangan atau kelebihan guru menunjukkan perlunya penyesuaian dan redistribusi tenaga pendidik. Hal ini disebabkan oleh penyebaran demografis yang tidak merata dan kebijakan penempatan guru yang belum optimal. Upaya redistribusi dan peningkatan insentif untuk guru yang bertugas di daerah terpencil akan membantu mengatasi masalah ini

## 2) Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar menjadi elemen penting dalam indikator pembangunan makro daerah karena terkait erat dengan pencapaian umur harapan hidup serta indeks pembangunan manusia. Adanya kecenderungan peningkatan persentase gizi balita buruk pada periode 2019 sampai dengan 2023 memberi sinyal belum optimalnya pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Belum optimalnya pelayanan kesehatan juga terlihat dari capaian indikator angka kematian bayi di tahun 2023 yang masih berada di atas target sebesar 9 kematian untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Rasio tenaga kesehatan yang meliputi dokter dan perawat per satuan penduduk berdasarkan data di tahun 2023 belum sesuai dengan target rasio yang dicanangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana hal ini tentunya berpengaruh kepada belum optimalnya tingkat pelayanan yang bisa diberikan. Demikian juga dengan rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (pustu) yang berdasarkan data tahun 2023 juga belum sesuai dengan target rasio yang dicanangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Keterbatasan dari sisi kuantitas sumber daya ini memberi dampak yang relatif signifikan terhadap pencapaian kinerja pada urusan kesehatan. Sisi kualitas sumber daya kesehatan pun patut mendapat perhatian, upaya pemenuhan standar kompetensi tenaga kesehatan dan ketersediaan peralatan medis standar sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan akan memberi dampak pada peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat

### 3) Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang

Secara umum Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan selama periode 2021-2023, dimana capaian layanan air bersih tahun 2023 mencapai 87,09%. Beberapa tantangan yang masih harus dihadapi terkait peningkatan layanan air minum diantaranya tidak semua wilayah mempunyai potensi air baku/sumber air. Selain itu kondisi topografi yang berbukit menjadi kendala teknis dalam upaya distribusi air, sehingga memerlukan teknologi seperti pompa dan lain-lain. Kondisi ini mengindikasikan perlunya investasi anggaran dan perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat.

Sesuai dengan capaian kinerja tahun 2024 Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Buleleng sebesar 79,80%. Kondisi ini menunjukkan dari total panjang jalan kabupaten yaitu 949,82 Km sepanjang 143,53 Km jalan masih dalam kondisi rusak berat dan 48,34 Km jalan dalam kondisi rusak ringan. kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan agar infrastruktur tersebut dapat berfungsi dengan optimal dan menjamin keselamatan pengguna jalan

Hingga tahun 2024, sekitar dari 21% infrastruktur irigasi di Kabupaten Buleleng masih dalam kondisi rusak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, bangunan pelengkap jaringan irigasi yang memerlukan perbaikan, serta kerusakan akibat aktivitas manusia dan bencana alam. Irigasi yang tidak efisien berdampak langsung pada produktivitas pertanian, mengingat pasokan air yang konsisten dan cukup sangat penting untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk memperbaiki jaringan irigasi serta menerapkan teknologi irigasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pertanian di wilayah ini.

Saluran drainase dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan kabupaten pada tahun 2024 baru mencapai 45,88% yang menunjukkan bahwa sebagian besar saluran drainase di Kabupaten Buleleng masih memerlukan perbaikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Dimensi saluran drainase masih banyak tidak memenuhi standar, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah seringkali menyebabkan penyumbatan akibat sampah dan sedimentasi.

Ketidakmampuan saluran drainase yang ada dalam menangani aliran air hujan yang tinggi dapat menyebabkan genangan, banjir dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi saluran drainase, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase dan lingkungan.

Hingga tahun 2024, Kabupaten Buleleng memiliki 57 Tempat Pengelolaan Sampah dengan sistem *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dari 129 desa yang ada. Pengelolaan sampah berbasis sumber juga harus dilaksanakan sehingga diharapkan seluruh desa dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Keberadaan TPA Bengkala saat ini juga memiliki permasalahan penting dimanan kondisi TPA yang *overload* mendorong pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengadakan lahan untuk perluasan TPA Bengkala seluas 3,051 ha. Pengelolaan TPA eksisting maupun perencanaan perluasan TPA Benkala memerlukan perencanaan teknis dan manajemen persampahan sehingga sampah yang masuk ke TPA adalah sampah residu yang telah diolah didesa/tingkat basis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan investasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta kebijakan yang mendorong pembangunan lebih banyak TPS3R di seluruh desa.

Tata ruang memegang peranan penting dalam pembangunan karena berfungsi sebagai panduan utama dalam mengelola ruang dan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan Tata Ruang yang baik, pembangunan menjadi terstruktur dan terintegrasi antar sector dan wilayah, mencegah *urban sprawl* (perkembangan kota tak terkendali) dan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Permasalahan tata ruang yang ditemukan di Kabupaten Buleleng diantaranya masih ditemukan ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang dan Pelaksanaan di Lapangan, banyak pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, melanggar sempadan jalan, sempadan pantai maupun jurang. Kondisi ini memerlukan pengawasan mulai dari kesesuaian terhadap rencana tata ruang, pengawasan pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

#### 4) Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Permukiman

Permasalahan perumahan dan permukiman di daerah masih menjadi tantangan signifikan, terutama terkait dengan penanganan Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH). Rumah Tidak Layak Huni, yang sering kali ditandai dengan kondisi fisik yang buruk, kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang tidak memadai, serta risiko kesehatan yang tinggi, mencerminkan ketidakcukupan infrastruktur perumahan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Meskipun persentase penanganan RTLH di luar kawasan kumuh telah mencapai 61,96%, angka ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 63,75% untuk tahun 2023 yang menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak. Salah satu faktor yang mempengaruhi situasi ini adalah keterbatasan akses lahan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Tingginya harga tanah dan regulasi yang ketat sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan hunian yang layak. Keterbatasan ini tidak hanya mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, tetapi juga berpotensi memunculkan kawasan kumuh baru. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap lahan yang sesuai untuk hunian, mereka terpaksa mencari solusi alternatif yang sering kali berujung pada terbentuknya permukiman informal yang tidak terencana dan tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif dari pemerintah untuk menciptakan aksesibilitas lahan dan pengembangan perumahan yang berkelanjutan, agar kebutuhan perumahan utamanya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat terpenuhi dengan lebih baik dan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru.

#### 5) Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Sebanyak 32.634,5 km<sup>2</sup> dari 132.268 km<sup>2</sup> lahan di wilayah ini memiliki kemiringan 40% atau lebih, menandakan tingginya potensi longsor dan bencana alam lainnya. Faktor penyebab kondisi ini terutama adalah topografi alami yang bergelombang dan kurangnya pengelolaan lahan yang baik. Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan juga memperparah kondisi ini.

Hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Sukasada dan Busungbiu, menghadapi risiko banjir dengan potensi luas bahaya mencapai 33.442 hektar. Faktor-faktor yang mendorong kondisi ini termasuk curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan volume air meningkat secara

signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, perubahan penggunaan lahan yang mengurangi daerah resapan air memperburuk situasi. Sistem drainase yang tidak memadai juga berkontribusi besar terhadap ketidakmampuan menampung air hujan yang melimpah.

Sebaran kerawanan kekeringan tersebar di 9 kecamatan dengan total luas mencapai 135.741 hektar. Kekeringan ini dipicu oleh pola curah hujan yang tidak menentu, yang menyebabkan ketidakteraturan pasokan air. Perubahan iklim memperburuk situasi dengan menciptakan musim kemarau yang lebih panjang dan intens. Selain itu, penggunaan air yang tidak efisien, baik untuk keperluan domestik maupun pertanian, mengakibatkan pasokan air yang terbatas tidak dapat mencukupi kebutuhan.

Situasi ini menuntut langkah- langkah tepat untuk meningkatkan manajemen sumber daya alam serta strategi mitigasi bencana yang efektif untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur di wilayah ini. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mengatasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut

Upaya- upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum juga bergantung kepada ketersediaan sumber daya yang memadai baik itu menyangkut sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang selama ini dilaksanakan belum mampu memfasilitasi kebutuhan peningkatan kompetensi personil yang terlibat dalam penegakan peraturan daerah maupun pencegahan dan penanggulangan bencana. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan peraturan daerah serta pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

#### 6) Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Urusan sosial terkait erat dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi antara lain kelompok anak terlantar, disabilitas, lanjut usia, keluarga miskin, korban kekerasan dalam rumah tangga, pengangguran maupun pekerja migran. Dari data yang ada jumlah PMKS dari tahun 2020 sejumlah 47.914 orang sempat menurun hingga 14.339 orang di tahun 2022 namun kembali meningkat menjadi 16.051 orang di tahun 2023. Fluktuasi ini tentu perlu mendapat perhatian serius dalam upaya penanganannya. Setiap kelompok memiliki karakteristik

tersendiri yang menuntut pendekatan yang berbeda dalam penanganannya, ketidaksesuaian pendekatan akan berdampak pada tidak optimalnya upaya penanganan. Karakteristik permasalahan setiap kelompok idealnya bersumber dari data valid dan aktual yang didapatkan dari verifikasi lapangan. Upaya verifikasi dan validasi data telah dilaksanakan namun terkendala keterbatasan jumlah sumber daya manusia sehingga dari sisi frekuensi belum bisa dilaksanakan secara optimal. Penanganan PMKS yang selama ini dilakukan masih terbatas atau sebagian besar berupa pemberian bantuan langsung baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai yang tentunya tidak akan optimal sebagai penanganan jangka panjang. Sisi pemberdayaan yang sejatinya merupakan opsi yang lebih relevan untuk penanganan jangka panjang belum banyak disentuh karena keterbatasan data identifikasi kebutuhan PMKS.

## **2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1) Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng selama periode 2019-2023 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali. Kondisi ini diindikasikan oleh beberapa faktor, termasuk kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri lokal, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kurangnya investasi di sektor-sektor potensial yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti pariwisata dan industri kreatif, juga turut berkontribusi. Selain itu, beberapa program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh angkatan kerja lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang melibatkan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan selama periode 2019-2023, namun angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Bali. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kesediaan dan kemampuan tenaga kerja untuk terlibat dalam pasar kerja. Namun, beberapa faktor seperti kurangnya peluang kerja yang sesuai, terutama bagi perempuan dan kelompok usia muda, masih menjadi tantangan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta dukungan untuk

kewirausahaan belum merata di seluruh wilayah. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan program-program yang mendukung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam angkatan kerja

## 2) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Indeks pembangunan gender adalah ukuran yang mencerminkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Buleleng periode 2019-2023 meningkat, namun masih berada di bawah rata-rata provinsi, dan target indeks pemberdayaan gender belum tercapai. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya program yang terfokus dan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pengembangan program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## 3) Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Pola pangan harapan merupakan konsep yang mengacu pada pola konsumsi pangan yang ideal dan seimbang, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, hal ini mencerminkan ketersediaan pangan lokal, budaya, dan kebiasaan makan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan pangan. Berdasarkan data skor pola pangan harapan ketersediaan menunjukkan kecenderungan meningkat dari 85,88 di tahun 2022 menjadi 91,61 di tahun 2023 sementara skor pola pangan harapan konsumsi menunjukkan penurunan dari 88,6 di tahun 2022 menjadi 86,6 di tahun 2023, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola pangan harapan konsumsi adalah keanekaragaman pangan yang dikonsumsi, keseimbangan gizi dan frekuensi konsumsi dari berbagai jenis pangan pada rentang waktu tertentu. Upaya optimalisasi skor pola pangan harapan konsumsi akan berkaitan juga dengan upaya optimalisasi skor pola pangan harapan ketersediaan. Upaya peningkatan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi serta frekuensi konsumsi akan terkait erat dengan jumlah produksi pangan termasuk ketersediaan pangan musiman dan distribusi pangan. Pendekatan yang

diterapkan tidak bisa berjalan terpisah dan harus dijalankan secara sinergis untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

#### 4) Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Kebutuhan akan lahan sebagai dampak dari perkembangan ekonomi menyebabkan nilai ekonomis dari suatu lahan menjadi meningkat sementara disisi lain belum semua aset lahan memiliki bukti kepemilikan yang sah. Hal ini menimbulkan permasalahan yang berujung pada sengketa ataupun gugatan baik antar individu, individu dengan kelompok adat bahkan antara individu dengan pemerintah. Gugatan atau sengketa ini tidak berpotensi meluas menjadi konflik di masyarakat. Kesadaran akan pentingnya bukti kepemilikan lahan yang sah di masyarakat harus dibarengi dengan kemudahan informasi dan layanan pengurusan bukti kepemilikan atas lahan sehingga potensi konflik yang timbul dari permasalahan kepemilikan lahan dapat diminimalisir.

#### 5) Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Tiga sungai utama di wilayah ini, yaitu Sungai Saba, Sungai Banyumala, dan Sungai Buleleng, menunjukkan tanda-tanda pencemaran pada bagian hilirnya, sehingga tidak lagi memenuhi baku mutu air minum. Pencemaran ini diduga disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai juga turut memperburuk kondisi ini. Dampaknya adalah penurunan kualitas air yang konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024, mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan sumber daya air. Peningkatan pencemaran, pengelolaan limbah yang buruk, serta kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan lingkungan semakin memperparah situasi ini, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem

Sedimentasi dan pendangkalan Danau Buyan telah menyebabkan penurunan volume air secara drastis dari 116,25 juta m<sup>3</sup> menjadi 49,6 juta m<sup>3</sup> (BWS, 2016). Proses sedimentasi ini diperparah oleh erosi tanah di sekitar danau, aliran air yang membawa sedimen, serta kurangnya upaya mitigasi untuk mencegah sedimentasi lebih lanjut. Kondisi ini mengancam fungsi ekosistem danau serta pasokan air bagi masyarakat sekitar

Sebanyak 2.516,29 hektar (6,77%) dari luas kawasan hutan di Kabupaten Buleleng berada dalam kondisi kritis. Penyebab utamanya

meliputi deforestasi yang berlebihan, aktivitas ilegal seperti penebangan liar, dan konversi lahan untuk pertanian dan permukiman. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna, serta penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Pengukuran indeks tutupan lahan menunjukkan kecenderungan menurun dari 52,58% pada tahun 2019 menjadi 52,06% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh konversi lahan yang masif untuk pembangunan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya yang mengurangi area tutupan vegetasi alami. Akibatnya, terjadi degradasi lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat

#### 6) Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Identitas kependudukan digital adalah dokumen elektronik yang menyimpan informasi identitas warga. Kepemilikan identitas kependudukan digital di Kabupaten Buleleng belum optimal, yang mengakibatkan kesulitan dalam akses layanan publik. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya identitas digital dan keterbatasan infrastruktur yang mendukung pendaftaran identitas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang efektif dan peningkatan infrastruktur pendukung untuk pendaftaran identitas digital.

#### 7) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) adalah lembaga yang dibentuk di desa sebagai wadah masyarakat untuk berorganisasi sekaligus juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa belum berjalan optimal, yang mengakibatkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan khususnya yang dilaksanakan di desa. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa antara lain kurangnya dukungan dan pelatihan bagi pengurus lembaga masyarakat, serta minimnya akses informasi terkait potensi dan peluang yang ada. Kompetensi pengurus selaku motor dari lembaga kemasyarakatan desa menjadi berdampak signifikan terhadap perkembangan lembaga kemasyarakatan desa. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa juga tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan informasi terkait potensi dan

peluang yang ada karena dengan mengetahui potensi dan peluang yang ada maka upaya- upaya pengembangan diri oleh lembaga akan lebih terarah yang bermuara pada peningkatan peran lembaga dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di desa. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, perlu dilakukan program pelatihan yang terstruktur bagi pengurus lembaga, serta peningkatan akses informasi yang relevan untuk masyarakat desa.

#### 8) Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah urusan yang terkait dengan kebijakan dan program untuk mengelola pertumbuhan penduduk, distribusi dan kualitas hidup masyarakat. Populasi penduduk disuatu wilayah akan berdampak pada kebutuhan infrastruktur layanan dasar, pendapatan perkapita, dan daya dukung lingkungan. Fluktuasi data laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan pada periode tahun 2021 sampai 2023 memerlukan pencermatan mendalam terkait faktor penyebabnya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan terlebih jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Pengendalian penduduk dari sisi distribusi penduduk terkait erat dengan sektor perekonomian karena keluar masuknya penduduk disuatu wilayah sangat didominasi oleh ketersediaan sumber- sumber ekonomi

Fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyediakan layanan kesehatan, termasuk program keluarga berencana. Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP sebesar 43,94% dari target 100% di tahun 2023 menunjukkan adanya kendala dalam pelayanan. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana yang berkualitas. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri pada kurangnya sumber daya manusia terlatih dan fasilitas yang memadai untuk program KB. Untuk meningkatkan ketersediaan layanan, perlu dilakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang mendukung program KB.

#### 9) Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Alat Transportasi di Kabupaten Buleleng masih didominasi oleh kendaraan pribadi sehingga beban volume lalu lintas semakin meningkat

setiap tahunnya. Kurangnya fasilitas transportasi public, mendorong terjadinya tundaan bahkan kemacetan lalu lintas. Keberadaan terminal saat ini belum optimal karena rendahnya jumlah angkutan umum.

Dari sisi pemenuhan penyediaan perlengkapan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten Buleleng belum optimal dilaksanakan. Hal ini diakibatkan karena Pemerintah masih memfokuskan pada meterisasi LPJU agar penggunaan listrik LPJU dapat terukur dan lebih efisien. Tingginya permohonan pemasangan LPJU dari masyarakat menjadi tantangan dalam sektor perhubungan. Dampak dari permasalahan ini adalah meningkatnya risiko kecelakaan dan kurangnya keamanan bagi pengguna jalan. Permasalahan pada bidang perhubungan ini memerlukan perencanaan sistem, kebijakan, pengaturan, dan penyediaan infrastruktur transportasi yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah didalam dan keluar Kabupaten Buleleng.

#### 10) Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah alat yang digunakan untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Pemanfaatan TIK dalam penyampaian informasi pembangunan belum optimal, yang mengakibatkan kesulitan dalam akses informasi bagi masyarakat. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, serta ketidakpuasan terhadap layanan publik. Akar permasalahan ini terletak pada infrastruktur TIK yang belum memadai dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur TIK dan program pelatihan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dalam mengakses informasi secara efektif.

#### 11) Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi di Kabupaten Buleleng saat ini tercermin dari persentase koperasi aktif yang stagnan di kisaran 80% dalam empat tahun terakhir. Salah satu akar permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan fungsi koperasi. Banyak anggota koperasi yang tidak merasakan dampak positif dari keanggotaan mereka, seperti akses yang terbatas terhadap modal dan

layanan yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya inovasi dalam pengelolaan koperasi dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar juga menjadi faktor penyebab. Banyak koperasi di daerah ini masih bergantung pada model bisnis tradisional, sehingga kurang kompetitif dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Faktor internal seperti manajemen yang lemah dan kurangnya pelatihan bagi pengurus koperasi turut berkontribusi pada penurunan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, perlu ada upaya penyuluhan yang lebih intensif, peningkatan kapasitas pengurus, serta inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

#### 12) Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng untuk tahun 2022 sebesar 448 miliar rupiah dan tahun 2023 sebesar 598 miliar rupiah menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2021 yang mencapai 1,6 triliun rupiah. Penurunan ini, sebesar 72% pada tahun 2022 dan 62% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi yang membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya. Selain itu, persaingan dengan daerah lain yang menawarkan insentif investasi lebih menarik juga mempengaruhi keputusan investor. Faktor lainnya adalah belum optimalnya implementasi kebijakan investasi dalam memperlancar proses investasi. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan dan penegakan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan promosi daerah yang lebih efektif untuk menarik lebih banyak investasi di masa mendatang.

#### 13) Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Pembinaan atlet adalah proses pengembangan kemampuan dan keterampilan atlet untuk mencapai prestasi. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembinaan atlet di daerah menjadi permasalahan yang signifikan. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya prestasi atlet daerah dan kurangnya minat generasi muda terhadap olahraga. Akar permasalahan ini terletak pada minimnya investasi dalam fasilitas olahraga dan kurangnya program pembinaan yang terstruktur. Untuk mengatasi

masalah ini, diperlukan pengembangan sarana olahraga dan penyelenggaraan program pembinaan yang lebih sistematis.

#### 14) Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Statistik sektoral adalah data yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek pembangunan di daerah. Tata kelola statistik sektoral di Kabupaten Buleleng belum berjalan optimal, yang berdampak pada ketidakakuratan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan. Akar permasalahan ini terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang statistik dan kurangnya sistem pengumpulan data yang efisien. Hal ini mengakibatkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Untuk meningkatkan tata kelola statistik, perlu dilakukan program pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga statistik dan pengembangan sistem pengumpulan data yang lebih efektif.

#### 15) Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Jaringan data pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi penting. Upaya pengamanan terhadap jaringan data pemerintah terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini berpotensi mengakibatkan kebocoran data dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya investasi dalam sistem keamanan data dan infrastruktur pendukung yang memadai. Tanpa sistem yang kuat, data pemerintah menjadi rentan terhadap ancaman keamanan. Untuk menangani permasalahan ini, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung keamanan data, serta pelatihan bagi pegawai tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data.

#### 16) Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Adat, tradisi seni, dan budaya daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat. Pelestarian adat, tradisi seni, dan budaya daerah belum berjalan optimal, yang mengakibatkan hilangnya identitas budaya lokal. Dampak dari permasalahan ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya dan kesenjangan pengetahuan generasi muda mengenai warisan budaya. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya perhatian dan dukungan terhadap kegiatan budaya, serta minimnya program yang melibatkan masyarakat. Untuk menangani permasalahan ini, perlu dilakukan program penguatan

komunitas budaya dan peningkatan dukungan pemerintah terhadap kegiatan pelestarian adat dan seni.

#### 17) Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen menjadikan perpustakaan sebagai pusat penguatan literasi, pembelajaran sepanjang hayat, serta pelestarian budaya lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berdaya saing, dan berkarakter Bali. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi menjadi pusat inklusi sosial, pusat layanan informasi, serta sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Buleleng. Sejalan dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Buleleng; Buleleng Paten", pembangunan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan berbasis digital, revitalisasi sarana prasarana, peningkatan kapasitas pustakawan, serta penguatan jejaring literasi di sekolah, desa, dan komunitas. Gerakan literasi daerah dipadukan dengan pelestarian konten budaya lokal agar menjadi sumber pembelajaran dan identitas kebanggaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, perpustakaan di Buleleng menjadi instrumen penting dalam misi membangun kualitas pendidikan yang merata dan berkarakter, serta memperkuat ketahanan sosial budaya melalui literasi yang berbasis kearifan lokal.

#### 18) Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Kearsipan merupakan elemen vital dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menempatkan pengelolaan arsip sebagai bagian strategis dari transformasi birokrasi yang kredibel, sekaligus sebagai wahana pelestarian memori kolektif daerah. Pengembangan sistem kearsipan diarahkan pada peningkatan tertib arsip dinamis dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Langkah strategis mencakup digitalisasi arsip, pembinaan SDM kearsipan, pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), serta pengembangan pusat arsip sebagai pusat dokumentasi sejarah dan identitas daerah. Melalui penguatan sistem kearsipan yang terintegrasi dan berwawasan budaya, Buleleng tidak hanya membangun birokrasi yang tangguh, tetapi juga menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur leluhur yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali.

### **3) Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1) Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan**

Jumlah produksi perikanan baik itu perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan hasil telah menunjukkan pencapaian yang sesuai bahkan melebihi dari target yang direncanakan di tahun 2023, namun disisi lain masih ada potensi perikanan yang belum digarap secara optimal. Dari 4668 Ha potensi budidaya ikan baik itu budidaya laut, air payau maupun air tawar baru sebanyak kurang lebih 415 Ha atau kurang dari 10% dari potensi perikanan yang dimanfaatkan. Upaya peningkatan pemanfaatan potensi perikanan akan berdampak pada peningkatan produksi pertanian dimana upaya peningkatan ini seyogyanya juga dibarengi dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia perikanan (tambahkan data terkait sumber daya perikanan).

#### **2) Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata**

Sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng menghadapi sejumlah permasalahan yang mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengembangannya. Kondisi yang diharapkan adalah adanya sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang terlatih, dengan keterampilan layanan pelanggan yang baik dan kemampuan manajerial yang memadai. Namun, saat ini, SDM pariwisata yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut, yang berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Selain itu, pelaksanaan promosi pariwisata belum dilaksanakan secara optimal, event-event wisata yang diselenggarakan belum sepenuhnya efektif dalam memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Buleleng kepada target pasar, yang terlihat dari tingkat kunjungan wisatawan relatif stagnan.

Penataan destinasi wisata juga belum berjalan secara optimal, di mana sarana dan prasarana atraksi wisata serta fasilitas penunjang lainnya belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Keberadaan atraksi wisata yang ada belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, berdampak pada kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Di sisi lain, sektor ekonomi kreatif yang belum sepenuhnya berkembang membatasi inovasi dan kreativitas dalam penyediaan produk wisata, yang seyogyanya dapat meningkatkan daya saing pariwisata lokal.

Penyebab utama dari permasalahan ini meliputi belum optimalnya investasi dalam pelatihan SDM, promosi dan pengembangan destinasi yang belum memadai, serta belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata.

### 3) Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Jumlah produksi komoditi jagung mengalami penurunan drastis dari 22.353 ton di tahun 2020 menjadi hanya 2.822 ton di tahun 2023, meskipun luas panen relatif tetap sama. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman, serangan hama dan penyakit yang meningkat, serta kurangnya akses petani terhadap teknologi pertanian yang lebih efisien dan pupuk berkualitas. Situasi ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih baik dalam hal bantuan teknologi dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan hasil produksi jagung

Luas panen dan produksi komoditi sayuran seperti cabai dan lainnya mengalami kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Penyebab dari penurunan ini antara lain adalah kondisi cuaca yang tidak stabil yang mempengaruhi siklus tanam dan panen, serta serangan hama yang lebih sering terjadi. Selain itu, ketersediaan bibit unggul yang terbatas dan kurangnya dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi juga berperan dalam penurunan produksi sayuran ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pengelolaan pertanian yang lebih adaptif dan peningkatan akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan

Populasi ternak di wilayah ini, termasuk sapi potong, babi Bali, babi Sadleback, kambing PE, dan ayam buras, mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti wabah penyakit yang menyerang ternak, penurunan kualitas pakan, dan kurangnya fasilitas kesehatan hewan yang memadai. Selain itu, perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi harga jual ternak juga turut mempengaruhi keputusan petani untuk memelihara ternak dalam jumlah besar. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem kesehatan hewan dan penyediaan pakan berkualitas untuk mendukung keberlanjutan populasi ternak

Produksi daging ternak, terutama daging babi, kambing, dan ayam buras, mengalami penurunan selama periode 2020 hingga 2022. Meskipun ada anomali di mana produksi daging sapi meningkat meskipun populasinya

menurun, hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam preferensi dan permintaan pasar. Faktor-faktor penyebab penurunan produksi daging ini meliputi penyakit yang menyerang ternak, kurangnya fasilitas pemrosesan daging yang efisien, dan fluktuasi harga pakan ternak yang mempengaruhi biaya produksi. Upaya peningkatan dalam manajemen peternakan dan investasi dalam fasilitas pemrosesan daging diperlukan untuk mengatasi tantangan ini

Nilai Tukar Petani (NTP) di wilayah ini masih berada di bawah 100, yang menunjukkan bahwa petani belum sepenuhnya mendapatkan keuntungan yang memadai dari hasil produksi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya NTP termasuk biaya produksi yang tinggi, harga jual yang tidak stabil, dan ketergantungan pada perantara yang mengurangi margin keuntungan petani. Selain itu, akses yang terbatas terhadap pasar yang lebih luas juga membatasi kemampuan petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Untuk meningkatkan NTP, diperlukan dukungan dalam bentuk subsidi, akses ke pasar yang lebih luas, dan kebijakan yang mendukung kestabilan harga hasil pertanian.

#### 4) Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Belum optimalnya pengawasan barang beredar di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu permasalahan yang signifikan dalam sektor perdagangan. Ketidacukupan dalam pengawasan ini menyebabkan beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi standar kualitas, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual. Selain itu, ketersediaan barang yang tidak stabil akibat pengawasan yang lemah dapat menyebabkan fluktuasi harga, di mana barang-barang penting, seperti bahan pokok, menjadi sulit diakses. Hal ini dapat mendorong harga barang tersebut melonjak dan berkontribusi pada terjadinya inflasi. Praktik monopoli atau kartel juga berpotensi terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara efektif, di mana sekelompok pelaku usaha dapat mengatur harga dan mengurangi persaingan.

Pemasaran produk unggulan daerah juga belum berjalan dengan optimal, di mana banyak produk lokal yang memiliki potensi tinggi, seperti hasil pertanian dan olahannya dan kerajinan tangan, kurang mendapatkan perhatian dalam hal promosi dan distribusi. Faktor-faktor seperti kurangnya strategi pemasaran yang efektif, minimnya pelatihan bagi pelaku usaha, dan

keterbatasan akses ke pasar turut memperburuk kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang beredar serta pengembangan strategi pemasaran yang lebih baik untuk produk unggulan daerah, agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

#### 5) Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Daya saing produk daerah merupakan indikator kinerja ekonomi yang mencerminkan kemampuan produk lokal untuk bersaing di pasar, baik regional maupun nasional, ditandai dengan pangsa pasar, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Penurunan daya saing produk daerah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi pendapatan daerah, dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Hal ini berujung pada terhambatnya pencapaian target pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan daya saing produk daerah ini utamanya disebabkan oleh kendala akses pasar yang multi-dimensi. Kurangnya infrastruktur pendukung logistik, seperti jalan raya yang memadai dan sistem transportasi yang efisien, meningkatkan biaya distribusi dan memperlambat waktu pengiriman, sehingga produk lokal kalah bersaing dengan produk dari daerah lain yang memiliki akses pasar lebih baik. Selain itu, minimnya promosi dan pemasaran produk lokal yang terintegrasi dan berbasis data, mengakibatkan rendahnya visibilitas dan awareness produk di pasar yang lebih luas. Keterbatasan akses terhadap informasi pasar terkini dan teknologi pemasaran digital juga memperparah situasi. Faktor-faktor ini secara sinergis menciptakan hambatan yang signifikan bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih kompetitif.

Untuk meningkatkan daya saing produk daerah, perlu dilakukan intervensi strategis yang terintegrasi. Pertama, optimalisasi infrastruktur logistik melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan raya, pengembangan sistem transportasi multimoda, dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Kedua, implementasi strategi pemasaran yang terukur dan berbasis data, meliputi pengembangan branding produk lokal, pemanfaatan platform digital marketing, dan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam hal pemasaran digital. Ketiga, perlu dibangun sistem informasi pasar yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mereka dapat memperoleh data pasar terkini dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Dengan

pendekatan holistik ini, diharapkan daya saing produk daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan daerah.

#### 6) Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya yang ditempuh untuk melakukan pemerataan penduduk antar daerah sekaligus juga merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama warga masyarakat yang terdampak dari kepadatan penduduk disuatu wilayah. Upaya pemerataan penduduk yang diharapkan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masih terkendala keterbatasan kewenangan serta kemampuan daerah dalam memfasilitasi distribusi penduduk keluar daerah. Upaya penyiapan dan pembekalan calon transmigran seringkali termentahkan oleh adanya penyesuaian kuota yang diberikan

### 4) **Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**

#### 1) Urusan Sekretariat Daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ukuran yang mencerminkan transparansi dan responsibilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih di bawah target yang dicanangkan, yaitu di angka 70. Dampak dari permasalahan ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan kualitas layanan publik. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya transparansi dan sistem evaluasi yang efektif. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu dilakukan pengembangan sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan partisipatif.

#### 2) Urusan Sekretariat DPRD

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah selain bertumpu pada partisipasi masyarakat juga bersumber dari jalannya pemerintahan di daerah dimana peran strategis sekretariat DPRD sebagai fasilitator komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pada beberapa poin masih terkendala keterbatasan sumber daya yang ada. Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan legislatif yang sinergis dengan eksekutif belum sepenuhnya mampu dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Upaya peningkatan kompetensi sumber daya

manusia dan ketersediaan sarana penunjang diharapkan dapat berdampak pada sinergitas pelaksanaan pemerintahan daerah.

## **5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### 1) Urusan Perencanaan

Data yang aktual dan akurat adalah informasi yang diperlukan untuk mendukung perencanaan yang efektif. Belum optimalnya penyediaan data yang aktual dan akurat sebagai bahan perencanaan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Dampak dari permasalahan ini adalah keputusan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang valid, yang dapat mengarah pada kebijakan yang kurang efektif. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih baik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data.

### 2) Urusan Keuangan

Kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Kemandirian fiskal daerah masih berada di kisaran 20%, menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal. Dampak dari permasalahan ini adalah terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, perlu dilakukan pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

### 3) Urusan Kepegawaian

Kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan gambaran dari kinerja perangkat daerah yang bersumber dari kinerja pegawai selaku individu sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai untuk dapat mengawali kinerja pemerintah daerah. Distribusi pegawai masih menjadi kendala yang dihadapi saat ini dalam arti ada perangkat daerah yang terkesan gemuk namun disisi lain ada perangkat daerah yang sangat

terbatas dari sisi ketersediaan pegawai. Distribusi pegawai pada beberapa kondisi akan berdampak pada produktivitas dan beban kerja pegawai

Capaian bagus dari indeks merit merupakan nilai lebih dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pegawai secara menyeluruh yang melingkupi identifikasi kebutuhan, perekrutan, pengembangan karir, evaluasi sampai dengan suksesi kepemimpinan di perangkat daerah yang sekaligus mampu menjadi solusi kendala distribusi pegawai. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pegawai juga perlu ditingkatkan selain sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap aparatur juga menunjukkan komitmen kuat transparansi pengelolaan pegawai di pemerintah daerah

#### 4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi pegawai adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kinerja pegawai sebagai pelayan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki. Salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Disisi lain, rasio jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada belum menunjukkan angka yang menggembirakan dimana masih banyak pegawai yang belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja perangkat daerah yang bermuara pada kinerja pemerintah daerah pada umumnya. Upaya identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki pegawai harus terus dilakukan karena seiring dengan perkembangan di daerah serta aturan dan kebijakan pemerintah atasan

#### 5) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Inovasi adalah proses penciptaan ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi yang telah lahir di Kabupaten Buleleng banyak yang tidak dilaksanakan secara kontinyu, yang menghambat perkembangan daerah. Dampak dari permasalahan ini adalah kurangnya daya saing daerah dan belum optimalnya solusi berbasis penelitian untuk permasalahan lokal. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya dukungan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan keberlanjutan inovasi, perlu dirancang peningkatan sumber

daya untuk penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian.

## **6) Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**

### 1) Urusan Inspektorat

Pengawasan pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Dampak dari permasalahan ini adalah meningkatnya risiko penyimpangan dan kurangnya pengawasan terhadap program-program pembangunan. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pengawas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan program pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan jumlah petugas pengawas untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.

## **7) Unsur Kewilayahan**

### 1) Urusan Kecamatan

Unsur kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dilaksanakan oleh perangkat daerah kecamatan dimana dalam pelaksanaannya meliputi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut saat ini belum dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kapasitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada dirasakan belum cukup mumpuni untuk pelaksanaan cakupan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban meskipun upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut telah diupayakan secara bertahap.

## **8) Unsur Pemerintahan Umum**

### 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Konflik sosial adalah ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Konflik beragama masih mendominasi konflik sosial di Kabupaten Buleleng, yang dapat menghambat pembangunan. Dampak dari permasalahan ini adalah terjadinya ketegangan

sosial dan mengurangi kepercayaan antar kelompok masyarakat. Akar permasalahan ini terletak pada kurangnya dialog antaragama dan pemahaman yang rendah tentang toleransi. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan program dialog antaragama dan peningkatan pendidikan tentang toleransi di masyarakat.

### **2.3.2. ISU STRATEGIS**

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Berdasarkan permasalahan utama dalam pembangunan daerah selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam melakukan analisis isu strategis, dapat terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap kebijakan di berbagai level. Telaah kebijakan tersebut meliputi kebijakan di level internasional, nasional, provinsi dan kabupaten.

#### **1) Telaah Kebijakan Internasional (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDGs ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Penerapan SDGs di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Sasaran dalam tujuan 7 ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Sleman karena kewenangan ada di tingkat provinsi;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan rekapitulasi capaian indikator TPB pada Laporan Induk kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Dari 184 indikator TPB yang dikaji, sebanyak 91 indikator (49,46%) mencapai target nasional/target global, 69 indikator (37,50%) tidak mencapai target, 9 indikator (4,89%) belum dilaksanakan, dan 15 indikator (8,15%) data belum tersedia, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.90

## Kondisi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan		Dikaji	Jumlah Indikator			
			Sudah dilaksanakan		Belum dilaksanakan	Belum tersedia data
			Target tercapai	Target tidak tercapai		
<b>I</b>	<b>Pilar Pembangunan Sosial</b>	<b>91</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
1	Tanpa Kemiskinan	23	17	5		1
2	Tanpa Kelaparan	11	5	5		1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	30	14	15		1
4	Pendidikan Berkualitas	13	7	5		1
5	Kesetaraan Gender	14	7	5		2
<b>II</b>	<b>Pilar Pembangunan Ekonomi</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2		1		1
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	8	8		2
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	9	2	5		2
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	3	4		1
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8	1	3	2	2
<b>III</b>	<b>Pilar Pembangunan Lingkungan</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	5	7		
11	Kota & Permukiman yang Berkelanjutan	7	7			
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	5		1	4	
13	Penanganan dan Perubahan Iklim	2	2			
15	Ekosistem Daratan	3	2	1		
<b>IV</b>	<b>Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>16</b>	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	19	11	4	3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>184</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
	<b>Persentase</b>		<b>49,46</b>	<b>37,50</b>	<b>4,89</b>	<b>8,15</b>

Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil analisis data tersebut atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Secara umum, Dari

184 indikator, 91 indikator diantaranya sudah tercapai di Kabupaten Buleleng, atau sekitar 49.46%. Disisi lain, 69 indikator belum tercapai, atau sekitar 37.5%. Sementara itu, 7 indikator yang belum dilaksanakan. Sisanya tidak ada data ditemukan pada dokumen / refrensi lain.

## **2) Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengangkat visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia(HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Tabel 2.91

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

<b>17 Program Prioritas Presiden</b>	<b>8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Wins</b>
1. <b>Swasembada Pangan, Energi, dan Air</b>	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. <b>Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara</b>	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. <b>Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi</b>	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4. <b>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. <b>Pemberantasan Kemiskinan</b>	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. <b>Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba</b>	6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru) dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat Negara;
7. <b>Menjamin tersedianya pelayanan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk rakyat</b>	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat
8. <b>Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta digitalisasi</b>	
9. <b>Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang kondusif</b>	
10. <b>Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta penyandang disabilitas</b>	
11. <b>Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup</b>	
12. <b>Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan pestisida langsung ke petani</b>	
13. <b>Menjamin pembangunan hunian berkualitas Terjangkau Bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan</b>	
14. <b>Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota</b>	

17 Program Prioritas Presiden	8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Wins
Nusantara serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	berpenghasilan rendah (MBR); 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya alam maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama,Kebebasan Beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah	
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Tema dan sasaran pembangunan wilayah periode 2025–2029 dimana Target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN untuk wilayah Provinsi Bali masuk dalam wilayah Bali–Nusa Tenggara.

Wilayah Bali–Nusa Tenggara diarahkan menjadi “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan highlight lokasi prioritas Wilayah Bali–Nusa Tenggara dengan rincian sebagai berikut terutama yang mengarah ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Pertumbuhan

- 1) Wilayah Metropolitan (WM) Denpasar
- 2) Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali
  - a. Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulatan)
  - b. Kintamani-Danau Batur
  - c. Besakih-Gunung Agung
  - d. Singaraja-Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan Singaraja menuju lovina kota pariwisata pusaka)

- e. Bedugul
  - f. Kuta-Canggu-Sanur-Nusadua
  - g. TNBB-Menjangan-Pemuteran
  - h. Amuk-Candidasa
  - i. Nusapenida
- 3) Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambangan
- B. Kawasan Komuditas Unggulan
- 1) Ekonomi Biru di Kabupaten Jembrana
  - 2) Kopi di Kabupaten Bangli dan Buleleng
  - 3) Anggur di Kabupaten Buleleng
- C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi
- 1) Swasembada Pangan, Air dan Energi
    - a. Bali-Nusapenida (Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, kabupaten klungkung)
- D. Kawasan Afirmasi Nusapenida (daerah Terdepan dan Pemerataan pembangunan)
- E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana meliputi Taman Nasional Bali Barat, Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur-Bukit Payang, Taman Wisata Alam (TWA) Danau Busan-Danau Tamblingan
- Kabupaten Buleleng merupakan satu dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang menjadi lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Sebagai lokasi prioritas, akan mencakup beberapa kegiatan prioritas, antara lain:
- 1) Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) sebagai berikut:
 

Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata Bali, antara lain:

    - a. Singaraja-Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka);
    - b. Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara-intemasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja;
    - c. Pembangunan Bardar Udara Intemasional Bali Baru/Bali Utara
  - 2) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi dan Peningkatan D. I. Tukad Ayung, D. I. Tukad knct, D. I. Tukad Unda, **D. I. Tukad Saba** , D. I. Tukad Oos, D. I. Tukad Pekerisan, D. I . Tukad Petanu, D. I . Tukad Yeh Hoo
  - b. Rehabilitasi dan pcingkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah;
  - c. Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan;
  - d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
  - e. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
  - f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;
  - g. Pembangunan dan peagelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;
  - h. Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung DAS Ayun, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS oos Petanu-Pakerisan, DAS loloan, DAS Unda, DAS Daya, **DAS Saba**, **Danau Buyan**, Danau Beratan, **Danau Tamblingan**, Danau Batur;
  - i. Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur
- 3) Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng, dan Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng:
- a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (Kopi dan Anggur);
  - b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industry (Kopi dan Anggur);
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (Kopi dan Anggur);
  - d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industry (Kopi dan Anggur);
  - e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan anggur;
  - f. Pengebansan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 4) Kawasan Konservasi TN Bali Barat dan Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan :
- a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi;

- b. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi;
  - c. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;
  - d. Penguatan pengelolaan hutan lestari;
  - e. Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan;
  - f. Pertindungan dan pengamanan hutan.
- 5) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHITC) .

### **3) Telaah Kebijakan Provinsi Bali**

Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 untuk Periode 2025-2029 adalah Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transformasi sosial yang merata, berkualitas dan adaptif, menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan sosial, peningkatan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan pelayanan umum serta peningkatan pemerataan ketersediaan dan mutu pelayanan dasar. Selanjutnya untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inovatif difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor ekonomi unggulan sebagai fondasi kemajuan perekonomian daerah, membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital Bali, serta penguatan sarana prasarana dan teknologi sebagai penunjang daya saing ekonomi kreatif.

Transformasi tata kelola yang berintegritas dan koordinatif ditujukan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, penguatan integritas partai politik dan reformasi kelembagaan. Berkaitan mengenai landasan transformasi bertujuan untuk memantapkan keamanan daerah tangguh dan kondusif, demokrasi substansial serta stabilitas ekonomi makro daerah, menitikberatkan pada perkuatan keamanan daerah berstandar internasional, dan peningkatan kerja sama daerah serta stabilitas ekonomi makro daerah, peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan dan penyediaan ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. Dalam upaya memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, difokuskan dengan memperkuat pertahanan sosial budaya dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, penggalan dan pelestarian

warisan adiluhung budaya Bali, serta penuntasan pembangunan dan pengelolaan TPS3R serta TPST di kota/kabupaten se-Bali.

Sebagai kerangka implementasi transformasi dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dititikberatkan pada percepatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, dan berkeadilan di setiap kabupaten/kota di Bali, serta penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. Kemudian, untuk mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan terkoneksi serta ramah lingkungan, memfokuskan pada percepatan penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan terkoneksi serta ramah lingkungan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas serta pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah. Dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan dititikberatkan pada penguatan sistem pendanaan pembangunan serta penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh.

#### **4) Telaah Kebijakan Kabupaten**

##### **1) Telaah RPJPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045, Isu Strategis Pembangunan 5 (lima) Tahunan Tahap I (Periode 2025-2029) RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 antara lain perkuatan Fondasi Transformasi yang meliputi:

A. Isu prioritas pembangunan secara umum meliputi :

##### **1) Perubahan Iklim**

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi pembicaraan hangat dewasa ini. Perubahan iklim tentu memiliki banyak dampak pada kehidupan masyarakat mulai dari kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir.

##### **2) Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi Kabupaten Buleleng, mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, dengan mengembangkan sistem produksi

pangan berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya local, mengembangkan sarana prasarana produksi pangan dan mempertahankan serta mengembangkan lahan produktif.

3) Terjadinya Alih Fungsi lahan

Kondisi Lahan pertanian di Kabupaten Buleleng berpotensi adanya ancaman terhadap alih fungsi lahan menjadi permukiman dan fungsi-fungsi lainnya. Alih Fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan ruang atau kegiatan di sekitarnya yang direpresentasikan melalui prediksi pertumbuhan ruang yang dapat terjadi di Kabupaten Buleleng.

4) Daya Saing SDM yang belum memadai

Sebagai kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Bali, Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Buleleng lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang.

5) Pelestarian Seni dan Budaya

Seni dan budaya merupakan identitas dan jati diri manusia Bali termasuk Buleleng, dengan melestarikan budaya berarti mempertahankan akar sejarah dan memungkinkan generasi mendatang untuk memahami dan menghargai asal-usul mereka.

6) Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka Panjang, yang mencakup strategi besar dan dijalankan dengan berbagai program pembangunan, Transformasi ekonomi merupakan dampak dari transformasi digital akibat perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam ekonomi global, dan ini menghasilkan beberapa bentuk transformasi ekonomi.

## 7) Konektivitas

Buleleng menjadi salah satu wilayah di Provinsi Bali yang terhubung langsung dengan sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi ini menguntungkan karena menyebabkan Buleleng mengalami peningkatan aksesibilitas yang berdampak pada lebih banyak implementasi program-program strategis pemerintah provinsi maupun nasional. Untuk itu perlu dikembangkan jalur konektivitas lainnya yang dapat membuka akses Kabupaten Buleleng lebih luas lagi dengan jaringan jalan nasional dan provinsi.

## B. Isu prioritas pembangunan berdasarkan sudut kepentingan lingkungan hidup strategis.

### 1) Penurunan Kualitas Air

Berdasarkan hasil pengujian mutu air sungai (Sungai Banyumala Buleleng dan Sungai Gelung Sangsit) di Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil pengujian Laboratorium pada UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dan 2023 kondisinya menunjukkan hasil pengukuran yang telah melampaui baku mutu. Selain tingkat pencemaran pada Sungai, isu tentang Danau Buyan dan Danau Tamblingan juga masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buleleng yang menjadi sumber penghidupan Bali Utara tersebut.

### 2) Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan;

Permasalahan sampah tidak pernah berhenti menjadi perbincangan publik karena sebagian besar wilayah hingga saat ini telah mencapai kondisi darurat sampah.

### 3) Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan tindakan pengawasan dan penegakan aturan harapannya agar membuat masyarakat menjadi jera dan tidak akan mengulangi membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan Buleleng menjadi bersih

### 4) Alih Fungsi Lahan;

Permasalahan tata guna lahan di Kabupaten Buleleng dihadapkan pada adanya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan sektor ekonomi basis Kabupaten Buleleng dibidang pertanian.

5) Kebutuhan lahan permukiman meningkat;

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Buleleng saat ini juga menimbulkan masalah tersendiri di antaranya masih adanya kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat yang sering disebut dengan Backlog, masih adanya rumah tidak layak huni, prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan yang tidak terawat karena ditinggalkan pengembang, belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memelihara PSU perumahan karena bukan merupakan aset Pemda, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan permasalahan permukiman kumuh menjadi tantangan daerah untuk segera diatasi.

6) Pengelolaan Sampah;

Timbulan sampah di Kabupaten Buleleng, tahun 2022 mencapai sebesar 150.562,50 ton/tahun, sedangkan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Bengkala, saat ini sudah melebihi batas daya tampung (overload), dengan kondisi saat ini ketinggian timbunan sampah di TPA bengkala sudah mencapai kurang lebih 18 meter dari permukaan tanah.pemerintah melakukan sistem sanitary landfill, dengan memanfaatkan urugan tanah yang berasal dari proyek sekitar, dan juga mengadakan perluasan lahan TPA Bengkala.

7) Kerentanan Terhadap Bencana.

Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Pulau Bali dengan kondisi geografi yang nyegara gunung sangat rentan akan adanya bencana alam, karena kedudukan pada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.

## 2) Telaah RTRW Kabupaten Buleleng

### a. Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 memberikan pedoman gambaran sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Buleleng secara lebih jelas sebagai berikut:

#### A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

##### 1. Pengembangan Sistem Pusat Permukiman (Sistem Perkotaan)

Pengembangan sistem pusat permukiman meliputi PKW, PKL , PPK dan pusat pelayanan lingkungan.

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep pengembangan berupa kegiatan untuk skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan konsep pengembangan berupa kegiatan untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

#### B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

##### 1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

###### a. Sistem jaringan Jalan

Arah kebijakan transportasi di Kabupaten Buleleng terbagi menjadi jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer.

###### b. Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api di Kabupaten Buleleng berupa rencana Jaringan Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api.

###### c. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Rencana pengembangan Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Buleleng meliputi; (1) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau berupa alur pelayaran Kelas III, (2) Pelabuhan Sungai dan Danau berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, (3) Pelabuhan Penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan Kelas II yakni Pelabuhan Penyeberangan Sangsit di Kecamatan Sawan.

d. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Buleleng mencakup Pelabuhan Laut, Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan.

e. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Buleleng berupa: Bandar Udara Pengumpul dan Bandar Udara Khusus.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Rencana pengembangan sistem jaringan energi diarahkan untuk:

- a. Memenuhi penyediaan energi dan tenaga listrik;
- b. Meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik;
- c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan.

3. Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi

Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buleleng diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika ke seluruh wilayah menuju Bali Smart Island.

4. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air

Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten, meliputi:

a. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi sebagai bagian dari sistem jaringan sumber daya air pada wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier maupun jaringan irigasi air tanah

b. Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir meliputi: pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi alur sungai.

c. Bangunan Sumber Daya Air

Bangunan sumber daya air diarahkan untuk menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

C. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Secara umum, sistem jaringan prasarana lainnya masih mampu melayani Kabupaten Buleleng berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Sistem jaringan yang ada saat ini perlu dipelihara demi keberlangsungan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Buleleng.

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Buleleng terpenuhi dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan terdiri dari:

- a. unit air baku yang berada di mata air SPAM Buleleng Atas di Kecamatan Banjar, Bendungan Titab di Kecamatan Seririt, Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan, Mata Air SPAM Mumbul di Kecamatan Buleleng, Mata Air SPAM Air Sanih di Kecamatan Kubutambahan; dan Mata Air SPAM Pangkung Dalem di Kecamatan Sukasada;
- b. unit produksi yang terdiri dari: IPA Bawah SPAM Burana dan IPA Atas SPAM Burana di Kecamatan Seririt, IPA SPAM Buleleng Atas di Kecamatan Banjar , IPA SPAM Tamblang di Kecamatan Sawan;
- c. unit distribusi yang berupa jaringan distribusi sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai dengan unit pelayanan; serta
- d. unit pelayanan berupa sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di Kabupaten Buleleng berupa penyediaan air melalui sumur pompa, yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng.

## 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) di Kabupaten Buleleng berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan non domestik. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) terdiri dari sistem pengelolaan individual dan sistem pengelolaan komunal. Sistem pengelolaan individual berupa Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Sistem pengelolaan komunal air limbah di Kabupaten Buleleng terdiri dari:

- a. pengembangan prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Kubutambahan.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan dan di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

## 3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa pengembangan tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu di Kecamatan Gerokgak yang diarahkan berdekatan atau di sekitar Kawasan Peruntukan Industri Celukan Bawang setelah melalui kajian.

## 4. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Sistem jaringan persampahan wilayah di Kabupaten Buleleng berupa:

- a. Pemilahan yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan, merupakan bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
- c. Pengangkutan, adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
- d. Pengelolaan Sampah, merupakan bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. Pemrosesan Akhir, merupakan bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Arah kebijakan pengelolaan sampah diantaranya melalui memenuhi penataan lembaga dan peraturan, pemenuhan prasarana pengelolaan sampah, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah.

5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana di wilayah Kabupaten Buleleng berupa pengembangan infrastruktur mitigasi dan pengurangan dampak bencana, pengembangan dan pemantapan jalur-jalur evakuasi bencana serta ruang evakuasi bencana sesuai tipe bencana.

6. Sistem jaringan drainase di Kabupaten Buleleng, meliputi:

Perencanaan sistem drainase harus mencakup secara keseluruhan agar sistem berjalan secara fungsional dan penanganannya diterapkan berdasarkan daerah tangkapan air (catchment area) dengan memadukannya pada program pengendalian banjir.

**b. Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

**1) Rencana Kawasan Peruntukan Lindung**

Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Buleleng dalam hal ini meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk, kawasan konservasi berupa kawasan Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam, kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gempa bumi, dan kawasan rawan bencana kekeringan, serta kawasan cagar budaya. Rencana kawasan peruntukan lindung secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.92  
Rencana Peruntukan Lindung

No	Fungsi Kawasan		Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5
1	Badan Air	Kawasan lindung	266,24	0,20
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung)	Kawasan lindung	30.449,74	23,02
3	Kawasan perlindungan setempat	Kawasan lindung	15,86	0,001
4	Kawasan konservasi	Kawasan lindung	11.986	9,06
5	Kawasan ekosistem Mangrove	Kawasan lindung	88,51	0,07
	<b>Luas kawasan lindung</b>		<b>42.806,83</b>	<b>32,36</b>

## 2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Rencana pola ruang kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Buleleng terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pergaraman, pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan transportasi. Rencana kawasan peruntukan budidaya secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 2.93  
Rencana Peruntukan Budidaya

No	Fungsi Kawasan		Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan budidaya	5.629,19	4,26
2	Kawasan pertanian	Kawasan budidaya	61.069,22	46,17
3	Kawasan pertambangan dan energi	Kawasan budidaya	36,14	0,03
4	Kawasan peruntukan industri	Kawasan budidaya	707,54	0,53
5	Kawasan pariwisata	Kawasan budidaya	4.343,56	3,28
6	Kawasan permukiman	Kawasan budidaya	16.899	12,78
7	Kawasan pergaraman	Kawasan budidaya	177,34	0,13
8	Kawasan perikanan	Kawasan budidaya	510,79	0,39

No	Fungsi Kawasan		Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5
9	Kawasan transportasi	Kawasan budidaya	44,57	0,03

### 3) Telaah Terhadap Rencana Strategis

#### A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Buleleng dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan penerapan kawasan strategis nasional dan Provinsi Bali yang telah ditetapkan dan kemudian dideliniasi sesuai dengan wilayah Kabupaten Buleleng. Kawasan strategis wilayah Kabupaten Buleleng dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
6. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
7. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
8. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

#### B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Buleleng dari sudut kepentingan sosial budaya merupakan penerapan kawasan strategis nasional dan Provinsi Bali yang telah ditetapkan dan kemudian dideliniasi sesuai dengan wilayah Kabupaten Buleleng. Kawasan strategis wilayah Kabupaten Buleleng dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) KSN yang terdapat di Kabupaten Buleleng berupa KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Subak Bali Landscape.

2. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
3. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
4. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
5. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
6. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
7. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

**C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Buleleng dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng terdiri dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis sesuai Ratifikasi Internasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

**4) Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Buleleng**

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi

pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Roadmap penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut:

1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat;
2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen; dan
3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleks.

Strategi umum yang dilakukan untuk SIDA, adalah:

**a. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah**

Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) melalui pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Adapun para pihak yang terlibat adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat yang berkolaborasi, bersinergi dan berkontribusi menurut peran dan fungsinya masing-masing dalam rangka pengembangan PUD yang kompetitif di pasar. Adapun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan elemen ekosistem riset dan inovasi dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.94  
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur PUD Kabupaten Buleleng melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur PUD Kabupaten Buleleng serta pengembangan produk inovatif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, kerjasama, meningkatkan budaya inovasi, meningkatkan rantai nilai produk

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		unggulan.
2	Mengembangkan daya dukung dan relevansi riset dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	Mempersiapkan berbagai kebijakan berbasis riset, menumbuhkan kembangkan jaringan kerjasama riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional
3	Mendorong perkembangan usaha usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	Mengembangkan skema investasi riset dan inovasi, menumbuhkan start up/UMKM berbasis riset, membangun pusat-pusat inovasi produk unggulan, membangun budaya inovasi, membangun kerjasama riset dan inovasi di tingkat nasional maupun internasional

**b. Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah**

Salah satu isu strategis Kabupaten Buleleng sampai dengan dua puluh tahun ke depan adalah permasalahan sampah dan kondisi geografis yang menyebabkan rawan bencana. Kondisi ini tentunya memberikan dampak terhadap akselerasi pembangunan daerah. Melalui pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah diharapkan permasalahan prioritas daerah dapat dicapai target penyelesaiannya. Strategi dan arah kebijakan selaras dengan elemen ekosistem riset dan inovasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.95  
Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional, meningkatkan akses fasilitas kesehatan, mengembangkan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Memperkuat sektor UMKM, pertanian modern, membangun pariwisata dan ekonomi kreatif

No	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang efisien, efektif dan ramah lingkungan	Meningkatkan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, meningkatkan penyediaan air minum yang layak, pembangunan perumahan berkualitas, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, memperkuat konektivitas antar-daerah baik regional maupun nasional
3	Meningkatkan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng	Meningkatkan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan kajian SIDA, terdapat 8 (delapan) sektor produk unggulan daerah (PUD), yaitu: Tanaman Pangan (Padi, jagung), Tanaman Perkebunan (Kopi, kelapa, cengkeh, manggis, anggur, mangga), Hortikultura (durian, pisang), Tanaman Herbal (jahe), Perikanan (garam, perikanan), Pariwisata dan ekonomi kreatif (Pariwisata dan ekonomi kreatif), Kerajinan (Kerajinan Endek, Perak, Bambu, dll), dan Peternakan (Peternakan Sapi Bali). Produk unggulan tersebut dipilih sebagai langkah antisipasi pertumbuhan ekonomi salah satunya di sektor pertanian yang selalu melambat. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian serta belum optimalnya penerapan inovasi di sektor pertanian. Harapannya, daya saing produk unggulan meningkat, sehingga dapat mensejahterakan petani.

### 5) Telaah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi salah satunya adalah dengan menyusun panduan yang dapat dijadikan rujukan bersama yaitu berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan dan

Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program yaitu:

A. Strategi

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

B. Program

Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

## 5) **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program pada Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng. Sementara itu, tujuan pembuatan KLHS RPJMD adalah memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian terkait lingkungan hidup telah termuat sebagai dasar penyusunan revisi RPJMD Kabupaten Buleleng

Alur proses penyusunan KLHS RPJMD sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan KLHS
  - a. Pembentukan Tim Pembuat KLHS
2. Focus Group Discussion 1 (FGD 1)

FGD 1 bertujuan untuk membahas dan mengklarifikasi capaian dan proyeksi TPB serta identifikasi data indikator TPB yang belum ada data
3. Konsultasi Publik 1 KLHS RPJMD Buleleng

Tahap konsultasi publik 1 dilakukan dalam rangka menjangkau isu pembangunan berkelanjutan dari peserta rapat, sekaligus melakukan klarifikasi terhadap capaian indikator TPB dan pembahasan isu strategis.
4. Focus Group Discussion 2 (FGD 2)

Kegiatan FGD 2 ini bertujuan untuk perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Konsultasi Publik 2 KLHS RPJMD

Kegiatan KP 2 ini bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan dan membahas alternatif dan rekomendasi KLHS terhadap RPJMD yang akan disusun.
6. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan:

  - a. Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
  - b. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
  - c. Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan

d. Laporan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis dan telaah atas target TPB yang memiliki indikator dengan capaian belum tercapai lebih dominan, menjadi bagian dari isu strategis. Perumusan isu strategis tidak hanya didasarkan pada capaian TPB dengan status SBT saja, namun juga dampak / pengaruh nya terhadap muatan KLHS. Untuk itu, sebelum perumusan daftar panjang isu, didahului hasil analisis indikator TPB dengan status SBT, BBT, dan tidak ada data, serta memiliki keterkaitan dengan muatan KLHS yang relevan;

Dari rumusan isu strategis yang diprioritaskan kemudian dirumuskan permasalahan yaitu berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menurut isu strategis. Adapun permasalahan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut;

Tabel 2.96

Perumusan Permasalahan

No	Isu- Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis	Permasalahan
1	2	3
1	Potensi penurunan kualitas Kesehatan	Kabupaten Buleleng tercatat memiliki Prevalensi HIV pada populasi dewasa sebesar 636 pada tahun 2020, cenderung berubah-ubah dari tahun 2018 hingga 2022. Untuk Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 6.32. selain itu Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar 81.58. Namun demikian, kepadatan dan distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan di Buleleng cukup rendah yaitu sebesar 2 orang per 1000 orang penduduk. Selain itu, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 94.15% namun mengalami penurunan

No	Isu- Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis	Permasalahan
1	2	3
		ditahun 2022 yaitu menjadi 80.9%. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman tercatat pada tahun 2022 sebesar 88.72% yang cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2018. sedangkan untuk Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada tahun 2020 tercatat 54.25% yang cenderung berubah-ubah.
2	Potensi Penurunan kualitas pendidikan	Pada Kabupaten Buleleng tercatat bahwa Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat sebesar 17.53 cenderung berubah-ubah dari tahun 2018-2022. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat 100.51 pada tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun sebesar 7.56 pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan dari tahun 2018.
3	Penurunan Kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Buleleng tercatat memiliki PDB per kapita tertinggi pada tahun 2019 sebesar 50101384.7 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar 6.21%. Selain itu untuk Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian cenderung berubah-ubah.
4	Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Kabupaten Buleleng tercatat memiliki Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun terbesar yaitu 92 pada tahun 2019 namun terus mengalami penurunan hingga ke tahun 2022. Untuk Jumlah

No	Isu- Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis	Permasalahan
1	2	3
		kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 0.54% pada tahun 2021 yang cenderung berubah-ubah. Sedangkan untuk Persentase sisa makanan atau jumlah semua jenis sampah pada tahun 2022 sebesar 748446.9 dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022.
5	Penurunan Produktifitas Pangan	Kabupaten Buleleng tercatat memiliki Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 21245716.66 dan cenderung terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2022.
6	Peningkatan kebutuhan energi berkelanjutan	Pemanfaatan energi berkelanjutan di Kabupaten Buleleng masih sangat minim. Salah satunya ditunjukkan dari indikator rasio penggunaan gas rumah tangga dari data tahun ketahun belum mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh biaya untuk mengakses gas rumah tangga dan peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan gas tersebut mungkin masih terlalu tinggi bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat pendapatan rendah. Selain itu, penggunaan intensitas energi primer yang dalam dokumen ini dihitung berdasarkan rasio listrik terjual (dalam rupiah) PLN dari sumber fosil per PDRB total, rata - rata sebesar 5%. Hal ini menunjukkan data yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penurunan pemanfaatan energi dari fosil, khususnya untuk sumber penerangan.

## 6) Penetapan Isu Strategis Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan atas permasalahan, isu global, isu Indonesia Emas Tahun 2045 dan isu RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 serta isu RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045, serta isu kebijakan lainnya maka dapat ditetapkan isu strategis daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.97  
Isu Strategis Daerah

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Kondisi Geografis:</b>	<b>Aspek Geografis</b>				
	Kabupaten Buleleng dengan Luas wilayah mencapai 132.267,98 Ha (24,23 persen luas Pulau Bali) dengan panjang pantai ± 157,05 km. dengan topografinya nyegara gunung dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali.	1. Cakupan wilayah yang luas dan sebagian kecil kawasan kering	Persaingan Sumber Daya Alam	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Konservasi lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
		2. Sebagian besar luas wilayah (58,12%), topografinya pada kemiringan dan terjal pada ketinggian 0-499,9 mdpl dengan dengan kontur berbukit.				
		3. Pemanfaatan sumber daya alam belum dikelola dengan baik.				
		4. Tingginya potensi bencana (bencana alam, bencana geologi dan Meteorologi).	Dampak perubahan iklim global	Perubahan iklim	Ketahanan terhadap Bencana	Belum optimalnya Pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko dampak bencana
		5. Curah hujan yang tidak menentu dan tidak merata.				
<b>II</b>	<b>Kondisi Penduduk:</b>	<b>ASPEK DEMOGRAFIS</b>				
	Perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng	6. Pertumbuhan penduduk cenderung	Perkembangan Demografi	Perubahan karakteristik	Demografi	Belum optimalnya

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
	menunjukkan peningkatan tahun 2023 mencapai 830,2 ribu jiwa, meningkat sekitar 5.065 jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2022. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya perubahan struktur penduduk usia non produktif (khususnya penduduk usia 65 tahun ke atas) semakin bertambah	bertambah dan masih Tingginya beban angka ketergantungan;	Global	penduduk sebagai konsekuensi kelahiran, kematian, dan migrasi diantaranya urbanisasi, globalisasi, teknologi, dan struktur umur penduduk.		pengendalian penduduk dan Keluarga Berenca
		7. Pertumbuhan penduduk wilayah perkotaan lebih tinggi dan lebih padat.				
		8. Masih adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.				
III	<b>Perekonomian:</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Ekonomi</b>				
	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Buleleng secara regional Bali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota menempati urutan ke enam (3,64 %).	9. Belum optimalnya sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.	Ketidak pastian Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi dan Tata Kelola Keuangan Global serta kebijakan proteksionisme	Dinamika geopolitik dan geoekonomi	Pemerataan pembangunan Ekonomi	Belum optimalnya daya saing perekonomian daerah.
		10. Nilai tukar petani masih belum optimal			Diversifikasi ekonomi	Belum optimalnya pengembangan sector Pertanian berbasis masyarakat

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		11. Pemanfaatan potensi ekonomi belum maksimal.				
		12. Sebaran pertumbuhan ekonomi yang belum merata antar wilayah dan antar sektor ekonomi.				
		13. Distribusi pendapatan kelompok 40% bawah masih rendah.				
		14. Pendapatan per Kapita Masyarakat masih rendah.				
		15. Sektor lapangan usaha UMKM, Koperasi dan Industri belum berkembang optimal.			Pemberdayaan usaha kecil dan menengah	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri pengolahan dan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi daerah
		16. Kesejahteraan petani dan ekonomi keluarga petani masih rendah.				
		17. Investasi sektor ekonomi di luar pariwisata masih perlu dipacu.				
		18. Indek Pembangunan Manusia (IPM) masih berada dibawah provinsi				
IV	<b>Sosial dan Budaya:</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya</b>				
	Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2023 meningkat mencapai 74,65 tahun, masih di bawah rata-rata Provinsi	19. Secara absolut penduduk miskin Bali (184.430) lebih tinggi dari Kab. Buleleng	Integrasi sosial, penyesuaian budaya, ketegangan sosial, kesenjangan ekonomi,	Perkembangan Demografi Global	Pemuliaan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta	Masih tingginya penduduk miskin diatas Provinsi Bali

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
	Bali. Rata-rata lama sekolah tahun 2023 menjadi 7,57 tahun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali. Secara relatif penduduk miskin di Kabupaten Buleleng tahun 2023 mencapai 5,85 persen lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bali.	(36.550), namun dilihat dari prosentasenya, Buleleng lebih tinggi (5,39%), Bali (4,00%) di tahun 2024	dan hak asasi manusia		kearifan lokal	
		20. Eksistensi nilai-nilai kebudayaan Bali yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami degradasi.				Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan
		21. Rata-rata lama sekolah masih di bawah Provinsi Bali.	Perkembangan Teknologi	Kualitas Pendidikan untuk Semua	Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya pembangunan dan Daya saing SDM
		22. Harapan Lama Sekolah (Tahun) masih di bawah Provinsi Bali.				
		23. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang tidak/belum bersekolah paling tinggi di Provinsi Bali.				
		24. Persentase penduduk yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3 masih di bawah Provinsi Bali.				
		25. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun, Usia 13-15 Tahun, Usia 16-18 Tahun, dan Usia 19-24 Tahun belum tercapai				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		100%.				
		26. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buleleng cukup rendah di Provinsi Bali.				
		27. Sarana keolahragaan masih terbatas dan belum merata disetiap wilayah				
		28. Belum ada pemetaan terhadap kondisi anak-anak yang rawan putus sekolah.				
		29. Program beasiswa anak kurang mampu belum optimal.				
		30. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, belum tercapai.				
V	<b>Daya saing daerah:</b>	<b>Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah</b>				
	IPM Kabupaten Buleleng tahun 2023 mencapai 73,97 masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali.	31. Ekonomi Buleleng selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kontraksi dan berfluktuasi serta masih dibawah capaian provinsi.	Pertumbuhan Kelas Menengah dan Perkembangan Teknologi serta infratsruktur	Perkembangan demografi global dan perkembangan teknologi	Diversifikasi ekonomi	Belum optimalnya daya saing perekonomian daerah dan kualitas tenaga kerja
		32. Daya saing Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Buleleng secara regional Bali dibandingkan dengan				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		Kabupaten/Kota menempati urutan kelima (masih rendah dibanding kabupaten lain di Bali).				
		33. Daya saing SDM masih rendah (IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali).			Kualitas Sumber Daya Manusia	
		34. Daya saing infrastruktur jaringan transportasi Buleleng yaitu Belum optimalnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan wilayah, masih terdapat kondisi jalan rusak sedang dan berat sebanyak 28,33% dari total ruas jalan yang ada di Kabupaten Buleleng.			Infrastruktur dan konektivitas	Lingkungan Belum optimalnya konektivitas antar pusat-pusat kegiatan wilayah
		35. infrastruktur di bidang kesehatan Buleleng baru memiliki fasilitas RS pemerintah sebanyak 3 buah sehingga belum mampu sepenuhnya bisa menjangkau jika dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah Buleleng.				
		36. infrastruktur di bidang pendidikan Buleleng pada beberapa jenjang				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		ketersediaan gedung sekolah belum memadai. sehingga belum mampu sepenuhnya bisa menampung semua penduduk usia pendidikan jika dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah Buleleng.				
		37. Daya saing investasi masih rendah	Perdagangan Global dan trend pelemahan ekonomi	Perkembangan demografi global dan perkembangan teknologi	Ekosistem dan pemerataan investasi	Belum optimalnya kondusifitas iklim investasi.
VI	<b>Pelayanan Publik:</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>				
	Ketersediaan fasilitas pendidikan kewenangan kabupaten meliputi Jumlah sekolah Taman Kanak Kanak di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebanyak 226 buah. Jumlah sekolah SD 465 tersebar di tiap-tiap kecamatan. sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng saat ini terdapat 71 sekolah SMP yang tersebar di seluruh kecamatan. Rumah sakit pemerintah sebanyak 3 unit. Jumlah Puskesmas 20 buah, puskesmas pembantu 73 unit	38. Belum optimalnya pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga;	Transformasi tata kelola, integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan, Perkembangan teknologi, Layanan umum dan informasi	Belum optimalnya akuntabilitas dan mutu pelayanan publik yang bersih, responsive, adaptif, dan reformasi birokrasi
		39. Masih belum optimalnya akses terhadap pelayanan				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		kesehatan yang berkualitas.				
1		40. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, drainase irigasi, pengelolaan sampah, penataan ruang wilayah yang memadai dan merata.				
		41. Masih adanya rumah tidak layak huni yang dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);				
		42. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan daerah guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.				
		43. Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana				
2		44. Sarana dan prasaran penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang kurang memadai.				
		45. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		(PMKS) masih perlu ditingkatkan.				
		46. Masih relatif tingginya angkatan kerja dengan keterampilan yang rendah dan belum sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga memiliki daya saing yang rendah.				
		47. Pelayanan pemenuhan hak anak, perempuan dan gender belum optimal				
3		48. Pelayanan ketersediaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan berbasis sumber daya local masih kurang				
		49. Kurangnya SDM teknis pertanian yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan pertanian;				
		50. Pelayanan penanganan pencemaran lingkungan dan sampah belum optimal				
		51. Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana penunjang, serta sumber daya manusia dalam menunjang fungsi pelayanan administrasi				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		kependudukan				
		52. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan				
		53. Akses pelayanan pengendalian penduduk dan KB belum optimal				
		54. Pelayanan perhubungan belum optimal				
		55. Pelayanan komunikasi, sistem informasi, statistic dan persandian belum optimal				
		56. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi dan UMKM				
		57. Belum optimalnya identifikasi potensi investasi, pelayanan kemudahan investasi dan perijinan.				
		58. Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan lokal Bali sehingga perlu dilestarikan.				
		59. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan daerah belum optimal				
		60. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan				
		61. Pelayanan peningkatan kepariwisataan daerah				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		belum optimal				
		62. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, belum optimal				
		63. Masih minimnya jaringan pasar yang terbentuk;				
		64. Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri				
		65. Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah				
		66. Belum optimalnya identifikasi potensi pendapatan dan aset pemerintah daerah;				
		67. Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal				
		68. Belum optimalnya peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam penyediaan data informasi kebutuha perencanaan pembangunan daerah				
		69. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan tidak pada waktu yang				

No	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	Isu Lingkungan Dinamis			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	Provinsi Bali	
	1	2	4	5	6	7
		telah ditentukan sesuai dengan rekomendasi.				
		70. Pelayanan pendukung urusan pemerintahan daerah yang belum optimal				
		71. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan publik dikarenakan keterbatasan sarana prasarana pendukung				
		72. Masih perlu ditingkatkannya wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa di kalangan masyarakat				

Berdasarkan pemetaan permasalahan daerah dan isu strategis pada Tabel 2.97, dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Buleleng secara makro untuk 5 tahun ke depan, yaitu:

### **1. Daya saing daerah**

Daya saing suatu daerah merupakan cerminan dari nilai yang dimiliki oleh suatu daerah bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Daya saing ekonomi secara khusus menunjukkan posisi kita dan seberapa siap kita dalam mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi hal yang signifikan untuk direncanakan dan diimplementasikan. Permasalahan yang mencakup penurunan daya saing produk daerah akibat kendala akses pasar, infrastruktur distribusi yang kurang memadai, dan minimnya promosi produk lokal wajib dicarikan solusinya. Solusi yang tepat, seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan bagi pelaku usaha, dan program promosi yang agresif, sangat penting untuk mendorong daya saing. Dengan meningkatkan daya saing produk, daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya ini.

### **2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Optimalisasi pemberdayaan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Saat ini, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Jika kondisi ini dibiarkan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terus menurun, sehingga program-program yang dilaksanakan tidak akan efektif. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan terstruktur bagi pengurus lembaga kemasyarakatan serta peningkatan akses informasi yang relevan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

### **3. Penguatan Infrastruktur dan Akses Dasar**

Infrastruktur dan akses dasar adalah fondasi penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penguatan infrastruktur ini menjadi isu strategis yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah. Saat ini, akses terhadap air bersih dan infrastruktur jalan yang buruk menjadi tantangan besar yang dihadapi. Jika tidak segera ditangani, kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah akan terpengaruh. Oleh karena itu, peningkatan investasi dalam infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih dan perbaikan jalan, sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pendekatan yang diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya bagi generasi mendatang. Isu ini menjadi sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya. Dampak dari pengelolaan yang tidak baik dapat mengancam kesehatan masyarakat dan mengurangi daya dukung lingkungan terhadap kegiatan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu ada kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan praktik mitigasi pencemaran yang efektif, sehingga keberlanjutan sumber daya dapat terjaga.

### **5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas**

Tata kelola dan akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan responsif. Kualitas tata kelola yang rendah dan kurangnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masalah ini tidak diatasi, kualitas layanan publik akan terus menurun, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan partisipatif, serta pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data, menjadi langkah strategis yang perlu diambil.

## **6. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Sosial**

Ketentraman dan ketertiban sosial adalah kondisi yang mendukung stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Isu ini menjadi sangat penting mengingat ketegangan sosial yang disebabkan oleh konflik beragama yang dapat menghambat pembangunan. Jika ketentraman dan ketertiban tidak dijaga, akan terjadi ketegangan yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program dialog antaragama dan pendidikan tentang toleransi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada.

## BAB III

### VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi Kabupaten Buleleng periode 2025-2029 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi Visi dan Misi Kabupaten Buleleng untuk periode RPJMD Tahun 2025–2029 sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

#### 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### 3.1.1. Visi

Visi merupakan kondisi Kabupaten Buleleng yang diharapkan dan ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, berpedoman pada warisan berupa *wejangan leluhur* untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Buleleng. Konsep Buleleng masa depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sat Kerthi*, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global.

Arah pembangunan Buleleng ke depan tidak terpisahkan dari:

1. Upaya pencapaian tujuan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, antara lain untuk mewujudkan Tatanan Kehidupan Bali masa depan, yaitu:
  - a. Bali yang Kawista  
Yaitu Bali yang suci dan menyucikan seluruh kehidupan Alam beserta isinya.
  - b. Bali yang *Kang Tata-Titi Tentram Kertha Raharja*  
Kehidupan Masyarakat Bali yang tertata, trepti/tertib, nyaman dan damai, serta sejahtera dan bahagia.
  - c. Bali yang *Gemah Ripah Loh Jinawi*  
Kehidupan Masyarakat Bali yang makmur *Niskala-Sakala* (*wibuh sakti*), yakni: segala yang ditanam tumbuh subur (*mupu kang sarwa tinandur*), segala yang dibeli murah (*murah kang sarwa tinuku*). Secara *Niskala* menumbuhkan *dreda bhakti* Masyarakat Bali dalam

melaksanakan kegiatan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal melalui *pakerthi yadnya*. Secara sekala memberikan perlindungan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kekuatan, kepatutan, dan keutamaan (*sura dharma mahottama*).

Arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan dengan mengimplementasikan konsep:

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**  
**melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**  
**dalam BALI ERA BARU**

**Yang mengandung makna:**

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Niskala-Sekala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Prinsip **TRISAKTI BUNG KARNO**, yaitu:

**a. Berdaulat secara politik**

Kehidupan Masyarakat Buleleng berdasarkan tatanan dengan nilai-nilai *manawa madawa* (Manusia dengan sifat-sifat kedewaan), mengatur sendiri tata kehidupan masyarakat sesuai dengan adat-istiadat dan kearifan lokal Bali.

**b. Berdikari secara ekonomi**

Masyarakat Buleleng mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengolah, dan memberdayakan serta mengatur sendiri kekayaan dan keunggulan Alam Bali sebagai sumber penghidupan yang mendasar secara berkelanjutan.

**c. Berkepribadian dalam Kebudayaan**

Masyarakat Buleleng menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai tata kehidupan yang berkarakter Bali, sumber nilai keindahan (*lango*), dan sumber ekonomi untuk kesejahteraan.

3. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045, yaitu:

**“BULELENG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN**

4. Permasalahan dan Tantangan Buleleng ke Depan

- a. Permasalahan dan Tantangan Alam Buleleng ke Depan
- b. Permasalahan dan Tantangan Manusia Buleleng ke Depan
- c. Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Buleleng ke Depan

Dengan berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka Visi Kabupaten Buleleng dalam pembangunan Buleleng 5 (lima) tahun ke depan adalah:

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**

**MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA  
DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”**

**Mengandung makna:**

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali di Buleleng Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Buleleng yang Sejahtera dan Bahagia, *Niskala-Sekala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Buleleng Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

**BULELENG PATEN** mengandung makna Buleleng yang unggul, solid dan berkelas. Dalam Bahasa Bali bermakna *cager*.

**3.1.2. Misi**

Untuk mencapai visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2025 – 2029 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas.

2. Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif dan inklusif.
4. Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama masyarakat Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya.
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.
7. Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.
8. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Buleleng PATEN”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, berbudaya tinggi, unggul, solid serta berkelas. Dalam Bahasa Bali bermakna *cager* dan berbanding lurus dengan konsep civil society. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Buleleng salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kabupaten Buleleng.

Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Keselarasan antara Misi RPJMN (Astacita) dengan RPJMD Kabupaten Buleleng

No	Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 (Astacita)	Misi Pembangunan Kabupaten Buleleng 2025-2029
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<b>Misi 7;</b> Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum
<b>2</b>	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	<b>Misi 4;</b> Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya
<b>3</b>	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;	<b>Misi 5;</b> Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
<b>4</b>	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;	<b>Misi 1;</b> Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas <b>Misi 2;</b> Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas
<b>5</b>	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	<b>Misi 3;</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif
<b>6</b>	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	
<b>7</b>	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	<b>Misi 6;</b> Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi
<b>8</b>	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	<b>Misi 8;</b> Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan

Tabel 3.2

Keselarasan antara Misi Provinsi Bali dengan RPJMD Kabupaten Buleleng

No	Misi Pembangunan Provinsi Bali 2025-2029	Misi Pembangunan Kabupaten Buleleng 2025-2029
1	2	3
1	Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi	<b>Misi 8;</b> Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan
2	Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan	
3	Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.	
4	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	<b>Misi 2;</b> Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas
5	Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	<b>Misi 1;</b> Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas <b>Misi 2;</b> Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas
6	Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	<b>Misi 3;</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif
7	Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	<b>Misi 1;</b> Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas
8	Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.	
9	Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	
10	Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	<b>Misi 3;</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif
11	Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali.	
12	Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan	<b>Misi 4;</b> Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu

No	Misi Pembangunan Provinsi Bali 2025-2029	Misi Pembangunan Kabupaten Buleleng 2025-2029
1	2	3
	terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali	maupun kontinuitasnya
13	Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.	<b>Misi 3;</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif
14	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	
15	Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	
16	Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.	
17	Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat	
18	Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan.	
19	Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	<b>Misi 5;</b> Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
20	Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.	
21	Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.	
22	Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.	<b>Misi 7;</b> Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum  <b>Misi 6;</b> Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi

### 3.1.3. Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 terkait dalam hal mendukung Misi RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2045. Adapun visi RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 yaitu **“Buleleng Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana”** Terdapat 8 misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2045. Delapan misi tersebut dijabarkan kedalam 17 Arah Kebijakan dan 45 sasaran pokok.

Selain itu misi dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2045 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Buleleng 2025-2045 dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029

<b>Misi RPJPD 2025 – 2045</b>	<b>Misi RPJMD 2025 - 2029</b>
1	2
<b>Misi 1;</b> Mewujudkan Transformasi Sosial yang adil dan kohesif	<b>Misi 1;</b> Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas <b>Misi 2;</b> Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas
<b>Misi 2;</b> Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang inovatif dan produktif	<b>Misi 3;</b> Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif <b>Misi 4;</b> Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya
<b>Misi 3;</b> Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang akuntabel dan responsif	<b>Misi 6;</b> Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi
<b>Misi 4;</b> Memantapkan stabilitas keamanan, kenyamanan dan daya saing Daerah	<b>Misi 7;</b> Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum
<b>Misi 5;</b> Penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi	<b>Misi 8;</b> Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan
<b>Misi 6;</b> Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	<b>Misi 5;</b> Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
<b>Misi 7;</b> Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
<b>Misi 8;</b> Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	<b>Misi 8;</b> Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan

### 3.1.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) mendatang. Tujuan dirumuskan atau diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan. Satu atau lebih tujuan ditetapkan untuk mewujudkan suatu misi. Tujuan ini juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kabupaten Buleleng dalam lima tahun mendatang. Sementara

itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kabupaten Buleleng yang diperoleh dari pencapaian outcome program pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan, yaitu lima tahun mendatang.

Tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan Kabupaten Buleleng periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi pertama, dan misi kedua.
  - a. Misi pertama yaitu Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas. Sasarannya yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat.
  - b. Misi kedua Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas. Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas berarti pembangunan kesehatan masyarakat yang merata dan inklusif, serta terukur dari sasarnya yaitu Terpenuhinya sarana prasarana dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata.

ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat.

2. Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Buleleng Berbasis Sektor pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan yang berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi ketiga, Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan melalui memperkuat Riset dan inovasi serta meningkatnya daya saing tenaga kerja. ukuran keberhasilan tujuan adalah Laju Pertumbuhan

- Ekonomi yang semakin meningkat, ketimpangan pendapatan yang semakin membaik, Tingkat pengangguran terbuka yang semakin mengecil dengan terbukanya lebih banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.
3. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng. Mewujudkan produktivitas pertanian dan terpenuhinya sandang dan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi ke empat yaitu Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya. ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Ketahanan pangan di daerah.
  4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kabupaten Buleleng serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi kelima yaitu Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Cakupan tujuan ini meliputi Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas, terwujudnya konektivitas kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Infrastruktur.
  5. Terwujudnya kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga meningkat Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke enam yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi. ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.
  6. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan supremasi hukum yang akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum, supremasi hukum yang akuntabel dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan iklim lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke tujuh yaitu Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum. ukuran keberhasilan tujuan

adalah Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Menurunnya Indeks Resiko Bencana.

7. Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan. Pelestarian adat dan budaya, pelestarian seni budaya, meningkatkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat dan meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender partisipasi perempuan dalam politik serta perwujudan kota layak anak. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke delapan yaitu Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah Capaian Kinerja ketahanan sosial Budaya

Sementara itu, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pendidikan, Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah, Persentase Peningkatan Prestasi Olahrag, Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan Persentase Wirausaha Muda.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Usia Harapan Hidup (UHH).
3. Meningkatnya produktivitas ekonomi. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB, Tingkat Inflasi, Persentase kontribusi Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB, Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB, Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB, Rasio Kewirausahaan, *Return on Asset (ROA)* BUMD, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Indeks Kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya daya saing tenaga kerja. Ukuran ketercapaian sasaran adalah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan.
5. Terwujudnya penguatan Riset dan inovasi. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Inovasi Daerah
6. Meningkatnya produktivitas pertanian. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor pola pangan harapan(ketersediaan), Nilai Tukar petani (NTP), Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian.
7. Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Rumah Tangga dengan

- Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten tertangani, Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dan Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
8. Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase cakupan layanan transportasi.
  9. Terwujudnya konektifitas kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan hidup, Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR yang sesuai ketentuan, Persentase sampah terkelola, Persentase Desa Mandiri.
  10. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Maturitas SPIP, Nilai Sistem Merit, Nilai AKIP, Nilai LPPD, Jumlah perizinan yang diterbitkan dan Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti.
  11. Meningkatnya stabilitas keamanan dan keteriban umum. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Fasilitasi Penanganan konflik sosial.
  12. Meningkatnya Konsistensi penegakan peraturan di daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Kepala daerah.
  13. Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Ketahanan Daerah.
  14. Meningkatnya nilai-nilai pelestarian adat dan budaya daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase pelestarian adat budaya dan Persentase pelestarian seni budaya.
  15. Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/Bangga, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat partisipasi perempuan dalam politik dan Nilai Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Secara umum penjabaran atas visi misi RPJPD kedalam tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 mengacu pada pendekatan kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kaitan misi, tujuan, sasaran, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran beserta target nilainya disajikan dalam Tabel 3.4 Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPJMD Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.4.

Rumusan Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2030

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>											
1	Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Pembangunan Manuasi (IPM)		75,40	75.53	76.01	76.51	77.00	77.52
2	Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas										

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>													
					1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat	1	Indeks Pendidikan	74,20	75,65	77,10	78,55	80,00	81,45
						2	Rata-rata lama sekolah	7.76	7.83	7.90	7.97	8.04	8.11
						3	Harapan lama sekolah	13.33	13.36	13.39	13.42	13.45	13.48
						4	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	68.56	70.13	71.70	73.27	74.84	76.41
						5	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	93.40	93.80	94.30	94.70	95.10	95.50
						6	Persentase Wirausaha Muda	13.40	13.90	14.30	14.70	15.10	15.60

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>													
				2.1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.03	75.29	75.55	75.81	76.07	76.33
<b>3</b>	<b>Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.</b>	<b>Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan</b>	<b>1</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>				<b>5,06</b>	<b>5,37</b> (5,12-5,62)	<b>5,65</b> (5,40-5,90)	<b>5,85</b> (5,60-6,10)	<b>6,05</b> (5,80-6,30)	<b>6,35</b> (6,10-6,60)
			<b>2</b>	<b>Gini Rasio</b>				<b>0.299</b>	<b>0.296</b>	<b>0.295</b>	<b>0.294</b>	<b>0.293</b>	<b>0.292</b>
			<b>3</b>	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>				<b>2.04</b>	<b>2.03</b>	<b>2.02</b>	<b>2.00</b>	<b>1.99</b>	<b>1.97</b>
			<b>4</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>				<b>5.30</b>	<b>5.22</b>	<b>4.87</b>	<b>4.66</b>	<b>4.44</b>	<b>4.23</b>
				3.1.	Meningkatnya produktivitas ekonomi	1	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	20.33	20.27	20,19	20.14	20.07	20.01

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>												
					2	Tingkat Inflasi	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
					3	Persentase kontribusi Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB	18.00	18.92	19.84	20.76	21.68	22.60
					4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	625,000	650,000	675,000	700,000	725,000	750,000
					5	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	6.60	6.65	6.69	6.72	6.75	6.78
					6	Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB	12.21	12.28	12.35	12.42	12.49	12.56
					7	Rasio Kewirausahaan	0.24	0.36	0.48	0.6	0.72	0.84

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”**

								8	Return On Asset (ROA) BUMD	8.72	8.76	9.04	9.06	9.35	9.35
								9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1.41	1.51	1.71	1.87	2.05	2.08
								10	Indeks Kesejahteraan Sosial	58,38	58,40	58,45	58,50	58,55	60.00
						3.2.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja								
								1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80.00	80.20	80.40	80.60	80.80	81.00
								2	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	56.5	58.00	59.50	61.00	62.50	64.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>														
					3.3.	Terwujudnya penguatan Riset dan inovasi	1	Indeks Inovasi Daerah	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98
4	<b>Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng</b>	1	<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>					<b>83.36</b>	<b>83.46</b>	<b>83.56</b>	<b>83.66</b>	<b>83.76</b>	<b>84,00</b>
					4.1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	1	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	90.25	90.50	90.75	90.80	91.00	91.25
							2	Nilai Tukar Petani (NTP)	95.41	95.45	95.48	95.52	95.57	95.62
							3	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian	1.70	1.75	1.80	1.85	1.95	2.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”**

					4.2.	Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	98.05	98.16	98.26	98.35	98.43	98.51
							2	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten tertangani	44.44	50.00	70.59	76.19	80.00	82.76
							3	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	89.00	89.50	90.00	90.50	91.00	91.50









No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>														
					7.1.	Meningkatnya Stabilitas keamanan dan ketertiban umum	1	Persentase Fasilitasi Penanganan konflik sosial	100	100	100	100	100	100
					7.2.	Meningkatnya Konsistensi penegakan peraturan di daerah	1	Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100
				<b>2</b>	<b>Menurunnya Indeks Resiko Bencana</b>				<b>85.16</b>	<b>84.31</b>	<b>83.47</b>	<b>82.64</b>	<b>81.81</b>	<b>80.99</b>
					7.3.	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Indeks Ketahanan Daerah	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80
<b>8</b>	<b>Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan</b>	<b>Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan</b>	<b>1</b>	<b>Capaian kinerja ketahanan sosial budaya</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**VISI DAERAH “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”**

					8.1.	Meningkatnya nilai-nilai pelestarian adat dan budaya daerah	1	Persentase pelestarian adat budaya	19.88	39.91	59.94	79.97	100	100
							2	Persentase pelestarian seni budaya	20	40	60	80	100	100
					8.2.	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/ iBangga	63.80	64.10	64.40	64.70	65.00	65.30
							2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29
							3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.44	92.64	92.84	93.04	93.24	93.44
							4	Tingkat partisipasi perempuan dalam politik	15.81	17.1	18.38	19.66	20.94	22.22



## **3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Priotitas Pembangunan Daerah**

### **3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Berpijak pada komitmen yang tinggi untuk mencapai visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG** melalui delapan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan indikasi arahan prioritas tema tahunan yang memiliki sinkronisasi dan konsistensi pada tiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2030

Tabel 3.5

## Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
<b>“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>	<b>1. Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas</b>	Penguatan tata kelola pendidikan yang berkualitas, merata dan perluasan akses pendidikan, pemuda dan olahraga yang bermutu.	Penguatan tata kelola pendidikan dasar dan penguatan dasar mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada peserta didik, pemudan dan olahraga	Akselerasi Penguatan tata kelola pendidikan melalui pemenuhan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	Penguatan tata kelola pendidikan melalui ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang berkualitas	Perwujudan tata kelola pendidikan yang berkualitas melalui ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
	<b>2. Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesejahteraan yang komprehensif dan berkualitas	Peningkatan sistem pelayanan kesehatan dalam teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.	Akselerasi Pembangunan melalui Pemenuhan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial	Pemantapan Pembangunan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial	Perwujudan Pemenuhan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial sarana & prasarana pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
	<b>3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.</b>	Peningkatan ketahanan pangan didukung sektor pertanian yang tangguh serta, serta Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta perdagangan.	Pembangunan dan penguatan infrastruktur Pertanian, peternakan dan perikanan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta perdagangan.	Peningkatan pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan yang terintegrasi hulu- hilir dengan pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan, industri, jasa, penguasaan iptek dan inovasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta perdagangan.	Perwujudan Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
	<b>4. Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya</b>	Stabilisasi pasokan dan harga sandang, Pangan dan papan yang terjangkau bagi masyarakat.	Penguatan ketersediaan dan stabilitas harga sandang, pangan dan papan yang terjangkau bagi masyarakat.	Peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan serta terpenuhinya	Pengembangan cadangan pangan untuk mewujudkan Pola Pangan Harapan, didukung sektor pertanian yang tangguh dan	Perwujudan kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
				sandang dan papan	terpenuhinya sandang dan papan	
	<b>5. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.</b>	Penataan kebijakan pengembangan sarana prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan Infrastruktur yang memadai dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan	Pemantapan pembangunan sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan;	Perwujudan pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah dan efisiensi lahan sesuai peruntukan ruang
	<b>6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.</b>	Perbaiki kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran	Penguatan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti dan penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI	Peningkatan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, simplifikasi regulasi berbasis TI	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Perwujudan kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima
	<b>7. Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum</b>	Peningkatan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman keamanan dan kebencanaan	Peningkatan stabilitas keamanan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi serta menanggulangi resiko	Peningkatan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi untuk mengurangi serta menanggulangi	Penguatan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana	Perwujudan tata kelola Supremasi hukum yang akuntabel dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan

Visi	Misi	Arah Kebijakan				
		Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
			bencana	resiko bencana.		dan bencana
	<b>8. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.</b>	Peningkatan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok untuk memperkuat kebudayaan daerah	Penguatan budaya daerah untuk meningkatkan perilaku budaya yang inklusif dalam kehidupan sosial beragama, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Pengintegrasian kebudayaan sebagai pilar utama dalam kehidupan sosial beragama, antar Desa Adat dan Antar Stake Holder.	Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung	Perwujudan nilai-nilai agama dan budaya daerah yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila

Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 8 berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut :

**Misi 1: Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas.**

- 1) Urusan Pendidikan, urusan Perpustakaan Strateginya yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan; (1) Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan.
- 2) Urusan Kepemudaan dan olahraga, **Strategi kesatu** yaitu; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan dengan arah kebijakan; (1) Peningkatan prestasi olahraga; (2) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat, **Strategi kedua yaitu** Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Tabel 3.6.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
				2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keolahragaan	1. Peningkatan prestasi olahraga
				2. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat
		Mengembangkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan	

**Misi 2: Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.**

- 1) Urusan Kesehatan, urusan Keluarga Berencana, Strateginya yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan; (1)

Penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 3.7.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
2	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

**Misi 3: Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.**

- 1) Urusan Perdagangan, Urusan industri, urusan Pangan, urusan Perikanan, urusan pariwisata, urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah, Pendukung urusan, urusan Penunjang keuangan, urusan Sosial, **Strategi kesatu** Menjaga stabilitas harga barang dengan arah kebijakan; (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk; (2) Memperkuat sarana distribusi perdagangan; (3) Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian; (4) Perbaikan fungsi pasar. **Strategi kedua** Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dengan arah kebijakan Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal. **Strategi ketiga** Meningkatkan penanganan PMKS dan Peran aktif PSKS dengan arah kebijakan Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi PMKS dan pemberdayaan PSKS.
- 2) Urusan Tenaga Kerja, **Strateginya yaitu** Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha, dengan arah kebijakan; (1) Peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja), (2) Peningkatan kualitas tenaga kerja.
- 3) Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan, **Strateginya yaitu** Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah dengan

arah kebijakan Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah.

Tabel 3.8.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas ekonomi	1. Menjaga stabilitas harga barang	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk
				2. Memperkuat sarana distribusi perdagangan
				3. Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian.
			4. Perbaiki fungsi pasar	
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata	Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal	
		3. Meningkatkan penanganan PMKS dan Peran aktif PSKS	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi PMKS dan pemberdayaan PSKS	
	2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha	1. Peningkatan peluang kerja (kerjasama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja)	
			2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	
		3. Terwujudnya penguatan Riset dan inovasi	Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah	Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah

**Misi 4: Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya.**

- 1) Urusan Pangan, urusan Pertanian, **Strateginya yaitu** Memperkuat dukungan prasarana dan sarana Pertanian dan kualitas sumber daya Petani dengan arah kebijakan; (1) Peningkatan kapasitas petani' (2) Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, (3) Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian.

- 2) Urusan Perumahan dan kawasan permukiman, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perhubungan, **Strateginya yaitu** Meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman yang layak dan terjangkau dengan arah kebijakan; (1) Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman, (2) Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak, (3) Peningkatan kualitas jaringan, dan infrastruktur pendukung energi listrik.

Tabel 3.9.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng	1. Meningkatnya produktivitas pertanian	1. Memperkuat dukungan prasarana dan sarana Pertanian dan kualitas sumber daya Petani	1. Peningkatan kapasitas petani
				2. Peningkatan kualitas produksi pertanian, diversifikasi produk pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian
				3. Peningkatan jejaring distribusi pasca produksi dan pengawasan stabilitas harga produk pertanian
		2. Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman yang layak dan terjangkau	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman.
				2. Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak
				3. Peningkatan kualitas jaringan, , dan infrastruktur pendukung energi listrik

**Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.**

- 1) Urusan Pekerjaan Umum, urusan Penataan Ruang, urusan Perhubungan, **Strateginya yaitu** Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai dengan arah kebijakan; (1) Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng, (2) Mengoptimalkan upaya penataan ruang.
- 2) Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan dan Desa **Strateginya yaitu** Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap dengan arah kebijakan Penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kabupaten Buleleng.

Tabel 3.10.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
5	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkelanjutan	1. Terwujudnya sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas	1. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	1. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng
		2. Terwujudnya konektivitas kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah yang mantap	2. Mengoptimalkan upaya penataan ruang Penyediaan prasarana dan sarana wilayah secara merata di Kabupaten Buleleng

**Misi 6: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.**

- 1) Urusan Komunikasi dan Informasi, urusan Penanaman Modal, urusan Pemerintahan dan Desa, penunjang urusan keuangan, penunjang urusan

pengawasan, penunjang urusan kepegawaian, penunjang urusan perencanaan, pendukung urusan pemerintahan. **Strateginya yaitu** Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan. **Strategi berikutnya yaitu** Peningkatan Pertumbuhan Investasi dengan arah kebijakan 1) Pemanfaatan Aset Daerah; 2) peningkatan peranan BUMD dalam berbagai kegiatan sektor ekonomi; dan 3) penyederhanaan perijinan, pemberian insentif, peningkatan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, keterbukaan informasi, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Tabel 3.11.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
6	Terwujudnya kelembagaan tepat fungsi dan tepat sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima	1. Terlaksananya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Meningkatkan kualitas SDM dan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan
			2. Peningkatan Pertumbuhan Investasi	1. Pemanfaatan Aset Daerah 2. Peningkatan peranan BUMD dalam berbagai kegiatan sektor ekonomi 3. Penyederhanaan perijinan, pemberian insentif, peningkatan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, keterbukaan informasi, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama dengan pihak terkait.

**Misi 7: Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.**

- 1) Urusan Pemerintahan Umum, Strateginya yaitu Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan arah kebijakan Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban.
- 2) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Strateginya yaitu Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan arah kebijakan; (1) Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana, (2) Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif.
- 3) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Strateginya yaitu Meningkatnya stabilitas hukum dengan arah kebijakan Meningkatkan penegakan peraturan di daerah

Tabel 3.12.  
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 7

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
7	1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan supremasi hukum yang akuntabel	1. Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Optimalisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban
		2. Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana	1. Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana 2. Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif
		3. Konsistensi penegakan peraturan di daerah	Meningkatnya stabilitas hukum	Penguatan penegakan peraturan daerah

**Misi 8: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.**

- 1) Urusan Kebudayaan, **Strategi kesatu** yaitu Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga kemasyarakatan lainnya

dengan arah kebijakan Penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati, menghargai dan toleransi. **Strategi kedua** yaitu Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dengan arah kebijakan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

- 2) Urusan Keluarga berencana, urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Strategi ketiga yaitu Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan arah kebijakan Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3.13.

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 8

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
8	Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan	1. Meningkatnya nilai-nilai pelestarian adat dan budaya daerah	Meningkatkan pengelolaan dan fasilitasi obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
		2. Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kesadaran, penguatan pencegahan dan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak

### 3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Buleleng adalah “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” Melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Buleleng**”. Visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapny dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Misi 1: Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program pengelolaan pendidikan
- 2) Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Program pembinaan perpustakaan
- 4) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- 5) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- 6) Program pengembangan kapasitas kepramukaan

**Misi 2: Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

**Misi 3: Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Perekonomian Dan Pembangunan
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 5) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 6) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- 7) Program penyuluhan pertanian
- 8) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- 9) Program Pengembangan UMKM
- 10) Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
- 11) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- 12) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 14) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 15) Program Hubungan Industrial
- 16) Program Pemberdayaan Sosial
- 17) Program Rehabilitasi Sosial
- 18) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 19) Program Riset dan Inovasi Daerah
- 20) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 21) Program Pemasaran Pariwisata

**Misi 4: Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Penyuluhan Pertanian
- 5) Program Pengembangan Perumahan
- 6) Program Kawasan Permukiman
- 7) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 8) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 9) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

**Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 4) Program Pengelolaan Pelayaran
- 5) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 7) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 8) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- 9) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- 10) Program Penataan Ruang
- 11) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 12) Program pengelolaan persampahan
- 13) Program Penataan Desa
- 14) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- 15) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 16) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**Misi 6: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 3) Program Penyelenggaraan pengawasan
- 4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- 5) Program Kepegawaian Daerah
- 6) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 7) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- 9) Program Promosi Penanaman Modal
- 10) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 11) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota

**Misi 7: Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- 2) Program Penanggulangan Bencana
- 3) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

**Misi 8: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan**

Misi di atas didukung oleh program:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 2) Program Pengelolaan Cagar Budaya
- 3) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- 4) Program Kesenian Tradisional
- 5) Program Pengendalian Penduduk
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 7) Program pembinaan keluarga berencana
- 8) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 10) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politi dan pengembangan etika serta budaya politik

Sebagai bentuk penterjemahan dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji politik kepada masyarakat, maka diperlukan penyelarasan program strategis Bupati dan Wakil Bupati dengan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14

## RUMUSAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan		
<b>VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG”</b>								
1. Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas	1. Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
2. Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas								
		1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan, partisipasi generasi muda serta kualitas olahraga masyarakat	1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	5	Indeks Pendidikan	1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	<b>Program Prioritas Bidang Pendidikan</b>
			2	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun.	6	Rata-rata lama sekolah		
			3	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah.	7	Harapan lama sekolah		
				Meningkatnya	10	Persentase		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
			4	pembinaan olahraga bagi atlet yang berprestasi	peningkatan prestasi olahraga	4. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 5. Program pengembangan kapasitas kepramukaan	
			5	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif.	11 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		
			6	Meningkatnya partisipasi Wirausaha muda dalam pembangunan	12 Prsentase Wirausaha muda		
		1.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	<b>Program Prioritas Bidang Kesehatan</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan		
						Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan		
<b>3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.</b>	<b>2. Terwujudnya Transformasi ekonomi yang berkelanjutan</b>				1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		
					2	<b>Tingkat Kemiskinan</b>		
					3	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>		
					4	<b>Gini Rasio</b>		
		<b>2.1.</b> Meningkatnya produktivitas ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB		1	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program	<b>Program prioritas Bidang pertanian</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
					Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian		
			Terkendalinya Inflasi	2	Tingkat Inflasi	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	<b>Program prioritas Bidang pertanian, Pangan</b>
			Meningkatnya kontribusi sektor akomodasi makan	3	Persentase kontribusi Akomodasi Makan	Program Peningkatan Daya Tarik	<b>Program prioritas Bidang</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			dan minum dalam PDRB	dan Minum dalam PDRB	Destinasi Pariwisata	<b>Pariwisata</b>
			Meningkatnya kunjungan Tamu Wisatawan Mancanegara	4 Jumlah Wisatawan Mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB	5 Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	Program Pengembangan UMKM	<b>Program prioritas Bidang UMKM</b>
			Meningkatnya kontribusi sector perdagangan dalam PDRB	6 Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB	1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan 2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
			Meningkatnya pelaku kewirausahaan	7 Rasio Kewirausahaan	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM	<b>Program prioritas Bidang UMKM</b>
			Meningkatnya	8 Return On Asset	Program	<b>Program</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			efisiensi dan laba BUMD	(ROA) BUMD	Perekonomian Dan Pembangunan	<b>prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
			Meningkatnya Pajak Daerah	9 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Kesejahteraan sosial	10 Indeks Kesejahteraan sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<b>Program prioritas Bidang Sosial</b>
		<b>2.2.</b> Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>Program Prioritas bidang Tenaga kerja</b>
			Meningkatnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	2 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	2. Program Hubungan Industrial	
					3. Program Penempatan Tenaga Kerja	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		<b>2.3.</b> Terwujudnya penguatan Riset dan inovasi	Meningkatnya Inovasi Daerah.	1 Indeks Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	<b>Program prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>
<b>4. Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya</b>	<b>3. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan Krama Buleleng</b>			<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>		
		<b>3.1.</b> Meningkatnya produktivitas pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<b>Program prioritas Bidang Pangan</b>
			Meningkatnya kesejahteraan Petani	2 Nilai Tukar petani (NTP)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan	<b>Program prioritas Bidang pertanian</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
					dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian	3 Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>Program prioritas Bidang pertanian</b>
		<b>3.2.</b> Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau	Meningkatnya Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1. Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan	<b>Program Prioritas Bidang papan</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
					Permukiman Kumuh	
			Menurunnya kawasan kumuh kewenangan kabupaten	2	Persentase Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten tertangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya proporsi rumah tangga berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.	3	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi aman	5	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
<b>5. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan</b>	<b>4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkelanjutan</b>				<b>Indeks Infrastruktur</b>	
		<b>4.1.</b> Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya jalan dan jembatan dengan kondisi mantap	1	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan

**Program prioritas Bidang infsstrukt ur publik**

**Program prioritas Bidang infsstrukt u**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
			Meningkatnya jaringan irigasi dengan kondisi baik	2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<b>r publik</b>
			Terpenuhinya layanan transportasi	3	Persentase Cakupan layanan transportasi	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran	
		<b>4.2.</b> Terwujudnya konektivitas kewilayahan yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	1	Indek Kualitas Lingkungan hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman	<b>Program prioritas Bidang Lingkungan Hidup</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
					<p>Hayati</p> <p>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>		
			Meningkatnya jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang disusun dan dilegalisasi.	2	Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR (yang sesuai	Program Penataan Ruang	<b>Program prioritas Bidang infrsstruktur publik</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
				ketentuan)			
			Meningkatnya pengelolaan persampahan	3	Persentase sampah terkelola	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan Persampahan	<b>Program prioritas Bidang Lingkungan Hidup</b>
			Meningkatnya jumlah Desa mandiri	4	Persentase Desa Mandiri	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	<b>program prioritas Bidang Pemerintahan Desa</b>
<b>6. Mewujudkan transformasi tata kelola</b>	<b>5. Terwujudnya kelembagaan fungsi dan tepat</b>				<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi	sasaran untuk menciptakan pelayanan publik yang prima						
		5.1. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>program prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik:</b>
			Meningkatnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meninkatnya Pelayanan Publik	3	Indeks Pelayanan Publik	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	
			Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	Nilai Maturitas SPIP	1. Penyelempgaan pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
			Meningkatnya kinerja manajemen ASN	5	Nilai Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Program prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6	Nilai AKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota</li> <li>2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ol>	Program prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7	Nilai LPPD	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
			Meningkatnya Izin Penanaman Modal Yang direalisasikan.	8	Jumlah perizinan yang diterbitkan	1. Program Promosi Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	9	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
7. Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban Umum	6. Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan supremasi hukum yang akuntabel				<b>Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>		
		6.1.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum	1	Persentase Fasilitasi Penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<b>Program prioritas Bidang Agama</b>
		6.2.	Meningkatnya konsistensi penegakan peraturan di daerah	1	Persentase penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah terhadap	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban	<b>Program prioritas Bidang Tata</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			Peraturan perundangan		Umum	<b>Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik</b>
				<b>Menurunnya Indeks Resiko Bencana</b>		
		<b>6.3.</b> Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1 Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	<b>Program prioritas Bidang infrsstruktur publik</b>
<b>8. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan</b>	<b>7. Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan</b>				<b>Persentase pelestarian budaya</b>	
		<b>7.1.</b> Meningkatnya nilai-nilai pelestarian adat dan budaya daerah	Meningkatnya pelestarian adat budaya	1 Persentase pelestarian adat budaya	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengelolaan Cagar Budaya	<b>Program Prioritas Bidang Adat dan kebudayaa n</b>
			Meningkatnya pelestarian Kesenian Tradisional	2 Persentase pelestarian seni budaya	Program Kesenian Tradisional	
		<b>7.2.</b> Meningkatnya kualitas	Meningkatnya	1 Indeks	Program	<b>Program</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Keluarga dan Kesetaraan Gender	Kualitas Keluarga	Pembangunan Kualitas Keluarga/iBangga	Pengendalian Penduduk	<b>Prioritas Bidang Kesehatan</b>
			Menurunnya Ketimpangan Gender	2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	<b>Program Prioritas Bidang Kesehatan</b>
			Meningkatnya kesetaraan Gender	3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	<b>Program Prioritas Bidang Kesehatan</b>
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik	4 Tingkat partisipasi perempuan dalam politik	Program Pengarusutamaan Gender dan Perempuan	<b>Program Prioritas Bidang Pendidikan</b>
			Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	5 Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	<b>Program Prioritas Bidang kesehatan</b>

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan

## **BAB IV**

### **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1. Rencana Program Perangkat Daerah**

Dalam bab ini diuraikan program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setiap perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan daerah dan indikasi rencana program Kabupaten Buleleng tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1,01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					<b>841.397.593.940,44</b>		<b>832.381.934.444,36</b>		<b>842.581.934.444,36</b>		<b>850.081.934.444,36</b>		<b>860.781.934.444,36</b>	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	696.075.372.940,44	100	482.008.839.444,36	100	482.508.839.444,36	100	483.008.839.444,36	100	483.008.839.444,36	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan akses dan kualitas pendidikan	%	100	100	144.398.592.650,00	100	333.373.095.000,00	100	335.773.095.000,00	100	337.773.095.000,00	100	340.773.095.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D-IV	%	95,42	96,61	923.628.350,00	97,21	17.000.000.000,00	97,81	24.300.000.000,00	98,4	29.300.000.000,00	99	37.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1,02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>577.387.888.112,74</b>		<b>578.757.547.541,50</b>		<b>602.413.607.605,65</b>		<b>620.017.812.255,39</b>		<b>648.014.903.321,85</b>	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	92,98	93,25	489.480.958.503,74	93,5	332.136.600.541,50	93,75	341.119.490.605,65	94	340.725.254.255,39	94,25	356.294.492.321,85	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kinerja UKP dan UKM	%	99,96	99,97	86.504.302.609,00	99,97	246.308.357.000,00	99,98	260.919.289.000,00	99,98	278.264.068.000,00	99,99	290.646.155.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten	%	97,47	97,5	1.064.374.000,00	98	50.221.000,00	98,5	63.940.000,00	99	63.714.000,00	99,5	66.550.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyedia kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman terstandar	%	100	100	127.165.000,00	100	51.248.000,00	100	56.225.000,00	100	671.971.000,00	100	701.872.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100	100	211.088.000,00	100	211.121.000,00	100	254.663.000,00	100	292.805.000,00	100	305.834.000,00	Dinas Kesehatan
1,03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>322.908.948.183,00</b>		<b>123.687.472.373,21</b>		<b>110.453.067.033,10</b>		<b>121.747.219.668,77</b>		<b>174.699.072.300,08</b>	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	25.942.395.183,00	100	22.696.715.297,90	100	22.896.715.297,90	100	23.196.715.297,93	100	23.696.715.297,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	KABUPATEN/KOTA														
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	79	80	10.150.000.000,00	80,5	3.500.000.000,00	81	3.700.000.000,00	81,5	4.000.000.000,00	82	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	88,5	89,5	746.350.000,00	90	2.500.000.000,00	90,5	2.700.000.000,00	91	3.500.000.000,00	91,5	4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	46,51	55,81	1.500.000,00	56,51	2.000.000.000,00	57	2.200.000.000,00	57,5	2.800.000.000,00	58	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,46	5,21	45.000.000,00	5,61	2.000.000.000,00	6,01	2.200.000.000,00	6,41	2.600.000.000,00	6,81	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	48,88	50,09	46.200.000.000,00	50,69	10.000.000.000,00	51,29	10.200.000.000,00	51,89	12.000.000.000,00	52,49	15.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar	%	100	100	216.688.703.000,00	100	56.673.502.197,10	100	5.709.096.856,99	100	7.000.000.000,00	100	7.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	73	75	22.835.000.000,00	75,5	22.567.254.878,21	76	58.867.254.878,21	76,5	63.650.504.370,84	77	108.502.357.002,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Terampil	%	100	100	11.282.107,00	100	1.000.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR	%	75	85	288.717.893,00	86	750.000.000,00	87	780.000.000,00	88	1.000.000.000,00	89	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
<b>1,04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					<b>17.531.754.076,50</b>		<b>17.690.674.309,28</b>		<b>20.140.674.309,28</b>		<b>22.040.674.309,28</b>		<b>23.540.674.309,28</b>	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	8.665.549.518,50	100%	8.932.490.513,28	100%	9.132.490.513,28	100%	9.332.490.513,28	100%	9.432.490.513,28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase penanganan Rumah Korban Bencana alam	%	100%	100%	15.250.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	2.350.000.000,00	100%	2.450.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	%	33,50%	50,00%	465.219.808,00	70,59%	600.000.000,00	76,19%	650.000.000,00	80,00%	700.000.000,00	82,76%	800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan RTLH diluar Kawasan Kumuh	%	0,00%	21,23%	8.296.594.750,00	31,84%	6.600.000.000,00	42,25%	8.700.000.000,00	53,07%	8.800.000.000,00	63,68%	9.900.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase PSU Perumahan yang	%	6,99%	7,93%	89.140.000,00	8,39%	558.183.796,00	8,86%	658.183.796,00	9,32%	858.183.796,00	9,79%	958.183.796,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah													dan Pertanahan
<b>1,05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>39.037.275.774,32</b>		<b>41.268.767.589,28</b>		<b>50.268.767.589,28</b>		<b>46.968.767.589,28</b>		<b>47.968.767.589,28</b>	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	96	96	17.785.601.869,64	96	18.001.394.090,83	96	19.101.394.090,83	97	19.201.394.090,83	97	19.401.394.090,83	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kesiapan Instrumen penegakan Peraturan di daerah	%	100	100	410.889.400,00	100	808.800.000,00	100	1.008.800.000,00	100	1.208.800.000,00	100	1.408.800.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6.466.283.502,91	100	6.920.988.148,88	100	7.520.988.148,88	100	7.620.988.148,88	100	7.820.988.148,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase cakupan penanggulangan bencana daerah	%	100	100	652.351.608,00	100	1.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	13.085.616.033,77	100	13.537.585.349,57	100	18.637.585.349,57	100	16.137.585.349,57	100	16.337.585.349,57	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	636.533.360,00	100	1.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>1,06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					<b>12.926.506.522,23</b>		<b>13.859.911.711,97</b>		<b>15.959.911.711,97</b>		<b>17.059.911.711,97</b>		<b>18.109.911.711,97</b>	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	8.922.800.857,23	100	8.937.455.293,00	100	9.258.500.119,00	100	9.776.300.119,00	100	9.657.300.119,00	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	95,83	96,52	2.717.687.793,00	96,87	2.017.687.793,00	97,22	2.039.331.816,97	97,56	2.091.531.816,97	97,91	2.710.531.816,97	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	9,84	10,84	561.703.718,00	11,84	662.688.849,97	12,84	820.000.000,00	13,84	950.000.000,00	14,84	1.000.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	100	100	63.897.008,00	100	1.042.079.776,00	100	1.842.079.776,00	100	2.042.079.776,00	100	2.242.079.776,00	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM	Persentase korban	%	100	100	102.152.500,00	100	700.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.600.000.000,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PENANGANAN BENCANA	bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat													
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	%	100	100	558.264.646,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	900.000.000,00	Dinas Sosial
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2,07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>8.962.386.933,44</b>		<b>10.216.417.166,37</b>		<b>10.418.817.166,37</b>		<b>10.689.817.166,37</b>		<b>10.982.817.166,37</b>	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,32	100	8.370.394.699,44	100	9.127.306.323,37	100	9.288.467.166,37	100	9.507.967.166,37	100	9.746.417.166,37	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan penyediaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten	%	100	100	76.992.234,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	13	13,3	366.999.281,00	13,4	762.282.130,00	14,3	782.000.000,00	15	812.000.000,00	15,5	844.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	27,25	27,5	80.000.000,00	27,75	151.228.713,00	28	163.750.000,00	28,5	177.250.000,00	29	191.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Hubungan Industrial	%	58,82	60	68.000.719,00	61	90.600.000,00	62	99.600.000,00	63	107.600.000,00	64	115.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja
<b>2,08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>10.630.254.728,97</b>		<b>18.859.452.954,50</b>		<b>19.809.452.954,50</b>		<b>20.209.452.954,50</b>		<b>20.759.452.954,50</b>	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	9.598.968.966,97	100	9.898.854.214,50	100	10.098.854.214,50	100	10.198.854.214,50	100	10.398.854.214,50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran Responsif Gender (ARG)	%	3,27	3,5	215.312.886,00	4	250.000.000,00	4,25	350.000.000,00	4,5	400.000.000,00	5	450.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	185.944.000,00	100	7.760.598.740,00	100	8.060.598.740,00	100	8.110.598.740,00	100	8.260.598.740,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM	Persentase desa yang	%	57	100	50.000.000,00	100	250.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas Pengendalian

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH			
					2026		2027		2028		2029			2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	
	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga														Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan sistem Data Gender dan Anak	%	100	100	40.312.876,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	375.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemebuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	57,70	58,60	250.000.000,00	59,50	200.000.000,00	60,40	350.000.000,00	61,30	400.000.000,00	62,20	425.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan perlindungan khusus	%	100	100	289.716.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>2,09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					<b>14.157.668.829,86</b>		<b>15.596.303.798,91</b>		<b>16.096.303.798,91</b>		<b>16.471.303.798,91</b>		<b>16.796.303.798,91</b>		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	13.332.668.829,86	100	14.146.303.798,91	100	14.346.303.798,91	100	14.546.303.798,91	100	14.646.303.798,91	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	%	50	60	0,00	70	550.000.000,00	80	700.000.000,00	90	750.000.000,00	100	850.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Nilai	90,23	90,5	701.000.000,00	90,75	350.000.000,00	90,8	375.000.000,00	91	400.000.000,00	91,25	450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan	%	60	65	84.000.000,00	70	300.000.000,00	75	400.000.000,00	85	425.000.000,00	85	450.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Aman	%	87	87,4	40.000.000,00	87,6	250.000.000,00	87,8	275.000.000,00	88	350.000.000,00	88,2	400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
<b>2,1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					<b>231.690.576,00</b>		<b>550.000.000,00</b>		<b>650.000.000,00</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>850.000.000,00</b>		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Tanah Garapan yang terfasilitasi	%	100%	100%	154.518.528,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	450.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100%	100%	77.172.048,00	100%	250.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	UNTUK PEMBANGUNAN														
<b>2,11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>38.868.801.798,64</b>		<b>43.476.573.874,00</b>		<b>48.006.573.874,00</b>		<b>48.026.573.874,00</b>		<b>46.186.573.874,00</b>	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	22.556.203.683,64	100	28.019.825.358,00	100	29.204.900.918,00	100	28.212.936.495,00	100	29.013.782.834,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja lingkungan hidup	%	100	100	243.063.340,00	100	234.414.300,00	100	434.414.300,00	100	234.917.230,00	100	78.147.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/JATU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	nilai	59,1	73,66	461.737.743,00	73,86	942.054.878,00	74,06	849.805.732,00	74,26	948.828.519,00	74,46	1.036.385.343,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola	%	100	100	3.195.746.135,00	100	4.424.912.370,00	100	6.334.912.370,00	100	5.494.912.370,00	100	2.844.912.370,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemenuhan komitmen rincian teknis penyimpanan limbah B3	%	100	100	22.500.064,00	100	55.000.000,00	100	80.000.000,00	100	95.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pemenuhan terhadap kewajiban izin pengelolaan lingkungan hidup	%	70	71	20.467.326,00	71,5	55.668.880,00	72	60.990.880,00	72,5	66.040.880,00	73	71.090.880,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang mendapat penampungan terkait PPLH	%	100	100	6.588.224,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%	100	100	23.015.328,00	100	65.000.000,00	100	75.000.000,00	100	85.000.000,00	100	95.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase teraihnya penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	75	75	9.090.452,00	75	45.000.000,00	75	50.000.000,00	75	55.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait PPLH	%	100	100	7.717.284,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola	%	77,14	80,26	12.322.672.219,00	81,86	9.559.698.088,00	83,5	10.826.549.674,00	85,17	12.728.938.380,00	86,77	12.757.255.347,00	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2,12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>11.936.560.799,03</b>		<b>13.861.332.443,33</b>		<b>14.461.332.443,33</b>		<b>14.861.332.443,33</b>		<b>15.361.332.443,33</b>	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	11.348.641.150,03	100	13.213.332.443,33	100	13.766.332.443,33	100	14.114.332.443,33	100	14.543.332.443,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	%	85,48	87,13	425.546.490,00	89,65	450.000.000,00	92,18	477.500.000,00	94,7	510.000.000,00	97,23	550.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	99,5	100	54.932.746,00	100	70.000.000,00	100	77.000.000,00	100	83.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	82,5	85	101.569.653,00	85	118.000.000,00	85	129.500.000,00	85	142.000.000,00	85	165.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	85	100	5.870.760,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.000.000,00	100	13.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2,13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>12.864.375.905,60</b>		<b>12.424.777.893,14</b>		<b>13.124.777.893,14</b>		<b>13.824.777.893,14</b>		<b>14.424.777.893,14</b>	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	8.238.823.911,60	100%	8.924.777.893,14	100%	9.124.777.893,14	100%	9.324.777.893,14	100%	9.424.777.893,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	%	76,74%	84,50%	129.999.648,00	88,37%	200.000.000,00	92,25%	300.000.000,00	96,12%	500.000.000,00	100%	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	100,00%	100%	39.999.977,00	100%	200.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi tata kelola desa	%	100%	100%	2.385.396.000,00	100%	2.450.000.000,00	100%	2.650.000.000,00	100%	2.750.000.000,00	100%	2.950.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100%	100%	2.070.156.369,00	100%	650.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	950.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>2,14</b>	<b>URUSAN</b>					<b>8.027.754.776,00</b>		<b>1.050.660.000,00</b>		<b>1.300.660.000,00</b>		<b>1.500.660.000,00</b>		<b>1.650.660.000,00</b>	

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	<b>PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 Tahun)	Tahun	18,4	17,6	351.664.000,00	17,2	200.000.000,00	16,8	250.000.000,00	16,4	300.000.000,00	16	325.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	83,9	84,3	3.175.290.776,00	84,6	650.660.000,00	84,8	800.660.000,00	85	900.660.000,00	85,2	1.000.660.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader kelompok kegiatan (Poktan) ketahanan keluarga yang aktif	%	22,5	24,31	4.500.800.000,00	26,74	200.000.000,00	29,4	250.000.000,00	32,35	300.000.000,00	35,6	325.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2,15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>35.856.780.890,92</b>		<b>38.955.666.310,62</b>		<b>41.855.666.310,62</b>		<b>47.555.666.310,62</b>		<b>44.755.666.310,62</b>	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	16.564.394.450,92	100%	17.730.666.310,62	100%	17.930.666.310,62	100%	18.130.666.310,62	100%	18.330.666.310,62	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Cakupan Layanan Transportasi	%	80,39%	80,60%	19.264.644.320,00	80,70%	21.175.000.000,00	80,80%	23.855.000.000,00	80,91%	29.325.000.000,00	81,01%	26.275.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	%	90%	90%	27.742.120,00	90%	50.000.000,00	90%	70.000.000,00	90%	100.000.000,00	90%	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
<b>2,16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>16.258.798.334,49</b>		<b>17.062.865.554,81</b>		<b>19.462.865.554,81</b>		<b>20.462.865.554,81</b>		<b>20.962.865.554,81</b>	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,37	99,39	10.951.746.342,49	99,4	10.762.865.554,81	99,41	10.962.865.554,81	99,42	11.162.865.554,81	99,43	11.362.865.554,81	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	%	70	75	723.897.008,00	77,5	1.200.000.000,00	80	1.400.000.000,00	82,5	1.500.000.000,00	85	1.600.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang diterapkan sesuai standar	%	85	87,5	4.583.154.984,00	90	5.100.000.000,00	92,5	7.100.000.000,00	95	7.800.000.000,00	97,5	8.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
<b>2,17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>13.951.270.901,83</b>		<b>14.547.820.243,27</b>		<b>15.022.820.243,27</b>		<b>15.547.820.243,27</b>		<b>16.097.820.243,27</b>	

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>														
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	13.209.270.901,83	100	12.491.420.243,27	100	12.691.420.243,27	100	12.991.420.243,27	100	13.091.420.243,27	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	1	1,5	5.000.000,00	1,55	200.000.000,00	1,6	250.000.000,00	1,65	300.000.000,00	1,7	350.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	10	10	30.000.000,00	12	250.000.000,00	15	275.000.000,00	17	300.000.000,00	20	350.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	0,75	0,77	5.000.000,00	0,78	200.000.000,00	0,79	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1,01	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi diberikan fasilitasi pelatihan	%	10	12	0,00	15	200.000.000,00	16	225.000.000,00	18	250.000.000,00	20	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	1	1,5	50.000.000,00	1,55	250.000.000,00	1,6	275.000.000,00	1,65	300.000.000,00	1,7	350.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	%	1,25	1,3	162.000.000,00	1,35	556.400.000,00	1,4	606.400.000,00	1,45	656.400.000,00	1,5	806.400.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	%	1,25	1,3	490.000.000,00	1,35	400.000.000,00	1,4	450.000.000,00	1,45	475.000.000,00	1,5	550.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					<b>10.361.368.809,00</b>		<b>11.016.213.172,91</b>		<b>12.216.213.172,91</b>		<b>12.916.213.172,91</b>		<b>13.616.213.172,91</b>	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	10.045.107.564,00	100	9.704.813.172,91	100	9.904.813.172,91	100	10.104.813.172,91	100	10.304.813.172,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Buleleng	%	100	100	69.090.000,00	100	411.400.000,00	100	811.400.000,00	100	911.400.000,00	100	1.211.400.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Nilai	82	85	124.848.825,00	86	350.000.000,00	87	600.000.000,00	88	700.000.000,00	89	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	%	75	77	104.061.520,00	78	300.000.000,00	79	450.000.000,00	80	600.000.000,00	81	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	18.260.900,00	100	250.000.000,00	100	450.000.000,00	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	INFORMASI PENANAMAN MODAL														
<b>2,19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>25.546.310.000,00</b>		<b>29.500.000.000,00</b>		<b>33.700.000.000,00</b>		<b>35.900.000.000,00</b>		<b>38.000.000.000,00</b>	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	%	93	93,8	207.770.000,00	94,3	1.500.000.000,00	94,7	4.000.000.000,00	95,1	5.000.000.000,00	95,5	6.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	66,99	70,13	24.638.540.000,00	71,7	27.000.000.000,00	73,27	28.000.000.000,00	74,84	29.000.000.000,00	76,41	30.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kegiatan pengembangan kapasitas kepramukaan	%	100	100	700.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
<b>2,2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>100.000.000,00</b>		<b>787.200.000,00</b>		<b>987.200.000,00</b>		<b>1.087.200.000,00</b>		<b>1.187.200.000,00</b>	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data statistik sektoral sesuai standar	%	100	100	100.000.000,00	100	787.200.000,00	100	987.200.000,00	100	1.087.200.000,00	100	1.187.200.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
<b>2,21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>369.535.544,00</b>		<b>600.000.000,00</b>		<b>700.000.000,00</b>		<b>800.000.000,00</b>		<b>900.000.000,00</b>	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi sesuai standar	%	100	100	369.535.544,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	800.000.000,00	100	900.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
<b>2,22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>129.304.053.565,04</b>		<b>38.911.067.839,61</b>		<b>49.611.067.839,61</b>		<b>55.411.067.839,61</b>		<b>61.011.067.839,61</b>	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	11.642.203.565,04	100	11.786.467.839,61	100	11.986.467.839,61	100	12.286.467.839,61	100	12.386.467.839,61	Dinas Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian adat dan tradisi budaya	%	7,1	39,64	114.711.850.000,00	59,76	20.650.000.000,00	79,88	28.650.000.000,00	100	32.650.000.000,00	100	36.350.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelestarian seni budaya	%	12	40	1.850.000.000,00	60	1.200.000.000,00	80	1.400.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pelestarian sejarah lokal	%	5	40	115.000.000,00	60	574.600.000,00	80	674.600.000,00	100	974.600.000,00	100	1.174.600.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian cagar budaya	%	10	40	125.000.000,00	60	3.400.000.000,00	80	5.400.000.000,00	100	6.200.000.000,00	100	7.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kunjungan ke museum	%	17	40	860.000.000,00	60	1.300.000.000,00	80	1.500.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan
<b>2,23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>7.564.100.223,64</b>		<b>7.966.680.310,70</b>		<b>8.116.680.310,70</b>		<b>8.266.680.310,70</b>		<b>8.416.680.310,70</b>	

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>														
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	6.366.100.223,64	100	6.666.680.310,70	100	6.766.680.310,70	100	6.866.680.310,70	100	6.966.680.310,70	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	%	100	100	1.148.000.000,00	100	1.175.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.225.000.000,00	100	1.250.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang lestari	Buah	20	20	50.000.000,00	20	125.000.000,00	20	150.000.000,00	20	175.000.000,00	20	200.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>2,24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>					<b>150.000.000,00</b>		<b>345.786.188,00</b>		<b>395.786.188,00</b>		<b>445.786.188,00</b>		<b>495.786.188,00</b>	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip pada OPD, Desa/Kelurahan yang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	100	100	100.000.000,00	100	170.786.188,00	100	195.786.188,00	100	220.786.188,00	100	245.786.188,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	50.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3,25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>1.439.450.158,00</b>		<b>2.452.220.000,00</b>		<b>2.652.220.000,00</b>		<b>2.977.220.000,00</b>		<b>3.252.220.000,00</b>	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,15	0,15	638.450.158,00	0,15	800.000.000,00	0,15	850.000.000,00	0,15	977.220.000,00	0,15	1.002.220.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,49	1,49	385.000.000,00	1,5	600.000.000,00	1,5	700.000.000,00	1,51	800.000.000,00	1,48	900.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Rekomendasi Pembangunan Sektor Perikanan yang ditindaklanjuti	%	60	70	21.000.000,00	80	200.000.000,00	90	250.000.000,00	95	300.000.000,00	100	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	3,34	3,34	395.000.000,00	1,26	852.220.000,00	0,69	852.220.000,00	2,14	900.000.000,00	1,59	1.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
<b>3,26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					<b>16.798.524.158,39</b>		<b>17.894.249.665,01</b>		<b>19.844.249.665,01</b>		<b>20.344.249.665,01</b>		<b>21.044.249.665,01</b>	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	15.118.231.302,39	100	12.038.649.665,01	100	12.238.649.665,01	100	12.338.649.665,01	100	12.438.649.665,01	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM	Persentase destinasi	%	15	25	813.311.456,00	30	3.500.000.000,00	35	4.750.000.000,00	40	4.900.000.000,00	50	5.150.000.000,00	Dinas Pariwisata

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	yang ditata													
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	2	4	551.135.888,00	5	800.000.000,00	6	1.000.000.000,00	8	1.100.000.000,00	10	1.200.000.000,00	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	%	5	5	50.000.000,00	5	700.000.000,00	5	800.000.000,00	5	850.000.000,00	5	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	2	2	265.845.512,00	2	855.600.000,00	2	1.055.600.000,00	2	1.155.600.000,00	2	1.255.600.000,00	Dinas Pariwisata
<b>3,27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>32.960.027.569,07</b>		<b>34.172.760.164,66</b>		<b>40.872.760.164,66</b>		<b>40.972.760.164,66</b>		<b>37.572.760.164,66</b>	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	28.474.701.911,07	100	29.229.217.640,66	100	29.429.217.640,66	100	29.529.217.640,66	100	29.629.217.640,66	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi pertanian	%	1	1,86	2.346.831.193,96	2,43	1.500.000.000,00	4,84	4.200.000.000,00	7,29	4.200.000.000,00	9,78	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	6.462,49	6.462,49	615.000.000,00	6.462,49	1.200.000.000,00	6.462,49	4.200.000.000,00	6.462,49	4.200.000.000,00	6.462,49	2.200.000.000,00	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis(PHMS)	%	79	80	521.204.080,00	82	700.000.000,00	86	1.000.000.000,00	88	1.000.000.000,00	90	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	%	100	100	215.490.384,04	100	700.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	15	15	786.800.000,00	15	843.542.524,00	20	1.043.542.524,00	25	1.043.542.524,00	25	1.043.542.524,00	Dinas Pertanian
<b>3,29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>														
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT													
<b>3,3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>163.900.000,00</b>		<b>1.075.000.000,00</b>		<b>1.250.000.000,00</b>		<b>1.450.000.000,00</b>		<b>1.900.000.000,00</b>	

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>														
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	100	100	25.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dengan kondisi baik (indikator yang digunakan)	%	42,55	42,55	25.000.000,00	42,55	175.000.000,00	42,55	200.000.000,00	42,55	250.000.000,00	42,55	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	33.900.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP ditera ulang sah tahun berlaku (indikator yang digunakan)	%	81,98	82,1	55.000.000,00	82,72	150.000.000,00	83,33	200.000.000,00	83,95	250.000.000,00	84,57	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dialksanakan	%	100	100	25.000.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>3,31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>205.000.000,00</b>		<b>375.000.000,00</b>		<b>425.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase fasilitasi kepada sentra IKM di Kabupaten Buleleng	%	10	20	205.000.000,00	30	200.000.000,00	40	225.000.000,00	50	250.000.000,00	60	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase realisasi pengawasan dan pengendalian usaha industri di Kabupaten Buleleng	%	0	80		80	175.000.000,00	80	200.000.000,00	80	250.000.000,00	80	300.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>3,32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>					<b>10.000.000,00</b>		<b>11.700.000,00</b>		<b>14.300.000,00</b>		<b>17.300.000,00</b>		<b>20.300.000,00</b>	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembinaan/ penyuluhan			25	10.000.000,00	26	11.700.000,00	27	14.300.000,00	28	17.300.000,00	29	20.300.000,00	Dinas Tenaga Kerja
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4,01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>66.113.078.805,84</b>		<b>67.936.913.087,50</b>		<b>69.936.913.087,50</b>		<b>71.936.913.087,50</b>		<b>73.436.913.087,50</b>	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	96	96,2	52.995.270.005,84	96,4	53.306.038.367,50	96,6	53.451.988.367,50	96,8	54.325.987.367,50	97	54.710.988.367,50	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Nilai	3,2	3,2	11.424.228.560,00	3,3	11.555.874.720,00	3,3	12.184.924.720,00	3,4	12.710.925.720,00	3,5	13.150.924.720,00	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Tingkat Inflasi	%	1,93	2,5±1	1.693.580.240,00	2,5±1	3.075.000.000,00	2,5±1	4.300.000.000,00	2,5±1	4.900.000.000,00	2,5±1	5.575.000.000,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PEMBANGUNAN														
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>91.910.644.831,80</b>		<b>91.630.900.254,51</b>		<b>91.630.900.254,51</b>		<b>96.130.900.254,51</b>		<b>96.130.900.254,51</b>	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	96,05	96,1	61.561.781.282,80	96,2	61.284.500.254,51	96,3	61.284.500.254,51	96,4	63.784.500.254,51	97,5	63.784.500.254,51	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	30.348.863.549,00	100	30.346.400.000,00	100	30.346.400.000,00	100	32.346.400.000,00	100	32.346.400.000,00	Sekretariat DPRD
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>					<b>14.349.412.206,84</b>		<b>13.570.696.262,47</b>		<b>14.070.696.262,47</b>		<b>14.470.696.262,47</b>		<b>14.770.696.262,47</b>	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	11.157.862.291,84	100	10.851.297.058,47	100	11.051.297.058,47	100	11.151.297.058,47	100	11.251.297.058,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	2.022.794.060,00	100	1.319.399.204,00	100	1.469.399.204,00	100	1.619.399.204,00	100	1.719.399.204,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	1.168.755.855,00	100	1.400.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>					<b>347.405.830.135,26</b>		<b>349.891.993.759,47</b>		<b>374.751.256.475,44</b>		<b>423.919.973.337,59</b>		<b>389.844.530.910,00</b>	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	38.130.236.688,76	100	37.412.541.543,47	100	41.153.795.697,38	100	45.268.738.753,59	100	45.414.620.997,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	75,69	76,09	308.187.054.196,50	76,15	310.464.163.300,00	76,26	329.282.171.862,06	76,87	373.635.945.668,00	76,87	338.414.620.997,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	100	100	300.000.000,00	100	1.015.288.916,00	100	1.315.288.916,00	100	1.515.288.916,00	100	1.715.288.916,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	20,1	26,91	788.539.250,00	27,05	1.000.000.000,00	27,18	3.000.000.000,00	27,32	3.500.000.000,00	27,45	4.300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>					<b>13.333.389.459,08</b>		<b>13.636.011.293,39</b>		<b>12.736.011.293,39</b>		<b>12.886.011.293,39</b>		<b>13.236.011.293,39</b>	
5.03.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	12.388.450.427,08	100	12.499.655.073,39	100	11.499.655.073,39	100	11.599.655.073,39	100	11.699.655.073,39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	944.939.032,00	100	1.136.356.220,00	100	1.236.356.220,00	100	1.286.356.220,00	100	1.536.356.220,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>420.000.000,00</b>		<b>900.000.000,00</b>		<b>1.000.000.000,00</b>		<b>2.050.000.000,00</b>		<b>2.300.000.000,00</b>	
5.04.02	PROGRAM	Persentase	%	100	100	420.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	2.050.000.000,00	100	2.300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi ASN													Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5,05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>7.752.068.868,40</b>		<b>8.593.275.200,00</b>		<b>9.452.703.100,00</b>		<b>10.397.973.200,00</b>		<b>11.435.439.600,00</b>	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	95,45	95,45	7.012.068.868,40	95,45	7.713.275.500,00	95,45	8.484.703.400,00	96	9.333.173.600,00	96	10.264.160.100,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	%	100	100	740.000.000,00	100	879.999.700,00	100	967.999.700,00	100	1.064.799.600,00	100	1.171.279.500,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6,01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					<b>26.786.265.195,96</b>		<b>27.070.886.887,38</b>		<b>27.270.886.887,38</b>		<b>28.470.886.887,38</b>		<b>29.570.886.887,38</b>	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	22.054.470.115,96	100	13.389.086.887,38	100	13.589.086.887,38	100	13.789.086.887,38	100	13.889.086.887,38	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95	95	2.374.102.520,00	95,5	7.681.800.000,00	96	8.181.800.000,00	96,5	8.681.800.000,00	97	9.181.800.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah	Nlai	3,1	3,1	2.357.692.560,00	3,15	6.000.000.000,00	3,2	5.500.000.000,00	3,25	6.000.000.000,00	3,3	6.500.000.000,00	Inspektorat Daerah
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
<b>7,01</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>81.732.584.814,60</b>		<b>86.519.673.839,27</b>		<b>89.319.673.839,27</b>		<b>91.119.673.839,27</b>		<b>93.319.673.839,27</b>	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	98,61	100	5.751.373.002,49	100	5.782.221.306,55	100	5.882.221.306,55	100	5.982.221.306,55	100	6.082.221.306,55	Kecamatan Gerokgak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	89.630.470,00	100	274.400.000,00	100	324.400.000,00	100	349.400.000,00	100	374.400.000,00	Kecamatan Gerokgak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	76,1	76,74	85.660.918,00	77,24	200.000.000,00	77,74	250.000.000,00	78,24	275.000.000,00	78,75	300.000.000,00	Kecamatan Gerokgak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibulinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	108.987.840,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Gerokgak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	140.177.732,00	79	200.000.000,00	85	250.000.000,00	92	275.000.000,00	100	300.000.000,00	Kecamatan Gerokgak
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,52	100	8.822.942.636,65	100	9.269.617.911,94	100	9.369.617.911,94	100	9.469.617.911,94	100	9.569.617.911,94	Kecamatan Seririt
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan	%	85	100	60.117.388,00	100	231.525.464,00	100	356.525.464,00	100	381.525.464,00	100	406.525.464,00	Kecamatan Seririt

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	sesuai standar													
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	66	68,58	400.382.612,00	70,99	425.000.000,00	73,49	450.000.000,00	76,07	475.000.000,00	78,75	500.000.000,00	Kecamatan Seririt
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibulinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	55.000.000,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	Kecamatan Seririt
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	200.500.000,00	79	150.000.000,00	85	175.000.000,00	92	200.000.000,00	100	225.000.000,00	Kecamatan Seririt
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,02	100	5.354.364.893,05	100	5.493.001.739,03	100	5.593.001.739,03	100	5.693.001.739,03	100	5.793.001.739,03	Kecamatan Busungbiu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	12.500.000,00	100	290.400.000,00	100	340.400.000,00	100	365.400.000,00	100	390.400.000,00	Kecamatan Busungbiu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	77,35	77,99	81.850.000,00	78,49	150.000.000,00	78,99	200.000.000,00	79,49	225.000.000,00	80	250.000.000,00	Kecamatan Busungbiu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibulinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	12.500.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Busungbiu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	83	85	62.418.190,00	87	150.000.000,00	90	200.000.000,00	94	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Busungbiu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	98,64	100	5.068.860.172,41	100	5.470.794.149,34	100	5.570.794.149,34	100	5.670.794.149,34	100	5.770.794.149,34	Kecamatan Banjar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	80	100	25.412.100,00	100	320.000.000,00	100	370.000.000,00	100	395.000.000,00	100	420.000.000,00	Kecamatan Banjar
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	77,25	77,99	297.745.600,00	78,49	250.000.000,00	78,99	300.000.000,00	79,49	325.000.000,00	80	350.000.000,00	Kecamatan Banjar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibulinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	78.202.420,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Banjar
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	74,25	76	86.440.520,00	79	150.000.000,00	84	200.000.000,00	92	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Banjar
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,65	100	6.019.509.904,32	100	5.923.396.767,86	100	6.023.396.767,86	100	6.123.396.767,86	100	6.223.396.767,86	Kecamatan Sukasada

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	30.000.000,00	100	342.000.000,00	100	442.000.000,00	100	467.000.000,00	100	492.000.000,00	Kecamatan Sukasada
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	67,7	70,19	290.000.000,00	72,52	375.000.000,00	74,94	400.000.000,00	77,43	425.000.000,00	80	450.000.000,00	Kecamatan Sukasada
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	25.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Sukasada
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	72	112.100.000,00	75	150.000.000,00	80	200.000.000,00	88	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Sukasada
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	98,14	100	28.710.278.624,08	100	27.485.685.286,04	100	27.685.685.286,04	100	27.785.685.286,04	100	27.885.685.286,04	Kecamatan Buleleng
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	27.596.000,00	100	764.000.000,00	100	814.000.000,00	100	839.000.000,00	100	914.000.000,00	Kecamatan Buleleng
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	67	70,15	3.736.825.700,00	72,21	3.700.000.000,00	74,32	3.750.000.000,00	76,51	3.775.000.000,00	78,75	4.150.000.000,00	Kecamatan Buleleng
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	72.775.500,00	100	450.000.000,00	100	500.000.000,00	100	525.000.000,00	100	550.000.000,00	Kecamatan Buleleng
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	170.245.000,00	79	500.000.000,00	85	550.000.000,00	92	575.000.000,00	100	600.000.000,00	Kecamatan Buleleng
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	97,93	100	5.193.881.874,20	100	5.364.491.263,33	100	5.464.491.263,33	100	5.564.491.263,33	100	5.664.491.263,33	Kecamatan Sawan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	16.978.200,00	100	271.600.000,00	100	321.600.000,00	100	346.600.000,00	100	371.600.000,00	Kecamatan Sawan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	76,25	77,01	205.654.510,00	77,63	200.000.000,00	78,25	250.000.000,00	78,87	275.000.000,00	79,5	300.000.000,00	Kecamatan Sawan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	21.554.425,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Sawan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	73.001.400,00	79	150.000.000,00	85	200.000.000,00	92	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Sawan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	97,28	100	4.679.855.028,72	100	4.508.768.782,57	100	4.608.768.782,57	100	4.708.768.782,57	100	4.808.768.782,57	Kecamatan Kubutambahan

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	DAERAH KABUPATEN /KOTA														
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	95	8.550.000,00	100	334.000.000,00	100	434.000.000,00	100	459.000.000,00	100	484.000.000,00	Kecamatan Kubutambahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	65	68,58	50.500.000,00	70,99	200.000.000,00	73,49	250.000.000,00	76,07	275.000.000,00	78,75	300.000.000,00	Kecamatan Kubutambahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	18.900.000,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	Kecamatan Kubutambahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	86.635.000,00	79	175.000.000,00	85	200.000.000,00	92	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Kubutambahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	99,03	100	5.188.555.145,68	100	5.152.971.168,61	100	5.252.971.168,61	100	5.352.971.168,61	100	5.452.971.168,61	Kecamatan Tejakula
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan kewenangan Kecamatan sesuai standar	%	90	100	49.697.008,00	100	190.800.000,00	100	240.800.000,00	100	290.800.000,00	100	315.800.000,00	Kecamatan Tejakula
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	%	77,25	77,99	50.925.000,00	78,49	150.000.000,00	78,99	200.000.000,00	79,49	225.000.000,00	80	250.000.000,00	Kecamatan Tejakula
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Trantibumlinmas yang ditinjaulanjuti	%	100	100	23.250.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	Kecamatan Tejakula
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa	%	68	74	75.250.000,00	79	150.000.000,00	85	200.000.000,00	92	225.000.000,00	100	250.000.000,00	Kecamatan Tejakula
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					9.442.008.700,07		9.457.958.262,83		9.857.958.262,83		11.857.958.262,83		12.857.958.262,83	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	7.341.471.293,07	100	7.271.151.754,83	100	7.371.151.754,83	100	7.871.151.754,83	100	8.371.151.754,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase capaian pembinaan dan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	1.202.208.065,00	100	1.336.806.508,00	100	1.386.806.508,00	100	1.886.806.508,00	100	2.086.806.508,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Masyarakat	%	100	100	354.068.097,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH		
					2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10
	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	50	60	78.201.668,00	70	150.000.000,00	80	200.000.000,00	90	500.000.000,00	100	550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100	201.327.336,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dini di daerah	%	95	100	264.732.241,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>JUMLAH</b>						<b>2.867.153.864.129,00</b>		<b>2.608.564.364.396,26</b>		<b>2.712.839.709.736,27</b>		<b>2.832.146.053.983,83</b>		<b>2.906.863.021.654,01</b>	

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah terdapat tiga aspek yang dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator di level dampak (impact) yang merupakan akumulasi dari hasil (outcome) multi-aspek penyelenggaraan pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD yang posisinya lebih ke arah dampak final/akhir (final impact) dari pembangunan.

#### **4.2. Indikator Kinerja Utama**

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030. Target capaian indikator kinerja utama daerah pada Tahun 2030, yang merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya disajikan sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,40	75,53	76,01	76,51	77,00	77,52	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,06	5,12	5,40	5,60	5,80	6,10	
3	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	2,04	1,90	1,86	1,84	1,82	1,80	
4	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,30	5,02	4,87	4,66	4,44	4,23	
5	Gini Rasio	Angka	0,299	0,296	0,295	0,294	0,293	0,292	
6	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	83,36	83,46	83,56	83,66	83,76	84,00	
7	Indeks Infrastruktur	Nilai	80,75	81,28	81,68	82,08	82,48	82,88	
8	Indeks Reformasi birokrasi	Nilai	82	85	87	88	90	91	
9	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pelestarian budaya	Persentase	19,94	39,96	59,97	79,99	100	100	
11	Indeks resiko Bencana	Nilai	85,16	84,31	83,47	82,64	81,81	80,99	

### **4.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayanan minimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>								
	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)	Skor	90,25	90,5	90,75	90,8	91	91,25	
	Nilai Tukar petani (NTP)	Nilai	95,41	95,45	95,48	95,52	95,57	95,62	
	Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian	%	1,7	1,75	1,8	1,85	1,95	2	
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	98,09	98,2	98,29	98,38	98,46	98,53	
	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	89	89,5	90	90,5	91	91,5	
	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	600,02	633,67	669,23	706,82	746,54	788,53	
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,81	5,21	5,61	6,01	6,41	6,81	
	Indek Kualitas Lingkungan hidup	%	75,44	75,65	75,87	76,08	76,29	76,5	
	Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR	%	80	85	88	90	95	98	
	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	%	44,44	50,00	70,59	76,19	80,00	82,76	
	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	
	Persentase Fasilitasi Penanganan	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	konflik sosial								
	Persentase Konflik Beragama	%	20	20	20	20	20	20	
<b>II</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
	PDRB Perkapita	Juta	31,29	32,62	34,02	35,47	36,99	38,57	
	Laju inflasi (%)	%	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	7,83	7,9	7,97	8,04	8,11	
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,36	13,39	13,42	13,45	13,48	
	Angka Partisipasi Sekolah Dasar	%	100	100	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	%	100	100	100	100	100	100	
	Angka Putus sekolah sekolah dasar	angka	0	0	0	0	0	0	
	Angka Putus sekolah sekolah menengah pertama	angka	0	0	0	0	0	0	
	Indeks Pendidikan	Nilai	74,20	75,65	77,10	78,55	80,00	81,45	
	Skor Literasi/ Numerasi	Nilai	63,15	65,15	67,15	69,15	71,15	73,15	
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,92	7,94	7,96	7,97	7,98	8	
	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	68,56	70,13	71,7	73,27	74,84	76,41	
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	93,4	93,8	94,3	94,7	95,1	95,5	
	Persentase Wirausaha Muda	%	13,4	13,9	14,3	14,7	15,1	15,6	
	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,03	75,29	75,55	75,81	76,07	76,33	
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Nilai	94,8	93,81	92,82	91,83	90,84	89,85	
	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Nilai	12	11,5	11	10,5	10	9,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	85	90	90	90	90	90	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	90	90	90	90	
	Persentase Prevalansi Stunting	%	13,8	12,8	11,8	10,8	9,8	8,8	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,7	98,74	98,78	98,82	98,86	98,9	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai	80	80,2	80,4	80,6	80,8	81	
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah	%	46,55	47,2	47,6	48,2	48,6	49,2	
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	Nilai	56,5	58	59,5	61	62,5	64	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,44	92,64	92,84	93,04	93,24	93,44	
	Persentase pelestarian seni budaya	%	20	40	60	80	100	100	
	Persentase pelestarian adat budaya	%	19,88	39,91	59,94	79,97	100	100	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/ iBangga	nilai	63,8	64,1	64,4	64,7	65	65,3	
	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,55	0,57	0,58	0,6	0,61	0,63	
	Tingkat partisipasi perempuan dalam politik	%	15,81	17,1	18,38	19,66	20,94	22,22	
	Nilai Kabupaten/ Kota Layak Anak	nilai	515	520	540	560	580	601	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kesejahteraan Sosial	nilai	58,38	58,40	58,45	58,50	58,55	60	
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	%	5,65	5,80	6,00	6,20	6,40	8,84	
	Persentase Kontribusi perdagangan dalam PDRB	%	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,56	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,41	1,51	1,71	1,87	2,05	2,08	
	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB	%	6,6	6,65	6,69	6,72	6,75	6,78	
	Persentase kontribusi Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB	%	18	18,92	19,84	20,76	21,68	22,6	
	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	%	20,33	20,27	20,2	20,14	20,07	20,01	
	Rasio Kewirausahaan	Rasio	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	625.000	650.000	675.000	700.000	725.000	750.000	
	Return On Asset (ROA) BUMD	Nilai	8,72	8,76	9,04	9,06	9,35	9,35	
	Persentase Desa Mandiri	%	77,52	81,4	89,15	93,02	96,9	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98	60,98	
	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	74	75	75,5	76	76,5	77	
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	79,5	80	80,5	81	81,5	82	
	Persentase Cakupan Layanan Transportasi	%	80,49	80,6	80,7	80,8	80,91	81,01	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	75,44	75,65	75,87	76,08	76,29	76,5	
		%	78,68	80,26	81,86	83,5	85,17	86,77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Sampah terkelola								
<b>IV</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,93	76,09	76,15	76,26	76,87	76,87	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,7	3,72	3,74	3,76	3,78	3,8	
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,1	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	
	Nilai Sistem Merit	Nilai	347,5	347,5	348,5	348,5	350	350	
	Nilai AKIP	Nilai	70,01	70,02	70,25	70,75	71,45	71,45	
	Nilai LPPD	Nilai	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	
	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Jumlah	6500	6700	6900	7100	7300	7500	
	Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
<b>V</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>PENDIDIKAN</b>								
	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	51,31	56,18	61,05	65,92	70,79	75,65	
	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	12,48	18,31	24,15	29,98	35,82	41,65	
	Jumlah siswa putus sekolah pendidikan dasar	Orang	0	0	0	0	0	0	
	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0	0	0	0	
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia SD	Rasio	73,88	74,08	74,28	74,48	74,68	74,88	
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia SMP	Rasio	28,35	28,55	28,75	28,95	29,15	29,35	
	Persentase Sekolah SD Kondisi Bangunan Baik	%	93,57	93,85	94,14	94,43	94,71	95	
	Persentase Sekolah SMP Kondisi Bangunan Baik	%	93,48	93,78	94,09	94,39	94,7	95	
	Rasio Guru per Murid SD	Rasio	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	
	Rasio Guru per Murid SMP	Rasio	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	
	Proporsi Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	96,02	96,61	97,21	97,81	98,4	99	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	90,76	92,61	94,46	96,3	98,15	100	
	Proporsi Jumlah Satuan SD Terakreditasi A	%	33,98	41,29	48,6	55,9	63,21	70,52	
	Proporsi Jumlah Satuan SMP Terakreditasi A	%	59,72	62,5	65,28	68,06	70,83	73,61	
	Skor Literasi SD	%	63,43	67,08	70,74	74,4	78,06	81,71	
	Skor Numerasi SD	%	51,05	55,94	60,84	65,73	70,63	75,52	
	Skor Literasi SMP	%	74,45	77,01	79,56	82,12	84,67	87,23	
	Skor Numerasi SMP	%	66,45	69,8	73,16	76,51	79,87	83,22	
	<b>KESEHATAN</b>								
	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ODHIV Mendapatkan Pengobatan	%	90	90	90	90	90	90	
	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	%	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Desa Kelurahan UCI	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95	95	95	95	95	95	
	<b>PEKERJAAN UMUM</b>								
	Indeks Infrastruktur	%	80,75	81,28	81,68	82,08	82,48	82,88	
	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	89	89,5	90	90,5	91	91,5	
	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	4,81	5,21	5,61	6,01	6,41	6,81	
	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	49,48	50,09	50,69	51,29	51,89	52,49	
	Persentase Penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai	%	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	standar								
	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terampil	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyusunan dan legalisasi RDTR	%	80	85	86	87	88	89	
	Persentase pengembangan sistem persampahan	%	51,16	55,81	56,51	57	57,5	58	
	Persentase rumah tangga yang sudah memiliki sambungan rumah di wilayah perkotaan	%	20,50	20,60	20,70	20,80	20,90	21,00	
	Persentase rumah tangga yang sudah memiliki sambungan rumah di wilayah perdesaan	%	68,50	68,90	69,30	69,70	70,10	70,50	
	Persentase rumah tangga sudah memilki pengolahan air limbah domestik aman	%	4,81	5,21	5,61	6,01	6,41	6,81	
	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	79,5	80,55	81,61	82,66	83,92	85,19	
	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	93,24	93,92	94,59	95,27	95,95	96,62	
	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	m	387,317	389,753	392,189	394,625	397,061	399,496	
	Luas areal layanan Irigasi yang berfungsi optimal	Ha	9,569	9,629	9,689	9,749	9,809	9,87	
	Persentase RDTR yg disusun dan dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	
	Persentase wilayah yg memiliki	%	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RDTR sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang								
	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	98,05	98,16	98,26	98,35	98,43	98,51	
	Persentase kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	%	44,44	50,00	70,59	76,19	80,00	82,76	
	Prosentase penanganan Rumah Korban Bencana Alam	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penanganan RTLH diluar Kawasan Kumuh	%	10,61	21,23	31,84	42,45	53,07	63,68	
	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah	%	7,46	7,93	8,39	8,86	9,32	9,79	
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
	tingkat capaian upaya pelaksanaan penegakan peraturan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Risiko Bencana	Nilai	85,16	84,31	83,47	82,64	81,81	80,99	
	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	
	Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Nilai	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	
	Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Nilai	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Nilai	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
	Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Nilai	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	
	Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Nilai	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	
	Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai	0,63	0,65	0,65	0,68	0,70	0,72	
	Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai	0,68	0,68	0,76	0,76	0,76	0,76	
	<b>SOSIAL</b>								
	Persentase PMKS tertangani	%	43,23	44,23	45,23	46,23	47,23	48,23	
	Persentase PSKS yang aktif	%	96,18	96,56	96,78	97,22	97,56	97,91	
	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>TENAGA KERJA</b>								
	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	4,87	13,3	13,4	14,5	15	15,5	
	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	%	26,18	27,5	27,75	28	28,25	28,5	
	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang di Selesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	57,14	60	61	62	63	64	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan penyediaan informasi pasar kerja daerah	%	65,68	67,68	69,68	71,68	73,68	75,68	
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	%	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilatih PUG	OPD	40	40	40	40	40	40	
	Persentase Program/Kegiatan PUG pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	62,3	63,4	64,25	65,3	66	67,05	
	<b>PANGAN</b>								
	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan	%	62	65	70	75	85	85	
	Persentase Pangan Aman	%	87,2	87,4	87,6	87,8	88	88,2	
	<b>PERTANAHAN</b>								
	Persentase Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Tanah Garapan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
	Indeks Kualitas Air		73,46	73,66	73,86	74,06	74,26	74,46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kualitas Udara		79,91	80,21	80,51	80,81	81,11	81,41	
	Indeks Tutupan Lahan		70,58	70,65	70,72	70,79	70,86	70,92	
	Persentase pemenuhan terhadap kewajiban persetujuan lingkungan	%	70,5	71	71,5	72	72,5	73	
	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	89,30	89,40	89,50	89,60	89,70	89,80	
	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	%	99,20	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	70	75	80	85	90	95	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	%	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98	99,99	
	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	56	56,60	56,90	57,20	57,50	57,80	
	Persentase Informasi Kependudukan yang di manfaatkan	%	82,50	85	85	85	85	85	
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase desa dengan capaian kinerja sesuai ketentuan perundangan	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	%	55	60	65	70	75	75	
	Angka Kelahiran Total (total fertility rate/TFR)	%	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,1	
	<b>PERHUBUNGAN</b>								
	Persentase Cakupan Layanan Transportasi	%	80,49	80,6	80,7	80,8	80,91	81,01	
	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	%	61,47	61,79	62,1	62,41	62,72	63,03	
	Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana Transportasi	%	90	90	90	90	90	90	
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	90	90	90	90	90	90	
	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>								
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,7	3,72	3,74	3,76	3,78	3,8	
	Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	Nilai	98,29	98,3	98,31	98,32	98,33	98,34	
	Persentase Perangkat Daerah	%	85	87,5	90	92,5	95	97,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang menerapkan SPBE sesuai standar								
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
	Persentase Pertumbuhan UMKM Naik Kelas	%	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	
	Persentase Koperasi Aktif	%	0,77	0,78	0,79	1	1,01	1,02	
	<b>PENANAMAN MODAL</b>								
	Persentase Realisasi Investasi (%)	%	76	77	78	79	80	81	
	Indeks Kepuasan Masyarakat		84	85	86	87	88	89	
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>								
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	64,76	66,52	68,29	70,05	71,81	73,57	
	Jumlah Pelatih Cabang Olahraga yang Bersertifikat	Orang	95	98	101	104	107	110	
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	63	64,85	66,7	68,55	70,4	72,25	
	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	533	536	539	542	545	548	
	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Cabor	16	17	18	19	20	21	
	Jumlah Medali yang Diraih	Jumlah Medali	512	514	516	518	520	522	
	<b>STATISTIK</b>								
	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	2,68	
	<b>PERSANDIAN</b>								
	Persentase pengamanan informasi Pemerintah Daerah sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>KEBUDAYAAN</b>								
	Persentase pelestarian adat dan tradisi budaya	%	19,53	39,64	59,76	79,88	100	100	
	Persentase pelestarian sejarah	%	20	40	60	80	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lokal								
	Persentase pelestarian cagar budaya	%	20	40	60	80	100	100	
	Persentase kunjungan ke museum	%	20	40	60	80	100	100	
	Persentase seni budaya yang terbina dan dipentaskan	%	20	40	60	80	100	100	
	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
	Persentase pengelolaan perpustakaan sekolah dan desa sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>KEARSIPAN</b>								
	Persentase Pengelolaan Arsip pada OPD, Desa/Kelurahan yang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	100	100	100	100	100	100	
	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>								
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0,44	1,49	1,5	1,5	1,51	1,48	
	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	0,86	3,34	1,26	0,69	2,14	1,59	
	<b>PARIWISATA</b>								
	Persentase destinasi yang ditata	%	15	25	30	35	40	50	
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	4	5	6	8	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	%	5	5	5	5	5	5	
	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	2	2	2	2	2	2	
	<b>PERTANIAN</b>								
	Luas Lahan Pertanian yang Menerapkan Sistem Organik (ha)	Ha	788	789	790	791	792	793	
	Produksi Padi (Ton)	Ton	109988,31	110098,30	110.208,40	110.318,61	110.428,92	110593,35	
	Jumlah Petani / Poktan / Gapoktan dengan Skor Kemampuan Madya	Kelompok	73	74	75	76	77	78	
	<b>PERDAGANGAN</b>								
	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan pada PDRB	%	4.80	4.82	4.85	4.87	4.89	4.92	
	<b>PERINDUSTRIAN</b>								
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7	6,75	
	<b>TRANSMIGRASI</b>								
	Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembinaan/ penyuluhan	%	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>								
	<b>PERENCANAAN</b>								
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPKD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
	Persentase keselarasan Program RPJMD kedalam RKPD (%)	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase keselarasan Program RKPD kedalam RENJA-PD (%)	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	%	90	91	92	93	94	95	
	<b>KEUANGAN</b>								
	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	%	34,85	36,45	38,12	39,87	41,69	43,6	
	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
	Nilai Sistem Merit	Nilai	347,5	347,5	348,5	348,5	350	350	
	Indeks Kepuasan ASN	Nilai	92,55	92,6	92,65	92,7	92,75	92,8	
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	81,33	81,34	81,35	81,36	81,37	81,38	
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								
	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,73	3,73	3,75	3,75	3,75	3,75	
	Persentase Perangkat Daerah Yang di Fasilitas Dalam Penerapan Riset dan Inovasi	%	35	35	36	36	36	37	
	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>								
	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								
	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3.10	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	%	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Evaluasi Internal terhadap AKIP Daerah	Nilai	16.82	16.93	17.00	17.10	17.15	17.20	
	Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.	%	97.49	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Nilai	3.10	3.20	3.25	3.30	3.35	3.40	
<b>UNSUR PENDUKUNG</b>									
<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>									
	Persentase Ranperda yang Disahkan Menjadi Perda	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Harmonis Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
	Persentase peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan (rata-rata)	%	50,4	51,6	51,9	52,2	52,5	52,7	
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat capaian kinerja penanganan situasi di daerah dan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, terhitung mulai dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dan RPJMN.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat Buleleng, swasta, tekad serta semangat aparatur pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, dukungan DPRD Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Kabupaten Buleleng dapat semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam melayani seluruh masyarakat Buleleng.

#### **5.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :

1. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025-2030 dan berpedoman pada RPJP Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Buleleng;
2. Seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Setiap perangkat daerah, baik yang berbentuk badan, dinas, sekretariat, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029;
4. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng;
5. RKPD Kabupaten Buleleng harus menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;

6. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Buleleng merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perangkat daerah periode sebelumnya;
  - d. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
8. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta APBD setiap tahunnya.
9. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Buleleng dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana

Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA